

KOMUNIKASI POLITIK

Pesan, Kepemimpinan dan Khalayak

Dr. Eko Harry Susanto

**Mitra**
Wacana
Media
PENERBIT

Komunikasi Politik Pesan Kepemimpinan dan Khalayak

Dr. Eko Harry Susanto



Edisi Asli

Hak Cipta ©2013, Penerbit Mitra Wacana Media

Telp. : (021) 824-31931, 82423435

Faks. : (021) 824-31931

Website : <http://www.mitrawacanamedia.com>E-mail : mitrawacanamedia@gmail.com

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Eko Harry Susanto

Komunikasi Politik Pesan Kepemimpinan dan Khalayak

- Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2013

1 jil, 16 x 23 cm, Hal

ISBN:

I. Politik

II. Judul

KATA PENGANTAR

Buku berjudul *Komunikasi Politik: Pesan, Kepemimpinan dan Khalayak* bersumber dari disertasi Bidang Kajian Utama Ilmu Komunikasi, Program Doktor Universitas Padjadjaran Bandung, berjudul “Kredibilitas Opinion Leader Pedesaan (Studi tentang Perubahan Peran Pemuka Pendapat di Desa-Desa Lokasi Industri)”. Disertasi dipertahankan dalam ujian terbuka pada bulan Januari 2004.

Secara keseluruhan, disertasi yang dibukukan dengan judul berbeda ini, tidak mengurangi substansi isi keseluruhan, sebagaimana yang tercantum dalam disertasi yang utuh. Perlu dikemukakan juga, bahwa pertimbangan untuk tidak memberikan gambaran yang spesifik dan terinci tentang lokasi penelitian, semata-mata dengan harapan agar tulisan dalam buku ini, bisa dipakai sebagai rujukan yang bersifat umum. Karena itu upaya mendeskripsikan wilayah secara singkat dimaksudkan untuk melukiskan panduan singkat keadaan di daerah yang menjadi sasaran penelitian. Tentu saja, jika pembaca ingin mengetahui lebih detil sampai ke lampiran dan foto-foto yang terdapat dalam laporan penelitian, yang dituangkan dalam disertasi, dapat melihat di Perpustakaan Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung.

Mengingat buku ini “*Komunikasi Politik: Pesan, Kepemimpinan dan Khalayak*”, bersumber kepada disertasi penulis di Unpad, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Promotor, Prof. Santoso S. Hamijoyo, M.Sc., Ph.D, alm Prof. Dr. Ir. H.M.I. Hasansulama, Prof. Deddy Mulyana, MA., Ph.D, dan salah satu oponent yang juga pembimbing tesis penulis di Universitas Indonesia, Prof. Dr. Harsono Suwardi, MA.

Kepada istri, Maya Ratnawati, anak-anak, Dekky B. Wicaksono, Dennis A. Satrio, dan Deffri I. Adiyanto, sudah selayaknya jika penulis mengucapkan terima kasih atas kegembiraan dan kebersamaan yang senantiasa mewarnai keluarga. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Akhirnya kepada civitas akademika Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara semua, dan semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun material yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi kita semua.

Jakarta, 2013
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB. 1 PERAN PEMIMPIN DALAM PUSARAN KOMUNIKASI.....	1
1. Pergeseran Pengaruh Kekuasaan Dalam Komunikasi	1
2. Pola Komunikasi Dalam Interaksi Masyarakat	6
BAB. 2 DIMENSI KOMUNIKASI PEMUKA PENDAPAT.....	15
1. Perkembangan Penelaahan Opinion Leader	15
2. Komunikasi dan Informasi dalam Dinamika Politik	21
3. Kredibilitas Sumber Informasi dalam Komunikasi	26
3.1. Esensi Kredibilitas.....	26
3.2. Kredibilitas dan Pembentukan Opini	29
3.3. Kredibilitas Komunikator Pembangunan.....	30
4. Kedudukan Pemuka Pendapat di Masyarakat	32
4.1. Kepemimpinan Pemuka Pendapat	32
4.2. Karakteristik Pemuka Pendapat	35
5. Perubahan Sosial dan Kekuatan Media	36
5.1. Hakikat Perubahan Sosial	36
5.2. Perubahan Sosial dan Media Massa	38
5.3. Media Massa dan Kekuasaan Negara	41
5.4. Perubahan Sosial di Pedesaan	44
5.5. Industrialisasi dan Pembangunan Pedesaan	46
5.6. Desa Kawasan Industri dan Mobilitas Penduduk.....	50



BAB. 3 MENGEKSPLORASI KEBEBASAN KOMUNIKASI:	
PROSES PENELITIAN	53
1. Metode yang Digunakan	53
2. Fokus Penelitian	55
3. Informan Penelitian: Memilih dengan Kehati-hatian	56
3.1. Menetapkan Informan secara purposive	56
3.2. Gambaran Umum Informan	57
3.3. Teknik Pengumpulan Data dan Metode Analisis	59
4. Gambaran Singkat Daerah Penelitian.....	61
4.1. Perkembangan Kawasan Desa Lokasi Industri	61
4.2. Tokoh Masyarakat.	62
BAB. 4 KOMPLEKSITAS KOMUNIKASI	65
1. Komunikasi Antar Pribadi Sebagai Kekuatan Interaksi	65
1.1. Proses Mencari Informasi dan Ketergantungan Kepada Elite .	65
1.2. Karakteristik Orientasi dan Perilaku Pemuka Pendapat.....	68
2. Komunikasi Kelompok Wujud Kolektivitas Masyarakat	70
2.1. Interaksi Dalam Proses Mencari Informasi	70
2.2. Geliat Kebebasan Komunikasi an Transparansi Informasi	76
3. Kebutuhan Informasi Masyarakat	79
3.1. Informasi Sosial dan Budaya	79
3.2. Informasi Perekonomian Desa	80
3.3. Informasi Politik Pedesaan	80
BAB. 5 PEMUKA PENDAPAT SEBAGAI RUJUKAN	
KOMUNIKASI SOSIAL BUDAYA	83
1. Informasi Sosial dan Kekuatan Nilai Tradisional	83
2. Budaya Tradisional Versus Budaya Populer	85
BAB. 6 KOMUNIKASI POLITIK DAN DINAMIKA	
PEREKONOMIAN	89
1. Masalah Pertanian dan Lingkungan Desa	89
2. Industri dan Kekuatan Pendekatan Pemilik Modal	95
3. Perdagangan dan Keterpurukan dalam Persaingan Usaha	101

BAB. 7 KOMUNIKASI POLITIK, KEKUASAAN DAN	
DEMOKRASI	107
1. Informasi Kekuasaan Lokal dan Perkembangan Demokrasi	108
2. Hegemoni Pengendalian Informasi Pemilu	113
BAB. 8. KOMUNIKASI POLITIK PEDESAAN	119
1. Dampak Sosial Budaya Masyarakat	123
1.1. Kekuatan Nilai Sosial Pedesaan.	123
1.2. Kebutuhan Informasi Budaya dan Kekuatan Media.	125
2. Kompleksitas Marginalisasi Perekonomian Desa	127
2.1. Kepercayaan Terhadap Informasi Pertanian	128
2.2. Sumber Informasi Perdagangan di Desa	133
3. Politik Pedesaan dalam Kutub Kursif dan Reformasi	135
3.1. Kekuatan Politik Kekuasaan Lokal	135
3.2. Pemilihan Umum, dari Partisipasi Prosedural ke Substansial	137
BAB. 9 KOMUNIKASI POLITIK DALAM GEJOLAK INDUSTRI	141
1. Tantangan Pelembagaan Sosial Budaya Dalam Komunikasi	141
1.1. Mempertahankan Nilai Sosial Masyarakat	141
1.2. Informasi Budaya Sebagai Basis Komunikasi Masyarakat	144
2. Pasang Surut Perekonomian Desa	146
2.1. Bertahan dengan Informasi Pertanian	146
2.2. Dilema Perkembangan Industri di Pedesaan	150
2.3. Perdagangan Desa Sebagai Pendamoing Kehidupan Desa	154
3. Diawali Potret Buram Politik Pedesaan.....	157
3.1. Perjalanan Demokratisasi Kekuasaan Lokal	158
3.2. Partisipasi Dalam Pemilihan Umum	160
BAB. 10 KREDIBILITAS KEPEMIMPINAN OPINI.....	165
1. Karakteristik yang mendukung Kredibilitas Peran	
Pemuka Pendapat.....	168
2. Karakteristik yang menghambat Kredibilitas Peran	
Pemuka Pendapat.....	170



BAB. 11 SUMBER INFORMASI DAN POLA KOMUNIKASI	175
1. Kecenderungan Mencari Sumber Informasi yang Dipercaya	175
2. Pola Komunikasi antara Pemuka Pendapat dengan Masyarakat.....	180
BAB. 12 KOMUNIKASI POLITIK PEMUKA PENDAPAT	183
1. Karakteristik Utama Pemuka Pendapat yang	
Menolak Industrialisasi	183
1.1. Masalah Sosial dan Budaya	184
1.2. Masalah Perekonomian Desa.....	186
1.3. Masalah Politik Pedesaan.....	188
2. Karakteristik Utama Pemuka Pendapat yang	
Mendukung Industrialisasi.....	189
2.1. Masalah Sosial dan Budaya	191
2.2. Masalah Perekonomian Desa.....	192
2.3. Masalah Politik Pedesaan	196
3. Perubahan Kredibilitas Peran Pemuka Pendapat	198
4. Ikatan Pola Komunikasi dengan Kelayakan Kredibilitas	201
4.1. Kerenggangan Hubungan Pemuka Pendapat dengan	
Industri di Pedesaan.	203
4.2. Merapat Kepada Kekuatan Pabrik	205
BAB. 13 HARAPAN TERHADAP DEMOKRATISASI KOMUNIKASI	209
1. Eksistensi Pemuka Pendapat sebagai Elite Dalam masyarakat.	209
2. Harapan Munculnya Penelitian ataupun Kajian Lain.....	211
DAFTAR PUSTAKA.....	213

1

PERAN PEMIMPIN DALAM PUSARAN KOMUNIKASI

1. Pergeseran Pengaruh Kekuasaan Dalam Komunikasi

Kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi, mengakibatkan mobilitas masyarakat semakin meningkat, sehingga jarak bukan merupakan hambatan dalam interaksi dan komunikasi secara intensif. Sebagaimana dikemukakan oleh Lee (1987:14) bahwa: “teknologi yang meningkat berperan penting dalam mengurangi faktor penghalang, dan perhubungan menjadi lebih mudah serta transportasi relatif murah”. Sebelumnya dalam penelitiannya tentang modernisasi di lingkungan masyarakat tradisional, Lerner (1983:32) menegaskan “meningkatnya mobilitas antar wilayah dalam masyarakat paling banyak ditunjang fasilitas transportasi dan komunikasi yang memadai”.

Tersedianya transportasi dan komunikasi sampai ke pedesaan, secara ekonomi merupakan faktor yang menarik bagi pemilik modal, seperti pendapat Mountjoy (1983:153), yang menyatakan “faktor transportasi inilah yang menarik minat para pemilik modal untuk mendirikan pabrik di desa”. Di samping itu, terdapat alasan lain seperti harga tanah yang relatif murah, dan tersedianya tenaga kerja marginal yang kooperatif pada tahap awal pembangunan fisik.

Tetapi pemilik modal menyadari, bahwa tidak mudah melakukan investasi di pedesaan yang masih mempertahankan nilai sosial budayanya. Langkah untuk memperkecil penolakan masyarakat desa terhadap kehadiran pemilik modal, yang nota bene elite dalam ekonomi adalah, berlandung dibawah perangkat kekuasaan negara dan bekerjasama

dengan pemimpin informal seperti pemuka pendapat, untuk mendukung kepentingan penanaman modal dan beroperasinya perusahaan.

Dengan substansi yang sama, Kunio (1990:108) menyatakan bahwa, “kapitalis di Asia Tenggara mempunyai koneksi dengan pemerintah dan memanfaatkannya untuk bisnis”. Sebagai upaya mendorong tumbuhnya industrialisasi di desa, pemerintah juga menggunakan pemuka pendapat untuk menyampaikan program pembangunan, termasuk usaha penanaman modal dan pendirian pabrik kepada masyarakat melalui berbagai forum di pedesaan. Isi informasi, pada hakekatnya mengandung pesan, agar masyarakat desa mengetahui dan mematuhi semua yang telah diprogramkan pemerintah.

Pola penyampaian informasi tersebut, menunjukkan dominasi pemerintah dengan segala organ kekuasaannya yang sangat kuat, tetapi di sisi lain menegaskan tentang ketidakberdayaan masyarakat setempat, dalam komunikasi interaktif dengan pemuka pendapat sebagai sosok elite, yang di dukung oleh kelompok kepentingan di desa. Padahal hakikatnya, komunitas pedesaan masih memiliki ketergantungan terhadap peran pemuka pendapat, untuk membela dan mendukung kehidupan sosial ekonomi dalam situasi desa pertanian.

Pola hubungan antara pemerintah yang memiliki kekuasaan, pengusaha dengan modal besar, dan pemuka pendapat yang memiliki pengaruh luas di lingkungan masyarakat, menghasilkan kekuatan integratif untuk melancarkan pendirian pabrik di desa. Relasi ketiga unsur yang sedemikian erat, tidak dapat ditandingi oleh masyarakat untuk menolak kehadiran industrialisasi. Kelemahan mendasar secara intelektual dan kurangnya keterampilan membuat mereka cenderung pasrah, karena tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perlawanan secara rasional, dengan mengutamakan kepentingan sektor pertanian yang sebenarnya masih menjadi tumpuan harapan sebagian besar masyarakat desa.

Terjadinya interaksi dan komunikasi antara masyarakat desa dengan pemuka pendapat, pemerintah serta pemilik modal pada situasi industrialisasi, membawa dampak yang kompleks, seperti terjadinya perubahan di luar kebiasaan dan kelaziman kehidupan masyarakat setempat dalam masalah sosial budaya, perekonomian dan politik pedesaan yang sudah mengakar turun temurun.

Industrialisasi yang tumbuh di pedesaan pertanian, sangat potensial menggeser pola interaksi yang semula bersifat homofili, dimana pihak yang berinteraksi memiliki kesamaan dalam nilai, kepercayaan, status

sosial dan faktor lain yang sejenis, berubah menjadi heterofili, dengan ciri pihak yang berinteraksi memiliki karakter sosial multi dimensi. Kemajemukan sosial ekonomi ini, menimbulkan persoalan yang berujung pada ketidakharmonisan hubungan. Masyarakat desa terbagi dalam komunitas yang lebih berorientasi pada kepentingan individual dan kelompok, sehingga semangat kolektivitas dan solidaritas mekanik, yang menjadi salah satu karakteristik masyarakat pedesaan, semakin sulit untuk ditemukan di sejumlah wilayah.

Berkembangnya industri di pedesaan, juga menciptakan keanekaragaman peran elite sebagai pemuka pendapat (*opinion leader*). Dalam kapasitas, elite yang memiliki keunggulan dalam posisi sosial, pemuka pendapat pedesaan yang semula cenderung bersifat polimorfik (*polymorphic*), menguasai sejumlah isu, berubah menjadi monomorfik (*monomorphic*), dengan penguasaan terhadap jenis informasi spesifik untuk disebarakan kepada khalayaknya. Pola penguasaan informasi ini menjadikan kedudukan dan peran pemuka pendapat di pedesaan tidak lagi bersifat dominan sebagai rujukan masyarakat desa.

Pemuka pendapat yang semestinya mampu mengantisipasi perubahan, pada kenyataannya, sebagian dari mereka yang memiliki pengaruh kuat dalam masyarakat, justru cenderung tidak berpihak kepada masyarakat desa, tetapi lebih condong untuk membela pemilik modal besar, kekuasaan negara dan kelompok kepentingan lain, yang menanamkan pengaruhnya sedemikian kuat di desa-desa lokasi industri, melalui komunikasi politik tidak berimbang, yang manafikan aspirasi masyarakat.

Kekuatan industrialisasi dengan modal besar, pembagian kerja dan produktivitas berkelanjutan, membentuk pengelompokan baru dalam status sosial ekonomi yang menimbulkan konflik kepentingan, secara horisontal maupun vertikal di lingkungan masyarakat desa. Tetapi persoalan ini kurang dihiraukan oleh pemerintah dan tokoh masyarakat, karena budaya yang menilai tinggi material semakin kuat menanamkan pengaruhnya. Di sisi lain media massa yang mudah ditemukan ataupun diakses, lebih banyak menginformasikan keberhasilan program pemerintah dalam industrialisasi dibandingkan dengan memberitakan berbagai macam dampak negatif, yang dihadapi masyarakat akibat pendirian pabrik-pabrik di desa pertanian.

Pemilik modal dengan industrinya yang semakin berkembang, dalam perjalanannya mengalami penurunan ketika terjadi masalah ekonomi dan politik di Indonesia. Krisis multi dimensi dalam waktu singkat berimbas

sampai ke pedesaan, sebagaimana pengamatan Geertz (2000: 2) bahwa “terjadinya kesulitan ekonomi di Indonesia, berdampak terhadap kelesuan pertumbuhan ekonomi, berkurangnya kegiatan industri dan pemutusan hubungan kerja pada pabrik-pabrik di pedesaan”. Krisis multi dimensi merambah ke semua sektor kehidupan masyarakat di pedesaan, dari masalah sosial budaya, perekonomian, sampai pada persoalan paling sensitif seperti masalah politik yang sebelumnya lebih banyak dikendalikan oleh berbagai organ kekuasaan negara di pedesaan.

Siklus kegiatan dan dinamika industri di pedesaan yang semakin surut, membawa implikasi terhadap kebebasan masyarakat desa, dalam mencari sumber informasi yang dipercaya. Arus penyampaian informasi tidak lagi selalu didominasi oleh pemuka pendapat sebagaimana dalam komunikasi dua tahap (*Two Step Flow*), dari sumber informasi kepada pemuka pendapat, dan pemuka pendapat menyebarluaskan kepada khalayaknya.

Informasi di desa dapat mengalir melalui komunikasi dengan banyak tahap (*Multi Step Flow*), yang memiliki berbagai pola penyebaran pesan dari sumber informasi kepada khalayak. Selain itu pola penyebaran informasi, sebagaimana dalam model jarum hipodermis (*Hypodermic Needle Model*) tentang kekuatan besar media massa dalam mempengaruhi khalayaknya, berlangsung pula di lingkungan masyarakat pedesaan.

Situasi krisis multidimensi, yang lebih diwarnai oleh komunikasi yang mengacu pada kegiatan politik, selanjutnya berdampak pada penetapan kriteria atau faktor pendukung kredibilitas peran kelompok elite sebagai pemuka pendapat. Kelayakan peran elite bukan sepenuhnya didominasi oleh karakteristik ideal versi pemegang kekuasaan, tetapi bergantung pada pilihan masyarakat desa, sebagai massa yang memegang mandat demokrasi.

Kredibilitas peran pemuka pendapat dalam situasi desa pertanian, berkembangnya industri dan surutnya industri di pedesaan merupakan masalah menarik untuk diteliti di lingkungan pedesaan yang mengalami perubahan yang dipicu oleh kemudahan akses teknologi dan transportasi menuju kawasan desa.

Perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi, jelas memberikan dorongan terhadap pemilihan lokasi pabrik di pedesaan. Sementara itu pembangunan fisik yang sangat cepat, diikuti dengan keterpurukan ekonomi dalam lingkup nasional, menimbulkan masalah sosial ekonomi yang kompleks. Termasuk di dalamnya, pola komunikasi dan interaksi antara pemuka pendapat dengan masyarakat, pada desa-desa lokasi industri

Kompleksitas perkembangan kawasan dan bergulirnya kebebasan dalam bingkai komunikasi politik, mendorong munculnya beragam persoalan yang menyangkut, kriteria sumber informasi yang digunakan oleh masyarakat, sebagai rujukan dalam membicarakan masalah dan keadaan di sekitarnya. Pola komunikasi antara elite sebagai pemuka pendapat dengan masyarakat desa mengalami perubahan. Dalam bingkai demokratisasi yang diakibatkan oleh reformasi politik, muncul pula penilaian berbeda terhadap faktor-faktor yang mendukung ataupun mengurangi kelayakan kredibilitas peran pemuka pendapat dalam tiga situasi yang berbeda, yaitu (1) Dari desa pertanian pada awal pembangunan industri, (2) Ketika industrialisasi berkembang dengan pesat, (3) Pada waktu kegiatan industrialisasi di desa semakin surut.

Hakikatnya, kriteria yang ditetapkan masyarakat desa terhadap kredibilitas peran pemuka, yang semula berdasarkan pada persamaan kolektif terhadap nilai sosial budaya, berubah menjadi karakteristik individual yang menilai tinggi faktor ekonomi. Karena itu, penelaahan dalam kredibilitas pemuka pendapat sebagai kelompok elite mencakup:

1. Kriteria yang ditetapkan oleh masyarakat desa untuk mengetahui sumber informasi yang digunakan sebagai rujukan dalam membicarakan masalah ataupun keadaan di sekitarnya.
2. Interaksi antara pemuka pendapat dengan masyarakat desa, untuk mengetahui pola komunikasi dalam kondisi yang berbeda yaitu situasi desa pertanian, ketika industrialisasi berkembang dan setelah industrialisasi surut serta berkurang kegiatannya
3. Peran pemuka pendapat, untuk mengetahui faktor yang mendukung ataupun mengurangi kredibilitas pemuka pendapat dalam berbagai situasi desa yang mengalami perubahan

Selain itu, tulisan ini, dilihat dari segi akademik, diharapkan memperkaya dan memperluas kajian dalam ilmu sosial, khususnya ilmu komunikasi. Penelitian ini juga berupaya memperluas teori komunikasi massa yang mengulas kredibilitas pemuka pendapat, perubahan sosial, media massa dan pedesaan dengan segala kompleksitas perubahan akibat industrialisasi. Disamping itu perluasan aspek teori komunikasi massa diharapkan dapat mendorong munculnya penelitian-penelitian dalam kajian ilmu sosial lainnya

Sedangkan dari aspek praktis, diharapkan memberikan sumbangan pemikiran, tentang pola komunikasi dan interaksi pemuka pendapat di pedesaan yang mengalami perubahan. Pola komunikasi yang ideal dalam

penyebaran informasi, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menangani masalah yang muncul akibat perubahan sosial dan industrialisasi di pedesaan.

2. Pola Komunikasi Dalam Interaksi Masyarakat

Teori yang digunakan untuk menjelaskan seputar kredilitas pemuka pendapat adalah Teori Tindakan Sosial Max Weber (dalam <http://www.src.uchicago.edu/ssr1/Prelims/TheoryWeber.Html>, 2003: 1), yaitu:

Action is human behavior to which the acting individual attaches subjective meaning. It can be overt or inward and subjective. Action is social when, by virtue of the subjective meaning attached to it by the acting individual(s), it takes account of the behavior of others and is thereby guided. Social action may be oriented to past, present, or predicted future behavior of others. Others may be concrete people or indefinite pluralities.

Dalam perspektif yang lebih adaptif, Teori Tindakan Sosial merujuk pada pengertian sebagai berikut: Tindakan sosial merupakan semua perilaku manusia ketika dan sejauh individu memberikan suatu makna subjektif terhadap perilaku tersebut. Tindakan dapat terbuka atau tersembunyi, bisa merupakan intervensi positif dalam suatu situasi atau sengaja berdiam diri sebagai tanda setuju dalam situasi tersebut. (Weber dalam Mulyana, 2001:60, Giddens, 1986: 186, Timasheff, 1967: 123).

Penggunaan teori tindakan sosial diorientasikan pada *grand theory* sebagai dasar Teori Interaksionisme Simbolik (*Symbolic Interaction*) yang sejalan dengan tradisi penelitian kualitatif. Untuk menelaah secara komprehensif kerangka pemikiran, teori interaksionisme simbolik dirujuk sebagai landasan teori kontekstual dalam ilmu komunikasi, konsepsi masyarakat ataupun dampak perubahan sosial yang sangat kompleks.

Teori Interaksionisme Simbolik berpandangan, bahwa kehidupan sosial merupakan suatu proses interaksi yang membangun, memelihara serta mengubah kebiasaan tertentu; disamping itu makna dapat berubah dari waktu ke waktu, dari konteks ke konteks, serta dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya. Pendekatan interaksionisme simbolik yang sangat dikenal dalam paradigma ilmu sosial adalah pokok pikiran George Herbert Mead (dalam Littlejohn, 1982: 171) yang menyatakan bahwa, "orang adalah aktor atau pelaku dalam masyarakat, bukan reaktor, sementara tindakan sosial (*social act*) merupakan payungnya". Dalam konteks ini tindakan sosial mencakup tiga bagian yang saling berhubungan yaitu: gerak isyarat awal (*initial gesture*) dari seorang individu, tanggapan (*response*) atas gerak isyarat

tersebut dari individu lainnya baik secara nyata maupun tersembunyi, dan hasil dari tindakan yang dipersepsikan oleh kedua belah pihak.

Menurut Manis dan Meltzer (dalam Littlejohn, 1992: 169-170) terdapat tujuh proposisi umum yang mendasari pemikiran teori interaksionisme simbolik, yaitu: (1).Tingkah laku dan interaksi antar manusia dilakukan melalui perantara lambang-lambang yang mengandung arti, (2).Orang menjadi manusiawi setelah berinteraksi dengan orang lain,(3).Masyarakat merupakan himpunan dari orang-orang yang berinteraksi (4).Manusia secara sukarela aktif membentuk tingkah lakunya sendiri, (5).Kesadaran atau proses berpikir seseorang melibatkan proses interaksi dalam dirinya, (6).Manusia membangun tingkah lakunya dalam melakukan tindakan-tindakannya, (7).Untuk memahami tingkah laku manusia diperlukan penelaahan tentang tingkah laku/perbuatan yang tersembunyi.

Sementara yang biasa digunakan untuk menelaah teori komunikasi, adalah teori interaksi simbolik dalam perspektif Herbert Blumer (1969: 2) yang menyatakan "manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan pemahaman arti dari sesuatu tersebut, pemahaman arti diperoleh melalui interaksi dan pemahaman arti juga merupakan hasil proses interpretasi". Dengan substansi yang sama, Bowers dan Bradac (1982:4) atau Myers dan Myers (1988:59), menyebutkan, "*communication is contextualized. Aspect of communicative context include language style, affect displays and explicit comments on intentions*".

Berlandaskan pada karakteristik teori interaksionisme simbolik, dapat diperoleh gambaran tentang teori kontekstual yang dapat mendukung konsep ataupun teori komunikasi. Penelaahan terhadap pola interaksi yang terjadi antara pemuka pendapat dengan masyarakat desa akan merujuk pada komunikasi kelompok (*group communication*) dan komunikasi massa (*mass communication*).

Dalam komunikasi kelompok maupun komunikasi massa terdapat berbagai model, atau pola komunikasi yang biasa muncul pada komunikasi dan interaksi antar manusia. Menurut Devito (1978:24) "model dalam komunikasi memberikan gambaran yang sederhana tentang proses komunikasi, dan model komunikasi dapat mengorganisasikan berbagai elemen dalam proses tindakan komunikasi".

Model komunikasi sebagai rujukan dalam penelitian terdahulu antara lain model linier. Menitik beratkan pada komunikasi satu arah (*one-way view of communication*), model ini diadopsi oleh David Berlo (dalam Ruben, 1992: 33) dengan mempopulerkan proses "*Source - MesSage - Channel -*

Receiver". Model linier dalam perkembangannya menjadi acuan model jarum suntik (*hypodermic needle theory*) yang percaya bahwa media massa dapat menimbulkan pengaruh yang kuat bagi khalayak.

Pola komunikasi kedua dipopulerkan oleh Wilbur Schramm (1977) yaitu model interaksional atau konvergensi (*convergence*) yang memperkenalkan gagasan umpan balik (*feedback*) dan komunikasi bersifat dua arah ataupun (*cyclical process*). Asumsi dasar model konvergensi adalah, "setiap partisipan memiliki peran ganda, dalam arti suatu saat bertindak sebagai *sender* namun pada waktu yang lain berlaku sebagai *receiver*". (Rogers dan Kincaid, 1981: 40). Selanjutnya dikemukakan pula sebagai berikut:

Information and mutual understanding are the dominant components of the convergence model of communication. Information shared by two or more participants in the communication process may lead to collective action, mutual agreement and mutual understanding. (Rogers dan Kincaid, 1981:65).

Sedangkan model yang ketiga adalah transaksional, dikembangkan oleh Dean Barnlund (dalam Ruben, 1992:67) yang menyatakan "semua perilaku manusia adalah komunikatif, dengan demikian tidak ada satupun perilaku yang tidak dapat dikomunikasikan". Atau menurut Mulyana (2000:111), "transaksional menunjukkan bahwa para peserta komunikasi saling berhubungan, sehingga kita tidak dapat mempertimbangkan salah satu tanpa mempertimbangkan yang lainnya". Mengingat ketiga model selalu tampak dalam komunikasi dan interaksi individual maupun kelompok, sangat layak jika di pakai sebagai landasan untuk menelaah masalah komunikasi.

Di dalam berbagai pola komunikasi, sumber pesan merupakan salah satu unsur yang terlibat dalam komunikasi, dan banyak penelitian tentang efektivitas komunikasi tidak dapat dilepaskan dari kredibilitas atau dipercayanya sumber pesan. Penelitian tentang modernisasi di lingkungan petani pedesaan yang dilakukan oleh Rogers dan Svenning (1969:184) memberikan pengertian tentang kredibilitas yaitu "tingkat dimana sumber komunikasi atau saluran komunikasi dapat dipercaya dan kompeten oleh penerimanya". Sedangkan penelitian Hovland, Janis dan Kelley (1953:21) ataupun tulisan Kincaid dan Schramm (1987:34), menyatakan "*credibility was defined as the degree to which a communication source is perceived by a receiver as trustworthy and competence*".

Pembahasan tentang eksistensi kredibilitas dikemukakan oleh Rogers dan Kincaid (1981:36) yang intinya bahwa, "kredibilitas senantiasa bergeser kearah yang lebih tinggi atau ke arah yang lebih rendah, tergantung situasi

saat terjadinya komunikasi". Penelitian kredibilitas pemuka pendapat pedesaan yang dilakukan Rogers dan Svenning (1969:186), juga menemukan bahwa "kredibilitas tinggi ada pada pemuka pendapat yang memberikan inovasi pertanian, sedangkan agen perubahan komersial (*Commercial Change Agents*) memiliki kredibilitas yang sangat rendah".

Sikap individual maupun kelompok terhadap kredibilitas sumber pesan tidak bersifat permanen seperti dijelaskan oleh Krech, Crutchfield dan Ballachey (1962:216) yang menerangkan: "sikap individual maupun kelompok dalam menerima informasi dapat berupa *incongruent* yaitu perubahan sikap yang berlawanan dan *congruent* yang berupa perubahan dua arah, yaitu bertambahnya derajat kepositifan atau kenegatifan". Sedangkan Ray (1982:25) menyatakan, "sifat dapat dipercaya bisa dibedakan dalam tiga zona yaitu (1). Penerimaan, (2). Non komitmen dan (3). Penolakan". Isu yang sesuai dengan pengetahuan yang telah ada mungkin diterima, isu yang berada di luar ruang kehidupan seseorang akan ditolak, dan isu yang terdapat diantara kedua sikap tadi merupakan zona non komitmen yang biasanya tidak banyak menarik perhatian partisipan dalam suatu situasi komunikasi.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemuka pendapat dilandasi oleh anggapan bahwa "pemuka pendapat adalah orang yang memiliki kemampuan mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain secara informal sesuai dengan kehendaknya melalui hubungan sosial dan komunikasi yang dibina". (Rogers 1973:103). Dalam menjalankan perannya seorang pemuka pendapat perlu di dukung oleh kredibilitas yang diakui oleh khalayaknya. Tetapi ternyata penelitian Rogers dan Svenning (1969), Rogers (1971), MacBride (1980), Jayaweera dan Amunugama (1987), Gonzales (1988) justru banyak menemukan "pemuka pendapat sebagai komunikator pembangunan sering tidak sependapat dengan khalayaknya dalam penyampaian informasi yang faktual". Padahal idealnya pemuka pendapat mampu berperan sejalan dengan masyarakatnya dan melindungi nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang sudah berlangsung turun-temurun.

Pemuka pendapat sebagai pelopor perubahan di pedesaan memiliki kepemimpinan yang bersumber pada bermacam-macam otoritas, nilai maupun peran formal dalam pemerintahan. Dukungan pada pernyataan tersebut adalah pendapat Max Weber (dalam <http://www.src.uchicago.edu/ssr1/Prelims/TheoryWeber.Html>., 2003:12):

3 Pure Type of Legitimate Authority: (1). Rational/legal grounds. belief in the legality of patterns of normative rules and the right of those elevated to authority

under such rules to issue commands (2). Traditional grounds. established belief in the sanctity of immemorial traditions and the legitimacy of the status of those exercising authority under them. (3). Charismatic grounds. devotion to the specific and exceptional sanctity, heroism or exemplary character of an individual person, and of the normative pattern or order revealed by him.

Ketiga jenis otoritas, memiliki dampak beragam pada pedesaan di Indonesia, misalnya otoritas legal rasional yang di dukung oleh kekuasaan negara memiliki kekuatan memaksa terhadap masyarakat. Dukungan yang sedemikian besar dari aparat pemerintah, mengakibatkan pola kepemimpinan pedesaan yang bersumber pada nilai tradisional ataupun kharismatis tergeser. Walaupun kekuatan legal rasional cukup dominan, tetapi tidak akan sepenuhnya diikuti oleh masyarakat jika tidak berkolaborasi dengan pemuka pendapat yang masih memiliki otoritas tradisional dan kharismatis di lingkungan khalayaknya.

Penelaahan terhadap pemuka pendapat yang dikemukakan oleh Rogers dan Svenning (1969:227), menjelaskan bahwa, "terdapat fungsi berbeda dari pemuka pendapat dalam komunitas modern dan komunitas yang masih tradisional". Singkatnya pendapat ini menegaskan dalam masyarakat modern, kepemimpinan pemuka pendapat bersifat *monomorphic* berkenaan dengan satu urusan; sedangkan dalam masyarakat tradisional, kepemimpinan pemuka pendapat memiliki karakteristik *polymorphic*, berhubungan dengan semua urusan dan bersifat umum.

Fungsi sosial pemuka pendapat di kawasan pedesaan yang sedang mengalami perubahan ternyata tidak dapat dipisahkan secara tegas dalam dikotomi *polymorphic* maupun *monomorphic*. Kenyataannya masyarakat desa yang sedang mengalami perubahan sosial, menurut Lerner (1983:162), "satu segi masih terikat nilai tradisional yang polimorfik, namun ketika mengadopsi simbol modernisasi di pedesaan, mereka masih percaya kepada pemuka pendapat yang monomorfik".

Konsepsi masyarakat dalam penelitian ini, berorientasi pada teori interaksionisme simbolik yang beranggapan bahwa, "masyarakat adalah suatu entitas aktif yang terdiri dari orang-orang berpikir dan melakukan tindakan sosial yang bermakna". (Weber dalam Mulyana, 2001:61), atau menurut Mead (dalam Littlejohn, 1992:168), "masyarakat merupakan himpunan dari perbuatan-perbuatan kooperatif yang berlangsung diantara para anggotanya". Dengan berpijak pada kriteria itu, masyarakat memiliki posisi dinamis, termasuk ketika menyikapi perubahan sosial yang terjadi di lingkungannya. Paham ini juga menolak gagasan bahwa individu adalah

organisme pasif yang perilakunya ditentukan oleh kekuatan atau struktur yang ada di luar dirinya. Menurut Mulyana (2001:61), "individu terus berubah maka masyarakatpun berubah melalui interaksi, jadi interaksi adalah variabel penting yang menentukan perilaku, bukan struktur masyarakat".

Perubahan sosial adalah hasil interaksi manusia dalam mengadopsi simbol di sekelilingnya yang mengandung arti. Samuel Koenig (dalam Soekanto,1981:237) menyebutkan."perubahan sosial menunjuk pada modifikasi dalam pola kehidupan manusia karena sebab-sebab intern dan ekstern". Dengan demikian pembahasan terhadap perubahan sosial, industrialisasi dan migrasi semuanya akan merujuk pada proposisi dalam teori interaksionisme simbolik.

Berbagai pendapat tentang tindakan manusia ataupun interaksi manusia menegaskan, bahwa perubahan sosial merupakan gejala yang selalu muncul dalam masyarakat. Daniel Chirot (1981: 141) menyatakan "setiap masyarakat akan mengalami perubahan seperti perubahan mengenai nilai sosial, norma sosial, lembaga kemasyarakatan dan lain-lain". Sedangkan Davis (dalam Soekanto,1981:236) menyebutkan "perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat".

Gagasan lain tentang perubahan sosial dikemukakan oleh Marx (dalam Chirot,1981: 146) yang menyatakan, "meningkatnya produktivitas menghasilkan kesempatan kerja pada pabrik-pabrik di kota dan menimbulkan kelas-kelas ekonomi baru yaitu industriawan dan pekerja". Sementara itu Weber (dalam Chirot, 1981: 147) berbeda dengan filosofi determinisme ekonomi Marx dengan mengemukakan, walaupun perubahan sosial adalah hasil kejadian interaksi dari sistem dan nilai budaya yang memungkinkan terdapat dalam materialisme dasar Marx, tetapi sesungguhnya perubahan adalah sesuatu hal yang kompleks termasuk di dalamnya faktor sosial termasuk religi, material dan otoritas individual maupun kelompok.

Dalam perspektif komunikasi, faktor yang sering disebut sebagai kontributor perubahan sosial adalah eksistensi media massa. Pada tulisan-tulisan awalnya, Schramm (1964:67) mengatakan "peranan media massa dalam pembangunan adalah sebagai agen perubahan sosial (*Agent of Social Change*)". Letak peranan media massa adalah membantu mempercepat proses peralihan masyarakat tradisional menjadi masyarakat yang modern. Dukungan dikemukakan pula oleh McQuail (1984:4) yang menyatakan "media massa paling banyak digunakan untuk menimbulkan perubahan dalam program pembangunan bersekala besar".

Dominasi media massa tampak menonjol dalam teori peluru (*bullet theory*) atau teori jarum suntik (*hypodermic needle theory*). Dikemukakan oleh Hernando Gonzales (dalam Jahi, 1988:7), bahwa, "media massa dianggap sangat perkasa, dengan efek yang langsung dan segera pada masyarakat". Komunikator menggunakan media massa untuk menembaki khalayak dengan pesan persuasif yang tidak dapat mereka tahan. Menyinggung teori peluru DeFleur dan Rokeach (1989:163) menyebutkan, "pesan-pesan dari media massa ibarat peluru ajaib yang mempunyai kekuatan besar dalam komunikasi massa".

Penelitian tentang pengaruh langsung media massa terhadap khalayaknya, pada perkembangannya kurang berperan, ketika hasil berbagai penelitian menunjukkan bahwa, pesan yang disebarkan melalui media massa tidak langsung ke khalayak, tetapi melalui seorang pemuka pendapat (*opinion leader*). Hasil penelitian ini, memunculkan model komunikasi dua tahap (*two step flow model*); yang pada intinya tahap pertama dari sumber informasi ke pemuka pendapat, sedangkan tahap kedua adalah dari pemuka pendapat disebarkan kepada khalayaknya (*Katz and Lazarsfeld's Model* (dalam Ruben, 1992:29).

Situasi perubahan sosial yang kompleks, mengakibatkan peran pemuka pendapat juga mengalami pergeseran, seperti yang terjadi di desa-desa lokasi industri, yang notabene sebelumnya sebagai desa pertanian khususnya padi sawah. Masuk dan berkembangnya industrialisasi menciptakan masalah baru, karena pedesaan adalah habitat yang cocok bagi petani dan sawahnya. Dikatakan oleh Finch (1957:19), "desa adalah tempat tinggal yang utama dari para penduduk, bukan sebagai pusat perdagangan dan pada umumnya mengutamakan pertanian sebagai sumber kehidupan". Pembahasan lebih khusus yang mendukung pernyataan tersebut dikemukakan oleh Soekanto (1981:119-112) yang intinya menyatakan bahwa, masyarakat pedesaan (*rural community*) pada umumnya hidup dari pertanian, mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam daripada hubungan mereka dengan warga pedesaan lainnya di luar batas, sistem kehidupan masyarakat pedesaan berdasarkan kelompok dan sistem kekeluargaan.

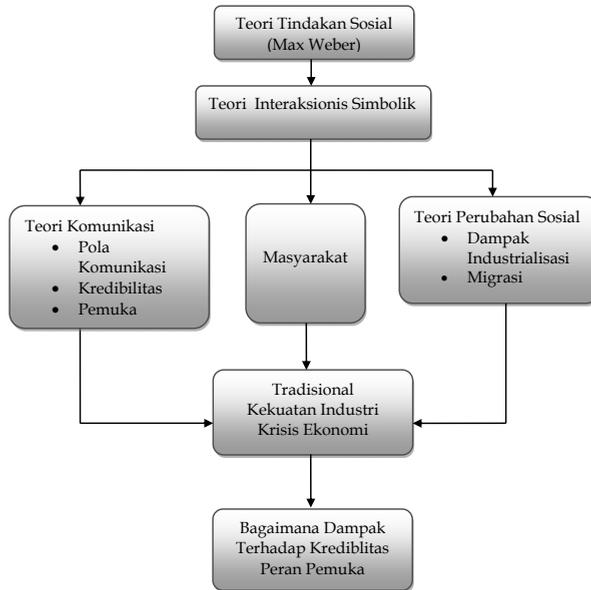
Pola hidup yang bersendikan pada sistem kekeluargaan di antara pemuka pendapat dan masyarakat, dalam kesempatan yang sama harus menerima program perubahan dan industrialisasi. Di berbagai negara berkembang, industrialisasi memang menjadi pilihan untuk menjalankan pembangunan ekonomi, walaupun cara ini tidak mudah mengingat adanya problem struktural tentang ketidakmampuan masyarakat pedesaan secara

intelektual dan keahlian kerja. Pandangan tentang industrialisasi dalam konteks kultural dikemukakan oleh Hofstede (1991:28) yang menyatakan "industrialisasi adalah suatu proses pembagian kerja antara berbagai kelompok pekerja, mesin dan penggunaan energi mekanis seperti listrik dan perluasan metode kerja pada masyarakat yang produktif". Bagaimanapun juga budaya petani ataupun masyarakat pedesaan tidak dapat secara cepat beradaptasi dengan budaya industri yang tegas dalam pengaturan kerja organisasi.

Tentang industrialisasi di pedesaan menurut Lerner (1983:32), "munculnya industrialisasi di pedesaan yang menggusur lahan pertanian adalah semata-mata motif ekonomi". Kehadiran industri di pedesaan pada sisi negatif adalah kehidupan sosial masyarakat yang semakin tersisih dari nilai-nilai setempat. Dalam pandangan Chirot (1981:137), "industrialisasi menyebabkan berkembangnya budaya komersialisasi tanah pertanian dan budaya material lainnya yang melunturkan ikatan sosial".

Industrialisasi pedesaan juga mendorong migrasi perorangan maupun kelompok, yang masuk atau keluar dari desa lokasi industri untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Ditegaskan oleh Mountjoy (1983:154), "faktor kemudahan transportasi adalah pilihan untuk mendirikan pabrik yang dapat mengurangi biaya angkutan". Dengan demikian sangat wajar, jika kawasan pedesaan yang mudah dijangkau dijadikan sasaran untuk menanamkan modal ataupun mendirikan pabrik. Banyak penelitian tidak menampik, bahwa pada umumnya daerah perkotaan atau daerah pinggiran kota yang dijadikan kawasan industri akan mendorong munculnya pekerja migran. (Todaro, 1983:345, Mountjoy, 1983:54, Bintarto, 1986:15, Collier, et.al, 1996:27).

Jika perubahan sosial ekonomi itu berlangsung di lingkungan desa-desa lokasi industri, dan di pihak lain karakteristik tradisional masih mewarnai sebagian kehidupan pedesaan, maka secara sederhana dapat digambarkan skema sebagai berikut:



Berpijak kepada penjelasan tersebut, maka postulat yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

- 1) Sumber informasi yang dikenal memiliki karakteristik positif, kapasitas penguasaan masalah, keeratan hubungan dengan masyarakat desa, transparansi dan kekritisan menghadapi penyimpangan merupakan rujukan masyarakat desa untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi dan keadaan desa atau keadaan di luar desanya.
- 2) Orientasi terhadap perubahan, kedudukannya dalam kelompok formal maupun informal, jenis informasi yang dibicarakan dan situasi pada waktu berlangsungnya interaksi membentuk pola komunikasi yang berbeda antara pemuka pendapat dengan masyarakat desa.
- 3) Nilai sosial dalam masyarakat, karakteristik ataupun perilaku individual, jenis informasi dan masalah yang dibicarakan, hubungannya dengan berbagai kelompok kepentingan serta situasi pada waktu berlangsungnya komunikasi, menjadi faktor yang mendukung serta mengurangi kredibilitas peran pemuka pendapat di lingkungan masyarakat pedesaan.



DIMENSI KOMUNIKASI PEMUKA PENDAPAT

1. Perkembangan Penelaahan Opinion Leader

Hasil penelitian, studi ataupun karya ilmiah tentang keberadaan elite dalam masyarakat dalam sosoknya sebagai pemuka pendapat, muncul dalam topik yang menelaah tentang perubahan dan pergeseran sikap masyarakat terhadap kredibilitas pemuka pendapat, peran dalam penyebaran inovasi, pengaruh media massa terhadap perubahan sikap masyarakat, efektivitas sumber informasi untuk menciptakan perubahan sosial. Topik lain yang banyak diteliti berhubungan dengan kredibilitas pemuka pendapat adalah kredibilitas sumber informasi karena dukungan teknologi komunikasi dan atribut modernisasi fisik maupun non fisik dalam kehidupan masyarakat pedesaan.

Selain beberapa hasil penelitian dan tulisan ilmiah tentang kredibilitas pemuka pendapat terdapat konsep, teori dan pemikiran yang walaupun tidak berhubungan langsung dengan kredibilitas pemuka pendapat tetapi dapat digunakan sebagai acuan penelitian ini; seperti halnya tulisan tentang peran individual di lingkungan masyarakat yang pluralistik, segi sosial dan kultural yang dimiliki oleh kelompok masyarakat tradisional khususnya di Pulau Jawa dan yang memiliki substansi metodologis dalam penulisan penelitian kualitatif.

Dalam khasanah ilmu komunikasi, berkembang asumsi bahwa kredibilitas sumber informasi memegang peran kuat untuk meyakinkan khalayak. Pada awal perkembangan ilmu komunikasi, peneliti dari Iowa State University menghadapi masalah kredibilitas ketika memperkenalkan

jagung hibrida pada dasawarsa 1920 (Ryan dan Gross, 1943). Banyak petani tidak percaya pada bibit jagung baru, karena mereka belum berpengalaman dengan bibit baru. Setelah cukup banyak bukti dan berulang kali para pemuka pendapat memberikan bukti nyata, maka semakin banyak pula petani yang tahu tentang jagung itu dan membentuk opini positif pada jagung tersebut. Studi senada dilakukan oleh Rogers (1971), ketika tahun 1950 Pemerintah Peru melancarkan kampanye memasak air minum. Kampanye yang semula ditentang oleh penduduk pedesaan lambat laun dapat diterima ketika pemerintah menggunakan para pemuka pendapat dari penduduk setempat maupun pemuka agama.

Hasil observasi partisipatif Lerner di Timur Tengah dalam *The Passing of Traditional Society: Modernization in Middle East* (1958), mengkaitkan peran pemuka pendapat dalam modernisasi di Timur Tengah. Memudarnya masyarakat tradisional karena penyebaran ide modernisasi di dukung oleh pemuka pendapat yang berorientasi ke perilaku dan standar barat. Hasrat untuk modern di kawasan ini didukung oleh media massa yang demikian kuat dan mendominasi segi kehidupan. Pemuka pendapat tradisional yang masih bertahan dengan nilai lama makin terpinggirkan. Namun pencapaian modernisasi tidak semudah seperti yang dipropagandakan melalui media massa oleh pemimpin formal. Modernisasi yang terwujud di Barat selama berabad-abad, oleh tokoh-tokoh Timur Tengah hendak diperoleh dengan beberapa tahun saja. Lagi pula mereka melakukan modernisasi dengan cara mereka sendiri yang berorientasi pada pembangunan fisik. Padahal yang ideal adalah modernisasi tidak hanya menyentuh fisik saja tetapi juga mentalitas yang berakar pada tindakan rasional untuk membentuk masyarakat sejahtera.

Kritik Lerner terhadap modernisasi di Timur Tengah adalah, bahwa yang dibutuhkan masyarakat bukan simbol fisik modernisasi tetapi moralitas modern yang menghargai keanekaragaman dan pluralisme semua bidang kehidupan. Modernisasi juga menggusur masyarakat dan lingkungan sosial, ekonomi maupun kultural sehingga mereka menjadi non partisipan dalam pembangunan ekonomi.

Penelitian kuantitatif yang mengarah secara langsung pada kredibilitas ditulis Hamijoyo (1967) sebagai desertasi di Indiana University, dengan judul "*Institutional Credibility and Emotionality of Appeals as determinants of Attitude Change*" Dikemukakan bahwa perubahan sikap merupakan pengaruh dari komunikator, inovasi, media massa dan kontes sosial. Bahwa komunikasi akan efektif kalau dipancarkan oleh komunikator yang

berwibawa, dan kewibawaan mengandung dua kualitas yaitu kejujuran (*trustworthiness*) dan keahlian (*expertise*).

Dengan metode Korelasi Multi Parsial, Chang, Jin-Park dan Shim (2000) dari *University of Missouri* meneliti efektivitas iklan politik terhadap khalayak di Amerika Serikat, antara lain dikemukakan bahwa kredibilitas komunikator, sumber pesan dan isi pesan yang disampaikan mempengaruhi respon serta sikap khalayak dalam mendukung maupun menolak satu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pada tahun 1976 muncul sebuah karya ilmiah tulisan Rahim (1976) hasil pengamatan di India, RRC, Tanzania, Columbia dan sejumlah negara berkembang lainnya mengungkapkan bahwa pemuka pendapat yang dipercaya sebagai saluran pokok dalam pembangunan desa. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemuka pendapat dapat menciptakan partisipasi masyarakat dan mampu memobilisasi massa dalam pembangunan pedesaan. Analisa Rogers (1973) terhadap peran kredibilitas pemuka pendapat tidak jauh berbeda, dengan menandakan bahwa dalam proses komunikasi massa pemuka pendapat memiliki posisi yang penting untuk menjembatani informasi yang diterima dari media massa dengan pemahaman masyarakat pedesaan.

Masih di negara berkembang, survey Belbase (1987) yang dilakukan di Nepal walaupun tidak menyebutkan secara jelas peran pemuka pendapat tetapi hakekatnya tokoh masyarakat atau pekerja proyek yang dapat diterima atau dipercaya masyarakat pedesaan adalah mereka yang luwes dan dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat.

Posisi pemuka pendapat dalam keterdedahan media massa (*media exposure*) pada konteks komunikasi antar pribadi ditulis oleh Rogers (1973) dalam artikel "*Mass Media and Interpersonal Communication*". Komunikasi antar pribadi merupakan aspek penting dalam teori komunikasi, dan Rogers menganalisa teori yang ada dalam hubungannya dengan media massa. Teori jarum hipodermis (*Hypodermic Needle Model*) yang menganggap media massa mempunyai efek langsung terhadap *audiense* berlebihan, sederhana dan mekanistik, sebab pada kenyataannya, penelitian lain menunjukkan bahwa media massa mempunyai peran yang kecil. Bergesernya pendapat kepercayaan media tersebut adalah setelah muncul teori komunikasi dua tahap (*Two Step Flow Model*) dimana bahwa ide senantiasa tersebar melalui radio dan media cetak, selanjutnya diterima oleh pemuka pendapat. Melalui pemuka pendapat inilah ide tersebut disalurkan ke masyarakat.

Penelitian terhadap kredibilitas sumber informasi juga sering berkaitan dengan propaganda, retorika ataupun penyebaran informasi melalui teknologi komunikasi. Hasil penelitian Xin (2001) dari *University of Pennsylvania* di Cina semasa Mao Zedong, menyatakan bahwa orang yang kredibilitasnya tinggi adalah orang partai yang selalu konsisten terhadap ajaran Mao. Slogan yang berisi petuah Mao dalam berbagai bentuk termasuk poster propaganda selalu ditampilkan pada setiap kegiatan pembangunan di pedesaan Republik Rakyat *China*.

Meskipun bukan berhubungan dengan kredibilitas pemuka pendapat di daerah pedesaan, tetapi perlu diketengahkan penelitian tentang kredibilitas sumber dan isi pesan dilakukan oleh Hart dan kawan-kawan (2001) dari *University of Louisville*. Dengan metode kualitatif mereka menganalisis perilaku konsumen kecil terhadap kampanye atau pesan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan besar. Dalam konteks iklan dan pemasaran, Wright (1993), juga menulis tentang pentingnya sumber kredibilitas untuk mempengaruhi pilihan konsumen.

Artikel dalam *American Communication Journal*, Frobish (2000) membahas tentang siaran agama melalui saluran web site, antara lain diketengahkan bahwa sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi maka kredibilitas media online perlu dimanfaatkan untuk menyiarkan informasi keagamaan.

Karya ilmiah lain juga menyinggung kredibilitas adalah dari Sopory dan Dillard (2002). Dijelaskan bahwa kredibilitas seorang komunikator di mata khlayaknya sangat penting untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Kiewe (1999) dari *Syracue University*, menganalisis pidato-pidato Presiden Clinton yang tujuan intinya adalah untuk mempertahankan kredibilitas di mata rakyat Amerika. Studi senada dilakukan oleh Garramone, Atkin, Pinkleton dan Cole (1990) menganalisis tentang efek negatif dari iklan politik yang salah satunya dapat disebabkan oleh komunikator yang tidak memiliki kredibilitas.

Penelaahan terhadap pemuka pendapat dengan latar belakang lingkungan pedesaan ditulis oleh Rogers dan Svenning (1969) dalam "*Modernization Among Peasant: The Impact of Communication*". Sedemikian kompleknya peran pemuka pendapat (*opinion leader*) dalam penyampaian dan penyebaran informasi di pedesaan; dimana informasi yang objektif lebih banyak diperoleh dari para pemuka pendapat pedesaan maupun juru bicara kelompok kepentingan yang berada di luar pemerintah.

Kredibilitas merupakan hal yang sangat penting, jika tujuannya adalah untuk merubah kepercayaan azasi seseorang, atau sekelompok orang mengenai lingkungan dimana mereka hidup. Berlaku atau tidaknya suatu kepercayaan biasanya tergantung dari mutu dan jumlah informasi yang dimiliki; dengan lain perkataan keabsahan suatu kepercayaan tergantung dari keyakinan serta adanya kesesuaian dengan kepercayaan tradisional yang dimilikinya dan sudah diterima dan diwarisi dari masa silam yang bertalian dengan segi kehidupan.

Pembahasan lain dalam tulisan itu adalah kredibilitas pemuka pendapat dalam sistem tradisional. Di lingkungan masyarakat tradisional pemuka pendapat pada umumnya bukan inovator sebab inovator sering dari golongan elite yang dicurigai dan tidak disukai oleh masyarakat desa, mengingat keadaan yang demikian dianjurkan para agen pembangunan dalam melancarkan pembaharuan supaya bekerjasama dengan pemuka pendapat jika mengharapakan hasilnya akan sukses.

Pada tahun 1971 Rogers dan Shoemaker melalui "*Communication of Innovations: A Cross Cultural Approach*" mengkaji penyebaran inovasi yang meliputi proses keputusan inovasi, sifat inovasi dan kecepatan adopsinya serta akibat yang ditimbulkan oleh tersebarnya inovasi. Memasyarakatkan ide baru perlu keterlibatan komponen sistem sosial yang ada seperti penerima inovasi, agen pembaharuan, saluran komunikasi yang digunakan, struktur sosial dan norma yang berlaku dalam masyarakat setempat dan yang utama adalah tokoh masyarakat termasuk pemuka pendapat. Perubahan sosial adalah proses yang terdiri tiga tahap berurutan yaitu: Inovasi sebagai proses dimana ide baru diciptakan dan dikembangkan; difusi yang merupakan proses dimana ide baru itu dikomunikasikan dalam sistem sosial dan Konsekuensi yaitu perubahan dalam sistem sosial sebagai akibat pengadopsian atau penolakan inovasi.

Jika dalam *Communication of Innovations* pengkajian inovasi dalam perspektif dan pendekatan kultural, maka dalam *Diffusion of Innovations*, pengkajian inovasi dan penyebarannya lebih terfokus pada metodologi, penelaahan kritis terhadap hakekat inovasi, peran pemuka pendapat dan agen perubahan (*change agent*). Menurut Rogers (1962), elemen penyebaran inovasi meliputi inovasi yang memang berguna bagi masyarakat, saluran komunikasi yang dipilih misalnya melalui komunikasi antar pribadi, kelompok maupun komunikasi massa, waktu yang digunakan untuk mendifusikan pesan yang inovatif dan sistem sosial yang berlaku dalam masyarakat. Tidak semua inovasi yang diperkenalkan pemuka pendapat

dapat diterima oleh individu atau kelompok sebagai *adopter*; ada pengklasifikasian penerima inovasi seperti (1). *inovators* sebagai orang yang menemukan berani untuk melakukan inovasi; (2). *early adopters*, orang-orang yang pertama kali mau menerima inovasi; (3). *early majority* dalam kelompok yang lebih besar, (4). *late majority* sebagai kumpulan orang yang terlambat dalam menerima inovasi dan (5). *laggard* dengan karakteristik tradisional yang paling akhir menerima inovasi.

Kredibilitas dalam perspektif komunikasi antar pribadi ditulis oleh Miller dan Steinberg dalam *A New Analysis of Interpersonal Communication* (1975) bebarapa hal yang menarik untuk disimak yaitu, komunikasi dan informasi diperlukan sebagai kebutuhan untuk mengurangi ketidakpastian, bertindak secara efektif, mempertahankan atau memperkuat kepercayaan sendiri dalam menghadapi berbagai persoalan. Tetapi tidak semua informasi tersebut dapat diperoleh dengan mudah dari suatu sumber sehingga setiap individu harus selektif terhadap sumber informasi atau makna informasi yang diterima. Penggunaan sumber informasi yang kompeten dan tidak mempunyai kepentingan politik dan ekonomi memang tidak mudah ditemukan oleh masyarakat di pedesaan negara berkembang.

Hakikat komunikasi menurut Noelle-Nouman (1974) dalam *Return to the Concept of Powerful Mass Media, Studies of Broadcasting*, menyatakan bahwa individu pada umumnya berusaha menghindari isolasi dalam arti sendirian, mempertahankan sikap dan keyakinan tertentu, oleh karena itu orang akan mengamati lingkungannya untuk mempelajari pandangan mana tidak dominan atau populer. Jika orang merasakan bahwa pandangannya termasuk diantara yang tidak dominan atau tidak populer, maka ia cenderung kurang berani mengekspresikannya karena adanya ketakutan isolasi tersebut. Sebaliknya, pendapat yang dominan akan menjadi semakin luas dan kuat. Semakin banyak orang menyesuaikan pendapatnya, maka suatu kelompok pemuka pendapat akan menjadi dominan, sementara lainnya akan menyusut.

Pembahasan terhadap kredibilitas dari aspek psikologi sosial dilakukan oleh Krech, Crutchfield dan Ballachey, dalam *Individual in Society*. Topik yang antara lain dibahas dalam buku ini adalah bagaimana kedudukan individu di lingkungan masyarakat dan bagaimana interaksi berlangsung diantara individu dalam kelompok yang di dalamnya terdapat orang yang dianggap memiliki kewibawaan.

Kredibilitas dianalisa dari sudut Psikologi Sosial, termasuk peran kognisi dan motivasi. Kognisi merupakan kemampuan seseorang untuk

menangkap objek, ide atau kemampuan seseorang merespon objek orang lain, benda atau ide yang berada di luar dirinya; sedangkan motivasi adalah dorongan terhadap perilaku yang ditentukan seseorang dalam mencapai tujuan. Perilaku terjadi karena adanya dorongan dari apa yang dipikirkan, dipercayai dan dirasakan.

Dalam pembahasan pembentukan sikap, dijelaskan oleh Krech et.al., sikap berkaitan dengan kepribadian, keinginan, afiliasi kelompok dan informasi. Perubahan sikap tidak hanya menyebabkan perubahan yang terjadi pada diri seseorang tetapi juga menyebabkan perubahan pada masyarakat dan kebudayaan.

Dapat dikategorikan sejalan dengan penelitian tentang masyarakat pedesaan yang didalamnya membahas tokoh-tokoh masyarakat yang dipercaya, adalah penelitian Clifford Geertz di Jawa Timur yang dituliskan dalam buku berjudul *The Religion of Java* pada Tahun 1960; dikemukakan oleh Geertz bahwa kepercayaan dan dasar religius masyarakat Jawa dalam segala perilakunya seperti perilaku politik, ekonomi dan sosial selalu merujuk pada stigmatisasi abangan, santri dan priyayi. Kredibilitas pemuka pendapat ataupun tokoh masyarakat akan bergantung pada khalayaknya yang terbagi dalam kelas sosial. Walaupun kemungkinan keadaan ini sudah berubah, tetapi model komprehensif untuk menggali suatu fenomena sosial dapat dijadikan acuan untuk penelitian sosial pada masa sekarang.

2. Komunikasi dan Informasi dalam Dinamika Politik

Komunikasi sebagai suatu kebutuhan hidup manusia; suatu pendapat klasik dari Watzlawick (dalam Bower dan Bradac, 1982:3) menyatakan, "*one cannot not communicate*". Manusia adalah makhluk yang tidak bisa tidak berkomunikasi, dalam arti semua tingkah laku yang dibuat seseorang menimbulkan makna; pada dasarnya seseorang tidak bisa lepas dari komunikasi sebagai suatu kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Ada berbagai alasan yang menyebabkan seseorang berinteraksi dengan orang lain. Menurut Myers dan Myers (1988:4-6), maksud seseorang berkomunikasi antara lain untuk mempelajari dirinya sendiri, untuk mempelajari dunia yang ada disekitarnya, untuk berbagi informasi, untuk membujuk atau mempengaruhi, untuk memperoleh kesenangan, bermain dan mengurangi kekakuan.

Pendapat lebih singkat dikemukakan oleh Reardon (1987:1), "komunikasi juga untuk menghibur, mempengaruhi, beramah-tamah, memperoleh informasi, menunjukkan perhatian dan sebagainya". Sejalan dengan konteks

komunikasi sebagai suatu kebutuhan Schutz menggolongkan kebutuhan manusia menjadi 3 (tiga) kebutuhan yang mendasar yaitu: (1). Kebutuhan untuk diakui sebagai individu yang berbeda dari individu yang lain; (2). Kebutuhan akan pengendalian mencakup kerja keras untuk mendapatkan kekuatan, kekuasaan, jabatan untuk mempengaruhi lingkungannya; (3). Kebutuhan afeksi, biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tertutup, yang sukar menjadi intim dan sukar menikmati hubungan yang hangat, bahkan dengan kenalan yang secara relatif kebetulan". (William Schutz dalam Myers dan Myers, 1988: 82-86)

Tiga kebutuhan itu dapat dipenuhi melalui interaksi dan komunikasi dengan individu maupun kelompok lain. Studi yang mendalam tentang komunikasi sebagai kebutuhan untuk mengurangi ketidakpastian, Miller dan Steinberg (1975: 207) menyatakan bahwa, "komunikasi dan informasi diperlukan sebagai kebutuhan untuk mengurangi ketidakpastian, bertindak efektif, mempertahankan atau memperkuat kepercayaan sendiri dalam menghadapi persoalan".

Gagasan reduksi ketidakpastian dikemukakan oleh Frank Dance (dalam Littlejohn, 1996:7) yang menjelaskan:

Salah satu aspek penting di dalam komunikasi adalah konsep reduksi ketidakpastian; komunikasi itu sendiri muncul karena adanya kebutuhan untuk mengurangi ketidakpastian, supaya dapat bertindak secara efektif demi melindungi atau memperkuat ego yang bersangkutan dalam berinteraksi secara individual maupun kelompok.

Untuk mengurangi ketidakpastian, manusia harus berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, sehingga dapat memperoleh informasi yang digunakan sebagai dasar berperilaku dan melakukan tindakan untuk kepentingan individual ataupun kelompoknya

Eksistensi informasi dalam komunikasi, jika dikaitkan dengan perspektif kontekstual dalam komunikasi antar pribadi maupun komunikasi antar kelompok memegang peran penting. Secara umum, Komunikasi Antar Pribadi (*Interpersonal Communication*) adalah komunikasi antar perorangan dan bersifat pribadi yang terjadi secara langsung tanpa medium atau secara tidak langsung melalui medium. Komunikasi ini umumnya memfokuskan pengamatan pada bentuk dan sifat hubungan (*relationships*), percakapan (*discourse*), interaksi dan karakteristik komunikator. Sedangkan Komunikasi Kelompok (*Group Communication*) memfokuskan pembahasan pada interaksi diantara orang dalam kelompok kecil. Pembahasan dititik beratkan pada dinamika kelompok, efisiensi dan efektivitas penyampaian

informasi dalam kelompok, pola dan bentuk interaksi serta pembuatan keputusan.

Ruben (1992:14) secara singkat menyebutkan, “*Human communication is the process through which individuals-in relationships, groups, organizations, and societies-respond to and create messages to relate to the environment and one another*”. Sedangkan pendapat Barnlund (dalam Bower dan Bradac, 1982: 3) menyatakan “komunikasi merupakan gambaran yang muncul dari tingkah laku dua belah pihak, hubungan pihak-pihak yang berinteraksi merupakan unit terkecil dalam analisis”. Dapat disimpulkan, komunikasi merupakan proses dinamis dalam suatu interaksi manusia dengan manusia lain maupun lingkungannya.

Pemahaman komunikasi kelompok yang merujuk pada karakteristik individual dikenal gaya komunikasi yaitu seperangkat perilaku yang biasa digunakan dalam berkomunikasi. Menurut Koehler, Anatol dan Applbaum (1981: 48) terdapat enam gaya komunikasi yaitu:

(1). *The Controlling Style* yaitu gaya komunikasi yang bersifat mengendalikan dan memaksa orang lain untuk mematuhi kehendaknya.; (2). *The Equalitarian* ditandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan-pesan verbal secara lisan maupun tertulis yang bersifat dua arah; (3). *The Structuring Style* yang lebih menitik beratkan tindakan komunikasi sesuai dengan sistem dan struktur organisasional; (4). *The Dynamic Style* yaitu gaya komunikasi yang dinamis dan agresif karena berorientasi pada tindakan yang nyata; (5). *The Relinquishing Style* yaitu gaya komunikasi yang mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat atau gagasan orang lain; (6). *The Withdrawal Style* yaitu ketidakinginan berkomunikasi dengan orang lain karena berbagai persoalan maupun kesulitan dalam hubungan antar pribadi ketika berhadapan dengan orang lain.

Gaya komunikasi diatas tidak menghilangkan substansi dari komunikasi yang bersifat umum. Bochner dan Waugh (dalam Langsdorf dan Smith,1995: 213) menyebutkan:

Komunikasi sebagai penyampaian pesan atau sebagai pengalihan pesan dari satu orang ke orang lain sebenarnya sangat sederhana tetapi pada kenyataannya komunikasi menghasilkan permasalahan-permasalahan terhadap kesan yang diberikan dalam proses penyampaian informasi.

Teori komunikasi yang dikaitkan dengan aktivitas individual dan kelompok dikemukakan oleh MacBride (1980:42) yang menyebutkan,

Komunikasi dalam arti luas bukan hanya pertukaran berita dan pesan tetapi sebagai kegiatan individu dan kelompok mengenai tukar menukar data, fakta dan ide maka fungsinya dalam sistem sosial mencakup informasi, sosialisasi, motivasi, perdebatan dan diskusi, pendidikan, memajukan kebudayaan, hiburan dan integrasi.

Komunikasi mempunyai cakupan yang luas jika dihubungkan dengan informasi yang disebarkan dari satu sumber kepada penerima informasi. Kelekatan komunikasi dan informasi dikatakan secara singkat oleh Kellerman (1984:42), "informasi sebagai sebagai elemen yang universal dalam komunikasi". Pendapat lain dari McLeod (1996: 18), "informasi merupakan data yang telah diproses atau data yang memiliki arti". Lebih spesifik Allen (1996: 3) menyebutnya,

Informasi berarti pemberitahuan yang mengandung arti; sementara dalam dalam kaitan aliran pesan, informasi merupakan proses dimana pengalaman seseorang disalurkan kepada penerima informasi untuk mengkodekan pesan, mengimplementasikan dan belajar dari pesan-pesan tersebut; informasi juga suatu aktivitas yang saling melengkapi untuk memberitahu.

Menyelaraskan informasi dengan komunikasi Rogers (1986:209) mempunyai pandangan tersendiri dengan menyatakan, "komunikasi adalah suatu proses dalam mana peserta-peserta menciptakan dan berbagi informasi satu dengan lainnya untuk mencapai pengertian bersama". Komunikasi selalu merupakan kejadian bersama, proses informasi diantara dua orang atau lebih; jaringan komunikasi terdiri dari individu yang saling berhubungan dan terkait pada arus informasi melalui suatu pola tertentu.

Menelaah komunikasi dan informasi dalam hubungan interpersonal ataupun kelompok merujuk pula pada model konvergensi. Pendapat Peirce (dalam Rogers dan Kincaid, 1981: 44) bahwa, "prinsip dasar yang melandasi model konvergensi adalah komunikasi sebagai proses dinamik dalam penyebaran informasi". Sifat informasi itu sendiri tidak tepat dan tidak pasti sehingga dapat saja menimbulkan persoalan baru ketika komunikasi itu dilakukan.

Selanjutnya dikemukakan oleh Rogers dan Kincaid (1981:65) yaitu:

Information and mutual understanding are the dominant components of the convergence model of communication. Information shared by two or more participants in the communication process may lead to collective action, mutual agreement and mutual understanding. (Rogers dan Kincaid, 1981: 65).

Informasi dan saling memahami adalah komponen dominan dari model komunikasi konvergensi. Informasi yang dibagi dua orang atau lebih partisipan dalam proses komunikasi dapat membawa pada tindakan kolektif, kesepakatan bersama dan pemahaman bersama terhadap simbol yang digunakan dalam interaksi

Simbol yang digunakan dalam komunikasi menciptakan berbagai makna yang berbeda dalam persepsi individual maupun kelompok yang berinteraksi. Barnlund (dalam Ruben, 1992: 67) dengan singkat menyebutkan "komunikasi adalah membangkitkan makna". Dalam pembahasan yang mengkaitkan pengertian komunikasi dengan penggunaan simbol dikemukakan oleh Erns Casserer (dalam Bower dan Bradac, 1982: 3) yang menyebutkan, "*human communication is unique*", komunikasi manusia adalah unik dan dalam prakteknya manusia merupakan satu-satunya makhluk yang menggunakan simbol-simbol dan penggunaan simbol ini sangat fundamental bagi kemanusiaan.

Pengkajian yang menghubungkan komunikasi dengan pemaknaan terhadap simbol, ditandaskan oleh Bower dan Bradac (1982:4) bahwa, "komunikasi tergantung konteksnya, yang secara kritis akan mempengaruhi pesan, konteks situasional mencakup: peranan sosial, pengenalan batas wilayah dan pengetahuan tentang jenis acara".

Perhatian spesifik berkenaan penggunaan simbol dan pemberian makna dipaparkan oleh Weaver (dalam Shannon dan Weaver, 1972:4) yang mengemukakan tiga problem komunikasi dalam penggunaan simbol dan pemberian makna-makna mencakup:

- (1). Bagaimana simbol-simbol komunikasi ditransmisikan (problem teknik);
- (2). Bagaimana ketepatan simbol-simbol yang sudah dikirimkan tersebut mampu membangkitkan makna yang dikehendaki (problem semantik);
- (3). Bagaimana efektivitas dari makna yang diterima dapat mempengaruhi hasrat dan tingkah laku (problem efektivitas).

Tidak semua komunikasi dikehendaki oleh pihak yang terlibat dalam interaksi seperti halnya mengurangi ketidak pastian, menambah pengetahuan dan keuntungan lainnya; dapat saja komunikasi justru menimbulkan ketidak serasian seperti pendapat Hooker dan Wilmot (1978: 20), "*communication is the central elements in all interpersonal conflict*". Perilaku komunikasi kerap menciptakan konflik, perilaku komunikasi merefleksikan konflik; komunikasi merupakan sarana bagi konflik manajemen yang produktif maupun destruktif.

Mengingat, bahwa hubungan antara pemuka pendapat sebagai elite dengan khalayaknya, cenderung diwarnai oleh pembicaraan dan penilaian terhadap kebijakan pemerintah dalam berbagai hal yang menyangkut kehidupan masyarakat dan lingkungannya, maka keterkaitannya dengan komunikasi politik sangat menonjol. Secara substansial, komunikasi politik, biasa dihubungkan dengan pembicaraan politik atau penyampaian pesan politik verbal maupun non verbal, yang dapat mempengaruhi rakyat ataupun pemegang kekuasaan. Menurut Dan Nimmo (1993: 8), "komunikasi politik merupakan komunikasi yang mengacu pada kegiatan politik". Dengan demikian semua kegiatan yang bernuansa politis yang dilakukan oleh pemerintah, atau kekuasaan negara beserta institusi pendukungnya maupun yang dilakukan rakyat pada umumnya, dapat dikatakan sebagai bentuk komunikasi politik.

3. Kredibilitas Sumber Informasi dalam Komunikasi

3.1. Esensi Kredibilitas

Kredibilitas sumber informasi ataupun saluran komunikasi merupakan salah satu faktor yang mendukung terciptanya komunikasi yang efektif. Jika seseorang memiliki kredibilitas yang relatif tinggi dibandingkan beberapa sumber atau saluran lainnya, maka apa yang datang dari orang tersebut lebih mudah diterima oleh individu ataupun kelompok lain.

Dikemukakan oleh Hovland, Janis dan Kelley (1953) sebagai berikut:

The term credibility denotes the resultant value of expertness which is the extent to which a communicator is perceived to be a source of valid assertion, and trustworthiness which is degree of confidence in the communicator's intent to communicate the assertions considered most valid. (Hovland, Janis dan Kelley dalam Hamijoyo, 1978: 3),

Kredibilitas menunjukkan nilai yang dihasilkan dari keahlian yang mengukur sejauhmana seorang komunikator diterima sebagai suatu sumber pernyataan yang tegas dan valid. Sifat dapat dipercaya merupakan tingkat kepercayaan dalam tujuan komunikasi yang mempertimbangkan kebenaran.

Sementara itu Kincaid dan Schramm (1987:111) berpendapat, "kredibilitas atau mempercayai adalah tindakan penerima informasi yang digunakan bersama sebagai hal yang sah dan benar". Mempercayai juga berarti menerima ketulusan orang yang menggunakan informasi bersama-sama. Dengan begitu terdapat dua hal yang dipercaya yaitu dipercayainya

pesan atau informasi dan dipercayainya sumber pesan tersebut. Semua penting untuk menjelaskan perbedaan antar kedua sifat dipercayai tersebut.

Dalam penelaahan Rogers dan Svenning (1969:169), "persoalan dipercaya atau tidak dipercaya merupakan hal yang sangat penting jika tujuannya untuk mengubah kepercayaan dari seseorang maupun kelompok mengenai lingkungan dimana mereka hidup". Berlaku atau tidaknya suatu kepercayaan tergantung dari keyakinan serta adanya kesesuaian dengan nilai yang dimiliki. Kepercayaan ini lebih bersifat tradisional yang diwariskan dari masa silam. Menurut Rogers dan Svenning (1969: 217), "sering mendapat dukungan tokoh dan pemuka pendapat yang dihormati dalam suatu masyarakat". Para tokoh dan pemuka masyarakat yang disegani berupaya untuk melembagakan nilai tradisional yang dimiliki.

Berbagai penelaahan tentang kredibilitas, khususnya di lingkungan masyarakat tradisional, menunjukkan pada sifat subjektivisme dan merujuk pada nilai kebenaran yang diyakini setiap individu maupun kelompok. Asumsi nilai dan kebenaran tersebut melekat pula dalam pandangan Kincaid dan Schramm (1987: 34), ukuran untuk menilai dipercayai atau tidaknya sumber suatu pesan adalah: (1).Kecakapan dan kompetensinya mengenai persoalan yang bersangkutan dengan masalah pedesaan; (2). Sampai seberapa jauh sumber itu dapat dipercayai untuk mengatakan kebenaran; (3).Kadang-kadang juga dinilai kedinamisan sumber yang dimaksud, juga dinilai semangat dan sikap ketulusannya yang nampak pada saat informasi digunakan bersama.

Sepanjang seorang pemuka pendapat tradisional memiliki sifat tersebut diatas; juga martabat dan kedudukannya dalam masyarakat, dia masih terus dipercaya. Tetapi jika seorang pemuka pendapat sudah tidak dipercaya selalu ada cadangan pemuka pendapat lain untuk menggantikannya.

Subjektivitas kredibilitas semakin nyata dalam hubungan antara individu maupun kelompok yang berbeda secara kultural. Dijelaskan oleh Samovar dan Porter (1991:274-279), sumber pesan atau individu yang berbeda secara kultural sulit untuk melakukan interaksi dan komunikasi yang efektif karena adanya: perbedaan tujuan berkomunikasi, etnosentrisme, ketidakpercayaan (*lack of trust*), penarikan diri (*withdrawal*), ketiadaan empati, *stereotype* dan struktur kekuasaan.

Mendukung pernyataan itu, Michael L. Ray (1973:147) berpendapat, "sikap percaya dan sifat dapat dipercaya dibedakan dalam tiga zona yaitu penerimaan, non komitmen dan penolakan". Isu yang sesuai dengan pengetahuan yang telah ada mungkin diterima, sedangkan isu yang berada

di luar ruang kehidupan seseorang akan ditolak. Sementara isu yang terdapat diantara kedua ekstrim ini akan jatuh pada zona nonkomitmen, misalnya isu yang keterlibatannya rendah dan tidak banyak menarik perhatian partisipan dalam suatu situasi komunikasi.

Pengkajian terhadap eksistensi kredibilitas sering masuk dalam wacana yang dinamis seperti diungkapkan De Vito dengan tegas (1987:78) menguraikan berbagai jenis kredibilitas yaitu:

(1) Kredibilitas awal (*initial credibility*), adalah sejauh mana komunikator diakui sebelum komunikasi aktual dimulai, tanpa memperhatikan siapa yang kita ajak bicara atau tulisan siapa yang kita baca, sumber harus sudah terlihat kredibilitasnya. Kerap kali awal ini merupakan suatu fungsi penghargaan atau posisi individual. (2). Kredibilitas perolehan (*derived credibility*) merupakan kredibilitas yang diterima seorang pendengar yang didasarkan pada apa yang terjadi selama menghadapi komunikasi; (3) Kredibilitas terminal (*terminal credibility*), adalah kredibilitas yang dimiliki komunikator setelah interaksi komunikasi selesai. Kredibilitas terminal ini merupakan suatu produk dari kredibilitas awal dan kredibilitas perolehan. Berdasarkan pada kredibilitas awal dan kredibilitas perolehan tersebut maka terbentuk kredibilitas terminal.

Dalam berbagai tulisan ilmiah komunikasi, komunikator sering disamakan dengan sumber pesan, komunikasi sebagai tingkah laku antar personal, dapat efektif merubah sikap khalayaknya tergantung kepada kredibilitas komunikator.

Ada sejumlah penelitian yang menunjukkan bahwa keefektifan komunikasi banyak ditentukan oleh ciri komunikator seperti kredibilitas, daya tarik dan afiliasi kelompok. Penelitian Hovland dan Weiss (dalam Krech, Crutchfield dan Ballachey, 1962:231) menunjukkan: komunikator sebagai sumber informasi yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi lebih mampu untuk merubah sikap dan memberikan pemahaman dibanding dengan komunikator yang mempunyai tingkat kepercayaan rendah di mata khalayaknya.

Kepercayaan yang tinggi biasanya terkait pula dengan karakteristik individual, isi pesan, hubungan dengan kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan nilai sosial kultural, dan situasi yang terkait pada saat dilakukan komunikasi. Faktor tersebut tidak bersifat mutlak sebab sejalan dengan perubahan, maka aspek kepentingan individual juga memegang peran yang penting.

3.2. Kredibilitas dan Pembentukan Opini

Kredibilitas mempunyai kaitan yang kompleks dalam pembentukan opini. Menurut C.I. Hovland, J.L. Janis dan H.H. Kelley (dalam Hamijayo, 1978: 3-4) menyatakan bahwa, dua variabel yang membawa perubahan opini pertama adalah kredibilitas sumber dan kedua, pertimbangan emosional dalam suatu argumen. Kredibilitas merupakan salah satu dari beberapa karakteristik komunikator seperti satu kelas dari empat stimuli komunikasi, sedangkan pertimbangan emosional adalah salah satu dari beberapa karakteristik kelas stimuli komunikasi yang lain

Kredibilitas terkait dengan salah satu karakteristik sumber pesan atau komunikator. Di lingkungan pedesaan atau pada komunitas petani, Rogers dan Svenning (1969:186) memaparkan, “yang dianggap kredibilitasnya paling tinggi adalah pemuka pendapat atau tokoh masyarakat yang mampu memberikan inovasi pertanian”. Orang yang memiliki kredibilitas tinggi di pedesaan antara lain adalah pekerja suka rela, penyuluh pertanian, guru, radio dan tetangga di sekitar lingkungannya.

Sedangkan kredibilitas terendah adalah surat kabar; agen perubahan yang komersial (*Commercial Change Agents*) seperti halnya pedagang mempunyai kredibilitas yang sangat rendah. Kotler dan Roberto (1989: 99) menyebutkan, “*The typical source of information on social product are low credibility sources and therefore do not generate higher-order belief*” Masyarakat memang menghendaki kelebihan dalam semua segi dari seorang sumber informasi sehingga sumber informasi yang hampir sama dengan perilaku penerima informasi merupakan sumber pesan yang kredibilitasnya rendah dan tidak mampu membangkitkan kepercayaan yang tinggi di lingkungan masyarakat.

Bagaimana kredibilitas yang dapat diterima oleh masyarakat setidaknya Rogers dan Kincaid (1981:37) juga memberikan penekanan: “kredibilitas meliputi kredibilitas yang kompeten diakui karena keahliannya dan kredibilitas keamanan yang dianggap tidak memiliki maksud untuk memanipulasi orang lain atau akan menarik keuntungan pribadi dari apa yang dikatakannya atau apa yang akan dijanjkannya”. Pandangan ini didukung oleh Hovland, Janis dan Kelly (dalam Hamijoyo, 1968:7) berteori, “komunikasi akan efektif kalau dipancarkan oleh komunikator yang berwibawa (*credible*)”. Kewibawaan menurut pendapatnya mengandung dua kualitas yaitu: kejujuran (*trustworthines*) dan keahlian (*expertise*). Dengan demikian jika seseorang pemimpin memiliki kewibawaan diharapkan komunikasi akan efektif sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.

Kredibilitas muncul dalam tulisan tentang efektivitas komunikasi di lingkungan orang yang memiliki kebudayaan berbeda, Samovar, Porter dan Jain (1981:195) menjelaskan, "persepsi memegang peran penting dalam mengevaluasi kredibilitas sumber informasi yang mempunyai kultur berbeda". Dengan kata lain kredibilitas seseorang tergantung dari siapa yang mempersepsikan dan menilai.

Secara mendasar Samovar dan Porter (1988:24), "persepsi adalah proses internal untuk memilih, mengevaluasi dan mengorganisasikan rangsangan dari lingkungan eksternal, dengan kata lain mengubah energi fisik lingkungan kita menjadi pengalaman bermakna". Persepsi dipengaruhi oleh (1) sistem kepercayaan, nilai dan sikap, (2) cara pandang dunia (*world view*) dan (3) organisasi sosial. Menilik pendapat ini ternyata persepsi merupakan proses yang panjang dan rumit.

Singkatnya dalam komunikasi yang interaktif, persepsi seseorang berpengaruh terhadap penilaian kredibilitas sumber pesan. Sejalan dengan konteks itu, Jackson (1959: 95) menyatakan bahwa, "problem komunikasi salah satunya adalah masalah percaya dan tidak percaya dari penerima pesan yang menyangkut sumber, saluran dan isi dari informasi yang disebarkan komunikator".

3.3. Kredibilitas Komunikator Pembangunan

Ketika pemuka pendapat harus menjalankan perannya dalam pembangunan masyarakat maka pembahasan akan bersentuhan dengan persoalan-persoalan peran seorang komunikator pembangunan dalam hubungannya dengan khlayak. Penelaahan para ahli komunikasi pembangunan salah satunya mengungkapkan, bahwa di negara berkembang muncul kecenderungan komunikator pembangunan yang tidak sejalan dengan khalayaknya dalam penyampaian informasi faktual, padahal masyarakat mengharapkan komunikator dapat memberikan sumbangan pemikiran terbaik dalam pelaksanaan pembangunan di negara berkembang.

Komunikator pembangunan di negara berkembang dalam perspektif Rogers dan Svenning (1969), Jayawera dan Amunugama (1987) dan MacBride (1980) lebih banyak mendukung kebijakan politik pemerintah yang berkuasa, menjadi juru bicara kelompok kepentingan yang justru tidak sejalan dengan masyarakat setempat dan lebih banyak berkolaborasi dengan pemilik modal atau kelompok elite lainnya yang mengendalikan kekuasaan politik negara.

Dengan kondisi demikian, para agen pembangunan tidak dapat diharapkan terlalu banyak oleh masyarakat, karena cenderung memberikan informasi yang tidak berpihak kepada masyarakat banyak tetapi lebih mendukung sekelompok elite. Di samping itu informasi yang disampaikan kepada khalayaknya menyimpang dari kenyataan yang dihadapi atau mereduksi informasi faktual menjadi informasi yang diolah sesuai dengan kepentingannya. Idealnya agen pembangunan sebagaimana pandangan Kotler dan Roberto (1989: 24), “mampu mengaplikasikan konsep pemasaran sosial (*social marketing*) sebagai suatu strategi untuk mengubah perilaku masyarakat dengan mengkombinasikan elemen-elemen terbaik”. Elemen itu meliputi pendekatan tradisional, orientasi perubahan sosial, kerangka kerja, penggunaan teknologi dan keterampilan pemasaran dalam suatu perencanaan yang terintegrasi.

Bukan sesuatu yang baru jika dalam proses perubahan sosial di lingkungan pedesaan menurut Rogers dan Svenning (1969:223) “para komunikator pembangunan lebih banyak berpihak pada pemerintah dengan menyebarkan pesan pembangunan secara sepihak dari sudut kepentingan pemegang kekuasaan”. Termasuk didalamnya propaganda politik yang dilakukan berulang-ulang sebagai bentuk tekanan kepada masyarakat untuk patuh terhadap kekuasaan negara. Padahal informasi yang diberikan berulang-ulang dapat menimbulkan kejenuhan informasi. Rogers dan Kincaid (1981:97) mengemukakan, “kejenuhan informasi adalah keadaan dimana individu atau suatu sistem tidak mampu lagi untuk menerima masukan informasi untuk diproses menjadi informasi yang lebih berarti”.

Kesulitan untuk memperoleh informasi yang objektif disadari oleh Rogers dan Svenning (1969: 219) yang menyatakan, “kalaupun ada harapan untuk memperoleh pesan yang objektif, barangkali figur yang tepat adalah para *opinion leader* tradisional yang berada di luar pemerintah dan kekuasaan politik yang masih memiliki ideologi objektif”. Jelas bahwa objektivitas sebuah informasi sangat diperlukan oleh individu maupun masyarakat.

Menggarisbawahi informasi sebagai suatu kepentingan individual, Miller dan Steinberg (1975:207) menyatakan, “komunikasi dan informasi diperlukan sebagai kebutuhan untuk mempertahankan atau memperkuat kepercayaan sendiri menghadapi berbagai persoalan”. Pemuka pendapat tradisional di pedesaan tidak memiliki legalitas, berbeda dengan pemimpin formal yang pada umumnya birokrat di pedesaan mempunyai kedudukan yang kuat karena di dukung oleh peraturan pemerintah.

4. Kedudukan Pemuka Pendapat di Masyarakat

4.1. Kepemimpinan Pemuka Pendapat

Ketika masyarakat desa lebih berorientasi pada pencapaian simbol fisik modernisasi, posisi pemuka pendapat semakin kompleks. Pemuka pendapat dituntut untuk memimpin khalayaknya beradaptasi dengan simbol modernisasi. Salah satu representasi modernisasi adalah penggunaan teknologi komunikasi yang akan mempengaruhi pula penyebaran informasi. Tubb dan Moss (1996: 224) menyatakan, “teknologi komunikasi mampu memberikan informasi yang lebih cepat kepada semua masyarakat”. Dengan informasi yang cepat maka pola kepemimpinan tradisional yang mengandalkan loyalitas terhadap nilai-nilai setempat harus berhadapan dengan nilai modernisasi yang ditransmisikan melalui berbagai saluran informasi.

Kemudahan akses informasi menjadikan masyarakat desa dapat menyaksikan berbagai peristiwa di tempat yang jauh dari jangkauan fisik melalui saluran media berteknologi tinggi. Tetapi sebagaimana pendapat Harrison (1988:16), “masyarakat tradisional memiliki karakteristik homogen dari segi sosial, ekonomi maupun budaya tidak mudah untuk beradaptasi dengan hal-hal yang baru”, atau pendapat singkat dari Chirot (1976:5), “kehidupan masyarakat negara peripheral masih bergantung pada pola kepemimpinan formal maupun informal”.

Mencerna informasi langsung dari suatu sumber yang belum dikenal baik, seperti halnya media massa dapat saja menimbulkan bermacam-macam persepsi jika tidak mendapat penjelasan ulang dari pemuka pendapat. Menurut Samovar, Porter dan Jain (1981:55), “persepsi akan berimplikasi terhadap efektivitas komunikasi dan penerimaan informasi”. Lachsmara Rao (dalam Condon dan Saito, 1976:61) menyatakan, “penggunaan bahasa, simbol kultur, kebiasaan sosial, sistem nilai sering pula ekonomi dan ideologi politik berpengaruh terhadap komunikasi”.

Dengan tingkat pemahaman yang sederhana masyarakat pedesaan memerlukan pemimpin yang mampu memberikan penjelasan sesuai dengan karakteristik atau mentalitas tradisional. Menghadapi keadaan yang demikian diperlukan pemimpin yang baik dan dapat diterima pengikutnya. Menurut Haiman (dalam Stogdill, 1974:7), “pemimpin harus memiliki jiwa kepemimpinan, sedangkan kepemimpinan diartikan sebagai suatu kemampuan mempengaruhi dalam proses interaksi melalui pembicaraan ataupun melalui perilaku orang lain”.

Dalam pandangan Keith Davis (1977:79) “kepemimpinan adalah suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain melalui komunikasi dan aktivitas lainnya secara bersemangat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan”. Sedangkan Kotter dan Heskett (1992:94), menegaskan “pemimpin adalah orang yang mempunyai wawasan komunikasi luas yang mampu mengatasi krisis potensial”.

Kepemimpinan dalam pengertian yang lebih spesifik dalam kemampuan berkomunikasi tidak terlepas dari konsep pemuka pendapat (*opinion leader*). Menurut Rogers (1973:103), “sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang secara informal sesuai dengan kehendak pemimpin melalui hubungan sosial yang dibina”. Sebelumnya Rogers dan Shoemaker (1971:199) menyebutkan, “orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain disebut tokoh masyarakat, pemuka pendapat maupun sebutan lain yang senada”. Pendapat lebih awal dikemukakan oleh Rosenberg dan Hovland bahwa, “pemuka pendapat merupakan ekspresi verbal dari sikap, di dalam sikap terdapat tiga kategori utama yaitu kognitif tindakan berpikir, afektif kemampuan merasakan dan perilaku”. (Rosenberg dan Hovland dalam Hamijoyo, 1978:14).

Penelaahan lain tentang pemuka pendapat dikemukakan Van Den Ban (1981: 293) sebagai berikut: “pemuka pendapat mempunyai sejumlah atribut yang membedakan mereka dengan orang lain dari komunitasnya”. Mereka mempunyai status sosial ekonomi yang lebih banyak berhubungan dengan penyuluh, lebih banyak menggunakan media massa dan memiliki relasi dengan orang atau lembaga yang terdapat di luar komunitasnya. Atribut ini dikenal juga sebagai kekosmopolitanan (*cosmopolitaness*).

Rogers dan Shoemaker (1971: 215-217) menetapkan kriteria untuk menetapkan pemuka pendapat melalui metode sebagai berikut:

1. *Sociometric Method*, dalam metoda ini ditanyakan kepada siapa mereka meminta dan mencari informasi atau nasehat mengenai masalah ke-masyarakatan yang dihadapi. Pemimpin adalah mereka yang menjadi anggota masyarakat tersebut dan memiliki informasi terbanyak, teknik ini paling valid untuk menentukan siapa pemimpin dalam masyarakat yang sesuai dengan pandangan para pengikutnya.
2. *Informant's Rating*, dalam metoda ini diajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu pada responden yang dianggap sebagai sumber informasi dalam masyarakat mengenai siapa pemimpin masyarakat yang benar-benar mengenal masyarakatnya.

3. *Self Designating Method*, metoda ini menanyakan kepada responden seberapa jauh ia menganggap dirinya sebagai pemimpin dalam masyarakat.

Ketiga metode tersebut menunjukkan posisi maupun peran pemuka pendapat sebagai pemimpin dan sumber informasi yang pendapatnya dipercaya oleh khalayaknya.

Peran (*role*) menurut Soekanto (1981:146), "merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan". Pengertian peran yang tidak berbeda dikemukakan oleh Krech, et.al (1962:310-311) bahwa, "peran dapat dipandang sebagai tugas dan kewajiban suatu posisi yang harus dilaksanakan". Jika peran tidak dilaksanakan dengan baik akan muncul tuntutan dari lingkungan sekitarnya yang mengkaitkan dengan status yang dimiliki.

Peranan menunjuk pada situasi yang baku, menentukan tingkah laku yang diharapkan dari orang-orang pada saat melaksanakan posisinya secara khusus. Dengan substansi yang merujuk posisi seseorang Linton (1956:114) menjelaskan bahwa, "dalam setiap kedudukan, peranan mempunyai dua arti dalam pola pergaulan hidup, yaitu menentukan apa yang diperbuatnya dan kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya".

Peran pemuka pendapat di pedesaan sering digambarkan ideal bagi masyarakat, sebab mereka umumnya adalah sekelompok elite di pedesaan. Dikatakan oleh Rahim (dalam Schramm dan Lerner, 1978: 118), bahwa, "pemuka pendapat di pedesaan terdiri dari pendidik, teknisi, spesialis maupun politisi, sering terjadi kelompok pemuka tersebut adalah kader partai yang sedang berkuasa dalam pemerintahan".

Dijelaskan pula oleh Schramm dan Lerner (1978: 127), "setiap kelompok pemuka pendapat mempunyai peran sendiri dalam interaksinya dengan masyarakat pedesaan". Misalnya kader politik biasanya membawa pesan pembangunan yang bersifat ideologis dan menjelaskan ide-ide untuk mengatur ataupun menggalakkan solidaritas sosial. Saluran utama untuk menyampaikan pesan dapat melalui media massa atau komunikasi antar pribadi. Meskipun demikian peran tersebut dapat mengalami perubahan maupun pergeseran sejalan dengan perubahan di lingkungannya.

Desakan dan tuntutan peran dalam pandangan khalayak yang berbeda kepentingannya sewaktu-waktu dapat membuat konflik. Dalam pandangan Hoker dan Wilmot (1978:6), "*conflict is a consequence of poor communication, misperception, miscalculation, socialization, and other unconscious process*".

Konflik terjadi karena ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan dan dapat muncul dalam kaitannya dengan peran yang dijalankan oleh seseorang.

Ditekankan Parsons (dalam Stryker dan Macke, 1978: 70), bahwa “konflik peran adalah suatu kasus yang terjadi karena pertentangan posisi struktural dan inkonsistensi perilaku yang melekat pada status”. Konflik peran dapat berupa persaingan struktural yang merujuk pada perbedaan peran, reaksi dari pertentangan diantara individu, perbedaan atau ketidakjelasan dalam berbagai harapan.

4.2. Karakteristik Pemuka Pendapat

Karakteristik pemuka pendapat dijelaskan oleh Rogers dan Svenning (1969:227) dalam penelitiannya di Kolombia adalah: (1) *more formal education*; (2) *higher levels of functional literacy*; (3) *larger farms (acreage)*; (4) *more farm and home innovativeness*; (5) *higher social status*; (6) *lower achievement motivation*; (7) *more mass media exposure*; (8) *higher empathy*; (9) *more political knowledgeability*.

Tidak serinci sifat itu, adalah pendapat Rogers dan Shoemaker (1971:217) yang menyebutkan, “pemuka pendapat sebagai tokoh masyarakat mempunyai kelebihan-kelebihan”. Seperti halnya hubungan sosial yang lebih luas daripada pengikutnya, lebih sering mengadakan perjalanan ke luar, kerap berhubungan dengan agen perubahan dan mempunyai keahlian atau pengetahuan tertentu melebihi orang kebanyakan.

Hakikatnya, seorang tokoh masyarakat mempunyai karakter spesifik, tetapi Rogers dan Svenning (1969:227) memberikan penegasan bahwa, “ada perbedaan fungsi pemuka pendapat dalam lingkungan masyarakat” Pemuka pendapat masyarakat modern bersifat *monomorphic*, hanya berkenaan dengan satu urusan, sedangkan dalam masyarakat tradisional, kepemimpinan pemuka pendapat lebih bersifat *polymorphic* yang berhubungan dengan semua urusan dan bersifat umum.

Dikemukakan pula oleh Rogers dan Svenning (1969:229) yang menghubungkan pemuka pendapat dengan dengan sifat inovasi dengan menjelaskan; “dalam sistem yang normanya tradisional pemuka pendapat biasanya bukan inovator, sebab para inovator dalam sistem ini sering dicurigai dan tidak dihargai; sedangkan dalam sistem yang normanya modern pemuka pendapat lebih inovatif dibandingkan dengan pengikutnya”.

Menyiasati kondisi itu dianjurkan agen pembaharuan bekerjasama dengan pemuka pendapat untuk menghindari konflik yang muncul

antara masyarakat pedesaan dengan agen pembangunan. Sebab dalam perspektif tradisional, konflik sekecil apapun memiliki dampak yang tidak menguntungkan bagi upaya pembaharuan.

5. Perubahan Sosial dan Kekuatan Media

5.1. Hakikat Perubahan Sosial

Banyak pendapat yang menegaskan perubahan sosial merupakan gejala yang selalu muncul dalam masyarakat. Daniel Chirot (1981: 11) menyatakan, "setiap masyarakat akan mengalami perubahan seperti perubahan mengenai nilai sosial, norma sosial, lembaga kemasyarakatan dan lain-lain". Menurut Karl Mannheim (dalam Chirot, 1981: 19), "perubahan sosial dalam sejarah manusia pada masa awal merupakan penemuan melalui *trial and error*". Sedangkan Hoogvelt (1976:9) menyatakan, "tidak ada masyarakat yang *stagnant*, oleh karena setiap masyarakat mengalami perubahan yang terjadi secara cepat atau lambat".

Perubahan sosial berhubungan dengan aspek material yang mencakup faktor ekonomi dan teknologi untuk produktivitas; meningkatnya produktivitas menghasilkan kesempatan kerja di pabrik-pabrik di kota dan kelas-kelas ekonomi baru (industriawan dan pekerja) yang menggeser sistem feodal dalam segi kultural dan politik serta kategori pelapisan masyarakat". (Karl Marx dalam Chirot, 1981: 23). Dalam analisis yang lebih umum, Bohanan dan Glazer (1973:6), menegaskan "perubahan yang lambat memerlukan waktu lama, dimana terdapat suatu rentetan perubahan kecil yang lambat dinamakan evolusi". Pada evolusi perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa suatu rencana atau kehendak tertentu, perubahan tersebut terjadi karena usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan-keperluan, keadaan dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain ada yang mengkhawatirkan sebagaimana menurut Berger (1986:3), bahwa "perubahan yang cepat biasanya mengakibatkan terjadinya disorganisasi yang sementara sifatnya di dalam proses penyesuaian diri, disorganisasi akan diikuti oleh suatu reorganisasi yang mencakup pemantapan kaidah dan nilai-nilai baru".

Penelaahan terhadap dampak perubahan yang diakibatkan oleh industrialisasi yang dilakukan oleh Rogers (1971:46) mengindikasikan bahwa, "industrialisasi pada masyarakat agraris merupakan perubahan yang membawa pengaruh besar, berbagai lembaga kemasyarakatan akan terpengaruh". Contohnya hubungan kerja, sistem pemilikan tanah,

hubungan kekeluargaan, stratifikasi masyarakat dan lain sebagainya. Sementara itu secara singkat Tehranian (1979:119) menyebut, “terjadinya perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri disebabkan oleh modernisasi dan pembangunan”.

Mengupas lebih lanjut tentang perubahan sosial; Rogers dan Svenning (1969:3-6) berdalih bahwa, “perubahan sosial merupakan proses terjadi perubahan struktur dan fungsi suatu sistem sosial”. Terdapat dua kategori perubahan yaitu *immanent change* yaitu perubahan yang diciptakan oleh orang seputar kelompok itu sendiri sehingga dapat diterima dengan mudah dan *contact change* yang terjadi karena diperkenalkan oleh sumber-sumber yang berasal dari luar kelompoknya. Selanjutnya Rogers dan Svenning (1969: 112) menandakan, “cara menerima perubahan yang dilakukan masyarakat menghadapi *contact change* adalah menyeleksi secara ketat (*selective contact change*)”. Penerimaan masyarakat semakin baik jika mengintrodusir nilai-nilai yang sama terhadap sasaran perubahan.

Menjaga nilai setempat dalam proses perubahan sosial sudah lama disadari oleh para peneliti dan pada umumnya terdapat titik temu bahwa menjaga nilai setempat merupakan tanggung jawab kolektif masyarakat. Dikemukakan oleh Emile Durkheim (dalam Abdullah dan Leeden, 1986:19) bahwa, “perubahan sosial memerlukan moralitas yang sesuai dengan komunitasnya”. Perubahan sosial yang ideal dan bermoral tidak mudah untuk dicapai sepanjang tidak ada konsistensi dari para pelaku atau agen perubahan yang terdiri dari berbagai kelompok masyarakat. Berger (1982: 56) secara tegas menyatakan, “para birokrat, pengusaha dan cendekiawan yang merupakan pembawa mistik pertumbuhan bukanlah ahli-ahli dalam moralitas”.

Di Indonesia menurut Garna (1992:37,1999:12) “perubahan sosial adalah perubahan masyarakat yang didalamnya bisa termasuk perubahan kebudayaan, yang mungkin berlangsung lambat atau cepat”. Dalam perpektif ini, pembangunan nasional di Indonesia dianggap dan dianalogikan sebagai perubahan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut diatas perubahan sosial seharusnya sejalan dengan nilai yang berlaku pada masyarakat setempat, bukan sebaliknya memarginalkan budaya dan nilai yang dipercaya oleh masyarakat secara turun-temurun dan berakar pada tradisi

5.2. Perubahan Sosial dan Media Massa

Ketika muncul berbagai pendapat tentang peran media massa dalam penyebaran informasi tidak sedikit peneliti yang mengkaitkan dengan perubahan sosial dalam masyarakat. Penelitian Rogers, Zao, Pan, Chen and Milton (1985: 179) di China menyimpulkan, "media massa berperan dalam perubahan sosial dan menyebarkan berbagai substansi modernisasi dan singkatnya media massa sebagai pengganda ajaib". Tanpa menyebutkan secara jelas peran media massa tetapi dengan substansi yang sama MacBride (1980:60): Media komunikasi adalah alat kultural yang mendorong atau mempengaruhi sikap, memberi motivasi, mengembangkan pola tingkah laku dan menyebabkan integrasi sosial, ia berperan utama dalam menerapkan kebijakan kebudayaan dan membantu mendemokraskan kebudayaan. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, media massa merupakan faktor yang mempercepat perubahan; sedangkan faktor-faktor lainnya menyangkut begitu banyak aspek dari berbagai disiplin ilmu.

Dalam pengkajian DeFleur (dalam Depari dan MacAndrew, 1988:4) tentang media massa, disebutkan, "pengaruh media massa terhadap individu maupun kelompok telah menumbuhkan pembaharuan kehidupan yang berjalan pesat". Pembaharuan yang berwujud perubahan (*change*) maupun pembangunan (*development*) pada umumnya merupakan suatu proses berlanjut yang menyangkut hubungan antar media dengan massa.

Walaupun berbagai pernyataan pada umumnya menunjukkan peran media massa dalam perubahan sosial tetapi Wilbur Schramm (dalam Depari dan MacAndrews, 1988:31) lebih percaya perubahan sosial dapat tercapai melalui hubungan interpersonal, dijelaskan sebagai berikut: "mengandalkan media massa dalam kampanye pembaharuan akan membatasi keberhasilan, karena saluran *interpersonal* bahkan lebih berhasil menyebarkan pesan pembangunan". Pendapat Schramm tersebut menunjukkan bahwa saluran *interpersonal* merupakan salah satu media komunikasi yang lebih unggul dalam menyebarkan pesan pembangunan, meskipun demikian dalam perkembangan teknologi komunikasi, media massa tetap memiliki pengaruh dalam interaksi masyarakat.

Media massa adalah representasi dari komunikasi massa, yang mampu menjangkau khalayak lebih luas. Eksistensi media massa yang ditunjang oleh teknologi komunikasi ditunjukkan oleh Gebner (dalam Corner, 1984:164) dengan menyebutkan bahwa "komunikasi massa adalah teknologi dan kelembagaan yang berbasis pada produksi massa dan distribusi yang seluas-luasnya untuk dibagikan terus-menerus melalui aliran publik dalam masyarakat industri".

Pendapat Rogers yang menghubungkan teknologi dan perubahan sosial adalah “teknologi komunikasi baru yang mempunyai jangkauan penyebaran informasi luas adalah salah satu dari sebab penting perubahan sosial dalam masyarakat”. (Rogers, 1986:110), Selanjutnya dijelaskan pula lebih terinci sebagai berikut: Teknologi komunikasi yang baru akan memiliki pengaruh besar sebagai berikut: (1). Peningkatan dalam jumlah informasi yang disampaikan kepada semua individu dan *audiense*, (2). Peningkatan yang besar dalam jumlah informasi untuk kekayaan informasi, sehingga memperdalam jurang informasi (3). Kelebihan beban informasi akan terjadi, khususnya pada bagian dari kekayaan informasi (4). Teknologi komunikasi yang lebih baru menciptakan jurang informasi baru sebelum jurang informasi lama tertutup. (Rogers, 1986:169). Topik lain yang menghubungkan teknologi komunikasi dengan kondisi negara berkembang dikemukakan oleh Goonasekera (1987:62), “perkembangan komunikasi dipengaruhi oleh tatanan informasi yang bertumpu pada teknologi dan program pembangunan bantuan negara maju”.

Penelaahan yang mengunggulkan teknologi komunikasi umumnya berpendapat, “kekuatan teknologi dalam menyebarkan informasi telah menyatukan dunia yang berbeda pandangan politik, sistem sosial ekonomi dan kultural yang membawa bangsa-bangsa pada orde global (McQuail, 1991; Rogers, 1986; Barnlund, 1988.). Dengan mengunggulkan teknologi Daniel Lerner (1983:187), mengemukakan dengan singkat “meningkatnya mobilitas antar wilayah dalam masyarakat paling banyak ditunjang oleh tersedianya fasilitas transportasi dan inovasi teknologi komunikasi yang memadai”. Uraian Joseph E. Burn (1999: 2), memiliki substansi tidak berbeda, dengan menyatakan, “model komunikasi semacam internet merupakan satu teknologi yang dapat digunakan untuk difusi inovasi meskipun dalam khalayak yang terbatas”.

Masih seputar teknologi komunikasi dalam kehidupan masyarakat, Rogers (1986: 254) mengungkapkan sebagai berikut: “modernisasi dalam teknologi komunikasi menyebabkan pengawasan masyarakat menjadi lebih penting, walaupun lebih sukar dilaksanakan”. Meskipun sejumlah pendapat menegaskan keunggulan teknologi komunikasi tetapi Goulet (1977:132), berdalih “teknologi komunikasi bukanlah sesuatu yang netral seperti teknologi lain, teknologi komunikasi juga pembawa dan penghancur tata nilai yang berlaku dalam masyarakat”. Dengan substansi yang sejalan, Bottomore (1983:114) mengatakan, “sewaktu gelombang industrialisasi dan modernisasi yang ditandai dengan teknologi informasi bergerak ke luar serta merusak unit sosial dan politik yang sebelumnya dipercaya”.

Nilai-nilai sosial yang pudar karena kemunculan teknologi komunikasi disesalkan oleh Rogers (1983:24) yang dengan tegas memperingatkan, “tatanan sosial semestinya dijaga karena berfungsi untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan tujuan masyarakat di pedesaan”. Sedangkan Davis (1972:53) menyebutkan: “tatanan sosial yang melembaga dapat menghindari konflik-konflik dalam masyarakat”, terlebih di negara-negara yang sedang berkembang.

Dalam pengkajian pembangunan pedesaan, media massa dianggap memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan. Teori Schramm (dalam Jahi, 1988:126) menyebutkan: Radio dan televisi mempunyai kemampuan besar sekali untuk mengantarkan dan menyebarkan pesan pembangunan kepada masyarakat yang berada di tempat terpencar dan tersebar luas seperti daerah pedesaan secara serentak dengan kecepatan tinggi. Pada penelaahan yang khusus mencermati televisi; Adoni, Cohen dan Mane (1981:189) menyatakan bahwa, “informasi yang jauh dari khalayaknya yang disiarkan oleh televisi, lebih dipercaya dan membentuk persepsi khalayak daripada keadaan sosial yang sebenarnya dialami dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya”.

Dukungan terhadap peran media massa dengan tegas diberikan oleh C. Wright Mills (1968:32), dengan mengutarakan, “kita masih belum percaya terhadap informasi sampai kita membaca atau mendengarnya dari radio”. Dengan kata lain media dianggap sebagai sarana pembenaran terhadap informasi yang diterima. Menurut Lippman (1998:468), “respon khalayak bukan hanya pada peristiwa aktual saja melainkan juga pada *pseudo environment*”. Gambaran tentang *pseudo environment* yang menimbulkan khalayak itu disebut *public opinion*, dan *public opinion* dibentuk media massa.

Menyangkut peranan media massa dalam masyarakat Rogers, et.al. (1985: 45) menjelaskan, “banyak tuntutan yang masih mengharapkan bahwa media massa memberikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya”. Sementara itu DeFleur dan Rokeach (1989:163) menyebutkan, “ pesan-pesan dari media massa sebagai peluru ajaib dan mempunyai kekuatan besar dalam komunikasi massa”. Media memberikan gagasan dalam membentuk opini publik dan mengalirkan pesan-pesan yang dikehendaki oleh komunikator. Dengan inti persoalan yang sama dengan peran media massa MacBride (1980: 60) berargumentasi, media komunikasi adalah alat kultural yang mendorong atau mempengaruhi sikap, memberi motivasi, mengembangkan pola tingkah laku dan menyebabkan integrasi sosial, ia berperan utama dalam menerapkan kebijakan kebudayaan dan membantu mendemokraskan kebudayaan.

Media massa mendorong penyebaran informasi sekaligus membentuk persepsi khalayaknya sehingga melalui media massa masyarakat dapat mengetahui peristiwa yang terjadi disekitarnya maupun di tempat lain. Dalam kesempatan lainnya, meskipun media dianggap sebagai saluran yang paling berperan dalam pembangunan dan pembaharuan, tetapi Rogers, et.al. (1985:145) melihat kekurang efektifan media massa dalam pembangunan disebabkan karena, "isi media massa sangat mengutamakan hiburan dan iklan". Isi media massa cenderung memotivasi penduduk pedesaan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih kaya seperti ditunjukkan oleh media massa, akan tetapi mereka tidak mempunyai kemampuan efektif untuk mencapai cita-cita itu.

5.3. Media Massa dan Kekuasaan Negara

Kecenderungan kekuasaan negara untuk menguasai rakyatnya sudah lama diulas oleh Durkheim (dalam Giddens, 1986:126) yang menyebutkan, "negara sering menjadi sumber gagasan baru dan mengarahkan masyarakat sejauh mungkin". Pemikiran Durkheim tentu dalam wacana keseimbangan peran yang selaras bukan sebaliknya ketidak seimbangan peran yang dimiliki oleh masyarakat dan kekuasaan negara.

Pada perkembangannya negara berupaya mengatur semua tindakan masyarakat termasuk pengendalian informasi yang disebarkan oleh media massa, sebagaimana ditegaskan oleh Chirot (1976:5), "melalui kekuasaan politiknya, negara mengendalikan semua kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan politik maupun tidak ada sangkut pautnya politik, seperti penyebaran informasi". Pendapat ini didukung pula oleh Duverger (1998:36) yang mengatakan, "dibangunnya kediktatoran selalu lebih mudah di dalam masyarakat yang terbelakang daripada dalam masyarakat yang sangat maju".

Sejalan dengan peran kekuasaan negara, penelaahan media massa di negara berkembang, banyak ahli komunikasi massa yang menghubungkan dengan eksistensi pemerintah dalam mengendalikan media massa. Menurut DeFleur (1970:11), "kekuasaan politik dan media massa mempunyai hubungan yang sangat erat dan keduanya memiliki kekuatan". Keterkaitan dua hal tersebut selalu menjadi persoalan yang menarik untuk dibicarakan, terlebih lagi di negara berkembang yang sarat dengan problem komunikasi politik.

Eksistensi media massa di negara berkembang yang sarat dengan persoalan politik menyebabkan media tidak dapat melakukan fungsi ideal seperti pendapat Dreier dan Gebner (dalam McQuail, 1987: 111)

yang menyatakan bahwa, “kekuasaan politik sangat menonjol dalam hal pengendalian isi media dimana sensor mempunyai kekuatan yang tidak bisa dilawan oleh media massa”. Sedemikian besar pengaruh kekuasaan politik terhadap media di suatu negara, umumnya sebagai upaya untuk menciptakan keadaan yang dikehendaki oleh pemerintah yaitu stabilitas kekuasaan, dan pernyataan ini didukung oleh Olien (1983:458) yang kurang lebih menyebutkan, “media massa mempunyai hubungan yang integral dengan sistem politik yang ada di berbagai lembaga maupun kelompok dalam suatu negara”.

Kekhawatiran munculnya ketidakstabilan merupakan salah satu pengabsahan terhadap semua tindakan ketat untuk mengendalikan media massa. Penguasa negara tidak mepedulikan apakah tindakan yang dilakukan membelenggu kebebasan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Sebab yang lebih penting dalam ideologi kekuasaan negara adalah kontinuitas jalannya pemerintahan dan bisnis yang dilakukan oleh sekelompok elite yang berkuasa secara ekonomis, politis maupun sosial.

Hasil penelitian lain yang mengkaji hubungan kekuasaan negara dan media massa dikemukakan Katz dan Wendel (1978:237), “pada proses pembaharuan, kekuasaan dalam negara bertindak sebagai perencana kebijakan komunikasi sebagai sistem penyampaian program yang menguntungkan bagi penguasa”. Pengendalian terhadap informasi dengan menjadikan satu pola yang seragam dalam penyebaran informasi akan menyulitkan masyarakat untuk mencari informasi alternatif yang dipercaya serta mengandung kebenaran.

Model penetapan menjadi satu pola dalam pengorganisasian atau tindakan seyogyanya dihindari, mengingat kepentingan masyarakat yang beragam. Dalam perspektif organisasi dan kelompok, Etzioni (1985:204) menyatakan, Kebutuhan masyarakat sangat beragam sehingga dalam masyarakat yang totaliter sekalipun, semua interaksi dalam organisasi atau kelompok tidak mungkin dipadukan dalam satu pola, karena setiap masyarakat mempunyai perbedaan sendiri. Menandai persoalan keterlibatan pemerintah dalam pengendalian informasi tersebut Gonzales (dalam Jahi, 1988: 56) menjelaskan, “aliran informasi di setiap negara yang sering dipersoalkan, dalam ideologi pembangunan, negara mempunyai kekuasaan yang begitu besar terhadap pengendalian informasi”.

Ketatnya kontrol terhadap media massa secara umum mempunyai persamaan alasan yaitu demi stabilitas dan kepentingan rakyat, seperti tampak dalam teori media pembangunan McQuail (1987:119) yang pada

garis besarnya, “media wajib melaksanakan tugas-tugas pembangunan yang ditetapkan kekuasaan negara”. Negara memiliki hak untuk campur tangan dalam membatasi pengoperasian media serta sarana penyensoran, subsidi dan pengendalian langsung dibenarkan oleh kekuasaan politik dalam negara berkembang.

Pengendalian lewat sensor selalu mempunyai penafsiran yang subjektif dari masyarakat atau penguasa politik. Diperparah lagi, konsep media pembangunan yang selalu digunakan negara dunia ketiga terdapat unsur yang sama dengan teori media otoriter”. McQuail (1987:112) yang antara lain menandakan bahwa, “kekuasaan negara sama sekali tidak memberikan kebebasan pada media massa, dilarang melakukan kecaman yang sifatnya merusak wewenang penguasa dan media”. Dalam artian selamanya media massa harus tunduk kepada penguasa dalam semua pemberitaan yang tidak hanya menyangkut politik.

Sejalan dengan pemikiran itu adalah pendapat McQuail (1991:109) bahwa, “penyebaran informasi melalui media massa adalah dominasi kekuasaan politik sehingga jauh dari hak atau kebebasan masyarakat untuk memperoleh informasi yang realistis, akurat dan dari sumber yang kredibilitasnya diakui”. Ketidakleluasaan menerima informasi karena kekhawatiran penguasa setidak-tidaknya disinggung oleh Chafee (1988: 17) yang menyatakan, Peran media massa dalam suatu negara antara lain mensosialisasikan politik kepada khlayak, tetapi efek politik yang sering dianggap memihak bagi satu kelompok yang memegang peranan penting di dalam kehidupan politik dapat dianggap berbahaya bagi media, khlayak maupun negara.

Pembahasan terhadap hubungan antara media massa, khlayak dan kekuasaan dikemukakan oleh Harsono Suwardi (1993:17); dengan menjelaskan, “dilihat dari fungsinya media massa mampu menggambarkan realitas politik, namun harus diingat pula bahwa kehidupan pers di suatu negara akan mengikuti sistem yang hidup dalam negara yang bersangkutan”.

Padahal sebenarnya media juga mempunyai ideologi seperti pendapat Dreier (1983:439), “media massa memainkan dua peran penting dalam masyarakat, pertama orientasi keuntungan yang dikehendaki oleh perusahaan, yang kedua adalah ideologi institusi seperti yang tampak dalam agenda pemberitaan politik, ekonomi dan sosial”. Tetapi bagaimanapun juga peran dan ideologi media massa, sebelumnya McQuail (1987:64) telah mengasumsikan bahwa, “sistem pers adalah sub sistem dari sistem politik

yang ada; dengan demikian ada keterkaitan antara kehidupan pers dan model kekuasaan yang ada dalam suatu negara”.

Jika merujuk pada problematika diatas maka kebebasan untuk mendapatkan informasi yang objektif dan tidak manipulatif dari sumber pesan di negara berkembang tidak mudah. Padahal kebebasan adalah penting dalam masyarakat yang sejahtera dan demokratis, seperti pendapat Mac Bride (1980:46), “kebebasan adalah bagian dari upaya pencapaian kesejahteraan dan kebebasan merupakan syarat untuk mencapai demokrasi yang paling berharga”. Kesejahteraan biasanya diperoleh melalui perjuangan yang sulit melawan kekuatan ekonomi, politik dan penguasa, dan demokrasi adalah proses dimana individu sebagai partner aktif bukan hanya objek komunikasi.

5.4. Perubahan Sosial di Pedesaan

Desa atau *community village* dalam istilah Smith dan Zopf (1970:34) merupakan “ konsentrasi penduduk di suatu tempat yang mempunyai berbagai kemudahan yang memungkinkan kehidupan suatu masyarakat dapat berlangsung”. Sementara itu Bintarto (1990:12) menyebutkan, bahwa desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya, hasil perpaduan itu merupakan suatu wujud kekompakan dinamika bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, kultural yang saling berintegrasi. Nilai desa ditentukan oleh potensi yang tersimpan didalamnya, antara lain potensi ekonomi, potensi sosial, potensi demografis, potensi kultural dan sebagainya.

Atas dasar pandangan ini perlu dikemukakan juga pendapat dari Finch (1957:19) yang menjelaskan bahwa, “desa adalah tempat tinggal yang utama dari para penduduk dan bukan sebagai pusat perdagangan serta pada umumnya mengutamakan pertanian sebagai sumber kehidupan”. Lebih singkat lagi di sebutkan oleh Ogburn dan Mayer (1953:12), “desa merupakan kumpulan sejumlah organisasi dari kehidupan sosial yang wilayahnya terbatas”.

Sejalan dengan dua pendapat tersebut serta lebih dititik beratkan pada aspek kultural, Boeke (dalam Sajogya dan Sajogya, 1983:31) menyatakan, “desa itu bukan untuk bekerja tetapi tempat ketenteraman dan ketenteraman pada hakekatnya hidup yang sebenarnya bagi orang Timur”. Walaupun pendapat ini masih dapat diperdebatkan lebih lanjut tetapi setidaknya memberikan gambaran bahwa lingkungan pedesaan identik dengan kehidupan yang harmonis.

Desa sering dihubungkan dengan kehidupan sosial masyarakat dalam suatu wilayah yang terbatas, dengan pola interaksi spesifik, maka berbagai pengkajian tentang pedesaan banyak bersentuhan pada istilah komunitas. Menurut Mac Iver dan Page (1967:9), "komunitas adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial tertentu; dasar-dasar daripada masyarakat setempat adalah lokalitas dan perasaan masyarakat setempat". Dalam komunitas melekat *community sentiment* adalah perasaan saling memerlukan, dan tanah yang mereka tinggali memberikan kehidupan kepada mereka semua diantara anggota-anggotanya. Unsur *community sentiment* adalah: seperasaan, sepenanggungan dan saling memerlukan.

Penelaahan tentang pedesaan menyangkut pula pembahasan terhadap masyarakat desa dengan lingkungan sosial budaya dan segala persoalan yang dihadapinya. Menurut Roucek (1987:339), "masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang sedikit banyak mempunyai kesatuan yang tetap dan tersusun dalam aktivitas kolektif serta mereka merasakan bersatu". Sementara itu alasan terbentuknya masyarakat dalam pandangan Kartohadikoesoemo, (1965:5) adalah: "(1). untuk hidup yaitu mencari makan, pakaian dan perumahan; (2). untuk mempertahankan hidupnya terhadap ancaman dari luar; dan (3). untuk mencapai kemajaun dalam hidupnya".

Pembahasan tentang masyarakat dengan menitik beratkan pada interaksi dalam suatu kolektivitas, Polak (1987:13) menyatakan, "masyarakat sebagai wadah antar hubungan yang terdiri dari banyak sekali kolektivitas serta kelompok dan tiap kelompok terdiri atas kelompok kecil dan kelompok besar". Kelompok kecil atau "*small group*" adalah kelompok yang terdiri dari paling sedikit dua orang, dimana orang-orang saling berhubungan untuk memenuhi tujuan tertentu dan menganggap hubungan itu sendiri penting baginya". (Cragan dan Wright, 1980 ; 213),

Lebih spesifik dan terkait dengan penelitian ini Soekanto (1985:336) menyebutkan, "masyarakat desa merupakan suatu bentuk persekutuan abadi antara manusia dan institusinya dalam suatu wilayah setempat dimana mereka tinggal di rumah-rumah pertanian yang tersebar dalam pusat kegiatan bersama". Masyarakat pedesaan (*rural community*) pada umumnya hidup dari pertanian, mempunyai hubungan yang lebih erat dan mendalam. Relasi mereka dengan warga di luar batas sistemnya kurang begitu erat dan siklus hidup mereka mengandalkan kelompok dalam sistem kekeluargaan.

Kenyataan yang masih menyangkut masyarakat desa dan petani; dalam pendekatan paternalistik, Uphoff (1974:4) menyebutkan, “penduduk desa bersikap pasif dan fatalistik, tidak tertarik untuk memprakasai dan melakukan usaha-usaha dalam kondisi hidup mereka”. Oleh karena itu masyarakat desa tidak dapat mengembangkan organisasi desa guna memperbaiki kondisi hidup mereka.

Saling menunjang dengan pendapat Uphoff adalah apa yang digambarkan oleh Francis dan Henderson (1992:11), “permasalahan yang mempengaruhi masyarakat desa adalah kemiskinan dan ketidakmampuan, pengangguran, perumahan, kesehatan, dan ketidaklayakan sosial”. Disamping itu ada pendapat lain yang menekankan pada hubungan antara masyarakat desa dengan pemerintah seperti ditandaskan oleh Redfield (1956:47), “karakteristik petani pedesaan yang menonjol adalah, tidak percaya dengan orang luar kelompoknya, keterbatasan dalam pemilihan barang untuk proses produksi, mempunyai sikap permusuhan dan ketergantungan terhadap pemerintah”.

Sikap memusuhi muncul karena dalam upaya modernisasi pertanian dan industrialisasi masyarakat desa sering dirugikan pemerintah sedangkan ketergantungan muncul lebih disebabkan oleh kekuatan pemerintah dalam mengatur proses produksi, pemilihan tanah dan segala bentuk penguasaan terhadap lembaga-lembaga pedesaan.

Wanasinghe mendukung pernyataan itu dengan menyebutkan, “di negara berkembang strategi pembangunan dipercayakan kepada birokrasi untuk menangani melaksanakan proyek pembangunan dan pengorganisasian petani di pedesaan”. (Wanasinghe, 1979:448). Pada prakteknya, sering terjadi masyarakat desa terbelenggu dalam berbagai aturan tentang pembangunan yang tidak dimengerti. Pemahaman tentang pembangunan hanya untuk orang di luar komunitasnya yang masih tradisional.

5.5. Industrialisasi dan Pembangunan Pedesaan

Ketika lahan pertanian yang subur digusur untuk pabrik atau simbol modernisasi lain seperti perumahan, lapangan olah raga, tempat rekreasi, peternakan, perkebunan yang dikelola secara modern bahkan kuburan, pada umumnya pemilik modal atau pemerintah menjanjikan pada masyarakat desa untuk bekerja di pabrik atau proyek-proyek tersebut. Tetapi janji itu tidak terwujud sebab industri atau organisasi modern hanya membutuhkan sedikit untuk tenaga kasar.

Disisi lain tenaga terampil sangat langka di pedesaan, padahal semula sebagai lahan subur mampu menampung banyak tenaga kerja. Semestinya sudah sedemikian banyak ketentuan yang melarang penggusuran tanah subur untuk kepentingan industri. Bahkan dalam tulisan tentang kehidupan petani pada masa kolonial di Indonesia, Pelzer (1985:96) menegaskan, “yang menjadi masalah adalah mengizinkan para pengusaha onderneming mendapatkan cukup tanah untuk operasi perkebunan mereka”. Tentunya masalah hanya ada pada pemegang kekuasaan yang memiliki wewenang untuk mengatur tanah negara, dengan demikian bukan kesalahan petani, tetapi penyimpangan fungsi tanah yang secara turun-temurun sudah melekat pada komunitas pedesaan.

Mengunggulkan industri dengan harapan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya adalah harapan yang masih sulit untuk dicapai. Kondisi yang tidak berpihak pada masyarakat desa ditepis pula oleh Mountjoy (1982:135), dengan mengungkapkan, “dalam jangka panjang, sukses atau gagal dalam industrialisasi tergantung kapasitas dan adaptasi dari orang sekitarnya untuk mengadopsi teknologi baru dan jalan hidup baru”. Adaptasi terhadap nilai baru membutuhkan waktu panjang, terlebih lagi penggunaan teknologi baru adalah suatu kemustahilan bagi masyarakat desa yang tradisional. Pengadopsian justru terjadi sebatas pada simbol fisik modernisasi yang lebih mudah dilakukan tanpa memerlukan proses pembelajaran yang panjang.

Industrialisasi memang menjadi pilihan banyak negara berkembang dalam menjalankan pembangunan ekonomi walaupun cara ini tidak mudah mengingat problem struktural masyarakat pedesaan yang sangat kompleks. Menurut Ponsioen (1969:158), “industrialisasi sebagai profesionalisme dalam produksi dan mengubah kerja manual menjadi kerja mesin serta menggantinya dengan energi mekanik”. Dari pendapat tersebut pada intinya industrialisasi berorientasi pada produktivitas; tetapi masalah yang selalu muncul di negara berkembang adalah dampak negatif pada masyarakat khususnya di pedesaan.

Lebih jauh Todaro (1981:97) menyatakan, “masyarakat desa khususnya petani adalah komunitas yang tidak mampu bersaing dengan perkembangan teknologi dan industri yang selalu dipakai sebagai simbol pembangunan ekonomi multi dimensial di negara berkembang”. Pernyataan tersebut pada prinsipnya sejalan dengan pemikiran Milikan dan Blakmer (1961:17), yaitu “sebagian besar rakyat di negara terbelakang terdiri dari petani miskin yang hidup di pedesaan, masih berpikir dan bekerja dengan cara amat sederhana yang masih mencirikan masyarakat tradisional”.

Jika kita cermati tentu saja pendapat ini berbeda dengan maksud pembangunan yang ideal yaitu, cara berpikir yang dianggap kurang menguntungkan menuju ke cara berfikir yang lebih menguntungkan. Pembangunan juga memaksa dan membentuk dalam hubungan kemanusiaan dan nilai-nilai sosial". (Phillip Ruopp, 1953:13).

Dengan substansi yang sejalan tetapi lebih ditekankan pada aspek ekonomi Weyner (1997:87).menyebutkan, "tujuan pembangunan ekonomi itu sendiri adalah memungkinkan setiap orang untuk mencapai taraf hidup yang layak, ide pembangunan mengharuskan adanya perubahan watak manusia untuk mencapai tujuan". Pembangunan mestinya secara signifikan mampu memberikan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat, bukan sebaliknya justru, "masyarakat desa setempat sangat sedikit terserap dalam perusahaan yang beroperasi di desa". (Tjokrowinoto, 1985: 82).

Penelaahan pembangunan yang dihubungkan dengan partisipasi masyarakat desa, dikemukakan oleh Batten (1979:1) bahwa, "pembangunan masyarakat desa adalah suatu proses dimana masyarakat desa pertamanya mendiskusikan dan menentukan keinginannya, merencanakan dan mengerjakan bersama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut". Jika pembangunan dijalankan dengan konsep Batten, maka selayaknya masyarakat desa diajak ikut berpartisipasi ikut menentukan berbagai kebijakan pembangunan di wilayahnya.

Secara spesifik mengarah ke pembangunan pedesaan, Manfred Leopolt (1991:34) menyatakan tujuan pembangunan desa terpadu adalah: (1) Peningkatan produktivitas pertanian dengan penekanan khusus pada petani subsistem (buruh tani) tanpa melupakan kelestarian lingkungan, (2) Perbaikan distribusi pendapatan dan aspek non material termasuk *social security* (3) Perbaikan pola konsumsi terutama perbaikan gizi (4) Mengusahakan kemajuan dalam integrasi sosial.

Berbagai macam pendapat ini, mengingatkan bahwa pembangunan yang ideal adalah yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara proporsional bukan semata-mata harus berorientasi ke industrialisasi yang belum tentu memberikan tetesan kesejahteraan pada masyarakat sekitarnya. Menurut Thompson (1953:23), "industri bukan obat mujarab bagi keterbelakangan ekonomi dan kesejahteraan tetapi salah satu bentuk dari pembangunan dan kemajuan yang lebih banyak dilakukan oleh negara daripada sektor-sektor lain dalam ekonomi".

Mensiasati problem pembangunan di negara berkembang mestinya bukan semata- mata mengadopsi model industrialisasi di negara maju tetapi

harus ada penyesuaian sebagaimana pengalaman Jepang yang dituliskan oleh Vogel (1979: 47), “model pembangunan terdahulu yang didasarkan pada peniruan total tahap demi tahap model industrialisasi Barat tidak dapat dijadikan suatu proses pembangunan yang akurat”. Keberhasilan seperti yang dicapai Korea Selatan dan Singapura dikembangkan atas dasar pengadopsian dan penyempurnaan teknologi dan institusi barat secara selektif dalam kerangka asli setempat.

Penyesuaian dengan kondisi setempat mutlak diperlukan terlebih lagi di lingkungan masyarakat pedesaan. Dukungan terhadap pernyataan ini dilontarkan oleh Berger (1982:170) yang menyebutkan, “dalam sebuah masyarakat yang sedang berorientasi pada modernisasi, hak itu meliputi hak seseorang untuk memilih makna bagi dirinya sendiri yang meliputi hak untuk mematuhi tradisi”.

Sejalan dengan konsepsi pembangunan dan keterkaitannya pada industrialisasi, Rogers (1971:46) menyebutkan, “pembangunan dengan industrialisasi pada masyarakat agraris merupakan perubahan yang membawa pengaruh besar”. Berbagai lembaga kemasyarakatan akan terpengaruh olehnya seperti hubungan kerja, sistem pemilikan tanah, hubungan kekeluargaan, stratifikasi masyarakat dan lain sebagainya.

Menurut Hayami dan Kikuchi (1981:76), “teknologi baru yang menyebabkan perubahan akan menghancurkan institusi-institusi tradisional yang didasarkan pada prinsip gotong royong”. Modernisasi tidak akan memberikan tempat bagi institusi tradisional yang tidak efisien dan tidak kalkulatif dalam tindakannya. Munculnya industri di pedesaan pada sisi yang negatif adalah kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang terpuruk, karena industrialisasi diikuti tumbuhnya kultur komersialisasi tanah pertanian. Daniel Chirot (1981:134) mendukung pernyataan ini dengan menandakan, “komersialisasi tanah pertanian di negara peripheral berubah dari bentuk pemilikan tanah yang berdasarkan tempat tinggal menjadi sistem pemilikan pribadi yang didasarkan pada uang”. Komersialisasi tanah berimplikasi pada tekanan kepada masyarakat untuk menjual tanah. Calo tanah berkeliaran di desa-desa yang tidak jarang di dukung oleh aparat pemerintah. Sebagai komunitas tradisional petani memiliki keterbatasan, tetapi sebenarnya mempunyai keinginan untuk melawan setiap bentuk represi.

Dikemukakan oleh Saung (1991:168) di Burma yang sejalan dengan kondisi pedesaan di Indonesia, “hampir seluruh petani putus asa dengan keadaan mereka, sehingga kalau dilengkapi senjata mereka tidak akan

ragu untuk memperoleh hak-haknya". Pernyataan Saung tersebut memiliki banyak kesamaan dengan karakteristik petani lain di berbagai negara berkembang, termasuk di Indonesia, dimana dalam keadaan yang terdesak petani dapat melakukan pembangkangan atau perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang tidak disukai.

Menghubungkan komersialisasi tanah dengan kekuasaan, Neil G. Rolling (dalam Rogers, 1995:71) menyatakan, "keterlibatan kekuasaan negara secara langsung dalam dalam urusan petani dan munculnya komersialisasi tanah pertanian adalah sesuatu yang memberikan kontribusi terhadap perubahan sosial budaya di lingkungan petani yang tidak memberikan keuntungan secara material". Pendapat itu sejalan dengan sinyalemen Collier, et.al. (1996:106), "pada tahun 1960 an di desa-desa hampir mustahil seorang petani menjual sawah kepada orang luar desa , tetapi kini terdapat pasar lahan yang cukup aktif di desa-desa". Sebagian hal ini disebabkan peran pemimpin lama yang menghargai pemilikan tanah telah surut dan juga pemilik tanah di desa tidak mampu untuk melawan kekuatan pemilik modal yang mencari tanah di desa sebagai investasi.

Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa industrialisasi melunturkan ikatan historis dalam pemilikan tanah pertanian dan orientasi terhadap industri juga tidak banyak memberikan kontribusi positif pada kesejahteraan masyarakat desa yang sebagian besar petani. Dalam arti lain bahwa *trickle down effect* yang mengharapkan tetesan kesejahteraan samapai kebawah tidak tercapai.

5.6. Desa Kawasan Industri dan Mobilitas Penduduk

Dalam berbagai penelitian tentang industrialisasi di negara berkembang, faktor transportasi yang memadai dan potensi wilayah yang menguntungkan menjadi pilihan untuk mendirikan pabrik dalam suatu kawasan pedesaan. Tersedianya transportasi bukan saja melancarkan peningkatan produktivitas tetapi juga mendorong mobilitas masyarakat desa dari satu wilayah ke wilayah lain dari satu desa ke desa lainnya atau dari pedesaan ke wilayah perkotaan. Mobilitas membawa implikasi yang beragam dalam kehidupan masyarakat pedesaan.

Ketergantungan karena perkembangan suatu kawasan dikemukakan oleh Friedman (1966:59) intinya sebagai berikut, tahap industri pemula atau *incipient - industrialization* ditandai dengan adanya kota-kota utama yang mendominasi wilayah yang luas dan memanfaatkan daerah pinggiran, sehingga perekonomian di daerah pinggiran akan banyak dipengaruhi oleh kota atau terikat pada kota".

Sebenarnya perpindahan dan mobilitas penduduk bukan hanya disebabkan faktor perkotaan dengan industrialisasinya. Dikatakan oleh Mountjoy (1982:273), "motif migrasi antara lain hasrat untuk kehidupan ekonomi yang lebih baik, oportunistik dan ambisi politik". Sementara itu Stark (1991:37) menyatakan, "keputusan untuk melakukan migrasi tidak semata-mata keputusan individu saja tetapi terkait dengan lingkungan sekitarnya terutama lingkungan keluarga, juga tidak semata-mata ditentukan oleh keuntungan maksimal tetapi juga kerugian minimal dalam pasar". Alasan melakukan migrasi dirangkum oleh Friedman, John dan Robert Wulff (1979:78) yang menyebutkan, "Migran dengan energi potensial adalah mereka yang pindah tempat untuk bekerja di tempat baru karena adanya pengaruh dari luar". Sedangkan migran dengan energi kinetik adalah mereka yang pindah tempat untuk bekerja di tempat baru atas kesadaran dan kemauan sendiri tanpa pengaruh pihak lain.

Dalam penelaahan lain, migrasi dianggap sebagai suatu hal yang alami dikemukakan oleh Kunz (1973: 126), "keputusan dan motivasi yang diambil oleh individu dalam migrasi sangat berlainan antara alasan ekonomi dengan alasan politik". Sedangkan Broeck (1996:74) menjelaskan, bahwa "mobilitas penduduk sebagai proses mempertahankan hidup". Dengan demikian migrasi merupakan upaya untuk bertahan dalam kehidupan masyarakat secara sosial maupun ekonomis.



MENGEKSPLORASI KEBEBASAN KOMUNIKASI: PROSES PENELITIAN

1. Metode yang Digunakan

Dalam koridor kebangkaman adalah pilihan yang aman, dan dalam belantara peraturan yang membelenggu kebebasan menyuarakan kekritisan terhadap kekuasaan negara beserta entitas sub-ordinat pendukungnya, maka tidak mudah untuk memperoleh informasi yang mengalir secara transparan. Masyarakat teramat mudah untuk menutup diri untuk mengungkapkan apa yang telah dialami, setidaknya-tidaknya selama dua dasawarsa sebelum reformasi kenegaraan tahun 1998. Keterbukaan mengeksplorasi informasi, adalah barang mahal dan teramat berisiko dalam bingkai pemerintahan yang menafsirkan stabilitas politik dan demokratisasi secara integralistik, demi pelembagaan hegemoni kekuatan politik penguasa.

Karena itu, menggunakan metode yang dapat mendukung kelancaran penelitian dan substansi topik yang diteliti, merupakan pilihan yang tidak mudah. Mengamati objek maupun subjek penelitian dalam perspektif akademis, tentu saja wajar jika ditemukan berbagai kendala teknis maupun akademis, namun kondisi itu, sesungguhnya bukan hambatan yang tidak bisa diatasi, apalagi sampai diposisikan sebagai kambing hitam yang mengganggu proses penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, bergantung pada pengamatan mendalam, terhadap perilaku manusia dan lingkungannya (Bogdan dan Taylor,1975:5, Bogdan dan Biklen,1990:2, Miles dan Huberman,1993:15, Moleong,1993:30, Brannen,1997:1). Orientasi kualitatif penelitian ini berupaya untuk “mengungkapkan realitas sosial

selengkap mungkin" (Vredendregt, 1980:4), terhadap kredibilitas pemuka pendapat dan peranannya dalam masyarakat, pada situasi yang berbeda. Diawali dari kondisi desa yang masih tradisioanal sebelum muncul industrialisasi, ketika industri berkembang, dan sampai terjadinya krisis ekonomi yang mempengaruhi kegiatan pabrik di desa-desa lokasi industri di salah satu wilayah.

Mengingat sedemikian banyak "informasi dalam penelitian kualitatif yang harus diperoleh dalam bentuknya yang holistik" (Muhadjir, 2000:18), peneliti melibatkan diri sebagai instrumen penelitian di lapangan, mengamati secara langsung interaksi masyarakat di pedesaan. Titik berat pengamatan interaksi adalah hubungan dan komunikasi yang terjadi diantara sesama masyarakat desa, komunikasi antara pemuka pendapat dengan masyarakat desa. Pengamatan juga memfokuskan pada interaksi dan komunikasi yang berlangsung antara masyarakat desa dengan sumber informasi lain di luar pemuka pendapat pedesaan, aktivitas pabrik dengan segala unsur purnunjangnya, kegiatan pemerintah dalam menyikapi masyarakatnya maupun kelompok lain yang dominan di sekitar desa.

Usaha ini adalah sejalan dengan yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor (1975:12) bahwa "metode penelitian kualitatif ditekankan pada paradigma naturalistik dimana manusia dijadikan sebagai instrumen". Pilihan untuk menggunakan metode kualitatif, karena proses penelitiannya dipandang mampu mengatasi persoalan yang muncul dalam pengumpulan informasi, termasuk bagaimana mengintrodusir informasi yang mengandung kepekaan tertentu sebagaimana dalam topik penelitian.

Informasi terhadap masalah yang sensitif, dalam kondisi tertentu sulit diperoleh dari sumber primer maupun sekunder. Diingatkan oleh Silverman (1993:6), "pengabaian terhadap sensitivitas historis, kultural, politis dan kontekstual dalam topik penelitian sosial, akan mengurangi pemahaman natural dalam penelitian". Sebagaimana dalam penelitian pendahuluan, ternyata tidak mudah memperoleh informasi yang menyangkut masalah sensitif di desa seperti penilaian terhadap pemimpin, penilaian terhadap kebijakan, penilaian terhadap perilaku aparat negara, individu di desa dalam kelas sosial, ekonomi dan politik yang menonjol. Padahal di satu pihak penelitian ini berupaya untuk memperoleh informasi selengkap mungkin terhadap kehidupan di pedesaan yang mengalami perubahan.

Penggunaan metode kualitatif, diharapkan mampu menyelidiki lebih mendalam terhadap fokus yang diamati dengan seksama, sebab peneliti melibatkan diri secara langsung dalam kehidupan subjek sehingga dapat

melihat dan mengamati kehidupan mereka sehari-hari; mendengar mereka berbicara tentang dirinya dan pengalaman mereka sendiri. Penelitian kualitatif ini bersifat studi kasus, yang tidak bermaksud menggeneralisasikan terhadap objek penelitian, juga berpedoman bahwa setiap subjek di dalam lingkungan kejadian (*setting*) dipandang mempunyai kedudukan yang sama dengan subjek yang lainnya tanpa pengecualian terhadap informasi yang diberikan bersifat negatif ataupun positif.

2. Fokus Penelitian

Mencakup isu utama yang diteliti atau sebagai pembatasan masalah penelitian. Penelitian difokuskan pada kredibilitas sebagai tingkat kepercayaan terhadap sumber komunikasi atau saluran komunikasi yang dapat dipercaya dan kompeten oleh penerimanya. Kredibilitas bersifat subjektif, tergantung dari kepentingan masyarakat yang menerimanya dan dapat bergeser ke arah yang lebih tinggi ataupun lebih rendah tergantung situasi pada saat terjadinya komunikasi ataupun kepentingan pihak yang terlibat dalam komunikasi.

Secara umum ukuran untuk menilai dipercaya atau tidak dipercayanya suatu sumber pesan adalah: (1).Kecakapan dan kompetensinya mengenai persoalan yang bersangkutan dengan masalah sosial di pedesaan; (2). Sampai seberapa jauh sumber itu dapat dipercayai untuk mengatakan kebenaran dalam menghadapi masalah-masalah sosial di pedesaan; (3). Dinamikanya sebagai sumber pesan, semangat dan sikap ketulusannya yang nampak pada saat informasi digunakan bersama dalam menghadapi masalah sosial di pedesaan

Kredibilitas terikat oleh peran, operasionalisasi konsep sebagai pembatas dalam peran adalah, perilaku (*behavior*) yang diharapkan (*expected*) oleh masyarakat atau pengikut dari seorang yang mempunyai kedudukan (*status*) tertentu. Peran pemuka pendapat di pedesaan merupakan kewajiban, tugas dan perilaku yang diharapkan oleh masyarakat desa dalam menangani masalah sosial yang terjadi di desa. Jika peran tidak dapat dilakukan sesuai dengan statusnya maka akan muncul desakan sosial yang berupa sanksi sosial dan dikenakan jika individu menyimpang dari peranannya.

Fokus terhadap pemuka pendapat dititikberatkan sosoknya sebagai elite yang mempunyai kemampuan mempengaruhi orang lain secara teratur pada masalah sosial di pedesaan. Pemuka pendapat biasanya terdiri dari tokoh masyarakat desa setempat. Komunikasi yang interaktif antara

pemuka pendapat dan khalayaknya mempunyai peranan merubah atau mencegah terjadinya perubahan dalam struktur sosial di desa-desa lokasi industri

Perubahan pada konteks ini sebagai perubahan sosial adalah proses dimana perubahan terjadi dalam struktur dan fungsi dari suatu sistem sosial. Terdapat dua kategori perubahan yaitu *immanent change* yaitu perubahan yang diciptakan oleh kelompok masyarakat itu sendiri, sehingga dapat diterima dengan mudah; dan *contact change* yang terjadi karena diperkenalkan oleh sumber yang berasal dari luar kelompoknya. Masyarakat menghadapi *contact change* dengan menyeleksi secara ketat (*selective contact change*)

Mengingat pemuka pendapat tidak bisa lepas dari terpaan media sebagai salah satu sumber informasi, maka fokus akan diarahkan bahwa, media massa adalah, saluran penyebaran pesan yang dapat menjangkau khalayak dalam jumlah besar dan merupakan salah satu agen perubahan sosial (*Agent of Social Change*), yang membantu mempercepat proses peralihan masyarakat tradisional menjadi masyarakat yang modern melalui informasi dan pesan-pesan yang disebarakan kepada khalayak melalui komunikasi dua tahap.

Sedangkan kawasan lokasi industri yang nota bene pedesaan, merupakan suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang memungkinkan kehidupan sosial dapat berlangsung. Nilai desa ditentukan oleh potensi yang tersimpan didalamnya, antara lain potensi ekonomi, potensi sosial, potensi demografi dan potensi kultural yang bersumber pada lingkungan serta kesatuan masyarakat setempat.

3. Informan Penelitian: Memilih dengan Kehati-hatian

3.1. Menetapkan Informan secara purposive

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah orang yang mengetahui situasi dan kondisi latar penelitian khususnya pada desa-desa lokasi industri. Penentuan informan dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan kemampuan memberikan informasi yang menyangkut pemuka pendapat sebagai sumber informasi dan peranannya dalam masyarakat. Cara menetapkan informan pertama, adalah melalui pengamatan terhadap interaksi dan komunikasi masyarakat dengan memfokuskan pada karakteristik seseorang yang menonjol dalam pengelompokan sosial di lokasi penelitian. Setelah diperoleh satu informan pertama, selanjutnya dengan teknik *snowball* dapat diperoleh informan lainnya yang dapat memberikan berbagai keterangan yang diperlukan.

Pada prinsipnya informan dipilih dari semua orang yang berdomisili di desa-desa lokasi industri dalam satu kecamatan, suatu kabupaten, dan orang yang masih mengidentifikasi diri sebagai penduduk asli, walaupun mereka tinggal di luar wilayah tersebut tetapi masih memiliki ikatan sosial, ekonomi, politik dan kepedulian terhadap desanya. Penetapan informan secara spesifik juga memperhatikan faktor usia, lama tinggal dan orang yang mengenal serta dikenal di wilayah penelitian.

Meminta informan menetapkan siapa yang layak menjadi pemuka pendapat, mengacu pada *Sociometric Method*, yang menanyakan kepada siapa, informan mencari informasi atau nasehat, dan *Informant's Rating* yang menanyakan pertanyaan tertentu kepada informan mengenai siapa pemimpin masyarakat yang benar-benar mengenal masyarakatnya.

Kedua metode tersebut dalam penerapannya di lokasi penelitian lebih menitik beratkan kepada pemuka pendapat dalam kapasitas sebagai pemimpin informal, yang tidak terkait dalam struktur organisasi pemerintahan desa maupun struktur pemerintahan kecamatan dan kabupaten. Dalam menetapkan pemuka pendapat tersebut dilakukan pula *reputational approach*, yang mengadakan wawancara mendalam dengan informan untuk menetapkan tokoh yang menjadi panutan masyarakat.

Pada prakteknya, selain metode tersebut, penelitian ini mengidentifikasi kelompok pemuka pendapat berlandaskan pola observasi dan penjelasan informan, dalam *positional approach*, yang mencari individu-individu berposisi penting dalam lembaga sosial pedesaan, dan *decisional approach*, yang melihat penampilan nyata pemuka pendapat dalam pengambilan keputusan di pedesaan.

Jika dalam teknik bola salju dalam menetapkan informan ditemukan individu yang masuk dalam kategori sebagai pemuka pendapat ataupun yang bersangkutan mengidentifikasikan dirinya sebagai pemuka pendapat seperti dalam model *self designating method*, maka informasi dari mereka diberlakukan sebagai penunjang data sebagaimana yang diberlakukan pula pada pemimpin formal dan sumber informasi lainnya

3.2. Gambaran Umum Informan

Penetapan informan secara *purposive* menghasilkan sejumlah informan yang memenuhi syarat sebagai sumber informasi. Mereka umumnya mengetahui perkembangan daerah penelitian dari desa pertanian menjadi kawasan atau zona industri.

Sebagaimana dikemukakan dalam penetapan informan, mereka di pilih

karena aspek pengetahuan terhadap masalah yang diteliti. Informan yang berasal dari pemerintahan desa maupun kecamatan, lebih diorientasikan untuk mencocokkan dengan dokumen yang ada dalam catatan, buklet, laporan, monografi dan catatan resmi lainnya versi pemerintah.

Tokoh formal dalam pemerintahan sebagai rujukan untuk mengklarifikasikan berbagai dokumen, karena mereka pada situasi tertentu dalam posisi sebagai subjek penelitian. Mengingat pada masa sebelum pergantian pemerintahan dari Presiden Suharto ke Presiden Habibie, pemuka masyarakat banyak di dominasi oleh tokoh formal yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat desa.

Tokoh formal dalam konteks ini antara lain, pejabat pemerintahan desa maupun kecamatan, pegawai pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat di pedesaan, misalnya petugas penyuluh pertanian, guru dan pegawai pemerintah lain yang memiliki fungsi langsung berhubungan dengan masyarakat desa dan lingkungannya.

Penelitian ini, memanfaatkan informan dalam berbagai kelompok penguasaan informasi. Terhadap informan kunci, diusahakan menciptakan hubungan yang erat dengan peneliti (*rapport*). Informan yang ditetapkan secara purposive terdapat di desa lokasi pabrik

Karakteristik umum informan dapat dikelompokkan dalam ciri spesifik, khususnya pengetahuan terhadap peristiwa yang terjadi sejak kawasan mereka sebagai desa pertanian yang produktif, berkembangnya pabrik-pabrik, sampai pada krisis multi dimensi yang melanda desa-desa lokasi industri.

Pengelompokan terhadap kecenderungan penguasaan informasi oleh informan, tidak bersifat mutlak. Terdapat informan yang menguasai beberapa jenis informasi atau bahkan semua informasi yang berhubungan dengan topik penelitian diketahui secara rinci, tetapi sifat informasi yang disampaikan kepada peneliti dapat dipisahkan dalam kecenderungan tertentu.

Kecenderungan penguasaan informasi oleh informan dapat dikelompokkan seperti dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.1: Informan Berdasarkan Kecenderungan Penguasaan Informasi

No	Kelompok Informan	Karakteristik Informasi yang dikuasai
1	Kelompok I	Umum tidak mendalam
2	Kelompok II	Dampak industri terhadap hubungan sosial, ekonomi dan politik
3	Kelompok III	Sejarah pedesaan sejak sebagai kawasan pertanian sampai lokasi industri
4	Kelompok IV	Situasi Reformasi dan implikasinya
5	Kelompok V	Hubungan kekuasaan, pengusaha dan industrialisasi pedesaan.

Sumber: Catatan Lapangan

Dari jenis pekerjaan, informan dalam penelitian ini umumnya bekerja pada sektor informal yang kegiatannya tidak diorganisasikan melalui paraturan organisasi atau kelembagaan. Karakter ini juga mencerminkan bahwa masyarakat desa lokasi penelitian, khususnya penduduk asli, umumnya bekerja pada sektor informal. Sedangkan pegawai pabrik yang jumlahnya sangat besar kebanyakan pendatang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, atau pekerja migran ulang-alik (*commuter*) yang tinggal di luar kota.

3.3. Teknik Pengumpulan Data dan Metode Analisis

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan secara seksama dengan melakukan pemilihan atau penentuan data dan informasi yang dipandang representatif dalam kerangka holistik. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara tidak berstruktur, observasi partisipasi, studi kepustakaan dan *focus group discussion*.

Dalam setiap pelaksanaan wawancara berupaya merekam semua penjelasan, khususnya aspek komunikasi yang berhubungan dengan karakteristik pemuka pendapat, kredibilitas dan peranannya dalam situasi desa pertanian tradisional, munculnya pabrik di desa dan situasi sekarang yang menitik beratkan informasi tentang lesunya industrialisasi. Terhadap informan yang diperkirakan dapat memberikan penjelasan lengkap tentang

masalah penelitian dilakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk mendapatkan informasi yang maksimal

Sedangkan untuk menggali data supaya lebih terfokus pada kredibilitas peran pemuka pendapat di pedesaan, digunakan pula teknik *Focus Discussion Group* yang berusaha mengumpulkan informasi melalui diskusi kelompok. (Irwanto, 1988:1) atau menurut Krueger (1988:47), “untuk mengeksplorasi informasi supaya lebih terfokus pada topik penelitian”. Pelaksanaan diskusi diikuti oleh sekelompok orang yang dianggap memiliki pemikiran yang luas dan dapat memberikan informasi bermanfaat berdasarkan kriteria tertentu yang akan berkembang di lapangan penelitian seperti tingkat pendidikan dan aktivitas sosial dalam lembaga pedesaan.

Mengingat metode ini sebenarnya kurang sejalan dengan observasi partisipasi, maka dalam pelaksanaannya peneliti akan memanfaatkan informan atau orang lain yang dipercaya untuk memandu diskusi. Pada forum tersebut peneliti hanya bertindak sebagai peserta diskusi sehingga fungsi observasi partisipasi tetap dapat terjaga, berlangsung dengan baik dan dapat memperoleh informasi bermutu dalam waktu yang relatif singkat.

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan sejak mulai berada di lapangan dengan mengatur secara sistematis transkrip, wawancara, catatan lapangan, dokumen dan bahan lain yang telah dihimpun untuk menambah pemahaman terhadap topik penelitian. Berdasarkan pendapat Bogdan dan Biklen (1990:189), analisis meliputi kegiatan mengerjakan data, menata, membagi menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintesa, mencari pola, menemukan apa yang penting dan apa yang akan dipelajari dan memutuskan apa yang akan dilaporkan.

Sebelum hasil lapangan dideskripsikan, data diperiksa kembali tentang derajat kepercayaan (*credibility*) terhadap temuan di lapangan, keteralihan (*transferability*) dari sumber informasi, kebergantungan (*dependability*) diantara sejumlah catatan lapangan dan kepastian (*confirmability*) terhadap data yang diperoleh adalah faktual. (Moleong, 1993:173). Apabila kesahihan dan keandalan data telah dicapai dan terkumpul, tahap berikutnya adalah mengatur data secermat mungkin sehingga dapat diadakan suatu analisa.

Model analisa data penelitian ini sejalan pendapat Miles dan Huberman (1992:15-16), melalui proses sebagai berikut: (1). Reduksi data sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. (2). Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penciptaan dan penggunaan penyajian data tidaklah terpisah dari analisis.,(3). Menarik kesimpulan/verifikasi merupakan kegiatan analisis yang ketiga, dari permulaan pengumpulan data seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi alur sebab akibat dan proposisi.

Secara ringkas analisa data akan dilakukan dengan mereduksi semua catatan lapangan yang diperoleh dan catatan yang telah direduksi selanjutnya disajikan dalam bentuk deskripsi penyajian data yang sesuai dengan keadaan di lapangan; tahap berikutnya adalah menarik kesimpulan. Dengan demikian analisa bersifat menyeluruh seperti dikemukakan oleh Faisal (1990:191) sebagai, "analisa *domain* yang sifatnya umum dan relatif menyeluruh mengenai pokok permasalahan yang diteliti". Pola analisis komprehensif ini akan "berlangsung terus-menerus sejak mulai memasuki dan melakukan pengamatan di lokasi atau lapangan penelitian" (Vredembregt,1980:57, Bogdan dan Taylor, 1975:139).

4. Gambaran Singkat Daerah Penelitian

4.1. Perkembangan Kawasan Desa Lokasi Industri

Lokasi penelitian adalah salah satu kecamatan di salah satu kabupaten di Jawa Barat. Sebagai objek penelitian, di kawasan ini industri atau pabrik muncul dengan pesat sejak dibangunnya jalan bebas hambatan. Kemudahan transportasi dan tersedianya fasilitas komunikasi yang memadai membuat kawasan ini menjadi pilihan pengusaha untuk mendirikan pabrik ataupun usaha lain yang berorientasi pada industrialisasi.

Pada perkembangan selanjutnya, industrialisasi menjadikan desa-desa mengalami perubahan yang berdampak pada kompleksitas kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat, termasuk perubahan peran pemuka pendapat. Kehadiran industri, juga telah mengubah masyarakat agraris menjadi masyarakat yang berorientasi pada industri. Atau dapat digambarkan satu kaki melangkah pada karakteristik industri namun kaki yang lainnya masih berpijak di sawah dengan kultur pertanian yang masih kental nuansa tradisionalnya.

Jumlah pabrik di wilayah Klari pada tahun 1998 sekitar 230 buah pabrik, tetapi setelah krisis ekonomi sampai tahun awal tahun 2002, jumlah industri besar dan sedang berkurang menjadi 165 buah pabrik yang masih beroperasi. Keadaan ini tidak berbeda dengan sinyalemen Chatib Basri (*Kompas*, 29 Januari 2003) yang menyatakan bahwa "indikasi kita mengalami

deindustrialisasi adalah data produksi yang mengalami penurunan dalam dua tahun ini sebagai akibat perusahaan asing merelokasi usahanya, sedangkan bagi pengusaha domestik kemungkinan menutup usahanya”.

Pembangunan pabrik dalam ketentuannya tidak menggunakan lahan produktif, tetapi bukan berarti aturan tersebut dipatuhi oleh semua pihak. Sebab pada kenyataannya bisa saja muncul pula pabrik di lahan produktif. Pabrik inilah yang sering menimbulkan konflik antara penduduk setempat dengan orang pabrik.

Masyarakat lokasi penelitian, mempunyai mata pencaharian yang bervariasi, namun secara historis pekerjaan utama adalah bertani. Terbukanya peluang di luar sektor pertanian juga menarik banyak tenaga kerja pertanian usia produktif, untuk bekerja di luar komunitas petani yang secara turun temurun digeluti

4.2. Tokoh Masyarakat.

Tokoh masyarakat desa, merupakan kelompok elite lokal yang memiliki posisi dan peran silih berganti. Sebagai elite lokal, mereka sangat potensial sebagai agen perubahan terutama untuk menjembatani antara kemauan penguasa dengan kepentingan masyarakat desa, mengingat mereka memiliki kelebihan-kelebihan yang menunjang posisinya.

Sejak tahun 1970 sampai tahun 1998, tokoh masyarakat di dominasi oleh pemimpin formal dalam struktur pemerintahan (pamong desa), pengurus lembaga sosial pedesaan seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Lembaga Musyawarah Desa Musyawarah Desa (LMD) dan lembaga desa lain dalam binaan pemerintah. Umumnya anggota lembaga pedesaan adalah pemuka masyarakat sebagai sub-ordinasi kekuasaan negara, seperti kelompok tani, guru atau pegawai negeri.

Setelah lembaga pedesaan mengalami perubahan sejalan dengan otonomi daerah, tokoh masyarakat yang memimpin lembaga desa, tidak lagi dalam kontrol pemerintahan desa tetapi berdasarkan pilihan masyarakat desa. Kendati demikian, kelompok elite formal pedesaan, masih tetap terpilih sebagai anggota berbagai lembaga desa yang ada sekarang seperti, Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Walaupun begitu, para elite formal, memiliki hak dan kewajiban yang sepadan dengan tokoh masyarakat lainnya. Pada masa lalu kesetaraan ini berlaku dalam batas aturan saja, tetapi faktanya tokoh formal anggota lembaga desa ini memiliki hak-hak istimewa dalam pengambilan keputusan.

Ketika era *floating mass* di desa berakhir, wilayah pedesaanpun dijadikan basis partai politik. Dari 48 partai politik yang ikut dalam Pemilihan Umum 1999, terdapat 21 partai yang memiliki pengurus sampai di tingkat desa. Tokoh partai di pedesaan ini ikut menyemarakkan persaingan diantara tokoh masyarakat lain yang sebelumnya sudah memiliki posisi yang kuat.

Di luar tokoh formal, tokoh politik dan tokoh dari berbagai institusi pedesaan, terdapat pemimpin informal (*informal leaders*) di pedesaan. Peran pemimpin informal, walaupun tidak melibatkan pada lembaga formal pedesaan, tetapi mereka adalah individu yang banyak di dengar pendapatnya dan diikuti petunjuknya oleh masyarakat. Tokoh masyarakat lain, adalah mereka yang memiliki garis keturunan terhormat dalam masyarakat, kaya, memiliki ilmu keagamaan yang tinggi dan orang pintar dalam konteks tradisional yang bersifat magis.

Sejalan dengan pertumbuhan kawasan industri, pemimpin dan tokoh masyarakat yang munculpun tidak terlepas dari kondisi desa. Misalnya ketika pembangunan pabrik yang sedemikian pesat, tokoh masyarakat yang menonjol adalah orang yang memiliki akses komunikasi kepada pemerintah dan pengusaha. Masyarakat menganggap mereka memiliki peran yang besar karena menguasai informasi lebih awal dalam bursa tenaga kerja di pabrik dan rencana pemerintah dalam pembangunan industri di berbagai kawasan pedesaan.

Ketika krisis ekonomi yang berdampak pada penutupan pabrik-pabrik di desa, dan terjadinya pergantian kekuasaan di tingkat nasional, maka muncul pula tokoh, terutama tokoh informal yang selalu membawa jargon reformasi, hak azasi manusia, lingkungan hidup dan sederetan istilah yang mengunggulkan kepentingan rakyat.

Mengingat sebagai kawasan yang kompleks, maka ada pula kelompok dalam penilaian yang "keras", seperti orang-orang yang menguasai pasar, tempat mangkal angkutan kota, stasiun, daerah sekitar pabrik, tempat-tempat lain yang selalu ramai, dan orang-orang yang bergerak dalam sisi gelap melengkapi situasi tersebut, adalah keberadaan kelompok yang bergerak dalam kegiatan yang tidak sejalan dengan norma desa maupun peraturan pemerintah.

Sejalan dengan dinamika desa yang beragam, terdapat orang kuat yang memiliki akses besar ke pabrik, sebagai penguasa limbah pabrik dan rombongan calo tanah. Dalam dinamika kebebasan, muncul pula anak-anak muda terpelajar yang tergabung dalam berbagai LSM dan bertindak kritis terhadap kebijakan pemerintah. Tokoh lain yang dikenal adalah aktivis

politik maupun Satgas (satuan tugas) berbagai partai politik yang ada di desa.

Dari uraian tentang tokoh masyarakat, pada intinya terdapat pemuka masyarakat yang berbasis pada keturunan elite desa, keagamaan, pamong desa, kekayaan material, aspek supernatural dan paduan antara faktor religius dan aspek supernatural. Sedangkan tokoh yang juga dipakai rujukan oleh sebagian khalayak adalah aktivis LSM, pemuda dan mahasiswa, tokoh kesenian, aktivis partai, calo pabrik; preman, jagoan desa dan tokoh dalam sisi gelap lainnya.

Sebagai wilayah yang mudah dijangkau, masyarakat desa lokasi industri dapat mengakses fasilitas komunikasi yang biasa dipakai, seperti telepon, radio, televisi, surat kabar dan media tradisional yang berfungsi sebagai penghibur maupun penyebaran pesan kepada masyarakat di pedesaan. Selain bentuk kesenian rakyat dan kelompok musik yang modern, media komunikasi tradisional di pedesaan dapat berbentuk, pertemuan atau perkumpulan yang digunakan untuk saling berdiskusi, bertukar pikiran dan ramah-tamah.

4

KOMPLEKSITAS KOMUNIKASI

1. Komunikasi Antar Pribadi Sebagai Kekuatan Interaksi

1.1. Proses Mencari Informasi dan Ketergantungan Kepada Elite

Masyarakat desa mencari informasi secara dinamis dalam berbagai kesempatan yang terjadi di lingkungannya. Informasi dapat diperoleh melalui komunikasi antarpribadi dengan sesama warga desa, warga luar desa dan berbagai kelompok di desa. Dalam komunikasi individual maupun kelompok, yang lebih diwarnai oleh komunikasi politik, masyarakat juga menggunakan referensi radio, televisi dan surat kabar.

Informasi dari sumber yang beragam digunakan untuk membandingkan dengan informasi dari pemuka pendapat yang dipercaya. Sebagian masyarakat mengandalkan informasi pemuka pendapat, hanya pada persoalan kehidupan sosial pedesaan. Sedangkan informasi di luar masalah sosial lebih mengandalkan sumber lain yang dipercaya. Dinamika mencari informasi dapat dilihat ketika masyarakat mendengar dan menyaksikan peristiwa yang menyangkut dirinya, kelompok atau komunitasnya. Hakekatnya, mereka mencari informasi dari sumber yang dikenal atau mudah diakses dan bersifat *Multi Step Flow* dengan berbagai variasi dalam penyebaran pesan dari sumber informasi kepada khalayak

Tahap awal, pencarian informasi sering dilakukan dalam komunikasi antar pribadi, yang merupakan proses pertukaran makna antar orang-orang yang saling berkomunikasi. Individu memiliki pemahaman dan makna

pribadi terhadap setiap hubungan dimana dia ada di dalamnya.

Dalam komunikasi antar pribadi, pembicaraan dilakukan bertatap muka langsung dengan sumber informasi. Kedekatan antara pihak yang berkomunikasi adalah tuntutan dalam komunikasi antar pribadi sebagaimana dikatakan oleh Judy C. Pearson (dalam Littlejohn, 1992: 262), "komunikasi antar pribadi mensyaratkan adanya kedekatan fisik antara pihak-pihak yang berkomunikasi dan saling tergantung satu sama lain". Dengan demikian efektivitas komunikasi ini tergantung pada kedekatan fisik maupun kesamaan psikologis untuk memulai pembicaraan

Proses pencarian informasi masyarakat desa, dilakukan dengan bertatap muka langsung mendatangi langsung ke rumah tetangga, atau siapa saja yang biasa diajak membicarakan berbagai persoalan yang belum begitu paham. Sebab mereka hanya mendengar sepintas dari orang lain, atau dari radio maupun dari televisi. Dengan bertemu langsung, mereka merasa enak karena dapat saling bertukar pikiran tentang segala sesuatu yang kami ingin pahami lebih mendalam.

Keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara itu, pada intinya menjelaskan bahwa bertatap muka langsung masih merupakan pilihan yang diandalkan oleh masyarakat desa ketika mencari informasi. Rogers dan Svenning (1969:237) mendukung pendapat tersebut, dengan mengatakan sebagai berikut: Walaupun media massa dan media lain yang berkembang dapat dipergunakan untuk berbagi informasi yang beraneka ragam, tetapi komunikasi antar pribadi jauh lebih diandalkan untuk membentuk pemahaman bersama di lingkungan masyarakat desa dan komunitas petani.

Sedangkan dengan substansi yang sama, yaitu keunggulan komunikasi antar pribadi di desa, Lerner (1983:111) menyatakan bawa, "informasi langsung dari sumber pesan yang dikenal baik, dalam hubungan antar pribadi lebih dipercaya kebenarannya oleh penerima pesan di pedesaan". Asumsi ini juga di dukung dan dibenarkan oleh Blake dan Horaldsen (1975:25), yang menyatakan: Komunikasi antarpribadi menunjukkan kedekatan hubungan diantara orang yang berinteraksi, setiap interaktan sebagai pengirim maupun penerima pesan berusaha untuk saling memahami makna yang dibentuk bersama dalam waktu yang singkat.

Komunikasi antar pribadi menunjukkan tingkat keakraban hubungan dan memiliki saluran yang tidak terbatas karena dapat saling melontarkan maupun menerima menerima umpan balik dalam waktu relatif singkat.

Dalam rangka mencari informasi yang dibutuhkan, masyarakat desa di Klari melakukan komunikasi antar pribadi, di berbagai tempat dan waktu

yang tidak terbatas. Substansi yang menonjol dalam interaksi tersebut adalah sekadar berbagi informasi sampai memecahkan masalah individual maupun kelompok Mereka saling bertukar berita yang diperoleh dalam interaksi sehari-hari maupun informasi yang di dapatkan dari radio, televisi dan surat kabar

Media massa yang mudah ditemukan di desa lokasi industri penyangga perkotaan, sejalan dengan perkembangan situasi dan teknologi komunikasi, media massa dapat memberikan pengetahuan yang dipakai sebagai acuan dalam pembicaraan antar individual. Eksistensi komunikasi antar pribadi yang dianggap sebagai hubungan yang penting, dalam membicarakan kehidupan sehari-hari di pedesaan yang tidak akan habis, karena setiap hari, ada saja masalah berkaitan dengan perilaku warga desa yang baik atau menyimpang di lingkungan desa. Mereka biasa membicarakan persoalan yang ringan maupun yang berat dengan orang terdekat atau orang yang kami percaya. Meski demikian, ketergantungan terhadap media elektronik, khususnya televisi juga tinggi, karena mereka menilai televisi sebagai hiburan yang murah.

Secara umum komunikasi antar pribadi yang dilakukan, adalah untuk saling berbagi informasi, atau secara teoritis sebagai pertukaran makna yang berlangsung terus menerus. Pertukaran informasi timbal balik diantara warga desa, dilakukan sampai membentuk satu pemahaman bersama.

Untuk mencapai pemahaman besama tidak mudah, sebagaimana ditandakan oleh Fisher (1987:110), ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, proses intra pribadi kita memiliki tiga tataran yang berbeda, yaitu: diri sendiri, orang lain dan pandangan orang lain terhadap diri saya. Untuk menyelaraskan tiga hal itu bukan pekerjaan yang mudah dilakukan.

Saling berbagi pemahaman ataupun pertukaran informasi, bukan berarti memiliki kesamaan pemahaman terhadap informasi. Sebab seseorang yang menguasai informasi bisa saja berupaya untuk memberikan pemahaman kepada setiap orang yang secara pribadi sesungguhnya memiliki perbedaan sikap terhadap berbagai persoalan yang dihadapi. Kebutuhan informasi dalam kehidupan sehari-hari, yang paling ringan, mereka akan mencari diantara mereka sendiri. Jika hasil pembicaraan antar pribadi tidak mampu memenuhi kebutuhan informasi, mereka akan mencari sumber pesan lain untuk mendiskusikan masalah yang belum diselesaikan. Jika mereka masih kurang puas, biasanya membawa pada forum yang lebih luas dalam pembicaraan kelompok, atau akan meminta penjelasan langsung dari pemuka pendapat yang dipercaya. Sebaliknya, jika dalam komunikasi antar

pribadi, salah satu pihak merasa puas, dia akan menginformasikan dan mendiskusikannya, dengan pihak lain tentang keberhasilan memecahkan masalah diantara dua orang saja. Pembicaraan semakin hilang jika topik yang didiskusikan diantara mereka sudah dianggap selesai.

Mencari informasi dari sumber pesan lain seperti tokoh-tokoh alternatif atau media teknologi komunikasi lain, tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan informasi. Oleh sebab itu, dorongan untuk mencari informasi yang berasal dari pemuka pendapat selalu muncul untuk mengatasi masalah individu maupun kelompok. Menilik hal tersebut, sewajarnya apabila masyarakat tetap memiliki ketergantungan informasi dari pemuka pendapat. Rogers dan Svenning menjelaskan (1969: 188), "pemuka pendapat memiliki posisi khusus, mereka dipakai sebagai rujukan dalam tindakan kolektif di pedesaan". Oleh sebab itu sangat wajar jika pemuka pendapat dipakai sebagai rujukan mencari informasi.

Dalam komunikasi individual, masyarakat biasa meminta nasehat dan bermacam informasi kepada pemuka pendapat yang dipercaya. Misalnya menyangkut, urusan penyelenggaraan upacara keagamaan, upacara tradisional ataupun untuk mencari penjelasan suatu peristiwa yang dialami maupun semata-mata hanya dilihat. Pilihan untuk membicarakan persoalan dengan pemuka pendapat didasarkan atas kapasitasnya sebagai tokoh masyarakat yang memahami masalah khalayaknya. Masyarakat desa umumnya mengandalkan tokoh yang mengetahui berbagai hal yang bersifat polimorfik. Tetapi semakin pudar, ketika muncul referensi yang mengunggulkan modernisasi dengan spesifikasi keahlian.

Secara umum, pemuka pendapat muncul karena faktor keturunan, lingkungan dan pelatihan. Dalam perkembangannya, pemuka pendapat memiliki orientasi yang beragam akibat kompleksitas organisasi sosial desa, modernisasi yang dibawa oleh kehidupan pabrik dan dampak pluralisme yang terus berkembang di desa dalam bidang sosial, ekonomi dan politik.

1.2. Karakteristik Orientasi dan Perilaku Pemuka Pendapat

Di kawasan pedesaan, sebenarnya, karakteristik individual pemuka pendapat tidak jauh berbeda dengan khalayaknya, tetapi mereka terpilih menempati posisi kunci dan melakukan fungsi penting dalam organisasi sosial. Asumsi tersebut sejalan dengan pendapat Rogers dan Svenning (1969:207), yaitu, karakteristik pemuka pendapat di desa modern memiliki tingkat pengetahuan sama dengan khalayaknya, tetapi umumnya mereka memiliki posisi dalam kelembagaan desa sehingga mempunyai pengaruh besar di lingkungan masyarakat desa sebagai khalayaknya.

Desa lokasi industri yang sarat dengan persoalan sosial, ekonomi dan politik, mempunyai berbagai macam pemuka pendapat yang memiliki sumber kewibawan atau asal usul keberadaannya. **Pertama**, pemuka pendapat yang dipercaya karena garis keturunan sebagai elite desa. Pemuka pendapat ini konsisten menjaga nilai tradisional secara konservatif maupun moderat, menguasai sejarah desa, sebagian memiliki keahlian supernatural. **Kedua**, Pemuka pendapat yang didasarkan pada faktor religius, mereka umumnya generasi tua yang berbasis pengetahuan agama secara otodidak melalui lembaga non formal. Sedangkan tokoh berbasis agama yang berusia muda belajar melalui pendidikan formal.

Pemuka pendapat yang berbasis agama, semula diakui hanya kredibel dalam masalah agama, tetapi semakin lama, mereka juga dipakai sebagai referensi untuk tindakan lain. Dengan demikian walaupun legitimasi pada awalnya berbasis agama, tetapi dalam perkembangannya mereka mapan dalam urusan lain. Usman (1991: 29), menerangkan, melalui proses interaksi sosial yang panjang dan sinambung, intelektualitas keagamaan, kewibawaan, dan kekayaan saling menunjang, membentuk satu kekuatan yang mampu mengukuhkan status elite berbasis agama menjadi kelas intelektual yang mandiri dan diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan di desa.

Kelompok pemuka pendapat **ketiga**, adalah mereka yang biasa menjadi mediator pabrik, jual beli tanah dan masalah faktual yang berhubungan dengan industri. Pemuka pendapat yang ketokohnya didukung oleh status dan peran formal dalam pemerintahan desa, seperti pamong desa dan pegawai pemerintah yang memiliki kekuasaan formal di desa, umumnya menguasai lembaga-lembaga desa kepanjangan tangan pemerintah.

Pemuka pendapat yang **keempat**, adalah mereka yang memiliki kekayaan dapat diandalkan di tingkat desa, menguasai perekonomian desa dan sering dilibatkan dalam berbagai lembaga pedesaan. Dengan demikian otoritas di tingkat desa secara otomatis mengikutinya. Sebagai orang kaya di desa, mereka menunaikan ibadah haji yang dapat menunjang otoritas sosial lainnya di masyarakat.

Sedangkan pemuka pendapat yang **kelima**, yaitu mereka yang ditempatkan sebagai sumber informasi, karena kekuatan supernatural. Kelompok ini tidak selalu berada dalam lembaga pedesaan. Karena kepopulerannya, mereka dapat memperoleh status ekonomi yang baik dan memperkuat posisi religiusnya dengan pergi haji.

Pemuka pendapat yang **keenam**, adalah pemuka pendapat yang

menggabungkan kekuasaan agama dalam konteks supernatural atau memadukan antara agama dan masalah tradisional, mereka cenderung menjadi rujukan atau sumber informasi yang disukai oleh masyarakat. Pemuka pendapat ini akan menjadi tumpuan dari warga desa untuk menanyakan apa saja yang dialami tanpa sekat sosial, ekonomi dan ideologis.

Dalam situasi yang terus berubah, seperti terjadinya krisis ekonomi, muncul pula tokoh-tokoh yang selalu membawa jargon politik untuk kepentingan rakyat. Mereka sebagai sumber informasi alternatif yang tidak konvensional, umumnya memahami keadaan masa kini dengan posisi yang kuat sebagai pengkritik kebijakan pemerintah, pemilik pabrik dan individu maupun kelompok kepentingan yang merugikan komunitas desa.

Dengan berbagai pilihan orientasi dari setiap pemuka pendapat tersebut, masyarakat desa memiliki kesempatan lebih banyak untuk membahas persoalan ringan maupun yang berat dengan tokoh-tokoh yang dipercaya dalam komunikasi antar pribadi. Penelitian ini tidak akan mengkaitkan asal usul otoritas pemuka pendapat dengan upaya pencarian informasi, tetapi lebih difokuskan pada pemuka pendapat dalam karakter yang diharapkan di lingkungan khalayaknya.

2. Komunikasi Kelompok Wujud Kolektivitas Masyarakat

2.1. Interaksi Dalam Proses Mencari Informasi

Dalam mencari dan mendiskusikan berita menarik, selain melakukan komunikasi antar pribadi, masyarakat akan membahas bersama dalam kelompok. Upaya mendapatkan informasi tentang berita dan peristiwa yang menarik perhatian, dapat dilaksanakan setiap kesempatan yang ada. Kelompok di pedesaan, dapat berupa sekumpulan orang yang melakukan kegiatan maupun pembicaraan bersama mengenai masalah yang menarik perhatian.

Pembicaraan yang dilakukan dalam komunikasi kelompok di desa, lebih ditekankan pada karakteristik kelompok primer yang cenderung tidak kalkulatif dalam kepentingan individual. Namun dalam bingkai reformasi kenegaraan, muatam komunikasi politik lebih terasa dalam pembicaraan kelompok di desa. Kelompok primer itu sendiri, menurut Soekanto (1981:113), "adalah kelompok yang tidak berdasarkan kepentingan material semata, tetapi lebih menekankan pada aspek kekerabatan". Kelompok sosial pedesaan, umumnya kelompok primer yang dipakai rujukan mencari informasi, bertukar pikiran dan mendiskusikan bermacam – macam topik

yang menarik perhatian

Substansi kelompok, juga dapat muncul dengan berkumpulnya beberapa orang dalam kegiatan. Pertemuan diatur oleh individu atau kolektif sesuai dengan norma atau kepercayaan yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya dalam acara tradisional yang berhubungan dengan siklus hidup manusia, acara keagamaan, perayaan kemerdekaan dan kegiatan sosial lainnya.

Sedangkan kelompok yang tidak diorganisasikan, namun sebagai salah satu sumber informasi, adalah kumpulan sejumlah orang dalam berbagai kesempatan yang ada di desa. Mereka biasa berada di simpang jalan desa yang ramai, pos keamanan lingkungan, warung desa dan lain-lain termasuk rumah warga desa. Dalam persepsi masyarakat desa, berbicara dengan banyak orang lebih menyenangkan, dibandingkan kalau kita berbicara hanya berdua saja. Berbagai informasi dapat diperoleh dalam kelompok. Mereka saling menceritakan banyak pengalaman dalam situasi yang akrab. Mereka juga sering merasa senasib, sehingga beragam persoalan dari setiap orang diberi jalan keluarnya serta didukung bersama-sama.

Ketika semua interaktan saling memberikan informasi, berdiskusi dan berdebat untuk mengulas topik yang dilontarkan, maka kelompok komunikasi ini hakekatnya sebagai sumber informasi yang potensial di pedesaan. Terlepas dari nilai informasi yang diperoleh berbobot, penting atau sekadar pelengkap informasi yang dimiliki. Secara teoritis Hennessy (1990:195), menyatakan:

Kesamaan pendapat dalam kelompok tergantung pada arti pentingnya kelompok bagi para perorangan yang menjadi anggotanya, norma kelompok akan mempengaruhi pendapat bersama dengan kuat atau lemah. Arti pentingnya kelompok bagi para anggotanya dihasilkan oleh kecenderungan perorangan, pendapat dan penilaian.

Komunikasi kelompok dalam posisinya sebagai sumber informasi, mencerminkan dinamika warga desa dalam membicarakan beragam berita yang beredar di desa. Dengan demikian kelompok ini bukanlah sejenis *coact* yang pasif terhadap upaya mencari informasi dan cenderung menerima informasi sepihak saja. Menurut Littlejohn, (1992:267), "*coact* adalah sekumpulan orang secara serentak terikat dalam aktivitas yang sama tetapi tanpa komunikasi satu sama lain".

Topik yang dibicarakan dalam kelompok, masalah keseharian sampai masalah yang bersekala luas dalam balutan komunikasi politik. Pembicaraan tidak terbatas pada persoalan yang ada di desanya saja tetapi dapat melebar

pada level negara maupun kehidupan politik masa kini. Menurut Ruben (1992:356), “ komunikasi dalam kelompok merujuk pada relasi-relasi yang dibangun untuk membicarakan masalah yang dihadapi dan dipecahkan bersama”.

Komunikasi dalam kelompok merupakan bagian keseharian di desa, dilakukan dengan tatap muka oleh tiga atau lebih individu untuk mencapai tujuan yang diharapkan seperti berbagi informasi dan pemecahan masalah. Hampir setiap hari, kecuali jika sakit atau ada keperluan di luar kota, seorang warga desa bertemu dengan banyak tetangga di sekeliling rumah. Mereka berkumpul di simpang desa, pos keamanan lingkungan atau di rumah salah seorang warga desa. Topik yang dibicarakan adalah masalah sehari-hari, menilai tindakan, kegagalan, keberhasilan warga desa. Bahkan tidak jarang, sebagai selingan mereka mendiskusikan masalah negara. Pemecahan masalah secara kolektif tetap menjadi rujukan dalam menghadapi persoalan di desa, meskipun secara kuantitas mereka yang terlibat dalam pembicaraan kolektif semakin berkurang ketika pekerjaan semakin menyita waktu.

Mengulas komunikasi kelompok Devito (1978:338), menyebutkan, “Komunikasi dalam kelompok berlangsung sebagai kebutuhan individu, dan merupakan faktor yang penting, karena melalui interaksi bersama, diperoleh kumpulan informasi untuk mengatasi persoalan individual maupun kelompok”. Sedangkan tentang manfaat komunikasi dalam kelompok Littlejohn (1992:297), menandakan “komunikasi kelompok, merupakan cara berpikir bersama yang cepat dalam *in-group* yang kompak”. Jelas bahwa komunikasi kelompok khususnya pada kelompok primer, sejalan dengan karakteristik masyarakat pedesaan lokasi industri.

Kondisi desa yang berubah karena munculnya simbol-simbol modernisasi, tidak mengurangi substansi dari pembicaraan kolektif di lingkungan warga desa. Dalam suatu kesempatan, berkumpul warga desa, tukang ojek, pedagang makanan dan individu lain, membicarakan persoalan pembangunan desa, politik yang berkembang dan persoalan pabrik yang melakukan pemutusan hubungan kerja, demonstrasi buruh dan topik hangat lainnya di sekitar desa ataupun di luar desa mereka.

Ketika kelompok komunikasi tersebut, membicarakan industrialisasi dengan segala aspek positif dan negatifnya, mereka bersemangat memberikan reaksi keras terhadap dampak sosial ekonomi pabrik yang merambah ke desa, pabrik dianggap sumber gangguan utama lingkungan pedesaan yang harmonis. Di pihak lain beberapa orang berbicara membela

buruh perusahaan yang terkena pemutusan hubungan kerja dan perlakuan lain yang dianggap tidak layak kepada buruh ataupun masyarakat desa sekelilingnya.

Umumnya anak muda, yang memiliki kepentingan langsung ataupun tidak langsung terhadap beroperasinya pabrik, cenderung membela buruh dibandingkan dengan orang tua. Dalam pandangan Feith dan Castles (1988:46), tentang pemuda, dikemukakan bahwa, "pemuda-pemuda memang berada di garis depan dalam semangat dan keberaniannya". Lebih jauh Geertz (1988: 412) menyatakan: "pemuda merupakan golongan perintis perubahan sosial yang efektif daripada generasi yang lebih tua". Sebagai kelompok yang berani bertindak, tokoh-tokoh pemuda di pedesaan lokasi industri, memiliki kekuatan posisional di kalangan pengelola pabrik.

Komunikasi dalam kelompok, dapat berbentuk sekumpulan warga desa dengan pemuka pendapat sebagai rujukan di dalamnya. Masyarakat desa mempunyai pilihan bervariasi dalam komunikasi kelompok. Pada suatu kesempatan pertemuan di pedesaan, biasanya diundang pula tokoh masyarakat atau pemuka pendapat pedesaan. Lazimnya pemuka pendapat diminta memberikan wejangan, tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan diselenggarakannya upacara. Tetapi pemuka pendapat juga menyampaikan pesan aktual dihubungkan dengan keadaan di sekitar pedesaan.

Mereka menyisipkan pesan dari kelompok kepentingan, atau mereka juga menyampaikan pesan yang dia peroleh dari sumber pesan lain, seperti media massa, hubungan kekuasaan maupun relasi lainnya dengan kelompok kepentingan di desa. Menyikapi keadaan yang lazim terjadi di negara berkembang tersebut, Diaz Bordenave (dalam Rogers, 1985:49), menyatakan, komunikasi masih tetap dianggap sebagai perpanjangan tangan para perencana pemerintah, dan fungsi utamanya adalah untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan rencana-rencana pembangunan.

Namun, tidak mudah untuk meyakinkan khalayak jika yang dikemukakan adalah pesan titipan yang tidak sesuai dengan kepentingannya dan tidak sejalan dengan nilai sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat. Khalayak juga akan melihat, posisi pemuka pendapat yang berbicara, sebab di desa berbagai kelompok juga memiliki orang-orang yang dipercaya dalam komunitas yang terbatas. Adakalanya pemuka pendapat dipercaya, tetapi jika isi pesan yang disampaikan tidak sejalan dengan kemauan masyarakat, atau terlalu sering disampaikan dalam

berbagai kesempatan, maka pesan akan diabaikan begitu saja.

Sesuai dengan perubahan situasi, masyarakat bebas membahas semua persoalan termasuk yang menyoroti ketimpangan pemerintahan desa. Pembicaraan dapat dilakukan dimanapun juga dan dengan persoalan yang beragam. Kondisi inilah yang membuat masyarakat tidak ragu lagi untuk mengkritisi semua yang ada di sekitarnya. Dalam konteks ini Blumler (1982: 622) menyatakan bahwa, "kebebasan masyarakat untuk mengemukakan pendapat, banyak ditunjang peran media massa". Setiap saat tidak bosan-bosannya mereka membicarakan topik yang sedang berkembang dan menjadi opini publik. Misalnya, di rumah salah satu warga desa, pada malam hari, orang-orang berkumpul membicarakan keadaan sehari-hari di desa atau di luar desa, seperti pemilihan Kepala Desa di tempat lain. Mereka berbicara, mengkritik dan juga berandai-andai memberikan pemecahan masalah terhadap kebijakan pemerintahan, kelesuan industri dan berita-berita kriminal. Pembicaraan biasanya dipancing oleh informasi dari seseorang, informasi televisi, surat kabar atau berita dari sumber lain.

Keterlibatan mencari informasi pada sumber lain juga dapat dilihat ketika masyarakat mencari informasi kepada anak-anak muda terpelajar yang tergabung dalam berbagai lembaga non pemerintah. Mereka mendiskusikan ketimpangan yang mereka hadapi di lingkungannya atau mengklarifikasi berita media massa. Menurut Lowery dan DeFleur (1983: 285), "media massa memancing pembicaraan khalayaknya, meskipun pesan yang ditayangkan sedikit berhubungan atau tidak ada hubungannya sama sekali dengan komunitasnya".

Televisi sebagai sumber informasi lebih banyak menyiarkan kegiatan hiburan, kriminal, ekonomi dan berita politik masa kini. Berita politik merupakan satu tayangan diantara berbagai jenis tayangan yang mampu memberikan kesadaran individu terhadap proses demokratisasi di pedesaan. Dalam pandangan Powel dan Rebecca (dalam Mc.Quail, 1987: 413), "berita politik di media massa mampu menyadarkan masyarakat untuk mengontrol berbagai kebijakan publik". Informasi politik dari media massa membuat masyarakat cenderung mendorong rakyat untuk membandingkan situasi sosial politik yang ada di lingkungannya, pada gilirannya mereka berani melakukan tindakan melawan ketidakadilan.

Berita pedesaan dan pertanian di televisi sebatas informasi dalam tataran nasional yang kurang menyentuh persoalan pedesaan dan petani. Menurut Rolling. Ascroft dan Chege (1985:79), "pelayanan pembangunan pedesaan dipusatkan pada petani maju yang cenderung akan menjadi

langganan tetap, sehingga informasi baru selalu disalurkan kepada mereka, yang selanjutnya memperbesar keuntungan mereka karena mengadopsi inovasi lebih awal". Dalam kondisi yang faktual, komunitas petani padi sawah, merasa bahwa informasi tentang subsidi pupuk, mereka tidak terlalu merasakan, karena informasi yang diperoleh pada waktu itu terlambat. Tetapi andaikata berita diterima dengan cepat, dana untuk membeli pupuk tidak selalu tersedia. Akibatnya mereka menganggap berita subsidi hanya sebagai pengetahuan belaka.

Di pihak lain petani atau pedagang kaya di pedesaan menikmati subsidi dengan membeli pupuk yang dijual lebih murah dari harga pasar. Sementara buruh tani, petani penggarap dan petani pemilik sawah berlahan sempit, membelinya dengan harga pasar yang tidak memperhitungkan subsidi.

Menurut Triyono (1994: 74), "petani merupakan bagian dari masyarakat yang tersubordinasi atau sebagai masyarakat pinggiran yang terus menerus di dominasi oleh kekuasaan negara". Kondisi yang merisaukan ini diakui pula oleh Mubyarto (1988:221) yang, "prihatin terhadap nasib petani yang selalu diatur pemerintah dari proses produksi, pemasaran bahkan penetapan harga". Petani dan pedesaan selalu dalam posisi yang tereksplorasi oleh berbagai macam kebijakan maupun kepentingan pemilik modal. Sedangkan media massa tidak memiliki atensi yang besar masalah petani untuk diekspose, kecuali jika terjadi perlawanan oleh petani dan kasus lain yang menonjol.

Sebagian masyarakat desa mengakui bahwa walaupun masalah pedesaan sering ditayangkan di televisi, mereka lebih memilih untuk mengganti saluran hiburan. Siaran yang mengeksplorasi kesusahan masyarakat desa, cenderung ditinggalkan, sedangkan saluran yang menayangkan hiburan yang jauh dari realitas sekelilingnya merupakan acara yang disukai.

Mereka sadar, bahwa kehidupan di layar kaca adalah impian belaka, yang indah untuk dinikmati bersama, tetapi menyaksikan realitas desa dalam belunggu kesusahan juga bukan suatu tontonan yang menghibur. Dikemukakan oleh Newcomb dan Hirsch (dalam Gurevitch dan Levy, 1985: 276), "televisi adalah tontonan yang menghibur tanpa menghiraukan jenis khalayak yang dihadapi". Televisi memiliki peran dalam kebudayaan massa yang menghibur dalam berbagai struktur masyarakat. Meskipun demikian dalam situasi kebebasan informasi, berita politik menjadi acara yang cukup diminati oleh khalayak di desa.

2.2. Geliat Kebebasan Komunikasi an Transparansi Informasi

Periode pemerintahan Presiden Suharto, semua arus informasi pada tingkat negara sampai ke pedesaan dikendalikan oleh kekuasaan negara. Dengan ideologi stabilitas keamanan dan pembangunan, media massa maupun pembicaraan publik dikendalikan oleh organ pemerintah dan kekuasaan politik dominan. Menyoroti arus informasi era Orde Baru, Djarot (2000:12), menyebutkan “akses kepada informasi hanya dapat digunakan secara leluasa oleh institusi maupun individu yang terkait dengan kekuasaan, rakyat harus sedemikian rupa dijauhkan dari berbagai sumber informasi”. Informasi lebih banyak dipakai untuk memberikan dukungan kepada mereka yang berada di sekitar kekuasaan negara dan sekelompok elite tertentu.

Secara teoritis terkait dengan penguasaan informasi, McQuail (1988:82) menyatakan bahwa, “media massa seringkali dipandang sebagai alat kekuasaan yang efektif karena kemampuannya untuk menyampaikan pesan yang dapat mempengaruhi khalayak”. Mengingat fungsi strategisnya, maka pesan atau berbagai berita sarat dengan sisipan kepentingan penguasa untuk mendukung stabilitas kekuasaan yang dikemas dalam bingkai integralistik dan keselarasan hidup bermasyarakat.

Dengan semangat integralistik dalam mengatur berbagai macam kehidupan masyarakat, maka kebebasan untuk memperoleh informasi juga tidak mudah untuk diperoleh. Pemikiran negara integralistik menurut Soepomo (dalam Feith dan Castles, 1988:179), adalah sebagai berikut:

Semangat kebatinan, struktur keruhanian dari bangsa Indonesia bersifat dan bercita-cita persatuan hidup, persatuan kawulo dan gusti yaitu persatuan antara dunia luar dan dunia batin, antara mikrokosmos dan makrokosmos, antara rakyat dan pemimpin-pemimpinnya.

Negara mempunyai keistimewaan sendiri berhubung dengan corak masyarakatnya. Oleh karena itu politik pembangunan harus disesuaikan dengan struktur sosial masyarakat Indonesia yang spesifik. Dengan mengunggulkan kultur yang spesifik, negara kurang memberikan ruang untuk mengeluarkan pendapat secara demokratis. Malahan bersama dengan partai politik dan pemilik modal, negara dapat bertindak sebagai eksekutor untuk menilai kelayakan sebuah informasi demi keselarasan dan keharmonisan hidup bernegara.

Berita yang layak disebar dan diterima oleh masyarakat luas, dalam pandangan kekuasaan adalah adalah berita yang diseleksi dan tidak mengganggu kekuasaan dengan koneksinya. Hak masyarakat untuk

memperoleh informasi tergantung pada berita sepihak yang dikendalikan pemerintahan. Informasi di pedesaan dalam ikatan komunikasi politik yang kuat, juga tidak terlepas dari pengendalian kekuasaan negara yang paling rendah. Secara singkat Goenawan Mohamad (1994:5), menyatakan “untuk membatasi bahaya pengaruh pers, pemerintah melakukan kontrol terhadapnya, bentuknya bisa macam-macam, mulai dari aturan, anjuran, lembaga “telpon” , sampai larangan terbit”.

Pendapat yang senada dikemukakan oleh Siregar (1989:2), bahwa “hubungan interaktif antara institusi pers dengan pemerintah adalah bentuk pembinaan, pada tingkat ekstrim pembinaan yang bersifat interaktif adalah pelarangan terbit”. Media massa dianggap mempunyai daya pengaruh yang besar sehingga perlu dilakukan sensor ataupun kontrol terhadap informasi yang akan disebarluaskan kepada khalayaknya tanpa menghiraukan orisinalitas berita.

Warga desa hanya diberi hak untuk menyebarkan informasi seputar upaya memelihara nilai tradisional. Itupun sudah banyak didominasi oleh tokoh formal yang duduk dalam berbagai lembaga desa, atau pemuka pendapat yang masuk dalam sub-ordinasi kekuasaan negara. Dalam masalah pertanian, masyarakat desa atau petani desa, tidak terlepas dari pengaturan birokrasi yang sedemikian rincinya. Dari masalah penyediaan pupuk, harga gabah, pengaturan air sampai kewajiban lain yang sebenarnya di luar kemampuan komunitas pertanian.

Ketika Presiden Soeharto turun dari kekuasaannya dan perilaku pengendali informasi dituntut untuk berubah, muncul kebebasan untuk memperoleh berita yang transparan. Menghubungkan dengan berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto, Haris (dalam Ardiantoro, 1999:17), menyebutkan, “kejatuhan presiden Soeharto, yang diawali oleh krisis moneter maupun ekonomi pada tahun 1997-1998, telah memberikan peluang untuk menata kembali kehidupan politik, ekonomi dan hukum”. Setiap orang bebas mencari dan menggunakan informasi tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi dan politik. Informasi bukan dominasi kekuasaan negara, atau dominasi elite dari kelompok kepentingan semata, tetapi hak semua rakyat. Semua berita dapat mengalir bebas sebagaimana yang dikehendaki oleh sumber pesan.

Media massa yang memberitakan berbagai peristiwa sosial, ekonomi dan politik memberikan pengetahuan kepada masyarakat desa tentang manfaat informasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pernyataan ini di dukung oleh Alex S. Edelstein (dalam Suwardi , 1988:71)

yang mengemukakan: “sumber informasi pada umumnya dapat dievaluasi tidak hanya didasarkan atas kredibilitas mediana saja, tetapi justru atas dasar isi, persepsi dan keberadaannya”. Selanjutnya dikemukakan, medium televisi lebih tepat dimanfaatkan untuk perkembangan suatu persepsi, sementara surat kabar adalah medium yang paling banyak memberikan isi pesan secara luas dan sepanjang massa dapat dimanfaatkan. Sedangkan medium radio adalah medium yang paling tepat dan mudah diperoleh.

Situasi kebebasan dalam komunikasi politik yang didukung oleh media massa, mendorong warga desa untuk menempatkan informasi sebagai salah satu kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat. Hakikatnya, masyarakat desa tidak mau lagi untuk menerima berita yang tidak jelas. Mereka berusaha untuk mencari tahu tentang segala sesuatu yang menyangkut kehidupan di desa. Bukan hanya persoalan kehidupan bermasyarakat ataupun masalah perekonomian desa, tetapi mencari berita tentang jalannya pemerintahan dengan benar, dari berbagai sumber yang dapat dipercaya.

Usaha mencari informasi sosial, ekonomi dan politik melalui berbagai sumber, sejalan dengan pendapat Blumler dan Katz (1974: 19), “penggunaan informasi akan sangat tergantung dari orang yang menentukan medium apa yang akan digunakan serta apa yang diyakini bahwa medium itu akan bermanfaat baginya atau tidak”. Dengan demikian, kepercayaan terhadap informasi juga sangat tergantung kepada masyarakat desa sebagai penerima pesan.

Kebutuhan informasi masyarakat desa meliputi informasi yang kompleks dan berkaitan dengan kehidupan sosial budaya, kehidupan ekonomi dan seputar politik lokal. Dalam perspektif tentang hak azasi manusia yang terdapat pada Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, di kemukakan: “Semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut, mereka dapat secara bebas menentukan status politik mereka secara bebas, mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka”. (Azasi, 2001).

Sejalan dengan pernyataan itu, dalam penelitian terhadap mudarnya masyarakat tradisional di Timur Tengah, Daniel Lerner (1988:38) menetapkan, “tiga sektor prinsipil dalam kehidupan untuk membedakan karakteristik kelompok masyarakat tradisional dan transisional adalah sosial ekonomi, budaya dan politik”. Dengan demikian bahwa dalam penelaahan terhadap kehidupan pedesaan, khususnya pada desa-desa lokasi industri, maka fenomena interaksi dan komunikasi tidak dapat dikesampingkan dari masalah sosial, ekonomi dan politik

3. Kebutuhan Informasi Masyarakat

Berpedoman pada uraian tersebut diatas terdapat tiga jenis informasi, berita maupun pesan yaitu informasi sosial budaya, informasi perekonomian desa dan informasi politik pedesaan. Tiga faktor tersebut menjadi titik tolak untuk memisahkan pola interaksi dan jenis pembicaraan yang selalu muncul dalam masyarakat desa lokasi industri.

3.1. Informasi Sosial dan Budaya

Informasi sosial dan budaya meliputi interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari seperti kerukunan hidup, gotong royong, siklus hidup kegiatan masyarakat dari lahir sampai meninggal dan sikap sosial terhadap industrialisasi di pedesaan. Menurut Gillin dan Gillin (dalam Soekanto, 1981:192), "interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antar individual, kelompok dan antara perorangan dengan kelompok manusia". Syarat terjadinya interaksi sosial adalah adanya kontak sosial dan komunikasi diantara individual maupun kelompok.

Faktor kehidupan sosial pedesaan, meliputi masalah pendidikan, olah raga, masalah pemuda, masalah keagamaan dan toleransi terhadap agama lain. Pada intinya kehidupan sosial meliputi hubungan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat desa. Sedangkan faktor yang berhubungan dengan pencarian informasi kebudayaan adalah pemeliharaan budaya setempat, kepercayaan tradisional terhadap kekuatan supernatural dalam berbagai upacara adat dan adopsi terhadap budaya massa dari berbagai media cetak maupun elektronik.

Pengertian budaya menurut Samovar dan Porter (1991:51), adalah sebagai berikut:

Budaya adalah deposit atau kumpulan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai-nilai, sikap, makna, hirarki, agama, dugaan waktu, peranan, hubungan tempat, konsep universal dan objek material yang diperoleh sekelompok besar orang dari generasi ke generasi melalui usaha individual dan kelompok.

Kebudayaan mencakup semua hasil kegiatan manusia yang dilembagakan, memiliki wawasan yang kompleks. Budaya merupakan bentuk kegiatan dan perilaku yang berfungsi sebagai model bagi tindakan penyesuaian diri dan gaya komunikasi dalam masyarakat yang dapat bertahan dari waktu ke waktu.

3.2. Informasi Perekonomian Desa

Informasi seputar kehidupan ekonomi yang dibutuhkan atau dibicarakan antara masyarakat desa dan pemuka pendapat meliputi: masalah pertanian, industri dan perdagangan yang berlangsung di seputar desa atau di luar desa tetapi dilakukan oleh warga desa setempat. Perekonomian desa dalam situasi yang berbeda menunjukkan pula karakteristik yang berlainan.

Kebutuhan informasi menunjukkan keterkaitan antara kebiasaan hidup sektor agraris dan pola kegiatan pabrik yang menekankan produktivitas, efisiensi dan keuntungan. Idealnya industrialisasi di desa dapat memberikan kesejahteraan masyarakat miskin disekitarnya, sebagaimana pernyataan Mountjoy (1998:124), bahwa "penyebaran lokasi-lokasi industri barangkali dianggap sebagai metode yang lebih langsung dan lebih sehat untuk membebaskan daerah pedesaan dari keterbelakangan". Tetapi sebenarnya alasan lain yang lebih menonjol adalah harga tanah yang relatif murah, surplus tenaga kerja untuk pembangunan fisik pabrik dan tersedianya sarana umum lain.

Interaksi dan adaptasi masyarakat pertanian dan kegiatan pabrik tersebut menghasilkan kebutuhan informasi yang beragam. Masyarakat memerlukan informasi pertanian yang meliputi siklus kegiatan pertanian, perkebunan, termasuk didalamnya harga komoditas pertanian maupun penunjang produktivitas pertanian dan perkebunan.

Di pihak lain warga desa juga memerlukan informasi tentang industri, sebab mereka merasakan dampak yang ditimbulkan oleh industri. Dalam penelitian di desa pertanian yang berdekatan dengan lokasi industri, Collier et.al, (1996:1), menyatakan "keluarga pedesaan yang tidak memiliki tanah pertanian (*landless*) paling tidak mempunyai seorang yang bekerja di luar desa, atau di suatu pabrik atau pekerjaan jasa".

Masyarakat desa juga memerlukan informasi tentang perdagangan di desa, yang meliputi: kegiatan perdagangan di desa seperti berbagai usaha kecil pedesaan, persewaan rumah, penjualan tanah dan lain-lain yang menunjang perekonomian pedesaan.

3.3. Informasi Politik Pedesaan

Informasi lain yang dibutuhkan oleh masyarakat desa, dalam dinamika komunikasi politik, adalah informasi politik pedesaan yang meliputi kekuasaan lokal dan pemilihan umum. Sejak tidak diberlakukannya konsep masa mengambang (*floating mass*) dalam masyarakat desa, persaingan partai politik di tingkat desa menjadi faktor yang transparan dalam kehidupan

masyarakat pedesaan. Politik pedesaan menjadi simbol kebebasan dan demokratisasi untuk menentukan pilihannya.

Partai politik juga harus bekerja keras untuk memperkuat basis konstituen di tingkat desa. Berbeda dengan masa sebelum Pemilu Tahun 1999, dimana pada tingkat desa, tidak ada pengurus atau kegiatan partai politik kecuali Golongan Karya yang mengidentifikasi diri bukan sebagai partai politik, tetapi sebagai kelompok kekaryaan yang peduli terhadap politik. Apapun alasannya sebenarnya Golkar tidak berbeda dengan partai politik lainnya.

Menyikapi keadaan politik pada pemerintahan Presiden Soeharto, Malaranggeng (dalam Ardiantoro, 1999:77), menyatakan:

Undang-Undang Politik tahun 1985 sama sekali tidak demokratis. Ketidak demokratisan dapat dilihat dari adanya pembatasan partai yang hanya tiga, dan diantara ketiga partai tersebut perlakuannya tidak sama. Golkar bisa sampai ke desa-desa, sementara partai-partai lain tidak. Birokrasi menjadi mesin politik dan pemerintah merepresentatif rezim dengan konsep monoloyalitas. Begitu pula dengan aparat yang lain, semua itu diatur melalui sistem dimana presiden menentukan segalanya.

Berbagai pembatasan dalam demokratisasi politik merupakan upaya untuk terus berkuasa. Dikemukakan oleh Saurip Kadi (2000:11), "guna membangun dan melanggengkan kekuasaan, Presiden Soeharto menggunakan pola patrimonial". Namun ketika bergulir kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan menentukan pilihannya sendiri, maka politik patrimonialpun semakin mendapat tantangan termasuk dari masyarakat pedesaan.

Pemuka pendapat yang semula memiliki orientasi sama dalam pilihan partai politik, atau jika tidak sama pandangan politiknya mereka cenderung diam dan keptis terhadap politik, ketika bergulir reformasi, maka pemuka pendapatpun masuk dalam wilayah ideologi partai. Bahkan masyarakat sudah lazim menyebutkan nama pemuka pendapat diiringi dengan kelompok partainya.

5

PEMUKA PENDAPAT SEBAGAI RUJUKAN KOMUNIKASI ASI SOSIAL BUDAYA

Masyarakat desa pada waktu mencari informasi tentang kehidupan sosial budaya, perekonomian dan politik pedesaan cenderung memilih mereka yang kompeten dalam bidangnya. Pemuka pendapat yang menjadi sumber informasi masyarakat desa memiliki berbagai otoritas dan kewibawaan di lingkungannya.

Masyarakat mempunyai banyak pilihan untuk mencari informasi dengan beraneka tipe pemuka pendapat. Penelitian ini tidak akan memilah pemuka pendapat berdasarkan asal diperolehnya kewibawaannya atau pengaruhnya tetapi memaparkan kedudukan mereka sebagai tempat masyarakat desa mencari informasi tentang berbagai hal dalam kehidupan di desa.

Disamping pemuka pendapat, sumber informasi lainnya adalah media massa. Sejalan dengan perkembangan kebebasan berpendapat, masyarakat juga dapat memperoleh informasi dari aktivis lembaga non pemerintah atau anak muda yang biasa mengakses informasi melalui media alternatif seperti internet

1. Informasi Sosial dan Kekuatan Nilai Tradisional

Problema perubahan di pedesaan menyangkut aspek multi dimensi dalam kehidupan sosial budaya. Perubahan menghancurkan atau minimal menggusur tatanan dan institusi tradisional yang sudah mapan seperti keselarasan antara kehidupan gotong royong dengan lingkungan

sosial budaya yang integral. Perubahan membawa implikasi tentang ketidakpastian untuk mempertahankan nilai tradisional disatu pihak dan beradaptasi dengan perubahan pada sisi lainnya. Untuk mengatasinya diperlukan informasi yang meminimalisir ketidakpastian dalam kehidupan sosial budaya masyarakat.

Bahwa penguasaan informasi yang lazim berlaku di lingkungan masyarakat mekanik cenderung bersifat polimorfik, disebutkan oleh Gonzales (dalam Jahi, 1988:91), "pemuka pendapat di desa secara teratur dapat mempengaruhi khalayaknya dengan sejumlah isu, kapabilitas penguasaan informasi yang beragam menjadikan pemuka pendapat seolah paham semua hal". Mestinya karena penguasaan informasi yang beragam, masyarakat desa dapat menanyakan berbagai persoalan kepada satu orang pemuka pendapat. Tetapi kenyataannya, mereka memilah jenis informasi untuk dibicarakan dengan pemuka pendapat yang kompeten dalam penguasaan informasi.

Masalah sosial di desa merupakan otoritas pemuka pendapat di pedesaan. Walaupun dalam situasi yang berubah, media massa dan sumber lain mudah ditemukan, namun masyarakat tetap menggantungkan informasi nilai sosial kemasyarakatan kepada pemuka pendapat yang dipercaya.,

Dalam situasi desa pertanian, ketika masyarakat masih sepenuhnya bersifat tradisionalpun, tidak ada penguasaan informasi oleh pemuka pendapat yang sedemikian luasnya. Memang otoritas terhadap informasi tidak terbagi secara rinci dalam satu macam isu dengan satu orang pemuka pendapat, tetapi merujuk pada beberapa penguasaan sejumlah isu yang terbagi pada beberapa pemuka pendapat. Warga desa memiliki tokoh yang memiliki keahlian berbeda, masyarakat akan menanyakan urusan tertentu kepada ahlinya. Masalah yang sifatnya umum, seperti yang disaksikan di televisi atau berita di surat kabar, biasanya dibicarakan dengan orang yang kira-kira paham dengan persoalan itu. Tetapi kalau menyangkut masalah sehari-hari, masyarakat desa, akan menanyakan atau minta nasehat kepada pemuka pendapat sebagai orang yang dituakan di masyarakat atau pemuka pendapat yang memiliki pengetahuan memadai.

Urusan sosial kemasyarakatan adalah dominasi dari pemuka pendapat dalam kelompok warga asli desa setempat, atau penduduk asli yang dituakan dan sangat menguasai sejarah perkembangan kehidupan sosial masyarakat disekelilingnya. Dari tokoh inilah masyarakat desa mencari dan membicarakan masalah sosial budaya. Masyarakat desa mencari informasi dari pemuka pendapat yang dipercaya di desa

Dalam perkembangannya, ketika industri berkembang dan dominan di desa, kecenderungan mencari informasi tentang kehidupan sosial kemasyarakatan, tetap merujuk kepada pemuka pendapat tradisional yang memelihara nilai-nilai sosial. Sebaliknya, tidak akan menghiraukan lagi dan tidak mau memposisikan sebagai rujukan untuk mencari informasi, jika pemuka pendapat melakukan pengingkaran terhadap nilai bersama yang dipercaya masyarakat.

Namun ketika kegiatan pabrik berkurang, ternyata masyarakat desa justru semakin percaya terhadap pemuka pendapat sebagai sumber informasi masalah sosial. Pengingkaran terhadap peran pemuka pendapat membawa situasi yang buruk dan ketidakharmonisan. Jika ada kekurangan atau kejadian yang tidak diinginkan dialami oleh masyarakat, maka akan mengkaitkan dengan tidak ditaatinya norma sosial yang berlaku di sekitarnya.

Masyarakat desa umumnya menjaga keserasian hubungan dengan mereka yang dituakan sebagai sumber nasehat. Padahal dalam perspektif rasional, mereka sesungguhnya ada yang memiliki kemampuan lebih baik karena faktor pendidikan dan pengalaman. Tetapi kenyataannya masyarakat desa tidak mungkin melewati peran pemuka pendapat menuruti kemauan pribadi, karena norma yang berlaku menghendaki agar warga desa membicarakan dan minta nasehat dari pemuka pendapat terhadap berbagai persoalan yang dihadapi

2. Budaya Tradisional Versus Budaya Populer

Masalah budaya di desa berubah sesuai dengan perkembangan kondisi pedesaan. Pilihan sumber informasi tidak terbatas pada pemuka pendapat saja tetapi berjalan dinamis karena pengaruh industrialisasi dan media massa yang mudah diakses di pedesaan. Media massa dengan budaya populernya menjadi faktor yang dipakai rujukan untuk mencari informasi masyarakat desa.

Ketika suatu kawasan sebagai desa pertanian, adat istiadat dan kebudayaan dipelihara dengan baik oleh warga desa. Kebudayaan tetap bertahan dalam perkembangan berbagai situasi pedesaan. Menurut W.Lustig (dalam Samovar, Porter dan Jain, 1988:55), bahwa, "budaya akan berlanjut keberadaannya jika perilaku pengikutnya selalu melaksanakan nilai yang terkandung di dalamnya dalam hidup sehari-hari".

Kehidupan masyarakat yang tetap mempertahankan eksistensi budaya dapat dilihat dari penyelenggaraan berbagai upacara adat dan selamatan

dalam siklus hidup manusia. Menyoroti kegiatan ritual untuk keselamatan, Geertz (1981:13), mengemukakan dalam tulisan tentang masyarakat Jawa sebagai berikut, selamatan atau slametan, merupakan semacam wadah bersama masyarakat, yang mempertemukan berbagai aspek kehidupan sosial dan pengalaman perseorangan, dengan suatu cara tertentu yang dapat memperkecil ketidakpastian, ketegangan dan konflik.

Pemuka pendapat menjadi pilihan sumber informasi dan memiliki posisi untuk meminimalkan ketidakpastian terhadap semua masalah yang dihadapi warga desa. Mereka bukan sekadar orang yang dipercaya menguasai informasi tentang kehidupan sosial masyarakat, tetapi mereka juga mempunyai otoritas lain yang diperoleh melalui faktor keturunan, kepemilikan benda pusaka dan pelatihan spiritual yang kontinyu sebagai salah satu bentuk perlindungan individual maupun kelompok.

Masyarakat di lokasi industri percaya bahwa berbagai upacara adat dan selamatan adalah bentuk komunikasi dengan penguasa alam yang dapat membawa kedamaian, keselarasan hidup bermasyarakat dan menjauhkan bahaya yang mengancam kehidupan harmonis di pedesaan.

Pemuka pendapat sebagai sumber informasi untuk menjaga keseimbangan hidup melalui kekuatan yang tidak dapat dideteksi oleh manusia. Sawah yang produktivitasnya menurun, kesulitan untuk memperoleh air bersih, selain harus diselesaikan dengan rasional, gerakan massa untuk melawan pemilik pabrik, tetapi harus disertai dengan jalan lain yang mendekati pada kekuatan adi kodrati (*supernatural*). Situasi ini mirip dengan asumsi terhadap masyarakat tradisional di negara berkembang seperti dikatakan Balandier (dalam Kartodirdjo, 1996:3), "masyarakat tradisional mengkaitkan ketertiban sosialnya dengan suatu ketertiban kosmos di atasnya". Ketertiban masyarakat merupakan keserasian hubungan, dengan kekuasaan yang lebih tinggi dalam dunia religius. Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai jika interaksi dengan kekuatan supernatural berlangsung dengan baik melalui berbagai upacara adat yang melembaga.

Dalam interaksi dan komunikasi sosial keagamaan, seperti membicarakan penyelenggaraan atau peringatan hari besar agama Islam, pemuka pendapat berbasiskan agama menjadi rujukan masyarakat setempat dan mendominasi penguasaan informasi yang berhubungan dengan agama. Prinsip pemuka pendapat ini adalah menyelaraskan kehidupan dunia dengan jalan Tuhan. Diungkapkan oleh Maarif (1988:147), "Islam adalah agama yang amat berkepentingan untuk mendaratkan pesan-pesan

moralnya dalam kehidupan kolektif manusia". Dalam kehidupan sehari – hari, meskipun masyarakat desa dengan mudah dapat memperoleh berita dari berbagai sumber tetapi pemuka pendapat berbasiskan agama tetap memiliki peran.

Dalam situasi berkembangnya industri, kepercayaan terhadap adat istiadat sangat kuat, bahkan cenderung bersikap etnosentrisme yang mengunggulkan kebiasaan hidup sehari-hari masyarakat setempat. Samovar, Porter dan Jain (1988:56), menyatakan, "penekanan pada superioritas budaya sendiri merupakan upaya untuk memelihara tatanan dan nilai budaya dan stabilitas budaya yang diikutinya". Sikap ini cenderung melihat budaya lain dari sisi negatif dan mengunggulkan budaya sendiri yang dipercaya dapat menyelesaikan berbagai jenis permasalahan dalam komunitas yang terbatas di lingkungannya.

Pandangan yang etnosentrisme yang mengunggulkan budaya setempat dapat mengatasi problem pedesaan, tidak sepenuhnya dipercaya oleh generasi muda dan masyarakat yang semakin banyak berinteraksi dengan media massa. Mereka umumnya terpelajar, memiliki pikiran praktis dan tidak menafikan fakta sosial di sekitarnya.

Mencari informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kebudayaan bukan hanya mengandalkan pemuka pendapat, tetapi media massa menjadi pilihan lain untuk mengetahui tentang budaya. Meskipun tidak terkait langsung dengan kebudayaan di desa, tetapi televisi dengan penyebaran budaya massa telah menjadi salah satu pilihan sumber informasi warga desa pada masa industri berkembang.

Dalam belunggu krisis multi dimensi yang merambah ke pedesaan, sumber informasi tentang nilai budaya di desa sama sekali tidak tergantung pada pemuka pendapat, karena masyarakat semakin intensif berhubungan dengan media elektronik seperti televisi. Kepercayaan terhadap pemuka pendapat sebagai sumber informasi budaya pedesaan semakin pudar disebabkan oleh kondisi faktual sehari-hari yang tidak lepas dari berbagai tayangan budaya massa dari televisi, radio dan teknologi audio visual lain yang berkembang dengan pesat di desa. Pengaruh media massa dan teknologi audio visual sangat kuat merambah pedesaan dengan mendifusikan budaya populer. Jika masyarakat ingin menyelenggarakan acara kesenian, tidak harus konsultasi dan mengikuti kemauan pemuka pendapat, sebab pemuka pendapat selalu menyarankan lebih baik mengundang jenis kesenian tradisional. Akibat pengaruh televisi, masyarakat lebih suka pertunjukan organ tunggal lengkap dengan beberapa penyanyinya.

Masyarakat menempatkan pemuka pendapat, bukan sebagai satu-satunya sumber informasi, sebab media massa juga menjadi sumber berita yang jauh lebih menarik bagi warga desa. Betapapun pemuka pendapat tradisional menguasai informasi kebudayaan desa dan berusaha mempertahankan nilai-nilai desa, tetapi realitasnya semakin pudar tergeser oleh simbol modernisasi dan budaya massa yang lebih menghibur.

Kenyataan ini di dukung oleh Inkeles (dalam Suwarsono dan So, 1991:22) yang menyebutkan “manusia modern akan memiliki sikap untuk semakin independen terhadap berbagai bentuk otoritas tradisional, seperti orang tua, kepala suku dan raja”. Begitupun, kebanyakan anak muda Klari, lebih terbuka dalam interaksi dan komunikasi dengan orang di luar kelompoknya, lebih adaptif terhadap pengalaman baru dan cenderung untuk mengabaikan nilai tradisional yang mengikat.



KOMUNIKASI POLITIK DAN DINAMIKA PEREKONOMIAN

Masyarakat desa membutuhkan informasi tentang perekonomian desa yang berhubungan dengan pertanian, industri di pedesaan dan perdagangan. Informasi tentang pertanian dibutuhkan terutama yang berhubungan dengan siklus dalam kegiatan pertanian desa, pupuk, bibit, harga gabah dan faktor lain yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi usaha pertanian penduduk.

Sedangkan informasi yang dicari dan dibutuhkan masyarakat pada umumnya terkait pada masalah buruh industri, dampak lingkungan, faktor ekonomi yang menyangkut eksistensi industri di desa. Informasi ekonomi yang juga menjadi kebutuhan masyarakat desa adalah informasi perdagangan dan jasa spesifik yang lazim berlaku di pedesaan.

1. Masalah Pertanian dan Lingkungan Desa

Informasi di bidang pertanian, merupakan kebutuhan masyarakat desa lokasi industri. Umumnya masyarakat yang bermata pencaharian di sektor agraris, mencari informasi dari berbagai sumber yang dipercaya di lingkungan desa. Dari pemuka pendapat, mereka mencari informasi pertanian dihubungkan dengan kebiasaan dan tradisi pertanian yang dilakukan. Dari media massa dan sumber informasi lain, masyarakat desa mencari informasi, untuk membandingkan masalah yang sama dengan situasi di luar komunitasnya.

Ketika suatu kawasan masih sebagai desa pertanian, sebenarnya sebagian masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, khususnya padi

sawah, tidak selamanya menghabiskan waktu untuk mengurus sawah. Sebab adakalanya mereka juga mempunyai pekerjaan sambilan sebagai buruh bangunan, pedagang asongan, menjalankan industri rumah tangga dan pekerjaan sektor informal lain. Pekerjaan di luar sektor pertanian akan segera ditinggalkan ketika mereka mendapat berita tentang tersedianya pekerjaan menanam benih maupun memanen padi dan kegiatan pertanian lainnya.

Kehidupan masyarakat yang mengandalkan pertanian padi sawah, tentunya memerlukan informasi siklus kegiatan pertanian dari desa sekitarnya maupun desa lain diluar kabupaten. Pemuka pendapat merupakan tempat mencari informasi dan membicarakan berbagai persoalan pertanian di desa. Meskipun petugas penyuluh lapangan dengan jadwal yang rutin mengadakan ceramah pertanian, pemuka pendapat tetap sebagai pilihan utama konsultasi, tentang harga gabah atau membandingkan berbagai masalah pertanian yang selalu muncul di tengah petani.

Pemuka pendapat sebagai elite desa yang berperan menjadi penengah, atau setidaknya memberikan perlindungan spirit terhadap petani desa. Posisi sebagai tokoh yang dipakai rujukan dalam kehidupan pertanian sangat wajar, mengingat petani memiliki kelemahan struktural. Mengkaitkan dengan karakteristik petani pedesaan, Rogers dan Svenning (1969:137), menandakan, petani tradisional umumnya mempunyai sifat familiisme, kurang inovatif, bersifat fatalisme, memiliki keterbatasan aspirasi, kurang layak dalam penghidupan dan penghasilan, keterbatasan dalam pandangan dunia (*worldview*) dan mempunyai empati komersial yang rendah.

Sifat tersebut di atas lebih berkonotasi negatif, dan dua hal yang perlu diperhatikan adalah tentang familiisme dan fatalisme. Perilaku familiisme di lingkungan petani sangat kuat dan kecil kemungkinan untuk meluntur dan hilang, sebab kekerabatan yang erat dibangun dengan komunikasi dan interaksi yang kontinyu. Hubungan kekerabatan merupakan tulang punggung, dalam pengelolaan pertanian karena siklus kegiatan pertanian selalu melibatkan relasi-relasi kekerabatan desa. Sedangkan fatalisme merupakan sikap mudah menyerah, yang menempatkan individu menyadari kekurangmampuannya, dalam mengontrol masa depannya sendiri maupun kelompoknya

Pilihan untuk berkonsultasi dengan pemuka pendapat di bidang pertanian juga selektif. Mereka tidak mau berhubungan dengan orang dengan status formal bekerja di institusi yang mengurus pertanian, dan memiliki kedudukan tertentu dalam lembaga desa. Terhadap tokoh ini,

masyarakat terlanjur menjaga jarak kekuasaan mengingat posisinya sebagai birokrat pedesaan yang menempatkan dalam elite penguasa. Warga desa pada umumnya, lebih condong menanyakan problem sawah kepada orang yang pekerjaannya sebagai petani dan bertempat tinggal di sekitar desa ini. Sebab mereka mengetahui masalah yang dihadapi petani. Sedangkan penyuluh pertanian, mereka diasumsikan ahli dalam teori tetapi kurang memahami kenyataan yang terdapat di desa.

Dalam perspektif petani tradisional, para penyuluh pertanian tidak selamanya unggul dalam pengetahuan pertanian, masyarakat desa menganggap sebagaimana penyuluh pertanian hanya paham teori dan sangat setia membawa pesan pemerintah kepada petani. Penyuluh pertanian diakui kurang terbiasa mengikuti praktek bertani secara lengkap dalam siklus pertanian tradisional, sehingga mereka kurang merasakan problem utama seperti kesulitan dana dalam proses produksi seperti harga kebutuhan penunjang produksi padi yang semakin mahal.

Pertanian adalah penghidupan utama masyarakat desa, termasuk yang bertempat tinggal pada wilayah di mana sebagian besar lahannya digunakan untuk industri. Masyarakat desa setempat, masih memiliki perhatian yang besar terhadap pertanian dan masih mengidentifikasi diri sebagai petani, walaupun mereka tidak sepenuhnya bekerja di sektor pertanian. Perkembangan industrialisasi yang pesat, sampai tahun 1997 mengakibatkan ketidakjelasan batas lahan yang boleh, atau yang tidak boleh digunakan untuk lokasi pabrik. Pemerintah melalui pemuka pendapat dan aparat desa memberikan penerangan kepada masyarakat tentang manfaat industri bagi kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Lahan pertanian yang tergusur dan berkurangnya tingkat kesuburan tanah, menimbulkan persoalan serius bagi petani sekitar pabrik. Mereka menjual tanah pertanian, karena hasilnya semakin berkurang, disamping itu tanah sekitarnya sudah banyak yang dibeli oleh pemilik pabrik. Sebelum menjual, umumnya orang desa bertanya dulu kepada orang yang dianggap dapat memberikan jalan keluarnya. Sesungguhnya mereka sangat berat menjual sawah, tetapi tidak mungkin dapat bertahan untuk mengolah sawah kalau tanah dan lingkungannya semakin tidak cocok untuk bertani.

Masyarakat percaya terhadap orang yang dianggap mengetahui seluk beluk pertanian di tengah berkembangnya industri di desa, seperti kelompok anak muda terpelajar, para *commuter*, makelar tanah dan orang desa yang memiliki relasi luas dengan kelompok lain dari luar desa. Mereka dianggap memiliki informasi lebih banyak dibandingkan mereka yang hanya kerja di

desa. Sehingga masalah yang menyangkut kehidupan pertanian termasuk dampak industrialisasi di desa, akan dibicarakan dengan orang tersebut yang dianggap sumber informasi lain yang dicari warga desa.

Meskipun akses untuk siaran media elektronik dapat mudah ditangkap, media massa tersebut tidak dapat dipakai sebagai acuan untuk mencari berita tentang pertanian, karena tayangan atau siaran tentang pertanian sangat terbatas. Kalaupun ada tayangan televisi atau siaran radio tentang persoalan serupa dengan yang dihadapi. Sebab informasi lebih banyak didominasi oleh berita politik yang berisi protes petani kepada pemerintah.

Media cetak yang beredar, bukan sebagai acuan utama bagi petani. Meskipun ada koran pedesaan berbahasa daerah, namun kurang memberikan dampak berarti. Terlebih lagi oplah media massa terbatas, hanya untuk pamong desa sehingga informasi pertanian sebagai misi utama media tersebut tidak tercapai.

Surat kabar desa, tidak dipakai sebagai referensi utama oleh para pemuka pendapat, seperti dalam prinsip *two-step flow communication*. Mereka lebih banyak menyebut sumber lain atau media massa lain yang digunakan rujukan dan di sebarakan kepada khalayaknya. Idealnya surat kabar pedesaan atau *community newspaper* yang diterbitkan untuk kepentingan daerah pedesaan, memakai bahasa yang dipahami dengan baik oleh penduduk desa, dan digunakan untuk mengungkapkan masalah yang erat kaitannya dengan masalah pedesaan.

Tetapi sulit untuk mencapai tujuan ideal tersebut, karena surat kabar pedesaan Kujang, lebih banyak bermuatan sebagai media pemerintah yang bersifat politis, bukan media yang menekankan pada pertanian, pemerintahan lokal dan koperasi. Menurut Reddy (dalam Jahi, 1988:116-117),:

Surat kabar pedesaan adalah surat kabar masyarakat desa, untuk kepentingan masyarakat desa dalam meningkatkan produktivitas pertanian, menghadapi atau menyelesaikan persoalan yang biasa muncul di pedesaan dan sebaiknya dikelola oleh masyarakat desa atau setidaknya yang memahami persoalan yang di pedesaan.

Semestinya berita yang ada mencerminkan kehidupan dan masalah yang berkaitan dengan masyarakat desa bukan semata sebagai media yang menyiarkan kesuksesan pemerintah dalam pembangunan pertanian dan pedesaan. Informasi yang cenderung menempatkan kekuasaan negara sebagai pelaku pembangunan, justru akan membuat jarak dengan komunitas pedesaan yang sudah sedemikian banyak memperoleh berita sejenis dari aparat pemerintah desa.

Sebenarnya, petani berlahan sempit dan buruh tani adalah kelompok yang tidak memiliki akses informasi dari luar komunitasnya dan sulit untuk membuat keputusan untuk dirinya sendiri dalam situasi hegemoni pemerintah. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketika industri berkembang di pedesaan, kekuasaan negara memegang peran besar dalam mengendalikan kehidupan petani. Pemerintah mengatur pola pertanian dari soal benih, pupuk, harga gabah sampai produktivitas setiap hektar.

Karena ketidakberdayaan menolak pesan yang berisi kewajiban, seringkali diterima dalam konteks fisik belaka pada forum yang dimobilisasi. Dalam arti mereka tidak melakukan perlawanan, dan ketidaksetujuan bukan ditunjukkan terus terang. Masyarakat desa tetap mendiskusikan berbagai represi kekuasaan negara dengan pemuka pendapat yang dipercaya.

Secara esensial, orientasi masyarakat mencari informasi tetap merujuk kepada pemuka pendapat, meskipun penyuluh lapangan menyampaikan pesan secara intensif dari pemerintah. Petani dan masyarakat desa tidak begitu percaya terhadap orang dari luar kelompoknya dan memiliki rasa takut terhadap pemerintah beserta institusi pendukungnya. Dengan kondisi tersebut, masyarakat desa mempunyai ketergantungan besar terhadap tokoh sekitarnya yang dipercaya, sehingga kecenderungan mencari tahu tentang pertanian di desa tetap masih mengunggulkan pemuka pendapat

Salah satu masalah potensial dalam pertanian desa adalah kelangkaan buruh tani. Kalaupun ada rata-rata sudah berumur, padahal kerja di sawah diperlukan tenaga muda yang dinamik. Keterpurukan nasib petani sebenarnya tidak sepenuhnya disebabkan oleh kelemahan internal yang dimiliki, tetapi saling bertumpuk dengan kebijakan kekuasaan negara yang tidak sinkron.

Pembangunan pedesaan sering tidak konsisten dalam mempertahankan karakteristik desa pertanian. Ketentuan tidak menggusur lahan dengan irigasi teknis hanyalah diatas kertas saja. Faktanya lokasinya berdekatan dengan sumber irigasi kadang-kadang menjadi kawasan industri yang menggunakan sebagian besar lahan pertanian.

Melihat masalah yang sedemikian rumitnya, sebagian masyarakat merasa pesimis bahwa prospek pertanian di desanya akan meningkatkan kesejahteraan sebagaimana sektor lain yang berkembang di seputar desa. Tetapi surutnya kegiatan pabrik dan berita seputar pemutusan hubungan kerja di sejumlah industri, menjadikan masyarakat desa tidak percaya juga terhadap sektor industri yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya masyarakat cenderung menyalahkan kebijakan industri yang

tidak memperhitungkan kesinambungan desa sebagai penghasil pertanian yang diandalkan.

Kemerosotan kegiatan industri dan derasnya kebebasan informasi dari media massa, selanjutnya mengubah sikap masyarakat pedesaan untuk tidak hanya mengandalkan berita dari pemuka pendapat saja. Media massa dianggap memberikan pengetahuan dan menyampaikan berita yang sesuai dengan kenyataan. Walaupun jarang atau tidak ada pemberitaan khusus tentang petani, tetapi siaran terhadap gerakan petani yang melawan kebijakan pemerintahan memberikan pelajaran berharga pada petani untuk bersikap kritis terhadap kekuasaan negara.

Ketertarikan masyarakat desa terhadap media massa yang bukan semata-mata menyajikan aspek hiburan, tetapi juga berita tentang demonstrasi petani di tempat lain, yang menjadikan penduduk desa lebih berani untuk bersikap menolak, terhadap tindakan para pemilik pabrik atau pemerintah yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Media massa yang berubah dalam pola pemberitaan, karena tidak lagi dikendalikan oleh kekuasaan negara, dijadikan masyarakat sebagai salah satu sumber informasi selain pemuka pendapat.

Teknologi informasi seperti internet, yang dapat diakses oleh anak muda desa setempat yang belajar di luar kota, menjadi salah satu rujukan sumber informasi. Padahal mereka umumnya tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan internet. Mereka dengan mudah menyatakan bahwa rumor, desas-desus, atau berita sumbang lainnya tentang penyimpangan yang dilakukan tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, politikus termasuk yang sifatnya lokal, dari daerah ataupun kabupaten setempat, semuanya berasal dari internet.

Masyarakat desa juga mulai berusaha mencari berita dari luar lingkungannya, seperti dari mahasiswa yang kuliah di kota. Ketika bergulir reformasi, gerakan mahasiswa dari berbagai elemen dan kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga masuk wilayah pedesaan, memberikan advokasi dan penerangan kepada petani. Sumber informasi lain yang biasa dicari masyarakat desa adalah, orang yang memiliki mobilitas tinggi dan kaya pengalaman, orang terpelajar, guru dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan pendapat Rogers dan Svenning (1969: 187), "Selain pemuka pendapat, orang yang mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat desa adalah pekerja sukarela, radio, orang kosmopolitan bahkan politisi desa."

Mereka sering dijadikan rujukan oleh petani untuk membandingkan berbagai masalah pertanian di desa dengan di luar desanya. Termasuk

masalah yang sensitif seperti konflik antara petani dengan pemilik modal, petani dengan pemerintah, petani dengan aparat negara serta informasi lain yang berkaitan dengan penyelewengan dalam pembangunan desa. Orang desa yang sering ke luar kota dan banyak pengalamannya, dijadikan sumber berita, untuk membandingkan dengan apa yang terdapat di radio, televisi dan pemuka pendapat. Berita dari berbagai sumber merupakan masalah yang menarik untuk dibicarakan bersama di desa.

Masyarakat desa mencari informasi dan membicarakan informasi pertanian dengan segala persoalannya yang berhubungan dengan dampak industrialisasi kepada pemuka pendapat yang dipercaya, dari media massa yang semakin transparan dalam pemberitaan dan dari sumber-sumber lain yang dipercaya memiliki atau menguasai informasi seputar pembangunan desa.

2. Industri dan Kekuatan Pendekatan Pemilik Modal

Sejak pertama kali masyarakat desa mendengar bahwa wilayahnya dipakai sebagai kawasan dan zona industri, mereka mengharapkan bahwa industri tidak menggusur lahan irigasi teknis dan dapat mensejahterakan masyarakat sekitarnya. Pembangunan industri yang ideal di pedesaan adalah, tersedianya kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Namun masyarakat desa tidak sepenuhnya mampu untuk masuk dalam sistem kerja pabrik.

Sejak awal industri, elite dan pemerintah, menghimbau kepada pemilik pabrik di desa, untuk memprioritas masyarakat setempat sebagai tenaga kerja di pabrik. Tetapi banyak kendala untuk memenuhi himbauan tersebut, mengingat bahwa kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan sangat ketat. Tidak sekadar persyaratan ijazah tetapi juga persyaratan lain yang menyangkut pengalaman kerja serta keahlian lainnya.

Untuk tenaga kerja marginal setingkat buruh, dengan kualifikasi pendidikan Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama, sebagian dapat terpenuhi dari tenaga kerja dari desa setempat. Tetapi mereka umumnya tidak mampu bertahan lama bekerja di pabrik, karena kultur desa yang tidak biasa dengan pola kerja yang teratur. Keadaan ini menunjukkan gejala yang sama dengan hasil penelitian Mountjoy tentang industrialisasi di Pakistan. Dikemukakan oleh Mountjoy (1983:142), bahwa, "kurangnya pengalaman dalam pekerjaan industri", sering sering terlihat dari keengganan mereka mengikuti tempo pekerjaan pabrik, yaitu jam kerja yang teratur dan sistem kerja yang harus ditiru, mengakibatkan banyaknya

absensi dan banyaknya pekerja-pekerja yang keluar masuk perusahaan.

Tidak mudah bagi masyarakat tradisional untuk beralih kerja dari sektor pertanian ke sektor industri. Kebiasaan dalam komunitas agraris yang mekanistik, memerlukan waktu yang cukup panjang untuk menyesuaikan dalam pola organik dalam pekerjaan di pabrik. Dalam situasi desa pertanian, di mana pembangunan pabrik baru dimulai, informasi yang menjadi pembicaraan publik desa adalah, pembebasan tanah dan harapan masyarakat akan perbaikan taraf hidup.

Dalam situasi desa pertanian, ketika pembangunan pabrik baru dimulai, informasi yang sering muncul adalah, masalah pembebasan tanah dan harapan masyarakat dapat bekerja di pabrik. Untuk tahap awal pembangunan fisik pabrik, penduduk setempat banyak yang memperoleh kesempatan untuk bekerja. Pemilik pabrik menggunakan tokoh masyarakat untuk memberikan penjelasan tentang keberadaan pabrik yang tidak akan mengganggu warga desa, dan mencari tenaga kasar sebagai buruh bangunan

Dalam kaitannya dengan industri di pedesaan, masyarakat membutuhkan informasi yang transparan terkait dengan kebutuhan buruh industri, dampak lingkungan dan faktor lain yang menyangkut eksistensi industri di desa. Pemuka pendapat yang memiliki hubungan baik dengan pemilik modal di desa, merupakan sumber informasi tentang tersedianya lowongan pekerjaan dan masalah lain yang menyangkut hubungan antara penduduk desa yang tradisional. Warga desa menjadi kagum dengan munculnya alat dan teknologi modern untuk membangun pabrik, dari alat berat untuk menancapkan tiang beton, sampai kedatangan mesin pabrik mengundang kekaguman masyarakat sekitarnya. Di sisi lain pemuka pendapat dengan bangga memberikan penjelasan kepada khalayak. Sebagai orang dekat pabrik, elite desa itu menguasai informasi tentang proses berdirinya pabrik, walaupun hanya terbatas pada garis besarnya saja, tetapi khalayaknya sangat kagum terhadap peran pemuka pendapat ini.

Selain pemuka pendapat, masyarakat desa juga cenderung mencari informasi tentang beroperasinya pabrik dengan segala implikasinya dari sumber lain seperti para makelar tanah dan penjaga keamanan pembangunan pabrik yang biasanya terdiri dari para jagoan dari desa setempat atau luar desa.

Tidak disangsikan lagi, bahwa munculnya pembangunan pabrik membuat nilai tradisional memudar, tanah pertanian yang semula sebagai

salah satu bentuk ikatan keluarga, dalam sistem kekerabatan yang dianut luas oleh masyarakat seperti tidak dihiraukan. Masyarakat lebih tertarik untuk memperoleh sejumlah uang yang biasanya juga tidak dapat diinvestasikan untuk usaha lain. Dalam situasi desa pertanian, sumber informasi tentang industrialisasi di pedesaan adalah pemuka pendapat dan sumber lain yang menguasai berita tentang pembangunan pabrik dengan segala akibatnya

Pesatnya pembangunan pabrik di desa, menyebabkan pola penguasaan tanah bertambah buruk, seperti turunnya produktivitas karena polusi, ketimpangan jumlah petani dengan lahan garapan yang tersedia dan semakin banyak rumah tangga yang tidak memiliki tanah sama sekali. Tetapi ketidakharmonisan di desa, oleh pemilik modal dikemas menjadi suatu pembenaran yang berlindung dibalik ideologi pembangunan.

Komunikator pemerintahan mempunyai bermacam alasan untuk mendukung industrialisasi. Menurut MacBride (1980:243), komunikator negara berkembang lebih banyak mendukung kelompok kepentingan dan kebijakan pemerintah daripada berpihak kepada masyarakat desa. Padahal sasaran pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa setempat.

Kekuatan kelompok kepentingan yang di dukung oleh pemerintah juga menempatkan pembangunan sebagai alat untuk melegalisasi semua bentuk tindakan kekuasaan negara terhadap rakyatnya. Demi industrialisasi atau modernisasi masyarakat desa dirugikan dan menjadi korban modernisasi fisik. Menurut Huntington:

Modernisasi juga dapat dikatakan sebagai proses homogenisasi dengan tendensi dan struktur serupa, sebagai perubahan yang progresif, sekalipun akibat samping maupun korban manusia beraneka macam dan kadang-kadang di luar batas kemanusiaan dan moral universal. (Samuel P. Huntington dalam Cyrill E. Black, 1976:30).

Kebijaksanaan untuk melakukan industrilisasi, adalah tindakan konkrit dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang modernis. Walaupun pencapaiannya sulit, banyak negara berkembang berorientasi kepada modernisasi. Dikemukakan oleh Berger (1982:97), "etika politik dan perubahan sosial membawa piramida korban manusia, dalam arti korban pembangunan di negara berkembang lebih banyak terjadi pada lapisan bawah atau massa". Korban pembangunan tidak dapat ditangani oleh aparat pemerintahan desa sebagai organ paling bawah. Institusi ini terkesan tidak memiliki otoritas apapun untuk menghentikan pembangunan pabrik di desa yang tidak konsisten nilai-nilai sosial kultural pedesaan.

Hirarki yang ketat dalam pemerintahan, menciptakan pola komunikasi antara atasan dan bawahan yang kaku pada tataran birokrasi. Ditambah lagi pengaruh budaya feodalistik yang masih kuat dalam pemerintahan, maka pola kekuasaan cenderung melahirkan hubungan patron-client. Model relasi ini memposisikan rakyat pada objek yang harus patuh dan tunduk terhadap patronnya. Sedangkan pemerintahan desa seperti halnya dalam sosok sebagai pelengkap kekuasaan, dan menjadi sumber dukungan terhadap pemerintah dalam kalkulasi jumlah massa.

Pabrik melalui pemuka pendapat biasa menyebarkan pesan yang baik-baik kepada rakyat sekitarnya, misalnya tentang telah dipenuhinya berbagai peraturan dalam pembangunan pabrik, seperti perijinan yang diperoleh dari pemerintah, tersedianya kesempatan kerja, pembangunan sekolah, bantuan kepada desa, tawaran kerjasama dalam penanganan limbah dan kegiatan lain yang menguntungkan masyarakat sekitarnya.

Dengan strategi meningkatkan kehidupan masyarakat setempat, maka masyarakat mempunyai harapan yang tinggi terhadap pabrik, mereka bahkan seperti tidak lagi menghiraukan kerugian yang diderita akibat lahan subur yang tergusur dan pencemaran lingkungan yang terjadi. Sebagaimana pendapat Tehranian 1979:121), "modernisasi dengan industrialisasinya menjadikan masyarakat agraris berusaha untuk mengikuti pola masyarakat industri yang rasional". Pemuka pendapat pendukung industri memiliki posisi yang sangat kuat sebagai penghubung warga desa dengan pabrik. Khalayaknya semakin bertambah sejalan dengan meluasnya areal pabrik dan bertambahnya jumlah pabrik di kawasan maupun zona industri.

Pemuka pendapat yang memberikan informasi tentang industrialisasi, umumnya lebih suka bicara tentang usaha di luar pertanian dan kesempatan kerja warga desa di pabrik. Mereka sebagai elite yang menguasai berita seputar industri, biasa bekerjasama dengan pemerintah untuk menyampaikan berita kepada warga desa. Pemuka pendapat juga mendapatkan hak istimewa dari perusahaan, misalnya memperoleh limbah industri yang bermanfaat seperti potongan kain, kertas, karet, plastik dan lain-lain yang dapat dijualbelikan serta menghasilkan uang.

Dalam konteks membantu lingkungan desa, pemuka pendapat partner pengusaha ini dimanfaatkan pula oleh warga desa untuk meminta sumbangan pembangunan desa atau berbagai kegiatan lain atas nama warga desa setempat. Misalnya, permintaan sumbangan kepada pengusaha untuk perbaikan jalan desa atau poros desa, adalah konsekuensi logis beroperasinya kendaraan perusahaan yang membuat jalan di lingkungan

desa cepat rusak. Oleh sebab itu, sangat wajar jika perusahaan membantu perbaikan sarana transportasi yang dimanfaatkan bersama.

Pemuka pendapat tipe ini memiliki relasi yang kuat dengan pengusaha, kelompok kepentingan dan elite kekuasaan formal, mereka cenderung kurang akrab dalam hubungan sosial di pedesaan, mereka lebih berorientasi untuk mendekati pada simbol kekuasaan dan simbol modernisasi yang dibawa oleh pabrik.

Mereka sering berurusan dengan orang di kantor desa, kadang mereka bersama orang dari luar desa berbicara dengan kepala desa dan para pamong desa. Hubungan yang luas dengan orang dari luar desa adalah salah satu karakter dari pemuka pendapat yang menguasai informasi tentang seluk beluk kegiatan pabrik di desanya.

Dalam situasi desa dimana industri di wilayahnya berkembang dengan pesat, kecenderungan masyarakat desa mencari informasi kegiatan industri di pedesaan adalah kepada pemuka pendapat dan sumber lain yang dipercaya, yaitu orang pabrik serta penjaga keamanan pabrik yang tidak resmi. Sedangkan masyarakat biasa menyebutnya sebagai jagoan pabrik dan sebutan lain yang bersumber pada kekuatan untuk memaksa masyarakat maupun orang yang berurusan dengan pabrik.

Idealnya, pabrik di desa membawa limpahan kesejahteraan bagi masyarakat setempat, tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Dalam konteks industri pertanian, Vernon Rutan (dalam Soetomo, 1991:204), menyebutkan bahwa:

Tidak berjalannya mekanisme *trickle down effect*, atau tetesan kesejahteraan sampai ke masyarakat sekitarnya, karena tiga syarat yang tidak dapat dipenuhi yaitu pengaruh industrial urban, terjadi induksi untuk perubahan teknologi serta adanya model kelembagaan yang menyesuaikan.

Ketiga faktor itu harus saling melengkapi dan menunjang, sehingga dapat menghasilkan tetesan kesejahteraan kepada masyarakat desa yang di wilayahnya beroperasi pabrik. Perubahan teknologi tidak akan efektif jika tidak diimbangi hubungan yang serasi dengan industrial urbannya dan tidak akan berhasil mencapai sasarannya jika tidak diikuti dengan perubahan kelembagaan pada tingkat desa yang relevan.

Ketika kegiatan pabrik di desa surut, masyarakat yang semula hanya mengandalkan sumber informasi dari pemuka pendapat dan sumber lain, pada masa krisis multi dimensi, berupaya manambah sumber informasi lain, yaitu media massa. Sebagai sumber informasi alternatif yang semula

kurang dipercaya, karena isinya sebatas keberhasilan pembangunan, pada awal terjadinya krisis multi dimensi, berubah sering menyiarkan berbagai berita seputar berhentinya operasi pabrik besar, pengurangan tenaga kerja di industri dan kesulitan-kesulitan lain, yang dihadapi para pekerja pabrik di sebagian besar wilayah Indonesia. Eksistensi media massa sebagai sumber informasi yang layak dipercaya muncul ketika terjadi pergantian kekuasaan tahun 1998 di Indonesia. Padahal umumnya masyarakat desa tidak tertarik dengan berbagai berita ekonomi dan politik yang lebih banyak menyiarkan agenda pemerintah.

Masyarakat mengalami trauma yang sulit untuk dihilangkan ketika dimulainya pembangunan pabrik sebelum bergulir kebebasan politik. Mereka tidak pernah memperoleh informasi yang transparan. Penggusuran lahan subur dengan dalih untuk usaha perikanan maupun peternakan, tetapi kenyataannya yang berdiri adalah pabrik yang mencemarkan lingkungan. Masyarakat tidak begitu paham tentang dampak lingkungan yang berasal dari berbagai asap pabrik dan berbagai macam limbah yang dapat mengurangi kesuburan tanah

Misalnya, pada awal pembangunan pabrik didesa ini, tidak pernah ada kejelasan tentang jenis usaha pabrik. Orang pabrik dan lembaga-lembaga pemegang otoritas pembangunan, berjanji tidak akan menggusur lahan pertanian yang masih digarap oleh warga desa, kecuali lahan sawah tadah hujan. Bahkan dalam bentuk komunikasi nonformal, akan dibangun usaha penangkaran ikan hias, peternakan kambing atau jenis usaha lain yang tidak mengganggu habitat pertanian. Namun ternyata itu tidak sesuai, karena sawah beririgasi teknis "dalam persepsi petani", juga dibebaskan untuk lokasi pabrik yang memproduksi berbagai barang dari tekstil sampai zat kimia. Ketika bergulir demokratisasi politik, warga desa mencari informasi untuk mengetahui penyelewengan yang dilakukan oleh pemilik modal di masa lalu dengan pemuka pendapat yang konsisten menjaga nilai desa dan kepada anak muda yang terpelajar dan kelompok LSM yang banyak beroperasi di desa.

Sumber informasi yang terikat oleh komunikasi politik masyarakat desa di masa krisis, adalah pemuka pendapat yang semula ditinggal khalayaknya, mahasiswa, LSM yang sering mengatasmakan kepentingan rakyat, dan media massa. Pemuka pendapat berupaya memberikan penjelasan terhadap pengaruh negatif munculnya industri di pedesaan atau yang sejak semula kurang mendukung industrialisasi di desa. Kelompok anak muda yang terpelajar meyakinkan kepada masyarakat desa tentang

hak atas tanah pertanian yang proses pembebasan tanahnya berjalan tidak wajar, pencemaran lingkungan bahkan ajakan untuk melakukan unjuk rasa mengusut tindakan pemilik modal yang di dukung oleh kelompok kepentingan di desa.

3. Perdagangan dan Keterpurukan dalam Persaingan Usaha

Pekerjaan di luar pertanian bagi orang desa mutlak diperlukan, khususnya bagi petani berlahan sempit atau buruh tani, karena produktivitas yang dihasilkan tidak dapat mencukupi kebutuhannya. Menurut Rogers (1985:176), bahwa,

Jurang yang lebar antara pendapatan dan taraf hidup petani merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perkotaan dengan pedesaan, dan petani tradisional yang pemilikan tanah dan penguasaan teknologi terbatas, dengan petani modern (komersial) yang maju dan dapat mengakumulasikan modal dari surplus produktivitas ang terus meningkat.

Keterbatasan pemilikan dan kesejahteraan petani kecil, mendorong mereka untuk mencari penghasilan lain di luar sektor pertanian. Sebenarnya dalam komunitas pertanian juga dapat memunculkan usaha lain yang menunjang seperti perdagangan dan usaha kecil lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Ditambah dengan rencana pembangunan pabrik di desa, masyarakat mempunyai harapan besar untuk lebih meningkatkan taraf hidup.

Sebagaimana dalam kehidupan pedesaan, informasi tentang perdagangan di desa dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam situasi apapun, perdagangan desa tetap berjalan, walaupun mengalami pasang surut sesuai dengan perkembangan perekonomian desa. Berbagai barang atau jasa yang diperlukan oleh warga desa dan munculnya pembangunan industri, telah membentuk pola konsumsi baru yang bergeser lebih praktis dan tersedia setiap saat.

Perdagangan di desa ketika masih dominan sebagai lingkungan agraris, adalah usaha penyediaan kebutuhan bahan pokok, kebutuhan untuk pertanian termasuk jual beli gabah ataupun beras, tukang jahit, tukang foto, dan usaha kecil lainnya serta penyediaan kebutuhan sehari-hari masyarakat desa. Sedangkan usaha di sektor jasa berkisar pada persewaan alat elektronik, perlengkapan hiburan, audio visual (VCD), persewaan film dan layar tancap, jasa angkutan umum sampai pada usaha menyewakan kerbau atau sapi untuk membajak sawah.

Situasi desa dalam kehidupan yang bersahaja dengan tingkat kekerabatan yang tinggi, menjadikan pemuka pendapat sebagai sumber informasi yang selalu dicari oleh khalayaknya. Kewibawaan yang dimiliki berdasarkan pada otoritas tradisional masih menempatkannya sebagai orang yang dipercaya di desa dalam urusan perdagangan. Sejak di desa baru mulai ada kabar akan dibangun pabrik, mereka selalu mencari berita dan minta nasehat dari pemuka pendapat untuk kelancaran usaha. Sebagai orang yang dihormati dan memiliki kemampuan “ilmu” yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang, pemuka pendapat dapat memberikan jalan keluar kalau warga desa mengalami hambatan dalam usaha.

Pemuka pendapat sebagai orang elite yang dihormati warga desa dan memiliki kemampuan supernatural atau orang desa sering menyebut sebagai mempunyai ilmu atau “orang pintar” yang memiliki kesamaan nilai dengan warga desa. Dalam pandangan Samovar, Porter dan Jain (1981: 196),

Orang yang memiliki kesamaan budaya dan nilai sosial, dapat melakukan komunikasi lebih baik dibandingkan terhadap mereka yang memiliki perbedaan dalam budaya dan nilai sosial, bahkan mempunyai prasangka (*prejudice*) terhadap kelompok lain maka komunikasi yang efektif akan terhambat.

Tokoh dengan kesamaan nilai memiliki khalayak luas di desa. Terpaan media massa dan sumber informasi lain kurang memiliki peran di lingkungan masyarakat. Perdagangan di desa yang mengembangkan atau menghadapi problem usaha termasuk persaingan dalam pasar, masih cenderung untuk menyelesaikan masalah melalui kekuatan supernatural. Informasi yang sedemikian banyak dari sumber lain seperti dari sesama pedagang yang sukses atau warga desa yang mobilitasnya tinggi, tetap kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan saran dari pemuka pendapat yang orang pintar.

Pada kurun waktu setelah pembangunan pabrik berjalan dengan pesat antara tahun 1990 sampai tahun 1997, ada orientasi untuk membuka usaha yang menyediakan kebutuhan pekerja pabrik atau minimal berusaha di seputar jalan menuju pabrik. Kecuali jika modalnya kecil mereka akan buka usaha di rumah yang menyediakan kebutuhan bagi warga desa. Kecenderungan masyarakat desa kalau mau membuka warung atau persaingan usaha diantara mereka, berujung pada keterlibatan pemuka pendapat yang berbasis agama maupun kekuatan supernatural.

Kemunculan warung makan, kios kecil dan usaha lain yang buka selama 24

(dua puluh empat) jam, adalah bentuk antisipasi terhadap tuntutan buruh pabrik yang tinggal disekitar desa. Dipihak lain toko bahan bangunan yang semakin banyak merupakan kepekaan pengusaha desa, khususnya dalam menyediakan kebutuhan masyarakat desa untuk memiliki rumah dengan bangunan yang layak.

Walaupun bermunculan usaha dan perdagangan yang menunjang kegiatan pabrik di desa, tetapi usaha tradisional yang menyediakan berbagai keperluan untuk pengelolaan sawah, perkebunan masih tetap bertahan dan usaha kecil lainnya tetap bertahan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat setempat.

Diversifikasi ataupun keanekaragaman usaha pedesaan terkait dengan sejarah hilangnya tanah pertanian dan pasang surut kehidupan petani pedesaan. Penyempitan lahan pertanian adalah kenyataan yang membawa sejumlah dampak sosial, ekonomi dan bahkan politik. Desa tidak lagi menawarkan lapangan kerja sektor pertanian yang melimpah. Sehingga tidak mengherankan, jika masyarakat desa melakukan usaha dan pekerjaan lain di luar masalah pertanian. Pengalaman singkat dari salah seorang warga desa menggambarkan hubungan antara tidak dimilikinya tanah pertanian dengan usaha skala kecil dalam perdagangan di pedesaan.

“Dulu keluarga saya memiliki sawah yang cukup luas tetapi sebagian dijual ke perusahaan. Sisanya dibagi dengan saudara lain sehingga saya hanya memiliki lahan yang tidak terlalu luas. Sebagian tanah sawah hasil pembagian keluarga milik saudara saya sudah dijual kepada petani lain atau dijual ke orang kota. Mereka menjual sawahnya dan sekarang mereka membuka warung kecil, adik saya lainnya menjadi tukang ojek yang biasa mangkal di desa lain. Banyak di keluarga saya yang menjadi pedagang sektor informal di tempat yang dekat dengan pabrik. Mereka tidak tertarik lagi dengan urusan pertanian yang semakin lama semakin sulit untuk diharapkan”.

Mengupas perekonomian desa dan masalah pertanahan yang sulit untuk dipecahkan, Chirot (1981:237), berpendapat bahwa, “*land reform* diharapkan meningkatkan produksi pertanian tetapi kenyataannya tidak sepenuhnya berhasil karena petani yang diberi tanah tidak memiliki modal untuk meningkatkan usahanya”. Jelas bahwa modal merupakan faktor yang penting selain faktor pemilikan tanah. Kesulitan pendistribusian kembali tanah kepada petani sulit untuk dilaksanakan didukung oleh Sadono Sukirno (1976:107), intinya yang menyatakan, terdapat banyak alternatif untuk menghapuskan tuan tanah, pedagang perantara desa dalam

kehidupan ekonomi. Caranya dengan mendistribusikan tanah kepada petani penggarap. Akan tetapi kenyataannya ini sedikit sekali negara yang dapat menjalankannya, karena masalah tanah memiliki dimensi kekuatan politik.

Tidak mudah untuk mengendalikan komersialisasi tanah pertanian, karena masyarakat desa sudah terpengaruh oleh kebiasaan yang menggunakan ukuran uang. Pemuka pendapat juga menghadapi sumber informasi lain yang lebih realistis yaitu para makelar tanah, para penghubung orang pabrik dengan orang desa. Masyarakat desa mencari informasi tentang orang-orang pabrik yang membutuhkan rumah atau kamar sewaan kepada para penghubung. Biasanya pemilik rumah atau tanah memberikan uang lelah kepada orang yang berhasil mencari penyewa atau pengontrak.

Hubungan warga desa dengan "orang pabrik" harus terus dibina supaya warga desa dapat mengetahui berbagai kebutuhan karyawan pabrik. Selain itu, warga desa juga berusaha untuk menawarkan berbagai barang dagangan, kepada orang pabrik, seperti hasil kebun, ternak sampai pakaian jadi. Tanpa perantara penghubung, mereka sulit untuk melakukan jual beli dengan pegawai pabrik.

Para penghubung pabrik yang terdiri dari orang desa setempat, pendatang atau keamanan pabrik, menjadi sumber informasi yang berharga bagi kelancaran usaha masyarakat desa. Sumber informasi lain adalah para pedagang perantara yang kosmopolitan dan menguasai banyak informasi perdagangan dari luar desa. Mereka memiliki pengaruh kuat untuk mengatur perekonomian desa. Sebagai kelompok yang menjalankan praktek makelar dalam komersialisasi tanah pertanian, lintah darat dan sistem ijon kepada petani maupun pengusaha kecil. Sebagian dari mereka dapat menancapkan pengaruhnya lebih kuat karena keanggotaannya dalam berbagai institusi pedesaan.

Masyarakat tidak mudah untuk melepaskan ketergantungan terhadap pedagang perantara karena usaha pedesaan banyak menekankan segi kemampuan individual tanpa mengharapkan bantuan pemerintah atau pemilik modal secara sukarela. Padahal setiap saat masih terdengar retorika elite tentang gotong royong yang dapat saling bertukar pendapat dan membantu satu dengan yang lainnya. Scott (1981:167), mengemukakan, "adat saling tolong dan hak hidup merupakan prinsip yang sesuai dengan keperluan hidup manusia dalam ekonomi pedesaan, keduanya terkandung dalam berbagai pola hubungan sosial yang nyata". Namun pada perkembangannya modernisasi menggeser pola tradisional dalam

sistem perekonomian desa. Komunikasi interaktif yang membicarakan kebersamaan dalam perekonomian desa semakin terpinggirkan oleh pembicaraan tentang hitungan untung rugi dalam perdagangan.

Walaupun muncul sumber informasi lain sejalan dengan perkembangan industri, pemuka pendapat tetap menjadi rujukan pendamping, dalam urusan perdagangan di desa. Pemuka pendapat dipercaya dapat mendorong kelancaran usaha sehingga mendatangkan keuntungan yang memadai serta mampu mengimbangi usaha lain yang sejenis di sekitar pedesaan lokasi pabrik

Warga desa, termasuk yang bekerja di pabrik dengan sentuhan modernisasi tetap mengandalkan pemuka pendapat, jika membuka usaha lain. Kelompok ini membuka usaha kecil untuk menutup kebutuhan rumah tangga. Mereka mencari berbicara dan mencari berita tentang harga, tempat meminjam modal, tempat pengambilan barang yang murah dan informasi lainnya dengan sesama pemilik usaha yang sukses. Meski demikian, mereka juga selalu mendiskusikan kelangsungan usaha saya dengan pemuka pendapat yang dipercaya mampu memberikan jalan keluar jika ada masalah. Walaupun pemuka pendapat itu bukan pedagang, tetapi pengalaman yang sedemikian luas dan menjadi sumber keluh kesah warga menyebabkan dia dipercaya dibanding orang dari kantor desa yang sering memberikan penerangan tentang peningkatan usaha kecil. Semua yang dikemukakan para tokoh dari pemerintahan desa, secara teoritis memang bagus tetapi saya tidak dapat mengikuti aturan yang mengikat, misalnya soal pengajuan kredit dan cara mengelola usaha kecil dengan profesional. Itu sangat rumit, kami butuh informasi yang praktis seperti bagaimana bisa mendapat bahan baku yang murah dan pemberian bantuan modal yang tidak banyak aturan. Selain itu, warga desa lebih suka bertanya kepada pemuka pendapat yang memberikan saran praktis dengan mengandalkan keluasan hubungan, maupun merujuk pada aspek religius.

Jelaslah disini bahwa warga desa menghendaki informasi yang praktis, bahkan sebagian lebih suka menerima solusi untuk memecahkan persoalan bisnis dari pemuka pendapat sebagai elite desa yang dihormati dan diikuti semua petunjuknya, dibandingkan dengan pemecahan masalah menggunakan teori manajemen atau berbagai ketentuan formal lainnya dari penyuluh usaha kecil dari lembaga formal organ kekuasaan.

Keterlibatan masyarakat desa untuk mendukung pesan pemerintah pada akhirnya hanya bersifat mobilisasi untuk pertemuan saja sebab pada kenyataannya substansi yang terkandung di dalam pesan itu sendiri tidak

dapat dijalankan. Pembangunan ekonomi yang mampu mengikutsertakan warga desa dikemukakan oleh Rogers dan Adhikarya (1978:3-9) intinya adalah, dalam upaya perbaikan perekonomian desa yang partisipatif, partisipan harus mengekspresikan kebutuhan mereka dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan melalui saluran komunikasi yang tersedia. Jika hal itu terjadi agen pembangunan dapat lebih responsif dalam memenuhi kebutuhan spesifik mereka, dan mungkin dapat mempersempit kesenjangan manfaat sosial ekonomi yang selalu dirisaukan.

Saluran komunikasi yang interaktif dan transaksional diperlukan oleh masyarakat untuk menjadi partisipan pembangunan, tetapi ketika model komunikasi yang dilakukan bersifat otokratis, masyarakat desa tidak lagi memosisikan para agen pemerintah sebagai sumber informasi jika warga desa memerlukan berita tentang kelancaran usaha mereka.

Dalam situasi industri yang berkembang pesat, kecenderungan masyarakat desa untuk mencari informasi dan berita perdagangan di desa diarahkan kepada pemuka pendapat yang memiliki peran besar di masyarakat dan sumber informasi lainnya yang dapat memecahkan masalah atau memperlancar usaha seperti para penghubung warga desa dengan pabrik.

Usaha pedesaan yang diwarnai dengan mencari kesempatan dan peluang, pada perkembangannya menghadapi perubahan sejalan dengan geliat demokrasi. Warga desa membutuhkan banyak informasi mutakhir dan transparan untuk dapat berdagang dengan tenang dan leluasa. Mengingat pada masa sebelumnya, persaingan usaha tidak jarang menyembunyikan informasi yang berguna, bahkan kadangkala sumber pesan sengaja melakukan pengelabuan terhadap konsumen atau pesaing di sekitarnya. Di sisi lain, informasi yang diperoleh melalui media massa dan teknologi komunikasi yang memungkinkan mengirim serta menerima pesan dalam waktu yang singkat, bukanlah berita yang dipercaya dengan mudah.

Karena itu, masyarakat masih mengandalkan pemuka pendapat untuk membicarakan berita tentang perdagangan desa. Informasi di luar hubungan langsung dengan pemuka pendapat hanyalah sebagai pelengkap dalam upaya pencarian informasi. Segala keputusan untuk berusaha akan bergantung juga kepada pemuka pendapat yang dipercaya. Kesuksesan berusaha akan bergantung pada perolehan informasi dan hubungan baik dengan sumber pesan yang dipercaya menguasai berita tentang dunia usaha.



KOMUNIKASI POLITIK, KEKUASAAN DAN DEMOKRASI

Selama pemerintahan Presiden Soeharto, pedesaan bukan habitat yang cocok untuk kehidupan partai dan masyarakat tidak layak untuk berpolitik di tingkat desa, lebih baik pikiran dan tenaga di salurkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Oleh sebab itu tidak ada pengurus partai di tingkat desa, kecuali Golongan Karya yang mengidentifikasi sebagai institusi kekayaan, dapat menggunakan kantor dan lembaga pedesaan sebagai basis politiknya.

Tidak ada aliran kelompok politik di desa, sebagian besar berorientasi pada aliran politik. Kepala Desa yang menjadi ujung tombak untuk menanggung konstituen besar-besaran dalam pemilu. "Sejarah politik Indonesia telah mencatat bahwa penyelenggaraan pemilu yang telah berlangsung lima kali dalam pemerintahan Orde Baru, secara sistematis diorientasikan untuk mempertahankan kekuasaan". (KIPP,1999:1). Model pengendalian politik yang berhasil menempatkan politik sebagai pembicaraan yang sensitif dan elitis, menjadikan masyarakat desa tidak tertarik atau takut ketika berbicara tentang politik.

Kebutuhan terhadap informasi masyarakat desa dalam komunikasi politik, meliputi kekuasaan lokal atau pelaksanaan pemerintahan desa oleh aparat desa. Sebagaimana dalam komunikasi politik yang didalamnya menyangkut pembahasan pemerintahan dan aparaturanya. "Komunikasi politik menelaah dampak pemerintahan terhadap media massa atau dampak media terhadap perilaku pejabat pemerintah. dan saluran formal/informal dalam menjalankan pemerintahan". (Rivers. et.al, dalam Charles R. Wright, 1975: 81-85).

Dalam konteks ini, informasi tentang jalannya pemerintahan setempat atau kekuasaan lokal merupakan sesuatu yang ingin diketahui oleh khalayak desa, disamping informasi mengenai pemilihan umum yang terkait dengan politik pedesaan dan eksistensi tokoh serta partai politik di desa pada masa Orde Baru.

1. Informasi Kekuasaan Lokal dan Perkembangan Demokrasi

Masyarakat desa sebagaimana di pedesaan lainnya tidak dapat secara terbuka mendiskusikan kekuasaan Kepala Desa beserta aparat dan lembaga-lembaga desa sebagai pendukung pemerintahan. Dengan di dukung oleh pemerintah yang lebih tinggi di tingkat kecamatan dan kabupaten, kepala desa memiliki kekuasaan yang sangat kuat.

Kekuasaan menurut Timasheff (1967:167), "sebagai kemampuan yang dimiliki orang atau sejumlah orang untuk melaksanakan kehendaknya walaupun kehendak itu bertentangan dengan keinginan orang lain". Kekuasaan dijamin dengan aturan dan hukum, tetapi dukungan kuat dari semua lembaga, partai politik dan struktur kekuasaan yang lebih tinggi, membuat Kepala Desa dalam menjalankan kekuasaannya tidak dapat dikritik ataupun di kontrol oleh masyarakat yang telah memberikan mandat dalam pemilihan Kepala Desa.

Kekuasaan lokal atau sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Kepala Desa dalam situasi desa pertanian dan awal tumbuhnya industri, berjalan tanpa gejolak yang berarti, walaupun masyarakat tidak puas dengan pola pemerintahan di desa tetapi kekuatan kepala desa dengan segenap orang-orang yang melindungi serta berbagai lembaga desa yang dibentuk, sangat sulit untuk menolak kebijakan organ kekuatan negara.

Dalam situasi kekuasaan lokal yang otokratis, pemuka pendapat merupakan sumber informasi bagi masyarakat dalam komunikasi politik. Pemuka pendapat yang selalu bekerjasama ataupun yang tidak sejalan dengan aparat desa memiliki peran dominan dalam memberikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan di desa dengan segala macam kebijakan tentang pembangunan dan politik pedesaan.

Kecenderungan yang otokratis, tidak pernah menghiraukan aturan yang berlaku umum tetapi membuat ketentauan sendiri untuk melegalkan segala tindakannya. Menurut Smith ketika menyikapi perilaku tersebut adalah:

Kebanyakan masyarakat pedesaan menunggu bimbingan Kepala Desa dalam segala bentuk tindakan dan partisipasinya pada pembangunan desa,

bahkan untuk daerah tertentu Kepala Desa dianggap sebagai raja kecil yang dapat menentukan semua kemauannya tanpa dapat ditolak, disamping karena mempunyai posisi yang kuat sebagai wakil pemerintah di desa maka masyarakat desa juga mengikutinya. (Theodore M. Smith dalam Kuntjaraningrat, 1984:197)

Pada masa pertanian, otoritas tradisional sangat kuat di desa, semua yang dikemukakan oleh pemuka pendapat sebagai kepanjangan tangan Kepala Desa masyarakat cenderung untuk mematuhi. Jika masyarakat yang tidak puas atau merasa dirugikan oleh kepemimpinan Kepala Desa, mereka akan mencari informasi yang lebih terinci kepada pemuka pendapat.

Demikian pula sebaliknya, masyarakat yang hanya ingin mempertegas berbagai kebijakan pemerintahan desa sebelum menyatakan dukungannya mereka juga akan mencari pemuka pendapat untuk memberikan pengarahan dan nasehat-nasehat. Karena pemerintah kecamatan dan aparat negara lain mendukung oragn formal pedesaan, maka warga desa mencari informasi kepada pemuka pendapat, yang memiliki informasi memadai terhadap jalannya pemerintahan, termasuk pemilihan kepala desa. Jika masyarakat desa menghadapi masalah yang belum dipahami, akan menanyakannya supaya lebih jelas ataupun minta klarifikasi kepada pemuka pendapat, untuk menjelaskan berbagai macam kebijakan lembaga-lembaga pedesaan.

Pemuka pendapat adalah sumber informasi yang paling banyak dirujuk oleh masyarakat desa. Keputusan penting masyarakat desa untuk bertindak kolektif maupun individual sangat tergantung dari pemuka pendapat yang masih memiliki otoritas tradisional. Dinyatakan oleh Altman dan Taylor (1973:131), "persamaan dalam aspirasi dan tujuan akan membentuk komunikasi yang lebih akrab dalam membangun hubungan diantara individu yang berinteraksi". Perbedaan dalam karakteristik pedesaan dianggap mengganggu keselarasan dalam hidup bermasyarakat.

Kesamaan orientasi menjadi pilihan warga desa untuk berkonsultasi dan mencari informasi kepada pemuka pendapat di lingkungannya. Sedangkan informasi dari sumber lain dan media massa tetap malalui saringan pemuka pendapat dalam komunikasi dua tahap (*two-step flow*). Kedudukan pemuka pendapat dalam kaitannya dengan media massa disebutkan oleh Rogers dan Svenning (1969:227), biasanya pemuka pendapat di desa mempunyai frekuensi berhubungan dengan media massa lebih besar dibandingkan dengan masyarakat lainnya, sehingga dia mempunyai pengetahuan yang luas, dan itu salah satu yang dipakai untuk berhadapan dengan khalayaknya.

Pemuka pendapat sebagai elite dalam masyarakat, merupakan sumber informasi yang dicari dan dipercaya masyarakat desa dalam situasi desa pertanian. Berbagai informasi di pedesaan dari sumber lain seperti media massa maupun dari hasil interaksinya dengan orang lain seperti birokrat desa, agen pembangunan pemerintah, aktivis partai politik hanyalah sebagai pelengkap untuk berbicara dengan pemuka pendapat.

Di era kejayaan industri di desa, Partai Golkar memiliki eksistensi yang sangat besar dalam mewarnai kehidupan masyarakat pedesaan. Dalam skala nasional kondisi industrialisasi di desa adalah representasi dari kekuatan kekuasaan Orde Baru yang berakar sampai pada tingkat bawah di lingkungan desa. Namun di pihak lain masyarakat desa tetap statis, dan masih menonjolkan sifat mekanistik, dengan naluri untuk selalu bersikap sama terhadap segala bentuk rangsangan perilaku atau simbol dari luar komunitasnya.

Secara umum masyarakat desa dalam kalkulasi kekuatan kekuasaan lokal dipahami sebagai suatu kategori sosial yang seragam dan bersifat umum, atau dalam persepsi Smith dan Zopf (1970:161) terdapat dua tipe berbeda di negara berkembang yaitu, "*one class system*" dengan sifat kelompok yang seragam dan *two class system* yang satu pihak masih bersifat tradisional dan pihak lain lebih bersifat rasional modern". Dengan sifat yang seragam, Kepala Desa dalam menjalankan kekuasaannya merekrut pemuka pendapat yang dikenal luas masyarakat. Menguasai satu pemuka pendapat berarti menguasai pula pengikut yang dimiliki. Dengan kekuasaannya, tidak sulit bagi kepala desa untuk mempengaruhi pemuka pendapat supaya mendukung kebijakan lembaga-lembaga pemerintah.

Dalam konteks kekuasaan legal yang birokratis lebih unggul, Etzioni mengungkapkan, *Position power* sebagai kekuasaan yang diperoleh dan di dukung oleh peraturan-peraturan dalam struktur kekuasaan formal, kekuasaan ini lebih banyak mengandalkan otoritas formal daripada personal power yang berdasarkan pada keteladanan di lingkungan pengikutnya. (Etzioni, dalam Robbins, 1980:80).

Kekuasaan pada level pemerintahan desa berjalan dengan otokratis, semua kebijakan desa akan dikendalikan oleh aparat desa dan pamong desa. Kondisi ini tentu tidak kondusif bagi masyarakat untuk melakukan penolakan terhadap program organ kekuasaan pedesaan. Pada situasi ini terdapat pemuka pendapat yang mendukung dan tidak mendukung kebijakan organ atau lembaga pedesaan. Biasanya pengelompokan ini terjadi pada waktu pemilihan kepala desa, dan berlanjut sampai masa

pemerintahan kepala desa yang terpilih, dan masing-masing kelompok juga memiliki relasi khusus dengan para pemegang kekuasaan di tingkat kecamatan maupun kabupaten.

Dengan demikian dalam urusan pemerintahan desa kelompok pemuka pendapat ini memiliki ketergantungan terhadap kekuasaan negara. Sebagaimana diketahui bahwa kandidat kepala desa dapat bersaing dalam pemilihan setelah melalui seleksi dari pemerintah. Oleh sebab itulah dukungan aparat pemerintah mutlak diperlukan. Tetapi intinya, bahwa dalam kekuasaan lokal masyarakat mencari informasi dari pemuka pendapat. Pada umumnya, warga desa biasanya minta informasi tentang jalannya pemerintahan di desa ini kepada pemuka pendapat. Walaupun mereka tidak mengikuti berbagai proses pengambilan keputusan dalam program pemerintahan desa tetapi, memiliki perhatian besar terhadap berbagai penyelenggaraan pemerintahan.

Pemuka pendapat adalah sumber informasi yang dominan di lingkungan masyarakatnya, sehingga berita yang diperoleh dari sumber lain biasanya akan diinformasikan juga dan disaring lagi oleh pemuka pendapat sebelum disebarkan kembali kepada khalayaknya dalam bentuk anjuran dan petunjuk untuk mendukung atau malahan mengkritik pemerintahan desa. Tetapi tindakan mengkritik dalam komunikasi politik yang egaliter, tidak pernah dilakukan dengan terus terang mengingat dukungan kepada kepala desa sebagai penguasa di desa, cukup kuat dari aparat pemerintahan di kecamatan dan kabupaten.

Komunikasi yang diperoleh dari berbagai macam sumber, merupakan karakteristik utama ketika terjadi krisis ekonomi, yang implikasinya sampai di perusahaan-perusahaan di pedesaan. Elite yang biasa berkolaborasi dengan aparat pemerintah maupun yang tidak sejalan dengan pemerintah, bukan sebagai sumber berita utama ketika masyarakat mencari informasi. Warga desa juga bersuara lantang, mengkritik kebijakan lembaga-lembaga pemerintahan, menyatakan ketidakpuasannya dan menuntut institusi pendukung dan orang lingkaran kekuasaan desa, agar bicara tentang apa yang seharusnya dilakukan menghadapi perubahan kehidupan politik.

Tuntutan yang sangat menonjol adalah, agar pemerintah memahami keamauan warga desa, menuntut kepekaan dan kemampuan pemuka pendapat untuk memantau aspirasi mereka yang selalu tidak jelas dipermukaan. Dengan demikian sekalipun lapisan bawah masyarakat merasa tidak terwakili dalam lembaga desa, tuntutan mereka dapat diakomodasikan.

Penguasaan informasi politik dan kekuasaan oleh kelompok yang membawa jargon reformasi, diikuti oleh mereka yang ketika Orde Baru berkuasa dianggap sebagai *outsider*. Tidak ada kelompok outsider yang melembaga di desa, tetapi mereka muncul berganti nama sesuai dengan masalah yang menjadi perdebatan maupun konflik. Mereka akan memberikan nama dengan forum, gerakan, komite, barisan, koalisi dan digabungkan dengan istilah rakyat, korban, reformasi dan lain-lain istilah yang lebih bernuansa demokratis.

Siaran media elektronik yang sebelum pergantian kekuasaan penuh dengan penayangan kesuksesan penguasa negara, berubah menjadi penuh dengan siaran penyelewengan yang dilakukan penyelenggara negara dan penguasa politik. Menghadapi situasi yang berubah dengan cepat, warga desa mencari informasi tentang penyelenggaraan pemerintah setempat, dengan menanyakan kepada anak-anak muda yang biasa melihat ataupun mengikuti unjuk rasa di luar desa. Berita dari televisi, surat kabar bahkan cerita dari internet yang diperoleh melalui mahasiswa, menjadi pengetahuan bagi warga desa. Sedangkan pemuka pendapat, karena memiliki informasi dari sumber lain dan media massa yang sama, maka kami lebih banyak berbagi informasi dan mendiskusikannya.

Masyarakat desa menempatkan media massa, pemuka pendapat dan tokoh-tokoh gerakan massa sebagai sumber informasi yang selalu dicari. Tidak ada yang dijadikan sebagai rujukan utama tetapi ketiga sumber tersebut saling mendukung untuk melawan kebijakan yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Situasi politik kekuasaan lokal di pedesaan dan informasi yang diperlukan dalam menghadapi persaingan kekuasaan di pedesaan, tampak dari sikap politik warga desa. Mereka sudah tidak lagi merasa bahwa aparat dari lembaga-lembaga formal pedesaan, sebagai entitas yang ditakuti. Warga desa berusaha untuk selalu memperoleh berita terbaru mengenai jalannya pemerintahan dari berbagai sumber berita. Mereka terus mengikuti dan mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh elite dalam kekuasaan pemerintah. Masyarakat yang dulu tergantung kepada para pamong desa yang berlandung dibalik penguasa yang lebih tinggi, bnerubah sikap dengan menjaga hubungan baik dengan rakyatnya.

Kepercayaan, kepatuhan dan ketakutan terhadap aparat pemerintah telah luntur. Bahkan mereka lebih keras ikut mengontrol tingkah laku pemerintahan desa yang menyimpang. Pengawasan yang layak terhadap jalannya demokrasi dikemukakan oleh Larry Diamond (1994: 7), yang intinya

menyatakan, basis fungsi demokrasi adalah kemampuan masyarakat sipil yang dapat mengontrol kekuasaan negara dengan pembatasan yang jelas dalam menjalankan pemerintahan dan mengatur institusi politik yang lebih demokratis. Masyarakat sipil dapat memonitor dan menggariskan kewajiban demokrasi bagi rezim yang berkuasa.

Pembahasan dan pembicaraan yang semula sensitif dalam komunikasi politik, menjadi terbuka dan semua rakyat desa bebas mendiskusikannya. Interaksi dan komunikasi diantara masyarakat pedesaan kerap kali diwarnai dengan ulasan terhadap politik di tingkat lokal maupun pada tataran lebih luas, bicara tentang kepentingan dan jargon lain yang biasa dipakai pidato oleh tokoh politik serta aparat pemerintah pada berbagai tingkatan dalam struktur kekuasaan.

Kebenaran isi dan kelayakan dari suatu informasi politik kekuasaan lokal tidak dihiraukan oleh masyarakat desa. Mereka senang mencari berita yang menyangkut kekuasaan lokal tanpa perlu memperhatikan kesempurnaan suatu pesan. Pada prinsipnya, kekuasaan harus selalu diawasi dan dikritik maka pemegang kekuasaan yang sudah berupaya menciptakan keteraturan dan ketertibanpun akan selalu dicari kesalahannya

2. Hegemoni Pengendalian Informasi Pemilu

Secara politik, sejak pemerintahan Orde Baru, pemilihan umum dimenangkan oleh Golongan Karya. Karena itu pemilihan umum bukan ukuran partisipasi politik masyarakat yang substansial, terlebih lagi kampanye menjelang pemilihan umum pada masa sebelum reformasi, lebih mirip sebagai mobilisasi massa untuk menunjukkan kekuatan kelompok politik. William Liddle (1973) menilai dengan lugas karakteristik partai politik di Indonesia dengan menyatakan sebagai berikut:

“Partai politik sangat berorientasi kepada ideologi, bukan kepada program, memperburuk pertentangan ideologis dalam masyarakat Indonesia di tingkat elite dan massa, menciptakan persaingan organisatoris dalam masyarakat karena partai selalu memlihara dukungan massa untuk memperlihatkan kekuatan persaingan di kalangan elite, tokoh partai adalah oportunist yang hanya tertarik untuk meningkatkan kesejahteraan diri mereka dan teman dekat mereka, bukan memperjuangkan kepentingan masyarakat” (William Liddle, dalam Gaffar, 1988:5).

Desa di Indonesia merupakan wilayah strategis untuk memperoleh konstituen dalam pemilihan umum, mengingat bahwa penduduk desa akan mengikuti pemuka pendapat atau patronnya dalam pilihan partai politik.

Masyarakat desa sepanjang pemerintahan yang dianggap floating mass, tidak dapat dengan bebas menetapkan pilihan partai selain harus sejalan dengan partai pemerintah. Menurut Gerth dan Mills (1981:180), "partai adalah suatu asosiasi sukarela dari para anggotanya yang dimaksudkan untuk memperoleh kekuasaan dalam suatu negara, partai dapat mewakili kepentingan dan tujuan dari kelas, status atau campuran antara kelas dan status".

Partai politik yang ada dipedesaan juga menunjukkan gejala yang sama. Intinya partai bukan sekadar dominasi kelas sosial, atau status ekonomi yang di dalamnya terdapat elite dan massa, tetapi partai politik lebih tampak sebagai organisasi inklusif yang didalamnya terdapat komunikasi integratif antara kelas sosial, ekonomi dan pemilik kekuasaan formal dalam negara.

Depolitisasi menjadi agenda penting pemerintah, dengan dalih komitmen yang kuat pada ekonomi. Dalam situasi desa pertanian, kekuasaan partai politik hampir tidak tampak di pedesaan, kecuali kekuatan Golongan Karya melalui aparat birokrasi dan lembaga-lembaga pedesaan dalam kontrol pemerintah. Kelompok petani, pemuda, ibu-ibu rumah tangga dan entitas lain yang diorganisasikan oleh pemerintahan desa dalam jaringan kekuasaan kekuatan partai yang mendominasi kekuasaan.

Meskipun semua institusi desa sudah dibentuk dengan orientasi mendukung partai yang berkuasa tetapi pemerintahan desa menggunakan pula pemuka pendapat untuk mempengaruhi masyarakat supaya mengikuti pilihan politik pemerintah. Peran dari orang yang dipercaya sejalan dengan pendapat Roucek dan Warren (dalam Rahardjo, 1999:73), menjelaskan, "masyarakat desa memiliki karakteristik sebagai kelompok primer, faktor geografik menentukan pembentukan kelompok, hubungan lebih bersifat intim dan awet, homogen, mobilitas rendah, dan cenderung mengikuti orang pemimpin kelompok yang memiliki otoritas tradisional".

Untuk urusan pilihan partai dalam pemilihan umum, pemuka pendapat di desa sangat jarang yang memiliki pilihan individual. Umumnya walaupun dalam komunikasi politik, memiliki perbedaan berbagai hal dengan pemerintah, tetapi urusan partai politik bisa saja seragam. Setidak-tidaknya dapat dilihat dari hasil pemilihan umum tahun 1997, dimana Golongan Karya menanggung suara mutlak dari jumlah pemilih. Mayoritas, warga desa mencari informasi tentang pilihan partai politik dalam pemilihan umum dengan pemuka pendapat.

Tetapi umumnya, pemuka pendapat memberikan saran supaya warga desa mengikuti saja pilihan kepala desa. Padahal pemuka pendapat tersebut dalam berbagai program pembangunan desa sering tidak sejalan dengan kebijakan lembaga-lembaga desa sebagai sub-organ kekuatan pemngusaha. Tetapi dalam urusan pemilihan umum, mereka mengikuti mayoritas di desa. Dalam konteks ini, pemuka pendapat adalah pusat informasi bagi masyarakat desa untuk membicarakan politik dan pemilihan umum. Tidak ada sumber informasi lain sebagai tempat bertanya tentang politik di desa. Para politisi desa di luar Golkar sulit ditemukan, sehingga dalam pemilihan umum biasa terjadi bahwa saksi dari partai tidak ada atau mereka tidak bersedia karena takut terhadap akibat yang tidak diinginkan.

Dalam perjalanannya, industri yang berkembang namun tanpa distribusi berarti kepada masyarakat desa adalah salah satu masalah pembangunan. Kekuatan industri yang diklaim sebagai keberhasilan depolitisasi dan konsep floating mass, menjadikan komunikasi politik semakin jauh dari masyarakat desa. Bahkan untuk sekedar pembicaraan pilihan partai politik dalam pemilu juga didominasi oleh sekelompok pemuka pendapat atau aparat pemerintah beserta lembaga - lembaga desa pendukungnya.

Dan Nimmo (1993:8) mengemukakan, bahwa "komunikasi politik adalah setiap jenis penyampaian pesan politik dari suatu sumber kepada sejumlah penerima, baik dalam bentuk kata-kata, tertulis ataupun dalam bentuk lambang-lambang". Pengertian lain yang menekankan pada bentuk pesan politik untuk tujuan penggunaannya, disampaikan oleh Ellul (dalam Suwardi, 1995:9), menyatakan, "Komunikasi politik adalah setiap jenis penyampaian pesan, baik dalam bentuk lambang yang tertulis atau tidak tertulis, dalam kata-kata dan isyarat yang dapat mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung kedudukan seseorang yang ada dalam puncak struktur kekuasaan dalam suatu sistem"

Komunikasi yang mempunyai nilai politik, adalah hegemoni penyelenggara kekuasaan negara dan pemuka pendapat yang membantu kelancaran jalannya depolitisasi desa. Di desa, informasi politik sepenuhnya dikendalikan oleh jaringan kekuasaan pemerintah. Warga desa mencari informasi pemilihan umum dengan pemuka pendapat, walaupun mereka sesungguhnya memperoleh banyak informasi tentang pemilihan umum, tetapi pada akhirnya kami akan menanyakan kepada pemuka pendapat dan cenderung mengikuti sarannya.

Pemuka pendapat sebagai rujukan utama ketika warga desa mencari informasi tentang partai apa yang harus dipilih dalam pemilihan umum.

Informasi dari sumber lain dan media massa yang gencar memberitakan tentang politik dan pemilihan umum juga bukan menjadi sumber informasi. Sebab depolitisasi menghendaki masyarakat desa supaya mendukung partai penguasa.

Hubungan antara kekuasaan dengan kelompok pendukungnya dalam pemerintahan yang di dukung oleh kelompok politik dengan keteraturan sistem, dikemukakan Max Weber, "kelompok politik yang berkuasa, berupaya untuk memelihara keteraturan melalui organ-organ pendukungnya yang dibentuk dengan untuk menjaga ketertiban, menerapkan ancaman atau paksaan fisik, demi menjaga kontinyuitas kekuasaannya". (Max Weber, dalam Timasheff, 1967:218).

Sebagai kekuatan politik yang berperan dalam penyelenggaraan negara, mereka membentuk jaringan organisasi yang kohesif dan dapat mempertahankan kekuasaannya. Salah satunya yang menjadi bagian dari jaringan kekuasaan pada masa berkembangnya industri di desa adalah pemuka pendapat.

Akhir zaman *floating mass* yang bersamaan dengan pergantian kekuasaan tahun 1998, membawa dampak yang luas terhadap kehidupan politik. Masyarakat yang selama puluhan tahun konservatif, apolitis dan tidak peduli dengan pergantian dalam siklus lima tahunan di tingkat elite, tiba-tiba berubah drastis pada tahun 1999. Sementara itu juga banyak pihak dalam masyarakat menganalogikan era itu dengan kebebasan politik yang kebablasan dan tidak beradab. Padahal pada pemilu 1997, di beberapa TPS desa ini sering kesulitan mencari saksi untuk partai di luar Golkar. Dalam berbagai kesempatan menjelang pemilihan umum elite pemerintah sudah lazim untuk menyuruh warga untuk memilih partai penguasa, yang selalu menang dalam pemilu.

Di awal reformasi, semua bebas bicara politik dan warga desa senang mengikuti berita politik dalam siaran televisi dan radio Jakarta. Berita tersebut biasanya dibicarakan lagi dengan sesama teman atau ditanyakan kepada orang yang lebih paham, mengingat semakin banyak berbagai sikap politik yang membingungkan. Dengan pemuka pendapat, mereka tidak lagi mencari ataupun petunjuk informasi, tetapi lebih banyak menayamkan sikap dalam menghadapi gejolak politik yang sampai ke desa.

Perhatian yang besar terhadap informasi politik, menimbulkan semangat untuk meniru terhadap kejadian di tempat lain. Masyarakat merasa memiliki kedudukan politik yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan aparat pemerintah. Mereka dengan mudah mengambil keputusan yang

mengkhawatirkan, bentuk kepedulian rakyat terhadap proses bernegara adalah menduduki, merepresi pusat-pusat kebijakan negara, menyuruh turun pejabat yang tidak disukai dan dengan mudah mengerahkan massa di jalan-jalan untuk menuntut perubahan.

Sebuah perubahan sikap politik emosional dan penuh perlawanan dari warga desa juga gampang muncul, karena mereka belajar dari media elektronik. Kehidupan politik dalam skala nasional yang penuh dengan konflik kepentingan, merupakan salah satu tayangan televisi dan berita surat kabar yang tidak pernah habis. Berita politik media massa tersebut adalah tontonan sehari-hari rakyat desa. *Headline* surat kabar yang bombastis dan menyramkan tidak luput dari perhatian orang desa. Mereka pun memiliki keinginan mengadopsi perilaku pengerahan massa dan menekan orang-orang yang tidak disukai dalam politik lokal di pedesaan. Dinamika politik pedesaan di Klari menjelang pemilihan umum tahun 2004 semakin diwarnai dengan kompetisi antar partai.



KOMUNIKASI POLITIK PEDESAAN

Komunikasi yang dilakukan antara pemuka pendapat dan khalayaknya di pedesaan dapat mencakup dua model besar yaitu linier dan interaksional. Model linier merupakan komunikasi satu arah (*one-way view of communication*), seperti halnya *hypodermic needle theory*, yang sejalan dengan *one-step flow model*, maka model ini percaya bahwa media massa dapat menimbulkan pengaruh yang kuat bagi khalayak.

Dalam penyebaran informasi, media massa tidak selalu memiliki pengaruh langsung, tetapi berlangsung dua tahap seperti pada *two-step flow model*, tahap pertama, pemuka pendapat memperoleh dari sumber informasi media massa sedangkan tahap kedua, pemuka pendapat menyebarkan informasi pada pengikutnya. Dengan demikian model linier memiliki keterkaitan pula pada pola penyebaran informasi yang berbeda.

Terdapat variasi lain yang melengkapi model linier, seperti model persepsi selektif dan teori efek terbatas. Menurut Gonzales (dalam Jahi: 1988:8), “keperkasaan pengaruh media atau sumber pesan lain tidak bersifat mutlak, pesan yang diterima akan diseleksi oleh khalayaknya”. Sedangkan teori efek terbatas berprinsip, media massa menimbulkan efek yang kecil atau bahkan tidak menimbulkan efek pada khalayaknya yang sangat selektif. Khalayak cenderung menyeleksi dengan ketat semau informasi yang diterima.

Model komunikasi yang kedua adalah interaksional sebagai suatu proses komunikasi dua arah (*cyclical process*), dimana setiap partisipan memiliki peran ganda dalam arti suatu saat bertindak sebagai pengirim namun pada waktu yang lain bertindak sebagai penerima informasi. Selain model dua model tersebut, ada model transaksional. Menurut Mulyana (2000:111):

Implisit komunikasi sebagai transaksi adalah proses penyandian (*encoding*) dan penyandian balik (*decoding*). Kedua proses itu meskipun secara teoritis dapat dipisahkan, sebenarnya terjadi serempak, bukan bergantian. Keserempakan inilah yang menandai komunikasi sebagai transaksi.

Jika merujuk pada pendapat tersebut, komunikasi tidak memilah antara sumber pesan dan penerima pesan karena semuanya akan berlangsung tanpa membedakan lagi sebagai pengirim maupun penerima pesa. Mengingat model transaksional memiliki karakteristik tersendiri yang lebih kompleks, maka dalam penelitian ini lebih ditekankan pada model interaktif.

Dalam perspektif interaktif, Rogers dan Kincaid (1981: 85), menganggap komunikasi sebagai suatu proses yang partisipan-partisipannya bertukar tanda informasi untuk mengurangi ketidakpastian, dalam komunikasi terdapat transaksi atau saling tukar informasi diantara para partisipan dengan caranya sendiri telah memberikan kontribusi pada proses tumbuhnya pengertian.

Diantara model linier dan model interaktif, dikemukakan pula gaya komunikasi sebagai bahan analisis yang dikaitkan dengan dua model pokok tersebut. Gaya komunikasi dapat muncul diantara pembicaraan yang linier maupun interaktif. Gaya komunikasi tersebut adalah *The Controlling Style*, bersifat mengendalikan dan memaksa orang lain untuk mematuhi kehendaknya, *The Equalitarian*, penyebaran pesan verbal lisan maupun tertulis bersifat dua arah, *The Structuring Style*, komunikasi sesuai dengan sistem dan stuktur organisasional, *The Dynamic Style* yang dinamis, agresif dan berorientasi tindakan nyata, *The Relinquishing Style*, mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat atau gagasan orang lain dan *The Withdrawal Style*, ketidakinginan berkomunikasi dengan orang lain. (Lihat Koehler, Anatol dan Applbaum, 1981:48).

Untuk menentukan pola komunikasi yang lebih rinci, dalam komunikasi linier maupun interkatif, antara pemuka pendapat dan khalayak memiliki peran yang berbeda dalam komunikasi kelompok. Menurut Beal, Bohlen

dan Raudabaugh (dalam Rakhmat, 1998:170), “peranan dalam komunikasi kelompok meliputi, peranan tugas kelompok, peranan pemelihara kelompok dan peranan individual dalam kelompok”. Ketiga peran tersebut akan tampak dalam setiap interaksi antara pemuka pendapat dengan masyarakat pedesaan dengan karakteristik yang lebih spesifik pada setiap peran.

Di Klari kecenderungan pola komunikasi dapat merujuk pada berbagai referensi tersebut diatas. Pola komunikasi yang dilakukan pemuka pendapat mencakup tiga situasi, yaitu pertama, ketika desa lokasi industri karakteristik pertanian masih dominan, pada situasi ini pembangunan pabrik baru pada tahap awal pembangunan fisik dan pembebasan tanah pertanian, situasi kedua adalah masa dimana pembangunan pabrik dan kegiatan industrialisasi di desa berjalan dengan pesat, sedangkan situasi ketiga adalah situasi krisis multi dimensi yang mempengaruhi surutnya industrialisasi di pedesaan.

Dari ketiga keadaan desa, pemuka pendapat memiliki dua orientasi besar yaitu sebagian menolak industrialisasi dengan tetap setia pada sektor pertanian dan sebagian lainnya mendukung industrialisasi. Terhadap pemuka pendapat yang tidak memiliki sikap pada dua faktor tersebut, tetapi melalui pengamatan mendalam dapat diketahui orientasi yang sebenarnya yaitu mendukung atau menolak. Pengelompokan tidak dipengaruhi oleh penambahan maupun pengurangan jumlah pemuka pendapat, tetapi lebih didasarkan pada orientasi sikap dalam interaksi dan komunikasi. Misalnya, dalam situasi industrialisasi sedemikian kuatnya di desa, maka akan muncul tokoh baru pendukung industri, tetapi muncul pula tokoh baru lainnya untuk menolak industrialisasi walaupun jumlahnya tidak sebanyak pendukung industri.

Secara historis sebelum masuknya industrialisasi, pemuka pendapat memiliki kesamaan pandangan terhadap desa pertanian yang berorientasi kepada pemeliharaan nilai sosial budaya desa. Tetapi munculnya pabrik di desa telah membentuk dua orientasi utama, yaitu pemuka pendapat yang menolak industri dan lebih suka wilayahnya bertahan sebagai desa pertanian, di lain pihak terdapat pemuka pendapat yang menerima industrialisasi dan beradaptasi dengan berbagai simbol modernisasi.

Pengelompokan tersebut, bukan berarti tidak terdapat orientasi pemuka pendapat yang dalam sosok fisiknya bersikap tidak memihak. Sebab pada kenyataannya, sikap netral pemuka pendapat, memiliki kecenderungan memberikan dukungan atau menolak industrialisasi pedesaan, walaupun

dalam pola yang sangat tidak transparan dalam komunikasi politik yang dilakukan. Misalnya, pemuka pendapat yang kelihatannya netral, tetapi memiliki hubungan dalam kegiatan kerohanian di perusahaan pada hari tertentu, masyarakat cenderung akan mengelompokkan sebagai pendukung industrialisasi. Pemuka pendapat yang mengidentifikasi diri sebagai orang yang tidak memihak, tetapi aktif menyampaikan pesan pembangunan desa, termasuk didalamnya bersahabat dengan orang pabrik, juga dikelompokkan dalam pemuka pendapat yang mendukung industrialisasi.

Sebaliknya jika pemuka pendapat seolah-olah memberikan dukungan terhadap industrialisasi di pedesaan, tetapi kenyataannya dia tidak puas adanya pembangunan pabrik, maka dianalogikan orang yang menolak industrialisasi. Sebagai ilustrasi, dalam pertemuan formal di tingkat desa atau kecamatan yang dikoordinasikan pemerintah, pemuka pendapat ikut hadir, tetapi tidak menunjukkan partisipasinya yang aktif dalam pembicaraan tentang beroperasinya pabrik-pabrik di pedesaan. Pemuka pendapat ini datang pada acara formal lebih disebabkan oleh unsur mobilisasi kekuatan negara terhadap rakyatnya. Keterlibatan fisik mereka dalam suatu kegiatan tidak selalu identik dengan partisipasi yang muncul secara sukarela.

Penelaahan terhadap partisipasi dikemukakan oleh Davis (1977: 140), bahwa tiga unsur yang terdapat dalam partisipasi, yang pertama, partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi seseorang yang lebih daripada sekadar keterlibatan fisik, kedua, partisipasi merupakan motivasi agar orang-orang mendukung situasi kelompoknya dalam arti mereka mengembangkan inisiatif dan kreatifitasnya, sedangkan yang ketiga, partisipasi dorongan untuk merasa ikut bertanggung jawab.

Jika partisipasi merujuk pada keterlibatan mental dan emosi pada kegiatan pedesaan, maka pemuka pendapat yang mengikuti pertemuan dalam pembangunan pedesaan tetapi hanya keterlibatan fisik, tentunya tidak dapat dikelompokkan dalam mereka yang berorientasi sebagai pendukung industrialisasi.

Memang terdapat pula pemuka pendapat yang apatis, skeptis dan tidak mau tahu terhadap industrialisasi pedesaan, namun kelompok ini memiliki khalayak terbatas, pengaruhnya kecil terhadap hubungan sosial, dan tidak termasuk sebagai kekuatan yang diperhitungkan oleh pemerintahan desa maupun masyarakat. Di sisi lain, pemuka pendapat yang mengubah peran sesuai dengan situasi desa, terutama pada tahun 1998 ketika berlangsung

pergantian pemerintahan, dapat pula dikelompokkan dalam orientasi dua kecenderungan tersebut, karena perubahan peran yang dilakukan dalam waktu singkat, belum mampu menghilangkan memori masyarakat desa untuk mengelompokkan pada sebagai pendukung ataupun yang menolak industrialisasi.

Industrialisasi di desa mendapat dukungan selain dari pemerintah, juga dari pemuka pendapat serta masyarakat yang mengharapkan bahwa beroperasinya pabrik akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya. Mereka berharap dapat bekerja di pabrik, membuka usaha yang mendukung kegiatan pabrik dan memperoleh penghasilan lainnya karena desa yang semakin ramai.

1. Dampak Sosial Budaya Masyarakat

Pembicaraan tentang masalah sosial dan budaya antara masyarakat dengan pemuka pendapat ternyata tidak bersifat tetap, pola komunikasi terus berkembang dalam berbagai situasi, dari pedesaan yang sangat teradisional dengan ketergantungan yang besar terhadap hasil pertanian, industri yang berkembang di pedesaan sampai kegiatan pabrik yang surut, memiliki implikasi komunikasi yang berbeda.

1.1. Kekuatan Nilai Sosial Pedesaan.

Masalah sosial dalam kehidupan sehari-hari menyangkut hubungan diantara warga desa dalam berbagai persoalan yang dihadapi. Dari yang sekadar menjaga sistem kekerabatan, kegiatan sosial religius, sampai munculnya konflik diantara warga desa. Problem sosial dalam pembicaraan antara masyarakat dan pemuka pendapat mengalami perubahan sejalan dengan situasi desa-desa lokasi industri. Nilai sosial yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat dalam berbagai situasi mengalami pergeseran karena munculnya simbol-simbol yang dibawa oleh industrialisasi maupun pengaruh media massa yang mudah diakses masyarakat pedesaan.

Dalam situasi desa pertanian yang harmonis, komunikasi dilakukan diantara pemuka pendapat dan khalayaknya dalam pembicaraan mengenai aspek sosial. Ketika pedesaan masuk pada awal pembangunan pabrik, umumnya berlangsung dengan model petunjuk dan nasehat yang tidak bisa dibantah sebagaimana hubungan *patron* dan *client* pada masyarakat tradisional. Sebagian besar warga desa pada waktu pabrik-pabrik belum muncul sudah lazim kalau ada masalah, minta petunjuk kepada pemuka

pendapat, bahkan ketika warga desa mau bertanding sepakbola saja minta restu dan patuh kepada pemuka pendapat.

Pemuka pendapat memiliki otoritas dalam hubungan masyarakat, sehingga berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari, selalu memerlukan perannya dan warga desa juga berupaya untuk mengikuti pesan yang disampaikan pemuka pendapat dalam kesempatan formal maupun informal di desa. Substansi tentang kemampuan pemuka pendapat tersebut, sejalan dengan pendapat Stogdil (1974:15), yaitu "kepemimpinan adalah hubungan antar manusia yang terjadi pada situasi dan terarah, melalui proses komunikasi tertentu dalam mencapai tujuan yang diharapkan". Pemuka pendapat adalah orang yang menggunakan kemampuan berkomunikasi untuk mempengaruhi khalayaknya.

Pada masa industri berkembang dengan pesat otoritas tradisional semakin pudar sehingga pembicaraan yang menyangkut segi sosial kemasyarakatan budaya lebih bersifat interaktif dan transaksional, mengingat munculnya semangat masyarakat desa pada rasionalisme akibat pengaruh perubahan sosial di desa lokasi industri. Perubahan sosial, memarginalkan kebiasaan masyarakat yang sudah mapan. Campur tangan kekuasaan negara dengan dalih rasionalisasi dalam musyawarah desa, pengelolaan air sawah dan kebiasaan lain yang sudah melembaga semakin menghilangkan nilai kebersamaan masyarakat desa. Sistem sosial yang dijaga bersama terdesak oleh kekuatan perubahan yang lebih rasional. Jika ada masalah dalam lingkungan desa, misalnya konflik antar kelompok pemuda, masyarakat desa kesulitan kalau hanya mengandalkan nasehat pemuka pendapat. Sebab pemuka pendapat selalu menunjuk pada cerita-cerita masa lalu yang diasumsikan tidak sesuai dengan keadaan sekarang.

Komunikasi dan interaksi menempatkan pemuka pendapat pada posisi yang seimbang dengan *audiencenya*. Masyarakat berpedoman pada hal yang realistis sementara pemuka pendapat yang memelihara nilai sosial pedesaan berupaya untuk konsisten. Dikatakan oleh Rogers dan Svenning (1969:21), "sistem sosial masyarakat tradisional khususnya di lingkungan petani pedesaan berfungsi sebagai alat untuk mengatur hubungan individual maupun kolektif".

Pola semacam ini juga sebagai faktor yang berpengaruh untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari pada komunitas pedesaan. Tetapi ketika sistem itu luntur, masyarakat cenderung tidak mau sepenuhnya tergantung pada sistem sosial yang banyak mengandalkan tokoh masyarakat dengan kekuasaan tradisional,

sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pembicaraan dalam nuansa komunikasi politik yang menyangkut kehidupan sehari-hari ketika kegiatan industri semakin surut, kembali menjadi linier. Pola komunikasi satu arah dalam *one-way communication* bersifat memberi informasi kepada khalayaknya. Menurut Bohlen dan Raudabaugh, "*information giver* bersifat memberikan informasi yang berisi fakta atau generalisasi yang otoritatif dengan menghubungkan pengalamannya". (Bohlen dan Raudabaugh, dalam Rakhmat, 1998:172). Hubungan dengan pemuka pendapat dalam situasi surutnya industri kembali menguat. Warga desa yang mempunyai masalah dengan tetangga maupun keluarga, akan berkonsultasi dengan pemuka pendapat, yang dari dulu konsisten memegang nilai sosial yang ada di desa.

Disini pemuka pendapat kembali menancapkan pengaruhnya karena sikap menolak industri yang menganggap bahwa pabrik bukan sebagai institusi yang mampu menyejahterakan masyarakat petani di desa, sedikit banyak mengandung kebenaran. Dengan demikian, nilai-nilai tradisional yang terus dipelihara dan selalu dipakai rujukan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat desa sebagai kelompok yang merasa memiliki berbagai kesamaan nilai dengan pemuka pendapat.

Dikemukakan oleh Rogers dan Svenning (1969:233-238) pada intinya, "komunikasi di lingkungan homofili menggambarkan kesamaan pihak yang berinteraksi dalam nilai, kepercayaan dan sikap, cenderung lebih banyak terjadi di desa tradisional". Kesamaan yang merujuk pada faktor nilai setempat menjadikan pemuka pendapat yang pernah ditinggalkan oleh sebagian khalayaknya, kembali menjadi rujukan dalam pembicaraan masalah sosial di pedesaan.

1.2. Kebutuhan Informasi Budaya dan Kekuatan Media.

Masalah budaya desa, seperti adat istiadat yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat termasuk di dalamnya kesenian tradisional, harus berhadapan dengan kesenian kontemporer atau budaya populer yang disebarkan oleh media massa. Interaksi antara masyarakat desa dengan pemuka pendapat, dalam situasi perubahan sosial dan orientasi kebudayaan yang lebih populer, menjadikan pola komunikasi juga mengalami perubahan.

Desa pertanian dengan tradisi yang kuat, memposisikan pemuka pendapat sebagai patron masyarakat yang wajib di dengar pesannya. Di pihak lain masyarakat desa terbiasa menggantungkan informasi terhadap

pemeliharaan nilai budaya pedesaan. Mereka bicara tentang kegiatan pemeliharaan tradisi yang mengandung unsur peribadatan, seperti syarat membangun rumah, memulainya pada hari yang dianggap baik dan syarat lainnya yang berkaitan dengan tradisi desa.

Sebagai orang yang menguasai informasi tradisi pedesaan, pesan pemuka pendapat tidak akan dibantah mengingat masyarakat tradisional selalu memiliki ketergantungan terhadap tokoh di sekelilingnya yang memiliki nilai budaya sama. Seperti pernyataan Gonzales (dalam Jahi, 1988:91), "kesamaan dalam budaya cenderung meningkatkan komunikasi yang efektif dibandingkan dengan orang yang memiliki perbedaan". Faktor kesamaan menjadikan masyarakat desa tunduk terhadap otoritas tradisional pemuka pendapat.

Dalam bayang-bayang kekuatan operasi pabrik di desa, masalah budaya yang muncul dalam pembicaraan antara pemuka pendapat dan masyarakat bersifat interaktif. Masyarakat terkena pengaruh budaya massa dari siaran televisi, tidak terlalu antusias terhadap upaya pemuka pendapat mempertahankan kebudayaan desa. Tidak ada lagi pengaruh yang kuat dari pemuka pendapat untuk mengatur supaya masyarakat mengikuti upacara tradisional, seperti bersih desa, hajat bumi, dan berbagai selamatan. Kalau warga memiliki kegiatan lain yang lebih penting, semisal harus bekerja di kantor, pabrik atau tempat usaha lain, maka acara tersebut cenderung ditinggal. Memang pemuka pendapat suka menegur mereka yang tidak berpartisipasi tetapi biasanya malah terjadi perdebatan yang makin panjang".

Otoritas terhadap tradisi pedesaan yang dimiliki oleh pemuka pendapat, berhadapan dengan realitas dalam hukum ekonomi yang lebih banyak berbicara dengan kalkulasi keuntungan dan kerugian, termasuk ketika berurusan dengan pelembagaan tradisi. Komunikasi lebih merupakan hak individual dalam interaksinya di masyarakat. Menurut Bower dan Bradac (1982: 147), "komunikasi adalah tingkah laku individual dan merupakan hubungan yang di dasarkan pada kepentingan masing-masing". Komunikasi yang terjadi diantara khalayak dan pemuka pendapat merupakan kebutuhan individual dalam lingkungannya.

Pembicaraan masalah budaya dalam bingkai meredupnya operasi pabrik di desa, tidak berjalan satu arah. Pengaruh industri dan teknologi komunikasi dalam media membuat topik tentang kebudayaan berjalan interaktif dan transaksional. Masyarakat desa tidak selalu setuju dengan pemuka pendapat dalam pembicaraan tentang kesenian tradisional yang

wajib ditonton. Sebab pemuka pendapat selalu mengunggulkan kesenian desa dalam segala hal, tetapi kenyataannya banyak warga desa yang lebih menyukai musik dangdut dan musik populer di radio atau televisi.

Warga desa Syka berargumentasi dengan pemuka pendapat tradisional kalau dia memaksa agar mengikuti tradisi nenek moyang yang sudah turun temurun. Mereka menghargai tradisi dan budaya desa, tetapi pelaksanaan upacara adat yang lengkap memerlukan biaya besar sehingga mereka berusaha untuk menyederhanakan. Menjalankan dan memelihara tradisi membutuhkan biaya yang cukup besar, sementara masyarakat yang terkena pengaruh modernisasi lebih berorientasi kepada efisiensi. Ditambah lagi situasi krisis ekonomi, menjadikan masyarakat semakin terpuruk dalam ketidakberdayaan ekonomi, oleh karena itu pemeliharaan tradisi yang memerlukan tenaga dan biaya besar cenderung dihindari dan ini tampak dalam pola komunikasi yang interaktif antara pemuka pendapat dengan masyarakat desa.

Keadaan ini didukung oleh Jean Martin (1981:141), "pluralisme sosial ekonomi adalah pilihan terbaik untuk masyarakat, kelompok maupun individu". Keanekaragaman menjadi dasar dari idealisme dalam masyarakat yang berkembang. Tetapi sebaliknya Chirot (1987:142) mengungkapkan, "petani dan penduduk desa adalah kelompok yang memiliki kekuatan untuk menjaga tradisi sepanjang habitatnya tidak terganggu". Klari sebagai desa yang berubah tentunya mengganggu sebagian habitat komunitas petani.

2. Kompleksitas Marginalisasi Perekonomian Desa

Kemiskinan diantara bangunan pabrik merupakan realitas masyarakat yang umumnya petani berlahan sempit dan buruh tani. Berbagai persoalan membelenggu kehidupan sehari-hari, dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan primer, eksploitasi secara ekonomis dalam pengendalian harga, sampai industrialisasi desa yang tidak konsisten, membuat masyarakat semakin rentan ketahanan ekonominya.

Perekonomian desa dipengaruhi pula oleh situasi desa yang berubah. Pola komunikasi terhadap topik perdagangan antara masyarakat dengan pemuka pendapat juga mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan, dari desa pertanian menjadi desa lokasi pabrik.

Sebagian besar petani desa, memiliki kondisi sosial ekonomi yang kurang memadai dan masuk dalam kemiskinan struktural. Pertanian di desa dilakukan bukan hanya mengandalkan kemampuan pengelolaannya

tetapi juga berorientasi pada tatanan sosial yang spesifik seperti kepercayaan yang besar terhadap penjaga alam semesta. Penghargaan kepada alam dilakukan dalam berbagai kegiatan ritual seperti hajat bumi dan berbagai salamatan mengikuti kegiatan pertanian di desa.

2.1. Kepercayaan Terhadap Informasi Pertanian

Dalam situasi desa pertanian, pemuka pendapat pedesaan memperoleh tempat yang ideal. Masyarakat desa sebagai bentuk persekutuan abadi antara manusia dan institusi sosial yang mendukung pola pertanian membutuhkan tokoh yang dikenal di lingkungannya. Warga desa cenderung mengikuti anjuran pemuka pendapat dalam pengelolaan sawah, dari menanam benih sampai masa panen, tidak hanya memerlukan kerja keras saja tetapi selalu membicarakan pada tiap kegiatan dengan pemuka pendapat, baik secara individual maupun melalui pertemuan formal di kantor desa.

Komunikasi dan interaksi cenderung linier dan memosisikan pemuka pendapat sebagai orang yang harus diikuti anjurannya. Ketidakpercayaan terhadap kemampuan sendiri dari petani berakibat ketergantungan pada pemuka pendapat di lingkungannya. Henessy (1990:105) menyatakan, "pendapat dibentuk oleh tradisi kultural, lembaga sosial dan kaidah kelompok masyarakat dimana setiap orang menjadi bagiannya".

Berpijak pada pernyataan itu, pendapat dan saran tokoh masyarakat yang sejalan dengan lingkungannya cenderung diperhatikan oleh pihak yang terlibat dalam komunikasi. Dalam siklus pertanian, petani sudah bekerja keras tetapi dorongan dari pemuka pendapat yang memiliki kesamaan tradisi kultural tetap diperlukan untuk mengatasi ketidakpastian

Berkembangnya industri, pengaruh modernisasi dan dampak media massa mengakibatkan masyarakat berorientasi pada kalkulasi ekonomi terhadap semua kegiatan manusia. Salah satu akibat yang menonjol adalah komersialisasi di bidang pertanian seperti: komersialisasi tanah pertanian, menjual sebagian besar padi kepada pedagang dari luar desa sendiri, pola pemeliharaan tanah yang mengikuti sistem borongan dalam pekerjaan membajak, bertanam, menyiangi ataupun memanen. Padahal semua kegiatan tersebut semula dilakukan bersama tanpa pengupahan tetapi dengan pola bagi hasil, misalnya dengan pembagian 1:5 ketika panen padi, yaitu satu bagian untuk buruh tani dan lima bagian untuk pemilik sawah, atau kesepakatan tertentu lainnya yang tidak berdasarkan pada ukuran uang.

Komersialisasi mestinya dapat meningkatkan produktivitas tetapi kenyataannya tidak demikian, berkurangnya lahan pertanian maupun tingkat kesuburan tanah yang berkurang akibat polusi dari pabrik menjadikan petani semakin sulit dalam kehidupannya. Dalam konteks yang sama tentang suramnya kehidupan petani miskin di pedesaan, Leopold (dalam Manfred, 1981: 210). menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

Berbagai pengalaman empirik tampak bahwa peningkatan produktivitas pertanian tidak selalu membawa peningkatan taraf hidup masyarakat petani di pedesaan, ini akibat pertambahan penduduk, mahalnya ongkos produksi dan kebutuhan lain yang tidak sebanding dan kurangnya kesempatan kerja non pertanian di pedesaan yang sesuai dengan pola kerja petani dengan kebiasaan mengatur jadwal kerjanya sendiri.

Masalah yang dialami petani pedesaan, tidak jauh berbeda dengan pernyataan Manfred tersebut. Perjalanan yang fluktuatif dalam pengelolaan tanah pertanian sangat dipahami oleh para pemuka pendapat. Informasi tentang siklus pertanian tradisional yang bergeser menjadi komersial dikuasai dengan baik oleh pemuka pendapat pada situasi awal industrialisasi.

Dalam keadaan wilayah desa yang berubah yang diwarnai oleh operasi pabrik-pabrik, penguasaan informasi pertanian dan otoritas tradisional pemuka pendapat tidak mengalami perubahan. Dalam membicarakan topik pertanian pemuka pendapat dalam posisi sebagai orang yang dijadikan rujukan ketika masyarakat mencari informasi, dan akan didengarkan serta diikuti pesan-pesannya pada waktu dia sebagai pembicara dalam pertemuan formal di desa yang lebih banyak diwarnai oleh penyampaian pesan dalam komunikasi politik.

Pemuka pendapat mempunyai peran besar dalam masalah pertanian, dia selalu memberikan informasi kepada warga desa tentang mahalnya harga pupuk, gabah yang sebaiknya dijual semua kepada pengumpul di desa, sedangkan petani disarankan membeli benih dari kios-kios desa, dan warga desa cenderung mengikuti petunjuknya.

Pada konteks ini, pemuka pendapat berkomunikasi dengan masyarakat desa dengan pola yang linier bersifat satu arah yang memberikan ide untuk mengatasi persoalan. Substansi yang sama dikemukakan oleh Rogers dan Shoemaker (1983:313-314) yang intinya, agen perubahan berusaha mempengaruhi atau mengarahkan keputusan inovasi orang lain, selaras yang diinginkan lembaga pembaharuan dimana dia mempercayainya.

Pemuka pendapat berupaya untuk mengarahkan khalayaknya untuk menerima inovasi pertanian dari institusi yang berwenang dalam pertanian di desa. Sifat mengikuti apa yang dikatakan pemuka pendapat karena pemuka pendapat masih memiliki penguasaan informasi pertanian yang lebih baik.

Otoritas terhadap informasi pertanian yang masih diperhitungkan khalayaknya, menjadikan pembicaraan lebih banyak bersifat satu arah, tetapi bergeser menjadi komunikasi dua arah, pada waktu industri berkembang dengan pesat. Masyarakat desa melihat berbagai fakta, bahwa pertanian tradisional tidak dapat dipertahankan berdampingan dengan pabrik. Situasi interaktif ini tetap bertahan, bahkan lebih terbuka dengan mengkritik berbagai kebijakan pemerintah ketika industrialisasi surut dalam operasinya.

Gejala komunikasi yang interaktif, muncul ketika warga desa tidak selalu mengikuti saran dalam pengolahan tanah, menanam benih dan urusan pertanian lain dengan pemuka pendapat. Tetapi sejak banyak pabrik di kawasan ini, warga desa cenderung berbagi informasi dengan pemuka pendapat, untuk mengatasi persoalan berkurangnya kesuburan tanah, meskipun sesungguhnya pemuka pendapat tidak bisa berbuat apa-apa ketika tanah petani banyak dijual kepada pabrik.

Mengingat kapasitas pemuka pendapat lebih banyak pada informasi nilai tradisional dan sedikit di bidang inovasi pertanian, maka pembicaraan tentang pabrik dan implikasinya bersifat interaktif dalam berbagai situasi yang melanda desa. Bahkan pemuka pendapat, juga berupaya menyerap bermacam-macam informasi dari masyarakat desa tentang dampak industri. Masyarakat dianggap mengetahui lebih banyak berbagai informasi aktual, karena mereka mendapatkan informasi dari sumber lain, seperti media massa dan hasil komunikasi dengan komunikator di luar kelompoknya yang lebih kosmopolitan.

Bicara urusan pabrik yang beroperasi di desa, pemuka pendapat sangat bersemangat dan warga desa dalam bentuk tukar pikiran, bahkan bisa saja saling berdebat ketika merencanakan untuk memberikan peringatan kepada pabrik, yang tidak menjaga lingkungan desa. Persoalan yang menjadi tantangan bersama, dikomunikasikan dengan interaktif saling memberikan informasi. Pemuka pendapat juga mengadopsi gaya komunikasi yang lebih menekankan pada *relinquishing style*, dengan kesediaan menerima informasi dari khalayak dalam kelompoknya.

Pembangunan pabrik di desa mestinya memperhatikan faktor lingkungan sebagai sumber potensial atau sebagai kekuatan dari dalam untuk menyejahterakan masyarakat setempat. Dalam perspektif lain disebutkan sebagai pembangunan ekonomi yang seimbang dengan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, harus dicari titik keseimbangan antara kebijakan pembangunan dan kebijakan lingkungan, sehingga akan tercapai kebijakan pembangunan ekonomi yang benar-benar menjamin peningkatan kesejahteraan manusia dalam jangka panjang. (Irawan dan Suparmoko, 1995:304).

Konsep ideal pembangunan industri di pedesaan semula juga berupaya untuk integratif, tetap mempertahankan lahan subur berpengairan teknis, tetapi tujuan itu cenderung tidak sepenuhnya tercapai, ketika pembangunan pabrik meningkat, dan pembebasan tanah pertanian tidak dapat dihindarkan lagi. Pembangunan seimbang, semestinya dapat memacu kehidupan perekonomian dan perdagangan di pedesaan. "Dalam melaksanakan program industrialisasi di daerah, seharusnya mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekitarnya dengan lebih cepat dibandingkan tanpa ada industrialisasi". (Sadono Sukirno, 1985:303). Tetapi kenyataannya, dominasi industri di desa membentuk kelompok masyarakat miskin baru, yang tidak memiliki tanah pertanian. Pengalihan usaha sejumlah masyarakat desa ke sektor perdagangan di tingkat desa, lebih banyak diarahkan untuk mendukung kebutuhan orang pabrik.

Industri pedesaan yang berdiri diatas lahan pertanian menyimpan berbagai masalah yang laten dan manifes. Namun, masyarakat desa cenderung tidak mampu untuk menyuarakan dalam komunikasi politik yang transparan. Secara esensial, dalam kontrol komunikasi politik yang ketat dari kekuasaan negara, pada awal berdirinya pabrik, ketika desa-desa masih dominan sebagai lahan pertanian, sudah banyak informasi yang tidak transparan dalam hal penggunaan lahan.

Untuk tidak meresahkan warga desa biasanya pemuka pendapat, lembaga-lembaga pemerintah dan pemilik modal, bekerjasama melakukan strategi meminimalisir gejolak yang terjadi di lingkungan desa, melalui komunikasi politik yang mengusung demokratisasi semu. Retorika yang biasa dikemukakan, pabrik yang akan didirikan, adalah sejalan dengan habita desa pertanian, pabrik akan membantu warga desa mengatasi kemiskinan, industri akan menampung hasil masyarakat setempat, bahkan pabrik berjanji akan memberikan pendidikan yang layak bagi masyarakat desa.

Dalam situasi desa pertanian, kehadiran industrialisasi hanyalah sebatas isu atau desas-desus yang terdengar ke seluruh penjuru desa. Pemuka pendapat pendukung beroperasinya pabrik, biasanya memiliki penguasaan informasi yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan khalayaknya. Kendati demikian, masyarakat desa yang tidak memahami tentang industrialisasi, tetap mencium gelagat akan munculnya pabrik melalui simbol-simbol fisik maupun non fisik disekelilingnya. Menurut Berlo (dalam Bower dan Bradac, 1982:151), "komunikasi merupakan transaksi antar pemakai simbol-simbol yang dinamis dan berubah sesuai dengan situasi dan waktu ketika peristiwa itu berlangsung. Dalam konteks ini pemuka pendapat berupaya untuk berbagi informasi dengan khalayaknya untuk memahami industri di desa.

Berkembangnya industrialisasi sebagai salah satu simbol keberhasilan pembangunan, semakin memberikan kekuatan pada posisi pemerintah. Di sisi lain kekuasaan tradisional yang dimiliki pemuka pendapat, yang kurang memahami industrialisasi, dalam menjalankan perannya, sebatas berbagi informasi dengan warga desa, karena persamaan nasib sebagai pihak yang merasa dipinggirkan.

Dalam pembicaraan tentang industri di desa antara pemuka pendapat dengan khalayaknya, pemuka pendapat berpijak pada tradisi ekonomi pedesaan yang tidak sejalan dengan karakter materialistis pabrik, sehingga pemuka pendapat lebih banyak minta informasi dari masyarakat tentang kegiatan pabrik di desa. Intinya, pemuka pendapat tidak tertarik dengan industrialisasi, sedangkan masyarakat memperoleh informasi dari berbagai sumber yang dekat dengan kehidupan pabrik. Oleh sebab itu komunikasi berlangsung interaktif dalam kesederajatan. Komunikasi yang sederajat menurut Ruben (1992:12), "suatu proses dengan mana kita bisa dipahami dan memahami oleh orang lain". Bahkan pemuka pendapat dalam memecahkan masalah, sangat mungkin justru pada informasi yang berasal dari khalayaknya dalam pola informasi yang egaliter.

Kepercayaan masyarakat desa semakin pudar ketika industri yang dibanggakan pemerintah berhenti beroperasi, pabrik mengurangi karyawan dan mengalami berbagai kesulitan pada awal tahun 1997. Dalam kondisi ini, pembicaraan antar pemuka pendapat dengan khalayaknya pun menjadi semakin interaktif. Pemuka pendapat memiliki sikap yang sejalan, bahwa industrialisasi di desa tidak dapat diharapkan untuk jangka panjang.

Pembicaraan pemuka pendapat dengan khalayaknya, dalam dinamika reformasi dan kebebasan komunikasi politik, biasanya tidak terlepas dari

mengkritik kebijakan pembangunan pabrik yang kurang menguntungkan warga desa. Intinya, komunikasi yang interaktif, menjadi karakter yang menggejala pada era pergantian situasi politik. Tidak ada lagi yang memiliki kekuasaan mutlak terhadap informasi. Sebab masyarakat bebas menentukan pilihan cara berkomunikasi, dan berhak untuk tidak setuju terhadap pendapat elite dan organ kekuasaan negara yang dipaparkan ke publik. Ruben (1992:14), mengatakan “komunikasi merupakan proses yang dinamis dan secara konstan berubah sesuai dengan situasi yang berlaku”. Dengan kata lain, situasi desa yang berubah mempengaruhi pola komunikasi antara pemuka pendapat dan khalayaknya.

2.2. Sumber Informasi Perdagangan di Desa

Dalam bidang perdagangan desa yang kekuatan industri, munculnya peluang baru untuk melakukan usaha-usaha yang sebelumnya kurang dikenal di desa. Namun masyarakat setempat, sepertinya kalah cepat dengan para pendatang di desa yang lebih dini mengantisipasi kebutuhan masyarakat yang berubah.

Situasi desa agraris menempatkan pemuka pendapat pada posisi terhormat. Kewibawaan yang diperoleh karena faktor keturunan elite desa, kemapanan ekonomi, penguasaan pengetahuan keagamaan dan sebagainya memberikan sumbangan yang besar terhadap peran yang dilakukan di lingkungan masyarakatnya. Dalam pandangan warga desa, pemuka pendapat merupakan orang yang wajib diikuti pendapatnya. Pembicaraan pribadi ketika masyarakat mengkritik tentang harga kebutuhan yang semakin tinggi, pemuka pendapat cenderung menyarankan pengikutnya untuk tidak emosional. Walaupun, masyarakat sebenarnya kurang sepakat tetapi pada akhirnya bisa menerima, karena pemuka pendapat tetap sebagai elite yang dihormati”.

Pada konteks ini, pemuka pendapat adalah penengah yang tidak memihak antara kepentingan masyarakat desa dengan kebijakan atau politik perdagangan pemerintah. *Opinion leader*, lebih banyak berposisi sebagai *harmonizer* bagi kelompoknya. Sebagaimana pendapat Kartodirdjo (1986:vi), “kepemimpinan tidak dapat dilepaskan dari kolektivitas sosial dimana terjadi interaksi antara yang memimpin dan yang dipimpin”. Kolektivitas sosial di pedesaan dipelihara oleh pemuka pendapat yang peduli terhadap karakteristik desa pertanian.

Perdagangan desa yang dijalankan oleh warga setempat, tetap bergantung pada beroperasinya pabrik. Informasi atau topik yang menyangkut perdagangan dalam berbagai situasi akan dibicarakan lebih

interaktif antara pemuka pendapat dengan khalayaknya. Posisi pemuka pendapat, tetap diperhitungkan meskipun sebenarnya tidak menguasai informasi, mereka lebih ditempatkan sebagai sosok yang mampu memberikan perlindungan terhadap segala kegiatan masyarakat desa. Pola komunikasi yang terjadi dengan pola interaktif dan bersifat *orienter* terhadap khalayaknya. Sebagaimana dikatakan Rogers dan Svenning (1969: 29), masyarakat desa atau para petani pedesaan, tidak memiliki kepercayaan terhadap kekuatan sendiri dalam menangani semua persoalan yang dihadapi, apalagi ketika harus bersaing dengan dari luar komunitasnya, mereka akan mencari dukungan dari tokoh yang dipercaya.

Oleh sebab itu dukungan dari pemuka pendapat sangat mereka perlukan, meskipun faktanya pembicaraan untuk memperoleh dukungan berlangsung dalam komunikasi yang transaksional dan *egalitarian* dalam kesederajatan. Perdagangan di desa, khususnya yang diselenggarakan oleh penduduk asli semula berbasis pada usaha yang berkaitan dengan pertanian. Pedagang kaya di desa merintis usahanya dari penjualan berbagai kebutuhan pengelolaan pertanian, termasuk penyaluran modal yang bersifat rente.

Dalam perjalanan waktu, situasi surutnya industri tidak membuat pola komunikasi dengan pemuka pendapat mengalami perubahan. Interaksi dan komunikasi tetap berlangsung dalam komunikasi dua arah yang sederajat. Perbedaannya, masyarakat lebih berani untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Pemuka pendapat memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, untuk mengekspresikan kepentingannya dalam masalah perdagangan. warga desa dan pemuka pendapat, saling memberikan informasi perdagangan desa yang terancam gulung tikar, karena berkurangnya pegawai pabrik sebagai konsumennya.

Pemuka pendapat dalam situasi surutnya industri berusaha untuk menancapkan pengaruhnya yang semakin pudar. Kesamaan etnik dan nilai sosial budaya menjadi salah satu faktor yang menguatkan perannya. Ditandaskan oleh Fredrik Barth (1988:11), "nilai budaya yang sama menjadikan kesadaran akan rasa kebersamaan dan membentuk jaringan komunikasi dan interaksi yang kohesif dalam satu komunitas". Dengan otoritas tradisional yang berlandaskan pada nilai sosial budaya desa, pemuka pendapat menolak industrialisasi, dan sikap tersebut dianggap benar ketika pabrik tidak dapat memberikan kesejahteraan yang memadai bagi masyarakat sekitarnya.

3. Politik Pedesaan dalam Kutub Kursif dan Reformasi

Masa sekitar tahun 1987 atau tahun sebelumnya dalam pemerintahan Orde Baru, warga desa harus bebas dari politik. Aktivitas politik sering menjadi kambing hitam konflik yang terjadi pada tingkat bawah. Karena itu, masalah politik menjadi sangat sensitif bagi warga desa dalam era kekuasaan Presiden Soeharto. Sebaliknya ketika pada waktu Presiden Habibie berkuasa, pembicaraan politik menjadi lebih terbuka sampai di tingkat bawah.

3.1. Kekuatan Politik Kekuasaan Lokal

Kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan setempat yang dimiliki Kepala Desa, berubah sejalan dengan dinamika politik nasional. Sebelumnya kekuasaan tradisional yang dimiliki oleh pemuka pendapat, tidak begitu saja hilang ketika diberlakukannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Karena peraturan tersebut, sebatas pada menyeragamkan politik dan pemerintahan desa dalam bingkai legalitas. Di sisi lain kekuasaan turun temurun dengan gaya otokratis, tetap berjalan dalam pemerintahan desa, sehingga bukan hal yang aneh jika kepala desa memegang jabatan berdasarkan faktor biologis, dalam arti merujuk kepada aspek keturunan, memang di pedesaan masih banyak ditemukan seorang kepala desa, yang orang tuanya juga pernah menjabat sebagai kepala desa.

Peran pemuka pendapat dalam penguasaan informasi tentang politik lokal, mengalami pergeseran, sejalan dengan dinamika pemerintahan desa yang terpengaruh oleh situasi politik nasional. Demikian juga yang terjadi desa lokasi industri, tidak ada peran yang tetap (*established*) dari pemuka pendapat. Semuanya berupaya mengikuti dinamika kawasan industri dengan simbol modernisasi. Walaupun sesungguhnya, ada kecenderungan yang kuat sikap itu sebatas untuk mempertahankan kepentingan individual maupun kelompoknya.

Pembicaraan dalam komunikasi politik yang membahas politik lokal, antara pemuka pendapat dan masyarakat desa, dalam situasi desa pertanian lebih diwarnai oleh model komunikasi yang linier, mengingat bahwa hubungan kekuasaan yang *patronage* berlaku dalam skala nasional sampai ke pedesaan. Dalam kegiatan resmi yang diselenggarakan di kantor desa maupun di rumah warga, pemuka pendapat menyarankan, agar masyarakat mengikuti anjuran elite dalam pemerintahan dan mendukung lembaga formal pedesaan, sepanjang tidak merugikan masyarakat. Tetapi walaupun kebijakan pemerintah dinilai tidak berpihak kepada rakyat,

pemuka pendapat menganjurkan, agar cara menolaknya dilakukan dengan halus. Biasanya warga desa memang tidak berani menolak dengan terus terang, karena tindakan itu dianggap akan menyulitkan berbagai urusan dengan organ pemerintahan.

Dukungan pemuka pendapat terhadap kekuasaan pemerintahan desa, biasanya dikaitkan dengan sejauh mana kegiatan pemerintah memihak kepentingan masyarakat. Komunikasi yang dilakukan pemuka pendapat dalam bentuk mendukung maupun tidak mendukung kebijakan pemerintah, dengan pola yang linier dalam konteks sebagai pendorong (*energizer*) atau sebagai pembantah (*disagreer*) terhadap program pembangunan di desa. Menurut Miller dan Steinberg (1975: 207), "komunikasi dapat dipakai untuk mengurangi ketidakpastian, mendorong bertindak efektif dan memperkuat kepercayaan sendiri dalam menghadapi berbagai persoalan". Fungsi ini melekat pada pemuka pendapat di lingkungan pedesaan lokasi industri.

Berkembangnya industri di desa sering dipakai sebagai simbol keberhasilan pembangunan. Pemuka pendapat yang menolak industrialisasi cenderung apatis dan tidak banyak berperan. Dalam komunikasi politik di depan publik yang bukan dikoordinasikan pihak kantor desa, pemuka pendapat selalu menghimbau masyarakat untuk memahami situasi yang ada di desa dengan cermat. Sebenarnya secara terselubung mau mengkritik kebijakan desa, tetapi tidak memiliki keberanian, sehingga pemuka pendapat sering berlindung di balik nilai-nilai kebaikan dalam hubungan kekuasaan universal, seperti yang terjadi dalam pemilihan kepala desa.

Dalam urusan menjagokan siapa yang akan menjadi kepala desa, masyarakat tidak memiliki kekuatan berarti, mengingat syarat administratif untuk menjadi kepala desa lebih banyak dalam kontrol pemerintah. Misalnya ketentuan yang menyangkut restu pemerintah jelas berpotensi untuk mengabaikan aspirasi masyarakat. Karena itu, kompetisi pilihan menjadi orang nomor satu di desa, sesungguhnya hanya berlangsung di tingkat elite. Disisi lain, kalupun pemuka pendapat, tidak setuju terhadap calon yang didukung pemerintah, lazimnya dalam komunikasi politik, hanya mengingatkan agar warga desa jangan salah pilih, dan himbuan semu lain yang tidak transparan.

Pemuka pendapat, dalam situasi kekuatan operasi pabrik, ketika berkomunikasi dengan khalayaknya, tetap bersifat satu arah diantara komunitasnya. Pola komunikasi satu arah dalam masalah politik pedesaan lebih dititik beratkan untuk memelihara kelompok supaya tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Menurut Rogers dan Svenning

(1969:247), bahwa “pemuka pendapat adalah orang yang dianggap bijaksana dan memiliki kemampuan dalam menangani masalah”. Dengan demikian semua persoalan di desa baik individual maupun kolektif cenderung mengandalkan peran pemuka pendapat.

Merosotnya operasi pabrik di desa, membuat kepercayaan masyarakat desa terhadap pemerintah dan institusinya di desa menjadi berkurang. Pemuka pendapat yang semula juga tidak berdaya menghadapi kekuasaan negara mulai menampakkan eksistensinya sebagai panutan masyarakat dalam pembicaraan tentang pemerintahan desa setempat. Pesan dan pembicaraan dengan khalayaknya dalam menilai pemerintahan banyak dilakukan dengan perbincangan yang sederajat. Walaupun pemuka pendapat masih diposisikan memiliki sejumlah kewibawaan, tetapi ketika informasi bebas mengalir dan diperoleh dari berbagai sumber yang mudah dijumpai di pedesaan, maka pemuka pendapat tidak lagi sepenuhnya menguasai khalayaknya agar diam atau menurut saja terhadap kebijakan pemerintahan. Komunikasi terjadi dalam situasi yang saling mengemukakan argumentasi, dan kesimpulan pembicaraan juga tidak tergantung dari saran pemuka pendapat.

Pola komunikasi yang otokratis, disisi lain menunjukkan ketidakberdayaan pemuka pendapat menghadapi khalayaknya. Sumber informasi seperti media massa yang mudah ditemukan di desa mendorong terjadinya sikap yang berani berbeda dengan pemegang kekuasaan lokal di desa. Dikatakan oleh Lerner (1992: 30), “ mass media menyebarkan dengan cepat hasrat untuk hidup baru sebagai kekuatan dinamis dari modernisasi”.

Pemuka pendapat memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam komunikasi yang interaktif sebagai upaya mencapai hasrat hidup baru dalam bidang politik lokal. Tidak ada tampak sebagai dominator dalam setiap pemecahan masalah yang berhubungan dengan penilaian terhadap kekuasaan pemerintahan setempat.

3.2. Pemilihan Umum, dari Partisipasi Prosedural ke Substansial

Masalah politik dan pemilihan umum di wilayah Klari berlangsung dalam situasi yang berubah-ubah pada kurun waktu pemerintahan Orde Baru. Konsep *floating mass* yang secara langsung menghilangkan hak politik masyarakat desa menjadikan persoalan pemilu ataupun partai politik hanya milik aktivis di kabupaten dan bukan sebagai wacana yang berkembang dalam masyarakat desa.

Dalam suatu penelitian di Jawa Timur tahun 1980, Gaffar mencatat pernyataan dari pejabat Kecamatan sebagai berikut: "Disini tidak ada politik, karena di semua desa di Kecamatan ini yang ada hanya Golkar. Saudara jangan main politik. Kecamatan ini bebas partai politik". (Afan Gaffar, 1988:1). Ungkapan yang terdapat didalamnya memperlihatkan situasi politik di Indonesia.

Situasi politik di desa lokasi industri, juga menunjukkan hegemoni Golongan Karya dalam penguasaan informasi maupun perolehan suara yang signifikan. Sebagai partai hegemonik Golkar tidak akan membiarkan terjadinya kompetisi yang antagonistik. Dengan basis yang sama yaitu masyarakat desa, Golkar tidak dapat diimbangi oleh partai lain, sampai pada pemilu tahun 1999 yang memposisikan di tempat kedua setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Pemuka pendapat desa digunakan sebagai agen partai politik untuk menyampaikan pesan politik. Mereka secara rutin melakukan sosialisasi politik kepada khalayaknya, "sosialisasi politik adalah penanaman informasi politik yang disengaja baik formal maupun informal pada setiap siklus kehidupan" (Fred I. Greenstein dalam Rush dan Althoff, 1997:36). Sebagai gambaran politik prosedural, pemuka pendapat adalah bagian dari jaringan kekuasaan politik pemerintah. Warga desa hanya menurut saja kalau pemuka pendapat berbicara pemilihan umum di depan publik yang intinya tidak perlu berseberangan dengan harapan pemerintah dalam pilihan partai. Tetapi dalam pembicaraan individual, pemuka pendapat akan menyerahkan sepenuhnya pilihan partai kepada masyarakat, dan warga desa cenderung mematuhi apa yang dikemukakan oleh pemuka pendapat.

Pembicaraan politik adalah dominasi negara terhadap rakyatnya dan tidak ada transaksi dalam menerima pesan politik. Menurut Deutsch (1963:147), "pembicaraan politik sebagai transmisi informasi yang relevan secara politis dalam suatu bagian sistem politik kepada sistem politik dan sistem sosial lain".

Pemuka pendapat yang tidak sejalan dengan pemerintah dalam program industrialisasi desa, tetap berupaya untuk tidak melawan pemerintah dalam urusan politik. Dalam pembicaraan publik maupun komunikasi individual, pemuka pendapat tetap menggunakan pola linier, walaupun jenis informasinya berbeda, tetapi memiliki substansi yang sama yaitu pola komunikasi satu arah.

Jika dalam situasi desa pertanian, pilihan partai politik yang muncul dalam pesan pemuka pendapat adalah mengarahkan untuk memilih partai pemerintah, atau sesuai pilihannya sendiri, tetapi di masa kejayaan industri, pemuka pendapat semakin skeptis terhadap kehidupan politik. Pemuka pendapat hanya memberikan petunjuk kepada masyarakat untuk menjaga ketenteraman desa dalam situasi politik yang memanas. Warga desa juga mematuhi saran pemuka pendapat termasuk pilihan partai politik yang diserahkan sepenuhnya kepada pemilih di desa.

Kekuasaan yang semakin besar, harus bersaing dengan pengalaman masyarakat yang makin intensif berinteraksi dengan media massa dan sumber informasi lainnya. Pemuka pendapat menggunakan komunikasi satu arah untuk mengendalikan penduduk supaya tidak terjadi konflik di tingkat desa. Kecenderungan tidak mau berurusan dengan partai politik bukan berarti menghilangkan pola komunikasi yang linier sebagai penyeimbang masyarakatnya.

Perubahan pola komunikasi dalam pembicaraan politik, terjadi sejalan dengan krisis multi dimensi. Pembicaraan tentang kekuasaan politik di tingkat desa dan orientasi partai menjelang pemilihan umum berlangsung bebas dan tidak tergantung pada pengarahannya ataupun pesan yang dikemukakan pemuka pendapat. Masyarakat desa bebas menentukan pilihan partai, dan pemuka pendapat tidak lagi diam dan hanya memberi nasehat-nasehat untuk menjaga lingkungan desa, tetapi pemuka pendapat juga terjun langsung dalam pembicaraan politik. Pesan tentang pemilu selalu dengan tegas dikemukakan diserahkan sepenuhnya ke masyarakat desa, tetapi sebagai elite di akar rumput, pemuka pendapat juga memiliki orientasi terhadap pilihan partainya, dan umumnya masyarakat desa mengetahui orientasi partainya.

Pola komunikasi satu arah ditinggalkan karena situasi politik nasional, dan gencarnya media massa memberitakan persaingan diantara partai politik. Menilai peran media massa McQuail (1997:2), "media massa merupakan sumber, kekuatan alat kontrol, manajemen dan inovasi dalam masyarakat". Media massa memberikan kontribusi besar terhadap sikap dan perilaku politik masyarakat.



KOMUNIKASI POLITIK DALAM GEJOLAK INDUSTRI

Masuknya industrialisasi di desa menimbulkan berbagai seperti, tanah yang subur menjadi kesulitan air, konflik yang berkepanjangan antara masyarakat dengan entitas industrialisasi dan campur tangan kekuasaan negara dalam kehidupan politik, hak sosial maupun hak ekonomi di pedesaan.

Situasi yang terus berkembang membentuk pola komunikasi di lingkungan pemuka pendapat yang mendukung masuknya industrialisasi di desa dengan masyarakat. Pemuka pendapat ini, memperoleh dukungan pemerintah dan pemilik modal pada industri di desa. Pembicaraan dengan khalayaknya dalam situasi komunikasi antar pribadi maupun komunikasi kelompok memiliki berbagai kecenderungan model komunikasi.

1. Tantangan Pelembagaan Sosial Budaya Dalam Komunikasi

Kehidupan sosial dan budaya masyarakat bersandarkan pada nilai-nilai desa setempat yang mendukung keselarasan dalam hubungan antar individual maupun kelompok. Tetapi situasi desa yang berubah, menjadikan masalah sosial dan budaya juga mengalami perubahan. Karakteristik masyarakat primer yang lebih mengandalkan hubungan berdasarkan nilai bersama, bergeser menjadi komunitas yang banyak menilai hubungan dengan faktor ekonomis.

1.1. Mempertahankan Nilai Sosial Masyarakat

Kehidupan sosial di desa yang tidak lepas dari hubungan kekerabatan yang erat dapat menjadi pudar ketika masyarakat cenderung untuk

mengunggulkan nilai material dibanding semangat kekerabatan. Tetapi ketika pabrik di Klari juga mengalami masa suram dalam krisis ekonomi, masyarakat berupaya untuk memahami kembali nilai sosial kehidupan masyarakat.

Pada awal industrialisasi maupun saat industri berkembang pesat, komunikasi yang terjadi ketika khalayak mencari informasi atau mendiskusikannya dengan pemuka pendapat mengenai masalah sosial, bersifat linier dengan memposisikan industri di desa sangat positif untuk menunjang penghidupan masyarakat yang lebih baik. Kepercayaan pemerintah sangat kuat bahwa "industrialisasi di luar sektor pertanian sekalipun, merupakan faktor utama dari modernisasi yang memiliki andil besar terjadinya perubahan dan kesejahteraan masyarakat di negara berkembang". (Mountjoy, 1981:143).

Pemuka pendapat yang banyak kerjasama dengan pemilik modal dalam setiap pertemuan di desa, terlebih lagi jika pertemuan itu diatur dan diselenggarakan oleh pemerintah, dia akan terus memberikan saran, petunjuk dan keharusan yang wajib dilakukan warga desa. Pada waktu jumlah pabrik hanya beberapa buah di desa, kebanyakan warga desa sering minta nasehat dan membicarakan problem desa seperti iuran perbaikan jalan desa, pemeliharaan surau, pembangunan pos ronda, pengaturan keamanan bersama dan kegiatan kerohanian yang sering diselenggarakan di desa.

Pemuka pendapat yang sebagian warga desa dikategorikan berpandangan maju, karena antisipasinya terhadap modernisasi ini dan dukungan birokrasi maupun pemilik modal. Dukungan dari berbagai pihak kepada pemuka pendapat yang sifatnya formal, membentuk komunikasi yang linier pada awal industri, karena masyarakat masih mempercayai bahwa pemuka pendapat memahami dan memelihara budaya setempat.

Komunikasi linier pada masa pertanian, menunjukkan pemuka sebagai pemberi informasi (*information giver*), pengarah (*orienter*) bahkan sebagai pendorong (*energizer*) yang mendorong khalayaknya untuk bertindak lebih baik. Disisi lain masyarakat desa sebagai khalayaknya dalam posisi pencari informasi (*information seeker*), pencari pendapat (*opinion seeker*), atau sebagai pengikut (*follower*) dari pemuka pendapat yang dipercaya.

Dalam masa kejayaan industri, komunikasi antara pemuka pendapat dengan khalayaknya dalam membicarakan masalah sosial masyarakat bersifat linier yang mengontrol. Elite desa itu, menyampaikan pesan tentang kehidupan sosial yang wajib dijaga seperti rukun dengan tetangga

termasuk dengan semua orang pabrik". Pola komunikasi yang digunakan bersifat satu arah, yang tidak dapat dibantah dan sangat mengontrol. Pada konteks ini, pemuka pendapat bertindak pula sebagai *coordinator integrator* dalam komunikasi kelompok.

Memasuki situasi yang berbeda, ketika Presiden Soeharto turun dari kekuasaannya, timbul dampak terhadap kebebasan memperoleh informasi. dukungan yang besar dari media massa dalam transparansi informasi juga memberikan motivasi kepada masyarakat desa dalam kebebasan berpendapat dan memperoleh informasi. Situasi yang sama dikemukakan oleh Comb dan Shaw (1981:127), media mempunyai peranan dalam memilih dan menekan isu tertentu sehingga khalayak menerimanya sebagai suatu yang sangat penting. Isi pesan membentuk khalayak untuk menilai dan mengakui realitas sosial yang disiarkan oleh media massa.

Semangat kebebasan dalam komunikasi politik, menguatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap berbagai kebijakan negara. Ketimpangan penyelenggaraan pemerintah, semakin menjadi pembicaraan masyarakat dan setiap hari menjadi berita utama media massa. Menurut Wright Mills (1968:32), "media massa berperan membentuk persepsi terhadap realitas sosial yang terjadi di luar lingkungannya". Kebebasan pers dan krisis multi dimensi berimplikasi pada surutnya peran pemuka pendapat yang terbiasa memperoleh perlakuan istimewa dari kekuasaan negara.

Model komunikasi antara pemuka pendapat dan warga desa berubah menjadi interaktif sejalan dengan surutnya peran industri di desa. Tidak ada lagi *one-way communication* yang bersifat mengontrol, semakin hilang pula gaya komunikasi *structuring style*, yang sering mengutip pesan yang secara struktural merujuk pada birokrasi pemerintahan. Semua pola linier tidak dihiraukan lagi oleh masyarakat desa.

Dengan semangat keterbukaan masyarakat desa cenderung sebagai *disagreer*, membantah pesan pembangunan yang propagandis. Situasi ketidakpercayaan terhadap jalannya pemerintahan masa lalu, juga memposisikan khalayak sebagai pengkritik (*evaluator-critic*). Khalayak sering mengungkit kebelakang ketika pemuka pendapat ini mengikuti tindakan represif dalam mengontrol kebebasan untuk berbicara dan kebebasan memperoleh informasi di pedesaan.

Hakikatnya, sejak keadaan berubah, warga desa semakin tidak percaya terhadap pesan yang disampaikan oleh pemuka pendapat. Semula pemuka pendapat selalu bilang sebagai warga desa harus ramah,

menjaga tradisi yang baik untuk kepentingan pembangunan dan menjaga stabilitas keamanan sekitarnya. Selanjutnya ketika zaman berubah, sering menyebut-nyebut pendidikan murah untuk rakyat, reformasi dan berantas budaya Kolusi Korupsi Nepotisme yang merusak kehidupan desa. Pemuka pendapat berupaya untuk menyesuaikan keadaan, tetapi kami warga desa sudah sulit untuk menempatkan dalam posisi sebagai pemuka pendapat yang dipercaya. Karena itu, warga desa juga sering memprotes dan berdebat panjang tentang berbagai urusan sosial maupun tradisi. Bahkan tidak jarang dalam suatu pertemuan, warga langsung mengungkit tindakan pada masa lalu, yang tidak memberikan manfaat, seperti kewajiban memasukkan pesan titipan penguasa dalam kesenian tradisional dan lain-lain tindakan yang intinya membelenggu kebebasan.

Upaya penyesuaian dengan keadaan oleh pemuka pendapat merupakan hal yang wajar untuk mempertahankan eksistensinya di lingkungan khalayak, tetapi tidak semuanya dapat diterima bahkan umumnya ditolak oleh warga desa, karena mereka bebas menentukan pilihan pemuka pendapat yang dipercaya.

1.2. Informasi Budaya Sebagai Basis Komunikasi Masyarakat

Menyinggung tentang kebudayaan tradisional, Landis menyebutkan "ciri-ciri kebudayaan tradisional masyarakat desa adalah sebagai konsekuensi yang pasif terhadap alam; pola adaptasi yang pasif terhadap lingkungan alam berhubungan dengan rendahnya tingkat inovasi masyarakat". (Paul H. Landis, dalam Rahardjo, 1999:49). Kepasifan atau mungkin juga kemalasan sosial dalam kelompok mekanistik dan tidak adanya inovasi, berperan dalam penanganan lahan pertanian, sikap hidup dan budaya kerja yang tidak terorganisasikan dengan baik.

Kebudayaan tradisional, eksistensinya terpengaruh pula oleh berbagai situasi yang terjadi. Disamping itu terdapat terpaan media massa yang menyiarkan budaya populer dan teknologi audio visual yang berfungsi sebagai sarana hiburan, umumnya untuk memutar film atau musik populer yang tidak ada kaitannya dengan kebudayaan di desa.

Akibatnya dalam situasi yang terus berubah, budaya desa setempat semakin tidak menunjukkan kekuatannya. Padahal menurut Ralph Linton (1952:17), "kebudayaan adalah *way of life* suatu masyarakat yang mencakup *way of thinking* dan *way of feeling* maupun *way of doing*". Kebudayaan akan tetap keberadaannya jika dipakai sebagai dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi, "budaya juga akan hilang baik secara lambat laun maupun dengan cepat, apabila masyarakat meninggalkannya dan

mengganti dengan tata nilai baru yang menyesuaikan dengan perubahan peradaban” (Lerner, 1983:149).

Situasi budaya pada masa pertanian dominan, jelas diwarnai dengan penguasaan informasi oleh pemuka pendapat terhadap nilai budaya. Kekuasaan tradisional dan dukungan pemerintah yang kuat, menyebabkan komunikasi bersifat linier, masyarakat desa kalau mau mengadakan acara keramaian dengan suguhan kesenian tradisional seperti wayang golek ataupun kliningan, harus mengikuti arahan dari pemuka pendapat supaya berjalan aman dan tidak ada gangguan dari karuhun desa. Dalam belenggu politisasi budaya, biasanya masyarakat juga akan mengikuti semua petrunjuk pemuka pendapat. Pola komunikasi yang berjalan satu arah ini, selain mengontrol khalayaknya, juga menunjukkan kemampuan pemuka pendapat menghadapi kekuatan jahat yang tidak tampak. Kepercayaan terhadap nenek moyang atau cikal bakal desa adalah sebagai bentuk penghargaan dari masyarakat.

Ketika industri berkembang dengan pesat, pola komunikasi antara pemuka pendapat dengan masyarakat desa, dalam pembicaraan individual maupun kelompok semakin linier dan cenderung bersifat vertikal dari atas ke bawah, yang mengendalikan dengan ketat pengikutnya. Pemuka pendapat itu wakil pemerintah, dalam acara tradisional selalu menyelipkan pesan pemerintah, yang isinya masyarakat supaya patuh. Kalau menguraikan tentang tradisi desa yang harus dipertahankan, sifatnya menggurui dan memaksa untuk mengikutinya. Kebudayaan adalah salah satu topik yang dipakai untuk dalam retorika pembangunan oleh pemuka pendapat yang tidak dapat dibantah.

Komunikasi antara masyarakat desa dengan pemuka pendapat, berjalan berjalan satu arah, dengan mengontrol dan mengendalikan pembicaraan. Pandangan pemuka pendapat sebagai wakil penguasa mengakibatkan masyarakat desa tidak memiliki keberanian untuk berbeda pendapat. Pola linier dalam pembicaraan antara pemuka pendapat yang sering diidentikkan agen pemerintah dengan khalayaknya juga berubah, seiring dengan dengan terjadinya krisis multi dimensi.

Komunikasi politik yang sarat dengan tuntutan kebebasan informasi, mempengaruhi pula kebebasan berekspresi dalam kebudayaan dan kesenian tradisional. Tidak ada lagi pengendalian terhadap seni tradisional. Dan masyarakat juga semakin banyak memiliki pilihan untuk kesenangannya pada semua jenis kesenian termasuk yang populer.

2. Pasang Surut Perekonomian Desa

Perekonomian pedesaan menyangkut: pertanian, industri dan perdagangan. Pertanian masih tradisional, sungguh ironis ketika pabrik di sekitar lahan pertanian menggunakan teknologi tinggi. Industrialisasi yang beroperasi di pedesaan, disatu pihak dianggap menguntungkan khususnya bagi para pekerja pendatang, tetapi di pihak penduduk asli, dianggap merugikan dan merusak suasana harmoni pedesaan. Sedangkan perdagangan semula sejalan dengan pola pertanian tradisional, tetapi sekarang perdagangan melengkapi dan mendukung kehidupan industri, dengan munculnya pola konsumsi baru

2.1. Bertahan dengan Informasi Pertanian

Pertanian di pedesaan sudah berlangsung ratusan tahun dengan dukungan irigasi teknis. Walaupun memperoleh pengairan teknis, tetapi dalam proses produksi pertanian masih tradisional, dengan menggunakan alat sederhana seperti cangkul, bajak, garu, sabit juga dengan memanfaatkan tenaga kerbau atau sapi. Siklus pertanian tradisional antara lain meliputi pengerjaan sawah, membuat persemaian, menanam, pemeliharaan tanaman, penyiangan dan memanen. Semua persoalan dari penggunaan alat, tenaga binatang dan siklus dalam produktivitas padi tidak terlepas dari saling berbagi informasi dan membicarakannya dengan pemuka pendapat. Disamping itu bertubi-tubi pula pesan pemerintah kepada petani dalam pertemuan formal di desa.

Proses produksi melibatkan lembaga pertanian yang ada di desa, seperti lembaga yang dikelola masyarakat dengan legalitas kekuasaan negara, sebagaimana koperasi penyaluran kredit untuk petani dan kelompok kerja pengaturan irigasi, yang dibentuk dan dikontrol oleh pemerintah. Disamping itu terdapat institusi, yang dibentuk karena aspirasi masyarakat dalam wujud kelompok kerja, yang memiliki ikatan tetapi tidak diorganisasikan dengan baik, seperti pada pekerjaan musim tanam, musim panen, kerja bakti memperbaiki poros desa dan kegiatan lain sifatnya sosial ekonomi.

Eksistensi lembaga informal yang menyangkut perekonomian desa, berjalan sesuai dengan sistem masyarakat mekanik, namun organisasi ekonomi dibawah kontrol kekuasaan negara jauh lebih dikedepankan oleh birokrat setempat. Menurut Uphoff dan Esman (1974:12), "keefektifan organisasi petani dalam mempengaruhi produktivitas pertanian dan kesejahteraan penduduk desa tergantung dari hubungan antara organisasi

petani dengan lembag lain pada tingkat horisontal maupun vertikal dalam struktur pemerintahan". Sejalan dengan pernyataan tersebut, "petani dalam melaksanakan pembangunan desa juga dipengaruhi pesan yang terkandung di dalam kebijakan dan stretegi pemerintah ". (Inayatullah, 1978:2).

Dominasi kekuatan negara dalam komunikasi politik yang mengendalikan petani dalam proses produksi, dan keterlibatannya pada pembangunan desa, dinilai justru membatasi gerak petani dalam upaya mencapai kesejahteraan. Situasi ini setidaknya terlihat dalam pendapat yang mengatakan bahwa, "kebutuhan masyarakat itu beragam, sehingga dalam masyarakat yang totaliter sekalipun, semua interaksi dalam organisasi tidak mungkin dipadukan dalam satu pola karena masing-masing memiliki perbedaan ". (Etzioni, 1985: 160).

Perbedaan tidak sejalan dengan konsep pemegang kekuasaan tentang keselarasan, sehingga perlu penyeragaman terhadap petani desa, misalnya dalam penggunaan bibit, pupuk, tempat penjualan dan produktivitas tiap hektar sampai penetapan harga dilakukan dengan seragam tidak mengikuti kemampuan individual atau kemampuan kelompok serta tidak berdasarkan pada pasar persaingan sempurna. Penyeragaman ini ditolak oleh Ruttan (dalam Soetomo, 1991: 204), "munculnya lembaga-lembaga pedesaan yang tidak sinkron dan dipaksakan mengakibatkan petani sulit untuk berkembang". Pendapat lain lebih tegas, "dalam perkembangannya organisasi harus dijalankan dengan melihat perbedaan-perbedaan yang ada dalam semua masyarakat". (Horison, 1988:34).

Keterlibatan kekuasaan negara pada komunikasi petani, tampak menonjol melalui petugas penyuluh lapangan, misalnya dalam memperkenalkan bibit baru atau benih yang dapat dibeli di kantor pertanian atau pada petani-petani kaya, penggunaan pupuk tablet yang kontroversial sampai kerjasama dalam pemasaran. Ini membuktikan kebenaran pernyataan Dick (1986: 38), "pengendalian pasar yang dilakukan pemerintah di tingkat lokal sering mengalami distorsi informasi, subsidi input produksi pertanian yang seyogyanya diarahkan kepada petani kecil sering bias kepada petrani berlahan luas". Petani miskin sebagai kelompok marginal, sudah tidak dapat berbuat banyak terhadap berbagai problem internal, masih dibebani lagi dengan hingar-bingar industrialisasi yang sama sekali tidak mereka pahami.

Otoritas tradisional yang telah turun-temurun untuk melindungi tanah pertanian sudah surut, mereka tidak mampu lagi menghadapi kekuatan

pemilik modal dari luar desa yang biasa menggunakan kaki tangannya orang desa setempat, aparat pemerintah dan tentara. Komersialisasi tanah pertanian menjadikan kondisi sosial ekonomi petani desa tidak bertambah, tetapi semakin terpuruk karena ketiadaan tanah dan jumlah penduduk yang terus bertambah. Seperti kebanyakan di negara berkembang, "komersialisasi tanah pertanian berubah bentuk dari pemilikan berdasarkan tempat tinggal kesistem pribadi berdasarkan uang, akibatnya produktivitas pertanian berkurang" (Chirot, 1967:87),

Dalam berbagai penelitian tentang pertanian dan pertumbuhan penduduk di negara sedang berkembang, tidak jarang disimpulkan, "karena penambahan penduduk yang tinggi maka peningkatan produktivitas terserap oleh jumlah penduduk yang terus bertambah, sehingga akhirnya tidak berpengaruh terhadap pendapatan rata-rata". (Todaro, 1983:401). Di desa lokasi industri, walaupun jumlah tenaga pabrik sangat besar tetapi mereka umumnya pendatang. Sedangkan jumlah tenaga kerja sektor agraris dari penduduk desa setempat tetap banyak, umumnya mereka kesulitan pindah ke sektor lain, kecuali anak muda yang kualifikasinya memang sejalan dengan pekerjaan pabrik.

Tentang masyarakat desa sebagaimana banyak referensi yang menganalogikan bahwa penduduk desa adalah petani, Bergel menegaskan, disetiap pemukiman para petani (*peasants*), ciri utama yang melekat pada desa adalah fungsinya sebagai tempat tinggal (menetap) dari suatu kelompok masyarakat yang relatif kecil. Dengan perkataan lain, suatu desa ditandai oleh keterikatan warganya terhadap suatu wilayah tertentu. (Egon E. Bergel dalam Rahardjo, 1999:27),

Masyarakat desa dan penduduk pedesaan yang biasa mengatur sistem kerjanya sendiri bekerja sesuai kemauan sendiri, sering menimbulkan kritik dari para pekerja pabrik yang bekerja dengan pengaturan waktu ketat. Petani dianggap statis dalam situasi ekonomi industri sekitarnya yang fluktuatif. Kondisi semacam itu, pernah ditulis oleh Boeke, bahwa petani-petani Indonesia sulit untuk mengubah diri ke dalam sistem perekonomian kapitalis yang dinamis, sedangkan sistem perekonomian yang dinamis mengakibatkan rusaknya seluruh sendi kehidupan masyarakat di desa-desa. Terhadap perekonomian yang dinamis masyarakat desa sama sekali tidak berkemampuan untuk beradaptasi menerima atau mengubah dirinya. (J.H.Boeke, dalam Soewardi, 1976:105). Kesulitan untuk mengubah pola kerja dan karakteristik ekonomi sudah menjadi hal yang lazim bagi masyarakat desa. Di sisi lain perkembangan lingkungan pedesaan dan perubahan teknologi produksi sangat cepat

Pada masa awal pembangunan pabrik, pertanian masih menjadi karakter utama Klari. Pola komunikasi yang berjalan dengan linier merujuk pada otoritas tradisional yang didukung kekuasaan formal dan pemilik modal. Mungkin saja, antara khalayak dan pemuka pendapat memiliki pengetahuan pertanian yang hampir seimbang, tetapi karena pemuka pendapat adalah tokoh yang dekat dengan penguasa sumber daya pedesaan dan memiliki sejumlah *power* tradisional, menjadikan komunikasi berjalan linier.

Pemuka pendapat bertindak antara lain sebagai *initiator-contributor* yang mengemukakan gagasan baru dari pemerintah. Walaupun terjadi komunikasi yang transaksional, pada akhirnya khalayak harus mampu menjalankan peran sebagai *summarizer*, untuk menyimpulkan pesan yang disampaikan oleh pemuka pendapat dan melaksanakan dengan semestinya.

Masyarakat desa harus mematuhi pesan yang disampaikan pemuka pendapat, yang memaparkan berita dari pemerintah. Warga desa tidak dapat menolak, sekeras-kerasnya tindakan mereka adalah tidak melaksanakan himbuan, yang isinya semuanya serba wajib. Tetapi itupun sulit dilakukan, karena pemerintah juga melakukan pengawasan yang ketat melalui aparatnya. Pemuka pendapat ini biasanya menyampaikan pesan melalui media pertemuan formal maupun informal di desa, tetapi khalayak yang secara khusus mencari informasi ke dia, jumlahnya sangat terbatas. Dalam pertemuan informal seperti pada suatu acara khajatan warga desa, kadang-kadang warga bicara dan berdebat dengan pemuka pendapat tentang masalah pertanian di desa, tetapi itu hanya bunga-bunga pembicaraan, sebab pada akhirnya masyarakat pada umumnya tidak kuasa untuk membantah ketika pemuka pendapat mengutip ketentuan pemerintah.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemuka pendapat memiliki posisi yang kuat sehingga dalam setiap pembicaraan dia akan memimpin. Perdebatan hanyalah variasi yang sangat sedikit dari khalayaknya, sebab pada akhirnya khalayak lebih condong untuk mematuhi apa yang dikehendaki pemuka pendapat.

Pada masa industri berkembang pesat, dan tingkat dukungan yang tinggi dari kekuasaan negara, tentara serta pemilik modal, maka pola komunikasi dengan khalayaknya bersifat semakin linier, tanpa ada transaksi untuk melakukan umpan balik dan bantahan. Pemuka pendapat yang merupakan bagian integratif dari kekuasaan negara selalu mengontrol pembicaraan dalam mengendalikan pesan agar sesuai dengan tujuan pembangunan pemerintah.

Komunikasi satu arah dengan gaya *controlling style* tersebut sangat menonjol dalam masa kejayaan industri. Khalayak desa dalam posisi *relinquishing style* yaitu kesediaan penerima informasi dari orang lain, tetapi di pihak lain kepentingan dan kebutuhan informasi yang sesungguhnya tidak dihiraukan oleh pemuka pendapat.

Sebagai desa pertanian, sebelum industrialisasi masuk, pengelolaan pertanian dilakukan dengan pola kekerabatan. Lahan pertanian maupun perkebunan yang memiliki ikatan historis tidak mudah dijual kepada orang lain. Tetapi modernisasi dengan industrialisasinya melunturkan sikap terhadap kepemilikan tanah. Jarang sekali masyarakat desa menjual tanah kepada orang luar desa. Tetapi sejak dibangunnya fasilitas jalan bebas hambatan, dan isu kawasan industri yang dibangun, maka lingkungan sekitar desa dengan cepat berubah. Muncul pasar lahan di desa sepanjang jalan bebas hambatan. Lahan subur diperjualbelikan secara bebas tidak menghiraukan apakah untuk pertanian, pabrik atau sekadar investasi pemilik modal dari luar wilayahnya.

Sebagaimana dalam peran lain yang juga mengalami perubahan, pada masa surutnya industri, maka peran pembicaraan pertanian juga mengalami kemerosotan. Masyarakat tidak lagi menghindar kepada pemuka pendapat dukungan pemerintah. Bahkan masyarakat menilai, pemuka pendapat yang selalu mengontrol warga desa dalam setiap pembicaraan tentang pertanian itu, ikut andil terhadap terpuruknya desa. Warga biasa mengungkapkan kekecewaan ketika pada awal pembangunan pabrik, pemuka pendapat dan entitas pendukung industri menyatakan bahwa pembebasan tanah akan dilakukan untuk peternakan ikan, peternakan ayam dan usaha lain yang tidak akan merusak lingkungan desa.

Pesan yang disampaikan kepada masyarakat tidak dihiraukan lagi, masyarakat cenderung reaktif terhadap pemuka pendapat dukungan pemerintah masa Orde Baru. Sebagian pemuka pendapat, dengan sisa otoritasnya berupaya untuk beradaptasi dengan perubahan, tetapi tidak mudah untuk meraih kembali khalayaknya. Masyarakat masih memiliki pengalaman buruk ketika model pemaksaan yang dilakukan tidak memberikan kesempatan untuk beda pendapat

2.2. Dilema Perkembangan Industri di Pedesaan

Pada waktu lahan pertanian irigasi teknis yang berproduksi tidak tergantung pada musim, ikut tergusur oleh pembangunan pabrik. Inilah awal dari redupnya desa sebagai salah satu sentra penghasil beras. Dipihak lain simbol modernisasi tumbuh dengan pesat seperti pabrik,

permukiman kelas menengah atas, tempat rekreasi komersial, peternakan dan perkebunan yang dikelola dengan cara modern. Lembaga-lembaga ini hanya memerlukan sedikit tenaga kerja marginal yang kualifikasinya seperti dimiliki petani desa. Padahal tanah pertanian yang tergusur, semula mampu menampung sejumlah besar buruh tani.

Orientasi baru kepada tatanan industri menjadi kuat, kegiatan yang berhubungan dengan siklus pertanian semakin ditinggalkan khususnya oleh anak muda, mereka lebih suka sebagai buruh pabrik atau bekerja sektor informal mendukung komunitas industri atau pergi ke luar desa sebagai tenaga kerja di perkotaan atau menjadi pembantu rumah tangga di luar negeri.

Mereka merasa bekerja di sektor pertanian tidak banyak memberikan keuntungan, bahkan sering masuk dalam situasi yang tidak pasti ketika terjadi serangan hama atau faktor alam yang mengganggu siklus pertanian. Oleh sebab itu bekerja di pabrik bagi sebagian masyarakat dianggap lebih memberikan kepastian dalam memperoleh penghasilan.

Dalam situasi awal masuknya industrialisasi ke pedesaan, pola komunikasi pemuka pendapat yang berorientasi untuk mendukung industrialisasi dengan masyarakat desa lebih banyak diwarnai dengan pola komunikasi yang linier. Penguasaan informasi tentang pembangunan pabrik dengan segala implikasinya membuat dan posisi individu yang memiliki hubungan dengan aparat pemerintahan dan pemilik modal semakin memperkuat posisi di depan *audience* nya.

Di pihak lain masyarakat desa cenderung untuk menghindari (*withdrawl style*) berinteraksi dan berkomunikasi dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan simbol kekuasaan. Namun sejalan dengan itu, muncul ketergantungan masyarakat terhadap eksistensi pabrik di desa dalam urusan penjualan tanah dan keinginan bekerja di pabrik, membuat komunikasi lebih banyak berjalan satu arah dalam kendali pemuka pendapat.

Sebenarnya masyarakat kurang suka dengan pemuka pendapat dukungan pemerintah, tetapi mengingat kekuatan eksistensinya dalam setiap pertemuan desa, maka masyarakatpun tidak mampu untuk mengimbangi komunikasi politik pemuka pendapat yang seringkali mengarahkan, agar menerima dengan baik kehadiran pemilik modal yang bisa memberikan kesejahteraan. Pembicaraan semacam itu juga sering dia kemukakan dalam acara tradisional maupun acara religius yang diselenggarakan masyarakat. Sebagai orang dekat pemerintah, pemuka

pendapat selalu hadir dan memanfaatkan kesempatan dalam komunikasi politik yang berisi "pesan titipan pemerintah" untuk warga desa.

Terhadap pemuka pendapat yang mendukung industrialisasi di pedesaan, warga desa memiliki dua sifat yang berbeda yaitu kelompok pertama menerima dengan terpaksa, sedangkan kelompok kedua menganggap bahwa pemuka pendapat memiliki peranan yang besar untuk membantu mengatasi kesulitan penghasilan. Ditinjau dari jumlah khalayaknya, yang menerima pesan dengan keterpaksaan adalah mayoritas warga desa. Sebab orang yang memiliki orientasi sama dengan pemuka pendapat ini, umumnya anak muda dan sekelompok pemilik tanah atau para calo tanah yang terlibat secara intensif dalam komersialisasi tanah pedesaan.

Pola komunikasi pemuka pendapat ini semakin menunjukkan dominasinya ketika pabrik berkembang dengan pesat. Situasi desa-desa pertanian dimana berdiri pabrik, tidak tampak lagi sebagai desa pertanian. Pertanian seolah hanya menjadi lahan-lahan yang membatasi antara pabrik yang satu dengan pabrik yang lain. Iring-iringan kelompok buruh tani akan bekerja di sawah semakin tidak tampak mencolok, digantikan oleh rombongan buruh pabrik yang datang secara serempak dari berbagai penjuru desa dengan menumpang bus pabrik. Hilir mudik bus perusahaan, sepeda motor dan angkutan lainnya tidak pernah berhenti sepanjang hari. Desa menjadi dinamik oleh mobilitas buruh pabrik yang sebagian besar pendatang.

Dominasi pemuka pendapat sangat menonjol ketika industri di desa semakin kuat menanamkan pengaruhnya dan menggeser pertanian tradisional, yang hakekatnya tidak sekadar aktivitas ekonomi tetapi juga menjaga tradisi pedesaan. Pemuka pendapat sebagai kelompok elite, semakin tidak tersentuh oleh warga desa ketika pabrik berkembang dengan pesat. Masyarakat tunduk terhadap semua perintahnya. Dalam posisi sebagai sponsor kepentingan khusus (*special interest pleader*) pemilik modal maupun pemerintah, memiliki kekuatan besar untuk mengendalikan khalayak dan menciptakan opini yang luas di pedesaan. Akibatnya masyarakat tidak berani berbeda pendapat. Dalam hubungannya pembentukan pendapat umum, Noelle-Neumann (dalam Denis McQuail, 1987:252) berpendapat, "orang-orang umumnya secara alamiah memiliki rasa takut terkucil, sehingga dalam pengungkapan opini, mereka berusaha menyatu dengan mengikuti opini mayoritas atau konsensus". Walaupun sebenarnya pendapat itu berlaku dalam pembentukan opini di media, tetapi pendapat

itu memiliki substansi yang sama dalam pola komunikasi di pedesaan. Masyarakat cenderung mengikuti pendapat mayoritas atau opini yang berkembang, walaupun keikutsertaannya ada unsur terpaksa. Penolakan terhadap opini yang berkembang dan mempunyai banyak pengikut tidak akan dihiraukan oleh khalayak lain.

Industrialisasi pedesaan yang digunakan sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan penghasilan masyarakat desa, tidak sepenuhnya berhasil. Justru yang nampak menonjol adalah masalah baru yang muncul sejalan dengan tidak beroperasinya sejumlah pabrik. Oleh sebab itu ketika terjadi kebebasan berpendapat pada masa krisis multi dimensi, masyarakat melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang menguntungkan pengusaha pada masa lalu.

Mereka mengungkit berbagai ketidak konsistenan dalam proses pembebasan tanah, pembuangan limbah dan kompensasi-kompensasi sosial lainnya yang dijanjikan. Pemuka pendapat yang dukungannya dari aparat desa juga melemah tidak lepas dari sasaran kritik masyarakat. Pembicaraan yang terjadi diantara pemuka pendapat ini dengan masyarakat tidak lebih dari perdebatan dan pengadilan terhadap mereka. Warga desa tidak percaya lagi meskipun pemuka pendapat berupaya untuk menyelaraskan dengan situasi reformasi. Kalaupun masih memiliki khalayak, mereka jumlahnya terbatas, umumnya adalah orang yang masih berharap bahwa peran pemerintah dapat dikembalikan kepada posisi semula. Kelompok ini cenderung muncul dari para birokrat desa atau pegawai pemerintah yang bertempat tinggal di pedesaan.

Konteks situasional yang tidak menguntungkan bagi pemuka pendapat pendukung industrialisasi menjadikan pola komunikasi yang terjadi dengan masyarakat desa bersifat dua arah. Masyarakat tidak lagi perhatian terhadap pesan titipan pemerintah bahkan cenderung untuk menolak semua berita atau pesan yang disampaikan pemuka pendapat.

Kebanyakan warga desa tidak begitu saja menerima pesan yang disampaikan oleh pemuka pendapat, karena mereka juga memperoleh berita dari banyak sumber yang lebih dipercaya. Mereka tidak segan-segan untuk menolak isi pesan jika tidak sejalan dengan aspirasi warga desa, karena itu pemuka pendapatpun mulai jarang tampil dalam forum di desa. Memang masih ada sebagian warga desa yang mengandalkan sebagai tokoh masyarakat, tetapi umumnya lebih banyak yang tidak memiliki ketergantungan lagi.

Dengan khalayak yang terbatas, pola komunikasi pemuka pendapat dengan khalayaknya juga berubah sejalan dengan hilangnya hegemoni kekuasaan negara dalam pengendalian pesan. Pola komunikasi yang linier berubah menjadi interaktif dan transaksional yang saling melemparkan argumentasi. Pemuka pendapat tidak dominan menguasai informasi tetapi berbagi informasi dengan masyarakat desa dalam komunikasi dua arah yang sederajat.

2.3. Perdagangan Desa Sebagai Pendamoing Kehidupan Desa

Perdagangan desa dipengaruhi oleh situasi dan pertumbuhan bidang lainnya yang terjadi di wilayah Klari. Sektor lain yang berkembang, menyebabkan munculnya peluang baru untuk melakukan usaha sebelumnya yang tidak dikenal. Tetapi karakteristik tradisional yang kurang inovatif terhadap sesuatu yang baru, mengakibatkan masyarakat setempat terlambat mengantisipasi kesempatan untuk berusaha, sehingga justru peluang tersebut sering dimanfaatkan oleh masyarakat pendatang. Misalnya, beroperasinya pabrik sepanjang hari lebih banyak diantisipasi oleh pendatang dengan membuka rumah makan, bengkel, toko kelontong, penitipan sepeda dan usaha lainnya yang menguntungkan.

Perdagangan desa, dalam situasi desa pertanian, bemula dari usaha mendukung produktivitas pertanian ketika sektor ini mendominasi kehidupan masyarakat. Perekonomian desa sebenarnya tidak pernah sepenuhnya merupakan ekonomi pertanian. Sebab siklus hidup pertanian berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa dalam kehidupan desa. Dalam situasi desa pertanian, komunikasi yang terjadi antara pemuka pendapat dengan masyarakat desa bersifat satu arah yang memberikan nasehat dan petunjuk kepada khalayaknya.

Pemuka pendapat adalah kepanjangan tangan pemerintah yang memberikan saran sepihak dan sulit untuk dibantah karena membawa pesan pembangunan yang sarat dengan berbagai kewajiban. Interaksi antara pemuka pendapat dengan masyarakat desa menghasilkan pola komunikasi linier sebagai rujukan masyarakat dan pola komunikasi satu arah (*one-way communication*) yang mengontrol ketat khalayaknya terjadi pada waktu kekuatan industrialisasi di desa sangat dominan. Kapasitas sebagai mediator untuk mendapatkan modal adalah salah satu referensi masyarakat yang memiliki ketergantungan terhadap pemuka pendapat ini. Disamping itu efek sukses yang dia peroleh dalam usahanya, semakin memposisikan sebagai tokoh yang layak untuk diikuti pendapatnya.

Perekonomian desa di sektor perdagangan tidak lepas dari pengaturan oleh pemerintah, dari masalah modal, iuran wajib bahkan cat untuk warung. Sedangkan untuk usaha yang lebih besar, terkait aturan pengucuran kredit, keharusan menjual komoditas, penggunaan tenaga kerja, keharusan mengisi bermacam-macam formulir dari pemerintah sampai pada pengendalian harga komoditas tertentu. Semua program pemerintah akan disebarakan oleh pemuka pendapat kepada masyarakat desa. Kerjasama ini dalam pemikiran McQuail (1987:188),:

Pengendalian masyarakat oleh elite atau kelas yang mementingkan diri sendiri, cenderung memiliki pengaruh yang kuat karena ketidaktahuan politik khalayak (*audience*) tentang realitas sosial, penekanan pada legitimasi negara dan lembaga kelas yang mapan. Apabila muncul ketidakpuasan, maka elite dan kelompok kepentingan tersebut akan mengkambinghitamkan sebagai para pembelot, kelompok militan dan mereka yang non kompromis terhadap kekuasaan.

Jika kondisi ini berlangsung, sudah barang tentu masyarakat pedesaan, tidak mempunyai keberanian untuk menolak pesan yang diterima mengingat kekuatan pemuka pendapat, pemerintah dan kelompok kepentingan di desa. Disini sebenarnya terdapat dua jenis penerimaan pesan, Cartwright dan Zander (dalam Tubb dan Moss, 1996:70-71), secara substantif menjelaskan, penerimaan pribadi lebih sering terjadi bila menghargai keanggotaan dalam kelompok, pendapat kelompok secara bulat berlawanan dengan pendapat individual, isu yang dipermasalahkan bermakna ganda (*ambiguous*) dan kelompok dipaksa untuk menghasilkan satu ujuan penting. Sedangkan penerimaan publik biasanya tumbuh dari keinginan mencegah ketidaknyamanan konflik. Setelah mempertahankan pendapat tidak sepakat untuk waktu yang lama, orang menjadi tidak nyaman oleh tekanan sosial, sehingga untuk menjaga kedamaian, ia akan memberi kesan setuju pada semua anggota kelompok.

Dukungan pemerintah dan otoritas tradisional serta kemampuan adaptasinya terhadap keadaan yang berkembang menjadikan pemuka pendapat menerapkan gaya komunikasi linier satu arah tanpa ada umpan balik yang diperhitungkan.

Berbagai persoalan komunikasi yang bersifat hegemoni, pengendalian yang ketat dari pemuka pendapat dan pemerintah, sebagaimana pola komunikasi pada bidang lain, maka komunikasi dalam perdagangan berubah menjadi pola komunikasi yang interaktif, ketika masyarakat tidak mudah untuk mempercayai pesan yang muncul dari pemuka

pendapat yang sering berkolaborasi dengan pemerintah dan pemilik modal kuat di desa. Persoalan yang terpendam mulai diungkit lagi, seperti halnya ketidaksetujuan para pemilik warung dan toko kelontong kecil terhadap beroperasinya beberapa mini market di pedesaan. Pemerintah desa dan kecamatan yang pernah diprotes warga desa untuk melarang beroperasinya mini market tidak mau menghiraukan tuntutan, bahkan melalui agen-agen pemerintah dan pemuka pendapatnya, justru seolah mendukung beroperasinya mini market dengan berbagai dalih termasuk alasan pasar persaingan sempurna yang sehat.

Warung-warung warga desa menjadi sepi pembeli, ketika mini market beroperasi. Umumnya mini market berdiri di dusun pusat desa. Masalah ini tidak pernah memperoleh pemecahan dengan tuntas, mengingat pemilik modal kuat yang dibelakang usaha retail, memiliki jalur hubungan kekuasaan yang tidak dapat diimbangi oleh kekuatan pada tingkat akar erumput. Antisipasi warga desa menghadapi industrialisasi dan beralih mata pencaharian dari sektor agraris ke usaha kecil menghadapi pesaing yang tidak seimbang. Semua kesalahan ini ditimpakan juga kepada pemuka pendapat dan pemerintah, karena dianggap tidak berpihak kepada rakyat kecil.

Masalah lain yang muncul berkaitan dengan usaha di luar sektor pertanian dan industri adalah, perdagangan limbah pabrik yang dapat dimanfaatkan seperti potongan kain, karpet, karet dan segala macam sampah industri yang dapat diperjualbelikan. Pengusaha limbah umumnya orang yang memiliki hubungan kuat dengan pemilik pabrik di desa. Karena itu para penguasa limbah ini berupaya selalu membela kepentingan pabrik, mengamankan gangguan pabrik dari kejahatan dan maupun meredam protes masyarakat desa karena pabrik melakukan kegiatan yang tidak dikehendaki warga desa. Hubungan antara pemuka pendapat dengan para pengusaha limbah berjalan dengan baik dalam satu modus kepentingan yang sama membela kelancaran beroperasinya pabrik.

Usaha di pedesaan yang sering menimbulkan konflik dalam masyarakat dikaitkan dengan moralitas adalah persewaan rumah. Pemuka pendapat dan aparat pemerintah sering dianggap tidak tegas terhadap penertiban rumah dan kamar sewaan, yang dipergunakan tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Namun kelompok ini memiliki eksistensi yang kuat, karena secara terselubung, memperoleh dukungan dari orang kuat di desa. Selain itu, mereka juga memiliki akses komunikasi yang interaktif dengan elite dalam berbagai kelompok di wilayahnya.

Dalam konteks kelesuan pabrik, para pemuka pendapat kehilangan dukungan, mereka tidak lagi mendominasi pembicaraan dalam usaha di desa dan memaksa untuk menjalankan kewajiban yang tidak disukai dan tidak sejalan dengan kebiasaan masyarakat desa. Komunikasi berlangsung interaktif dengan kesetaraan diantara pihak yang berinteraksi. Mulanya masyarakat takut menolak pesan pemuka pendapat, tetapi mereka sering membandingkan kejadian di televisi dan radio-radio di Jakarta yang juga menyuarakan kebebasan. Selain itu, radio di daerah juga tidak hanya menyiarkan hiburan tetapi penuh dengan berita tentang mengungkapkan penyimpangan yang dilakukan berbagai pihak dalam menjalankan pemerintahan. Oleh sebab itu, warga desa dalam komunikasi politiknya, menjadi berani dan tidak lagi bisa dikendalikan oleh pemuka pendapat. Bahkan kami lebih suka membantah apa yang dia kemukakan. Zaman telah berubah dan masyarakat bebas untuk mencari informasi tentang bagaimana cara mengatasi persoalan usaha kecil.

Pola komunikasi antara pemuka pendapat dan khalayaknya muncul dalam bentuk egaliter, tidak ada lagi posisi yang harus diikuti pesannya, tetapi justru pesan yang muncul selalu menjadi perdebatan dengan khalayaknya. Upaya untuk menyesuaikan dengan keadaan reformasi tidak dapat dilakukan dengan cepat sehingga pemuka pendapat ini juga tidak lagi menjadi referensi masyarakat untuk berbicara tentang perdagangan di desa, walaupun pemerintahan desa setempat tetap berupaya untuk memanfaatkan sisa kewibawaan sebagai tokoh masyarakat.

3. Diawali Potret Buram Politik Pedesaan

Politik di pedesaan secara khusus partai politik yang di dukung atau memberikan dukungan kepada birokrasi negara, mempengaruhi semua bentuk kebijakan publik dari tingkat pusat sampai ke pedesaan. Politisasi desa oleh partai yang berkuasa sangat menonjol dan bertolak belakang dengan depolitisasi yang dilakukan kekuasaan negara terhadap penduduk desa.

Sejak pemilihan umum tahun 1971, Indonesia memasuki era baru dalam sistem kepartaian, yaitu sistem hegemonik. Dikatakan oleh Sartori:

Sistem yang hegemonik adalah sistem dimana tingkat kompetisi antara partai politik dibuat seminimum mungkin oleh partai hegemony. Partai yang lain hanyalah sekedar diberi kesempatan untuk hidup dengan peranannya yang sifatnya sangat peripheral. Kemungkinan akan adanya rotasi kekuasaan hampir sama sekali tidak mungkin karena tidak akan hal itu terjadi oleh partai *hegemony*. (Giovanni Sartori dalam Gaffar, 1988:10).

Dalam sistem seperti ini, dengan di dukung oleh militer dan birokrasi, dominasi Golongan Karya sama sekali tidak dapat diimbangi oleh partai politik yang lainnya dalam segala aspek kehidupan politik di Indonesia. Partai lain menjadi sangat minimal dalam *policy process*, paling terbatas sebagai pelengkap dalam suatu kompetisi yang timpang.

Selayaknya partai politik berperan dalam proses pendidikan politik, tetapi depolitisasi melalui kebijaksanaan massa mengambang (*floating mass*), terutama pada tingkat pedesaan, menjadikan hubungan antara elite partai dengan massa menjadi terputus. Kaderisasi partai politik di tingkat bawah mengalami kemacetan, sehingga sangat sulit merekrut aktifis yang memiliki kemampuan dan kecakapan. Hal ini tidak terjadi pada partai penguasa, karena aparatur pemerintah desa dan kecamatan merupakan aktifis Golkar di desa, sehingga mampu mengadakan penetrasi intensif di segala sektor kehidupan desa, tentu saja termasuk menetapkan siapa calon kepala desa yang layak di dukung dan dipilih dalam sistem kekuasaan lokal.

Pola hegemonik berakhir, sistem politik dengan corak kepartaian juga berubah. Sistem politik menempatkan partai politik secara otonom melaksanakan agenda politiknya. Berubahnya sistem politik sampai ke tingkat desa, menghendaki dan membebaskan keterlibatan aktif masyarakat untuk senantiasa mengontrol perilaku politik dalam sebuah bangunan sistem baru.

Floating mass telah ditinggalkan, partai berlomba-lomba masuk ke pedesaan sebagai sumber konstituen menghadapi pemilihan umum. Tetapi berdasarkan catatan pemerintahan kecamatan, pada tingkat kecamatan saja, dari 48 (empat puluh delapan partai) yang ikut dalam pemilihan umum, hanya ada hanya 21 partai yang memiliki pengurus di tingkat kecamatan., sedangkan 27 partai gurem lainnya tidak memiliki kepengurusan.

3.1. Perjalanan Demokratisasi Kekuasaan Lokal

Kekuasaan lokal dalam konteks ini adalah kekuasaan desa setempat yang dapat mengarahkan dan mempengaruhi masyarakatnya. Kekuasaan menurut Mokken dan Stokman adalah "kemampuan dari pelaku (seseorang, kelompok atau lembaga) untuk menetapkan secara mutlak atau mengubah (seluruhnya atau sebagian) alternatif bertindak atau alternatif memilih yang tersedia bagi pelaku lain". (Mokken dan Stokman dalam Budiardjo, 1994:94).

Politik sebagai upaya penguasaan orang atau komunitas lain, jika tanpa kontrol cenderung menindas kepada yang dikuasai atau rakyat.. Kekuasaan

otoriter dilakukan melalui *bureaucratic strategy* yang paralel dengan *top-down approach*, atau menjalankan kekuasaan dengan model birokrasi yang mengontrol. Akibatnya pembangunan politik di desa menafikan partisipasi masyarakat.

Pembicaraan yang membahas seputar kehidupan politik lokal, antara pemuka pendapat dan masyarakat desa, dalam situasi desa pertanian lebih diwarnai oleh model komunikasi linier, mengingat bahwa hubungan kekuasaan yang *patronage* berlaku dalam skala nasional sampai ke pedesaan. Dukungan terhadap kekuasaan kepala desa oleh pemuka pendapat diwujudkan dalam pesan yang disampaikan dalam pola komunikasi yang linier. Di pihak lain warga desa yang memiliki ketergantungan terhadap "administrasi desa" cenderung untuk mengikuti pesan pemuka pendapat tanpa berani menolak.

Berkembangnya industri di desa, dipakai sebagai simbol keberhasilan pemerintah oleh pemuka pendapat. Dalam pidato ataupun pembicaraan di depan publik, pemuka pendapat sering mengkaitkan bahwa perannya adalah mengamankan pembangunan dan di dukung oleh aparat desa. Tidak ada komunikasi interaktif yang memberikan kesempatan khalayak untuk berbeda pendapat. Pesan pemuka pendapat adalah pesan pemerintah yang harus dilaksanakan.

Sejak dulu hingga menjelang pergantian Presiden Soeharto ke Presiden Habibie, dalam komunikasi politik tentang kebijakan pembangunan, warga desa tidak dapat membantah, semuanya wajib dilaksanakan, padahal ada pula ketentuan yang dinilai memberatkan bagi warga desa. Komunikasi politik yang berlangsung dalam membahas kekuasaan lokal, hanyalah bentuk kompromi sepihak, atau penyampaian pesan untuk memobilisasi dukungan dari warga desa. Pemuka pendapat ini menguasai khalayak desa dan tidak jarang ditakuti karena berfungsi pula sebagai kaki tangan kekuasaan negara.

Kekuasaan yang dominan dari pemuka pendapat kelompok pendukung industrialisasi pun surut, ketika terjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Masyarakat tidak lagi tunduk terhadap penggunaan kekuasaan untuk menyebarkan informasi. Justru berbalik arah, masyarakat selalu mengontrol dengan ketat tindakan pemuka pendapat, pamong desa dan pabrik

Pembicaraan politik sedemikian marak dengan semangat keterbukaan. Pemuka pendapat hanyalah sebagai salah satu sumber informasi yang tidak lagi diperhitungkan. Masyarakat memperoleh informasi dari berbagai

sumber pesan, mengikuti aliran *multi-step flow*. Warga desa tidak peduli lagi dengan kewajiban untuk berpartisipasi dalam mendukung setiap program pemerintah. Reputasi pemuka pendapat yang mendukung kekuasaan dan tidak menghiraukan rakyat semakin pudar. Masyarakat desa lebih suka lebih suka bicara tentang kekuasaan di desa ini dengan tokoh yang masih muda dan terpelajar.

Diskursus peran organ-organ kekuasaan negara dalam mengendalikan pemerintahan, selalu masuk dalam peran yang tidak disukai oleh masyarakat desa, sehingga masyarakat memiliki semangat untuk mengkritik yang cukup intens ketika berbicara peran pemuka pendapat yang selalu mendukung kebijakan pemerintahan desa.

3.2. Partisipasi Dalam Pemilihan Umum

Pada pemilu masa Orde Baru, Golkar muncul sebagai mayoritas tunggal. Hal ini sebagian dimungkinkan karena adanya sistem politik yang birokratik patrimonial dengan basis utama aparat pemerintah yang bertindak sebagai mesin politik untuk menanggung konstituen. Dalam pandangan Duverger (1998:137), “di lingkungan masyarakat tradisional yang belum lazim menjalankan demokratisasi, kekuasaan negara lebih mudah untuk mengendalikan masyarakat untuk mendukung kepentingannya”. Komunitas masyarakat tradisional tidak memiliki kemampuan atau kepercayaan untuk berargumentasi dengan kekuasaan negara ketika terjadi ketidaksesuaian.

Terlebih lagi dalam masalah politik, sangat kecil kemungkinan masyarakat desa untuk berbeda pendapat dengan pemerintah beserta pemuka pendapat di desa. Kekuasaan semacam ini, menurut Murdoch dan Rosen (1970) sebagai kekuasaan *disruptif*, yaitu “kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk memaksa orang lainnya agar melakukan apapun yang diinginkannya”. (Murdoch dan Rosen, dalam Tubbs dan Moss, 1976:5). Ketidaksamaan dalam orientasi politik yang sering dikaitkan dengan komunis dan gerakan radikal lainnya membuat masyarakat desa terperangkap dalam konsep *floating mass* yang terus dikendalikan oleh kekuasaan negara.

Politik sebagai masalah yang sensitif dalam masyarakat pedesaan, membuat dominasi pembicaraan pemilu dan partai politik sepenuhnya dalam penguasaan pemuka pendapat sebagai agen pemerintah. Pesan yang berbau politik akan disampaikan kepada khalayaknya dalam bentuk yang sangat linier, sesuai dengan kebijakan pemerintah tentang kehidupan

ideologi, politik dan stabilitas kekuasaan negara pada tingkat pedesaan.

Pemuka pendapat digunakan sebagai agen partai politik untuk menyampaikan pesan politik. Upaya yang dilakukan pemuka pendapat sebagai entitas dari kekuatan politik yang berkuasa sangat menonjol. Mereka secara rutin melakukan sosialisasi politik kepada khalayaknya. Secara umum, sosialisasi politik adalah, penanaman informasi politik yang disengaja baik formal maupun informal pada setiap siklus kehidupan” (Fred I. Greenstein dalam Rush dan Althoff, 1997:36). Pengenalan politik yang terprogram menghasilkan dominasi partai yang kuat, mengatur semua segi kehidupan.

Masyarakat desa adalah konstituen yang mudah dikendalikan dan tidak akan melakukan perlawanan untuk urusan politik semenjak trauma politik tahun 1965. Pengendalian politik yang ketat memposisikan khalayak sebagai sumber eksploitasi untuk mendukung kekuasaan negara. Masyarakat desa pada umumnya tidak berani membantah yang dikemukakan pemuka pendapat untuk tetap memilih partai yang didukung pemerintah pada waktu itu. Mereka takut jika tidak mematuhi, sebab khawatir akan memperoleh kesulitan dalam berbagai urusan dengan lembaga-lembaga formal di desa.

Karena itu, mereka menurut saja ketika para pamong desa, aparat desa dan kecamatan memberikan pengarahan supaya warga desa memilih partai pemerintah dalam setiap pemilihan umum sampai tahun 1997 yang lalu. Komunikasi antara pemuka pendapat dan khalayaknya tentang pemilihan umum, berlangsung linier dengan mengarahkan untuk memilih partai yang diikuti oleh pemuka pendapat.

Pola linier itu, lama kelamaan luntur ketika Presiden Soeharto sebagai pemegang otoritas politik yang paling kuat turun dalam suatu kemelut politik. Selanjutnya komunikasi atau pembicaraan politik berlangsung dengan sebebas-bebasnya. Media massa mempunyai peran besar untuk memnciptakan kebebasan berpendapat di masyarakat. MacBride (1980:209) menyatakan, konsepsi kebebasan informasi, kebebasan arus informasi, arus informasi yang seimbang dan kebebasan menggunakan media massa adalah pengembangan dari prinsip dasar kebebasan berbicara dan berpendapat. Apabila kebebasan berbicara itu adalah kebebasan individu, maka kebebasan informasi mempunyai aspek individu dan kolektif, dikembangkan oleh adanya sarana komunikasi massa yang beranekaragam.

Informasi tentang politik dan ketimpangan penyelenggaraan pemerintah menjadi pembicaraan masyarakat desa. Pemilu juga menjadi

perbincangan yang menonjol di lingkungan masyarakat desa. Partisipasi masyarakat desa dalam pemilihan umum tahun 1999, menempatkan pesta demokrasi sebagai kedaulatan rakyat dan memposisikan rakyat sebagai aktor yang otonom dalam menentukan pilihan. Bukan rakyat yang dimobilisir tanpa tahu untuk kepentingan siapa partisipasi politiknya.

Pada Pemilu tahun 1999 warga desa bebas memilih. Tidak lagi harus mengikuti himbuan pemuka pendapat yang biasa menyuarakan kepentingan partai penguasa. Situasi kampanye dari berbagai partai politik ramai sampai ke pelosok desa. Padahal pemilu sebelumnya, warga desa tidak pernah melakukan atau melihat kegiatan partai di desa, kampanye partai biasanya ada di kota. Pada masa lalu, sebelum reformasi politik, di tingkat desa sering diadakan pertemuan oleh aparat desa, elite dalam masyarakat dan partai penguasa.

Masyarakat tidak mengenal lagi mobilisasi massa dalam pemilihan umum, tetapi mereka mulai dengan kesadarannya sendiri berpartisipasi dalam politiknya. Menurut Jennings dan Vincent, "partisipasi aktif dalam komunikasi politik membuat para pemilih menyadari dan mengenal serta memperoleh informasi tentang calon dalam suatu pemilihan (Jennings dan Vincent, dalam Suwardi, 1995:47). Keberanian untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, karena situasi yang berubah dan dukungan media massa yang gencar menyuarakan transparansi politik.

Keberanian untuk berbeda pendapat dengan pemerintah atau organ kekuasaannya, bahkan dilakukan dengan pengerahan massa berbagai kelompok dalam masyarakat. Namun celaknya ketika konflik dipecahkan bukan dengan kompromi dan musyawarah, akibat masyarakat kurang memiliki kepercayaan lagi terhadap aparat pemerintahan di desa dan para pemuka pendapat, saluran yang digunakan oleh masyarakat seringkali dalam bentuk pengerahan massa untuk melawan kebijakan pemerintah

Menyikapi model tindakan massa Patterson dan McClure menyatakan, ungkapan ketidakpuasan secara individual kepada struktur kekuasaan, jarang mendapatkan sarannya. Namun jika mereka bergabung dalam kelompok, maka biasanya akan mencapai sasaran yang dituju. Saluran khusus dimaksud disini adalah demonstrasi, huru-hara, atau peristiwa tertentu dalam situasi politik atau semasa kampanye pemilu. (Patterson dan McClure dalam Suwardi, 1995:37).

Masyarakat desa yang selaku masuk dalam kutub *floating mass* yang tidak layak atau dilarang berpolitik, pada waktu terjadi krisis ekonomi dan krisis multi dimensi berubah menjadi komunitas yang bebas berpolitik.

Dalam partisipasi politiknya yang paling rendah seperti keikutsertaan dalam pemilihan umum, masyarakat bebas menentukan pilihannya tanpa keterlibatan kekuasaan negara. Kebebasan berpolitik menjadikan masyarakat desa menjadi target dari banyak partai politik supaya menjadi konstituennya.

Perbedaan politik bukan lagi dibicarakan dengan situasi rahasia dalam kelompok yang berseberangan dengan pemerintah saja. Bahkan perbedaan dalam orientasi politik justru cenderung menjadi karakteristik baru warga desa dalam situasi krisis yang berkepanjangan. Perbedaan pilihan politik di desa tidak menimbulkan konflik ideologis seperti yang dikhawatirkan pemerintahan pada masa depolitisasi diterapkan di lingkungan masyarakat desa.

Komposisi perolehan suara dari lima partai politik pada Pemilihan Umum tahun 1999 untuk DPRD di tingkat kecamatan yang menaungi desa-desa lokasi industri adalah, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) memperoleh 37.152 suara. Kedua, Partai Golongan Karya (Golkar) dengan 21.157 suara. Ketiga, partai persatuan Pembangunan (PPP) mendapatkan 8.314 suara. Sedangkan yang keempat diduduki oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memperoleh 4.911 suara. Urutan kelima adalah Partai Amanat Nasional (PAN) yang memperoleh sekitar 4.164 suara. Komposisi perolehan suara tersebut, membuat peta politik yang selama beberapa dekade didominasi oleh mayoritas tunggal Golongan Karya berubah. Padahal hasil pemilihan umum sebelumnya, Golkar memperoleh suara antara 80-90% dai jumlah pemilih.



KREDIBILITAS KEPEMIMPINAN OPINI

Keanekaragaman sosial budaya, perekonomian dan politik di Klari terjadi setelah munculnya industrialisasi, pengaruh media massa dan tersedianya akses transportasi yang memudahkan orang untuk melakukan migrasi. Dalam situasi yang kompleks, karakteristik masyarakat dan lingkungannya juga mengalami dinamika dalam pergeseran sikap dan perilaku. Dampak selanjutnya adalah pandangan masyarakat terhadap pemuka pendapat mengalami perubahan dalam menetapkan kriteria kelayakannya sebagai sumber rujukan. Penilaian terhadap karakteristik individual, isi pesan yang disampaikan dan pola hubungan antara pemuka pendapat dengan orang di dalam maupun di luar kelompoknya menjadi acuan untuk menilai sejauhmana pemuka pendapat memiliki kompetensi terhadap masalah yang dihadapi.

Perubahan menimbulkan permasalahan yang semakin rumit, ketika di lingkungan masyarakat muncul pengelompokan baru yang merujuk pada aspek kepentingan individual maupun komunitas yang terbatas. Namun sekat dalam masyarakat, tidak mengurangi kecenderungan untuk berinteraksi dan berkomunikasi diantara warga desa, walaupun kualitas interaksinya dapat berbeda antara mereka yang satu kelompok, dengan mereka yang di luar kelompoknya. Sebab komunikasi itu sendiri sebagaimana dikatakan oleh Reardon (1987:1), “dimaksudkan untuk menghibur, mempengaruhi, beramah tamah, memperoleh informasi, menunjukkan perhatian dan sejumlah kegiatan lain untuk melakukan hubungan”. Komunikasi tidak hanya berlangsung untuk menciptakan hubungan yang sejalan tetapi dalam perbedaan dapat juga dilakukan

komunikasi jika memiliki satu tujuan yang sama. Kelompok yang berbeda dalam status sosial ekonomi di desapun dapat ikut serta dalam komunikasi yang intensif, ketika memiliki tujuan yang sama.

Interaksi dan komunikasi yang dilakukan diantara sesama warga desa maupun dengan pemuka pendapat, menentukan ukuran karakteristik ketokohan seorang pemuka pendapat yang berbeda. Terlebih lagi jika dalam masyarakat desa dan pemuka pendapat juga terjadi pengelompokan, maka akan diperoleh hasil yang berbeda dalam kaitannya dengan penilaian terhadap "kompetensinya" sebagai tokoh masyarakat.

Perbedaan terhadap berbagai kriteria kredibilitas peran pemuka pendapat, sebenarnya terkandung pula nilai universal pedesaan sebagai bentuk kesepakatan bersama, seperti nilai sosial budaya yang dimiliki, kompetensi dan kejujuran serta sejumlah nilai universal lain dalam konteks sosial budaya. Bentuk yang kurang terkait dengan universalitas budaya bersama, adalah komunikasi yang lebih rasional dan keterbukaan, khususnya yang terjadi setelah industrialisasi meerambah pedesaan.

Orang menjadi lebih rasional dan terbuka, menurut kriteria Rogers dan Shoemaker (1971:211) "orang yang lebih inovatif adalah mereka yang sering melakukan komunikasi interpersonal dengan anggota sistem lain, biasa berhubungan dengan media massa dan mencari informasi dari banyak saluran". Rasionalisasi yang melekat dalam industrialisasi sangat menguntungkan bagi komunitas yang mendukung komersialisasi, tetapi merugikan tradisi desa yang penuh dengan tabu.

Pengelompokan kriteria yang mendukung ataupun menghambat kredibilitas pemuka pendapat berlaku umum, tidak terkait dengan posisi sebagai yang menolak maupun menerima industrialisasi sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Tabel.10.1: Faktor yang Mendukung dan Mengurangi Kredibilitas

Karakteristik yang mendukung kredibilitas			Karakteristik yang mengurangi kredibilitas		
Situasi Desa			Situasi Desa		
Desa Pertanian	Berkembangnya Industri	Surutnya Industri	Desa Pertanian	Berkembangnya Industri	Surutnya Industri
Kesamaan nilai sosial budaya	Kesamaan nilai sosial budaya	Kesamaan nilai sosial budaya	Meninggalkan nilai-nilai sosial budaya	Meninggalkan nilai-nilai sosial budaya	Meninggalkan nilai-nilai sosial budaya
Kompetensi di bidangnya	Kompetensi di bidangnya	Kompetensi Di bidangnya	Sikap Tertutup	Prejudice	Prejudice
Kejujuran	Konsistensi	Konsistensi	Etnosentris	Stereotip	Tidak tanggung jawab
Membela warga desa	Hubungan Kekuasaan	Mendiagnosa perubahan	Orientasi kepada Pabrik & Penguasa	Orientasi kepada Pabrik & Penguasa	Orientasi kepada Parpol.
Cenderung Terdidik	Cenderung Terdidik	Memilik Motivasi	Familiisme	Familiisme	Familiisme
Mengandalkan Pengalaman	Mengunggulkan Empati	Mengunggulkan Empati	Skeptis/ Apatis	Tidak Adaptif	Tidak Adaptif
Elite Pedesaan	Yang Inovatif	Mau berbagi informasi	Otokratis	Tidak Inovatif	Tidak Inovatif
Mempunyai hubungan luas	Pengalaman	Mempunyai hubungan dengan LSM	Avoidance dalam Komunikasi	Komunikasi Mengontrol	Kompromis
Tidak diskriminatif	Berpandangan Luas	Memiliki hubungan dengan politisi	Berpihak kepada kelompok kepentingan	Berpihak kepada kelompok kepentingan	Berpihak kepada kelompok kepentingan
Memberikan insentif	Konseptor Program dan Aturan	Mampu memecahkan konflik	Informasi tidak transparan	Informasi tidak transparan	Ketergantungan pada penguasa
Melakukan Musyawarah	Inklusif	Agresif	Mobilisator gerakan masyarakat	Komersialisasi	Withdrawal dalam komunikasi
Partisipatif	Responsif	Responsif	Materialistis	Birokratis	Komersial
Mengetahui Situasi	Dekat dengan Kelompok Kepentingan	Menjunjung tinggi demokratisasi	Fatalistik, mudah menyerah	Mengunggulkan aspel legal	Mobilisator Massa
Berbagi Informasi	Menguasai informasi dari media	Memiki kejujuran	Sifat destruktif	Diskriminasi dalam komunikasi	Menghambat demokratisai komunikasi
Konstruktif dalam komunikasi	Mengandalkan Empati	Tindakan Korektif	Indolen, kelambanan dalam bertindak	Antilocution dalam interaksi	Kecenderungan destruktif dalam tindakan
Menjunjung tinggi toleransi	Mengunggulkan kesederajatan	Bersifat introspektif	Irrasional	Anti Kritik	Mengikuti pola mekanistik dalam bertindak
Kekerabatan	Bertindak secara organik sesuai bidang	Harminizer dalam interaksi	Tidak Disiplin	Represif dalam tindakan	Orientasi kepada masa lalu

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Kredibilitas peran pemuka pendapat tergantung pada situasi berkembangnya desa, dari desa pertanian, berkembangnya industri sampai pada surutnya kegiatan industri di pedesaan. Situasi yang kompleks membentuk pluralisme dalam kehidupan masyarakat. Dikatakan oleh Durkheim (dalam Haneman, 1990: 20 - 21), sebagai berikut:

Kepadatan interaksi antar anggota masyarakat (*moral density*) berarti hubungan anggota masyarakat semakin rapat, demikian juga hubungan antar kelompok, jumlah alur interaksi mengalami peningkatan. Hal ini meningkatkan kerjasama, aksi dan reaksi dan munculnya gagasan-gagasan baru dalam kehidupan sosial di sekitar peningkatan pembagian kerja".

Kepadatan moral (*moral density*) mengakibatkan pula kriteria terhadap sejumlah karakter pemuka pendapat yang mendukung ataupun menghambat dan merugikan kredibilitas peran pemuka pendapat semakin bervariasi karena dipengaruhi pula oleh banyaknya interaksi dan komunikasi di lingkungan masyarakat desa yang berubah.

1. Karakteristik yang mendukung Kredibilitas Peran Pemuka Pendapat

Sifat yang mendukung kredibilitas peran pemuka pendapat lebih banyak berhubungan dengan karakteristik individu yang ideal dalam berbagai situasi, seperti kesamaan nilai sosial budaya dan kejujuran. Semua akan bermuara pada satu tuntutan kompetensi pemuka pendapat untuk lebih memperhatikan dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh warga desa secara musyawarah.

Unsur pengalaman dan pendidikan bagi pemuka pendapat, yang umumnya elite desa tersebut, menjadi syarat penting dalam situasi desa pertanian, namun dalam situasi lain berkembangnya industri dan merosotnya operasi pabrik, masalah pendidikan sudah menjadi tuntutan utama, sehingga tidak perlu ditonjolkan sebagai syarat yang mendukung kredibilitas perannya di lingkungan pedesaan.

Pemuka pendapat juga menarik dukungan dari warga desa melalui pemberian insentif kepada warga desa, atau setidaknya-tidaknya dia berfungsi sebagai mediator untuk menyerahkan berbagai imbalan kepada warga desa supaya mendukung program dan kegiatan dari kelompok kepentingan di desa. Dalam kemiskinan dan serba kekurangan, pemberian imbalan menjadi suatu yang menarik, terlepas dari maksud yang terkandung di dalamnya, meskipun sebenarnya untuk jangka panjang justru merugikan masyarakat desa.

Sifat mendukung kredibilitas peran pemuka pendapat pada situasi berkembangnya industri, adalah hubungan kekuasaan yang sering diandalkan untuk memobilisasi warga desa dalam mendukung kelompok kepentingan. Relasi yang kuat antara pemuka pendapat dengan penguasa, mengakibatkan otoritas pemuka pendapat menjadi lebih besar, dan memiliki pengaruh yang luas. Relasi ini juga menempatkan pemuka pendapat sebagai orang yang mampu membuat program, maupun aturan yang mengikat warga desa dalam kehidupan masyarakat.

Berbagai ketentuan yang muncul dari pemuka pendapat, merupakan representasi keamatan hubungan dengan kekuasaan negara, misalnya penunjukan penanganan limbah industri kepada kelompok yang dekat dengan elite dalam pemerintahan, atau penetapan jabatan pada berbagai lembaga desa yang slogannya “musyawarah” tetapi sebenarnya dilakukan dengan setengah hati, karena yang sering terjadi adalah, munculnya tokoh yang sudah direstui pemerintah dan di dukung pula oleh pemuka pendapat sub-ordinat kekuasaan.

Program lainnya yang terbentuk hasil kolaborasi antara penguasa dan pemuka pendapat, selalu mewarnai kehidupan desa, dari masalah sosial budaya sampai dalam perdagangan desa, akan berorientasi untuk menguatkan pengaruh politik kekuasaan dan partai pemerintah dalam situasi yang hegemonik tanpa ada perimbangan.

Ketika industrialisasi surut di desa-desa lokasi industri, karakteristik universal yang mendukung tetap muncul, tetapi tuntutan lainnya juga berkembang sejalan dengan situasi lokal maupun nasional. Sehaluan dengan asumsi ini Berger dan Luckmann (1979:13), menyebutkan “masyarakat dan berbagai gejala sosial merupakan suatu proses, muncul, bertahan atau berubah berlandaskan pada hubungan dialektis antara individu dengan masyarakat”. Masyarakat dan individu ikut membentuk keadaan sosial sekitarnya. Sementara pemuka pendapat, semestinya mampu mendiagnosa perubahan dengan baik dan memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dialami warga desa. Peran ini dalam penilaian warga desa akan meningkatkan kredibilitasnya.

Kekonsistenan untuk tidak pernah mengikuti arus yang memberikan dukungan terhadap kelompok kuat dan isu demokratisasi merupakan faktor yang mendukung pemuka pendapat untuk lebih responsif terhadap aspirasi warga desa dan tidak ragu lagi melakukan koreksi terhadap kesalahan pemerintahan, namun tetap menjaga harmonisasi desa.

Hubungan dengan lembaga non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat dan politisi di desa memberikan dukungan terhadap peran pemuka pendapat. Sedangkan hubungan dengan politisi di tingkat desa, kecamatan ataupun yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat di kabupaten merupakan kekuatan baru pemuka pendapat. Pada masa pemerintahan Orde Baru hubungan dengan politisi hanya akan dilakukan dengan birokrat yang umumnya merangkap sebagai kader partai pemerintah.

Pluralisme partai tanpa doktrin *floating mass*, menyebabkan pemuka pendapat juga menjadi orang yang diperebutkan partai untuk mempengaruhi khalayak di desa. Jika dalam periode kejayaan industri, seseorang yang ingin mencapai tujuan biasa menyatakan bahwa dia mendapat dukungan dari aparat pemerintah ataupun tentara, berubah menjadi , “sudah didukung oleh partai dan anggota dewan”.

2. Karakteristik yang menghambat Kredibilitas Peran Pemuka Pendapat.

Karakteristik yang sangat menonjol sebagai faktor yang mengurangi kredibilitas pemuka pendapat adalah meninggalkan nilai sosial budaya, sifat familiisme, tidak adaptif, tidak inovatif selalu melekat pada masyarakat desa. Tuntutan perubahan tidak dapat dipenuhi oleh pemuka pendapat dengan cepat karena pemuka pendapat juga memiliki kesamaan sifat dengan masyarakatnya yang cenderung lambat. Faktor ini dalam penilaian masyarakat bersifat negatif.

Meninggalkan nilai budaya masyarakat, mungkin saja tidak secara radikal dilakukan, tetapi ketika seorang pemuka pendapat mulai tidak menghiraukan berbagai ritual di desa, termasuk peribadatan dalam pengelolaan tanah pertanian, maka pemuka pendapat tersebut akan dikelompokkan dalam mereka yang mulai meninggalkan nilai masyarakat setempat. Sebenarnya tidak ada tindakan yang menghilangkan nilai budaya secara total dan ini dipercaya pula oleh Durkheim (dalam Giddens, 1986:89), yang menyatakan:

Bilamana masyarakat primitif digantikan oleh bentuk-bentuk meninggalkan yang modern , maka dasar moral dan kesatuan tidak akan lenyap sama sekali, harus diakui bahwa jenis orde sosial itu tetap mempunyai suatu kesatuan kolektif dan kesatuan identitas dengan bentuk yang ditinggalkan tersebut.

Tidak ada pemutusan hubungan terhadap nilai secara penuh tetapi ada penambahan dan pergeseran yang mengakibatkan secara fisik nilai

sosial dan budaya seolah-olah hilang sama sekali. Dalam pengertian yang lebih aplikatif Rogers (1985:161), menyatakan, "perpaduan antara sistem tradisional dengan modern membentuk pengertian modern suatu sinkretisme antara pemikiran lama dan pemikiran baru". Perpaduan yang seimbang adalah sebagai suatu yang ideal dalam pembangunan pedesaan.

Orientasi terhadap pemilik modal dan penguasa di desa sangat merugikan pemuka pendapat, sebab kelompok ini dianggap sebagai yang ikut menenggalamkan eksistensi pedesaan sebagai penghasil pertanian yang unggul. Sementara pemuka pendapat, sering melakukan mobilisasi massa untuk mendukung kepentingan penguasa, faktor ini juga tidak disukai oleh masyarakat. Mereka mengikuti kemauan pemuka pendapat tetapi lebih banyak di dasarkan bukan pada faktor kesadaran yang partisipatif tetapi karena ketakutan.

Sebagaimana diketahui, bahwa orang yang tidak sejalan dengan pemerintahan di desa sering memperoleh perlakuan diskriminatif ketika berurusan dengan kantor desa. Faktor ini juga dilembagakan oleh pemuka pendapat sebagai bentuk laoyalitas terhadap kekuasaan negara. Pada situasi berkembangnya industrialisasi di desa, orientasi kepada kelompok kepentingan tetap menjadi nilai yang buruk bagi pemuka pendapat, terlebih lagi dalam menjalankan perannya sering bersifat mengatur, mengendalikan dan represif dengan berlindung di belakang struktur birokrasi pemerintahan maupun tentara. Lebih parah lagi bahwa sifat tersebut disertai dengan keyakinan bahwa setiap tindakan yang dilakukan adalah benar dan untuk kepentingan masyarakat desa, sehingga mereka tidak mau dikritik.

Padahal dalam beberapa kasus yang terjadi, justru semboyan untuk kepentingan pembangunan, adalah identik dengan kepentingan sekelompok orang yang ada dalam lingkaran kekuasaan dan kelompok kepentingan pada jaringan konglomerasi bisnis di Indonesia. Misalnya dalam pembangunan pabrik tidak pernah ada transparansi informasi terhadap jenis pabrik, standar limbah yang di buang apakah sudah sesuai dengan ketentuan dampak lingkungan, penyedotan air tanah yang potensial menyebabkan tanah sekitarnya menjadi kering dan berbagai problem desa akibat industrialisasi.

Semua problema yang muncul seolah dibiarkan saja oleh pemerintah dan pemuka pendapat. Malahan bukan hal yang aneh jika mereka justru melindungi dan menyampaikan kabar yang tidak benar kepada masyarakatnya. Untuk meredakan atau mengantisipasi kemarahan warga desa, biasanya muncul pernyataan dari pemuka pendapat, selain dengan

jargon demi kepentingan pembangunan juga akan merujuk kepada dukungan yang bertingkat seperti: “pabrik ini milik pejabat tinggi negara, milik jenderal, milik konglomerat dan sejumlah nama besar lain yang lazim dipakai sebagai kekuatan yang tidak dapat dilawan”.

Sifat lain yang cenderung negatif dalam pandangan warga desa adalah salah satu perwujudan dari prasangka (*prejudice*), yaitu mendiskusikan kelompok lain dari segi negatifnya saja (*antilocution*). Pada masa kejayaan industri, sangat kentara sekali predikat *outgroup* dan *ingroup* yang berkembang. Semua sebenarnya bermuara pada sikap kelompok yang tidak sejalan dengan pemerintah dalam pilihan partai. Bukan rahasia umum, yang tidak mau bergabung dengan partai pemerintah beserta organ-organnya di pedesaan, selalu akan dikelompokkan dalam orang yang perlu dicurigai karena dianggap tidak bisa bekerjasama dan melakukan pembangkangan terhadap pemerintah.

Sejumlah atribut yang mengurangi tingkat kredibilitas peran pemuka pendapat pada situasi industri yang surut, pada satu pihak mencerminkan kelemahan mendasar yang dimiliki oleh masyarakat desa seperti tidak inovatif, tidak adaptif dan memiliki ketergantungan terhadap kekuasaan. Sedangkan faktor lain adalah lebih banyak terkait dengan sikap tidak mau bertanggung jawab terhadap berbagai kesalahan yang pernah dilakukan pada masa sebelumnya, ketika pemuka pendapat menjalin kerjasama yang kuat dengan lembaga-lembaga sub ordinat kekuatan negara dan para pemilik modal.

Terdapat banyak persamaan dengan masa sebelumnya, misalnya dalam hal orientasi politik, pemuka pendapat lebih perhatian terhadap kelompok kepentingan yang di dukungnya seperti partai politik. Padahal orientasi politik yang berlebihan dari pemuka pendapat membuat masyarakat menjaga jarak komunikasi yang bebas. Apalagi peta politik di desa-desa lokasi industri, menunjukkan bahwa sejumlah partai memiliki massa yang cukup memadai sehingga masyarakat cenderung memiliki pemuka pendapat lain yang di dukung oleh partai yang berlainan juga. Faktor ini menjadi nilai buruk bagi pemuka pendapat di desa.

Kelompok kepentingan selalu muncul di tengah kehidupan masyarakat desa dan ditengah kelesuan perekonomian rakyat. Urusan dukungan identik dengan kalkulasi materi, sehingga muncul sinyalemen bahwa ketika pemuka pendapat mendukung seseorang, kelompok, program kegiatan desa, pabrik dan lain-lain, orang cenderung akan mengkaitkan dengan transaksi ekonomi. Kecenderungan materialistis, dalam pandangan Johnson

yang menelaah hubungan infrastruktur ekonomi dan superstruktur sosial budaya dalam ekonomi Marx, menyatakan, hubungan antara infrastruktur ekonomi dan superstruktur budaya dan struktur sosial yang dibangun atas dasar itu merupakan akibat langsung yang wajar dari kedudukan materialisme historis. Adaptasi manusia terhadap lingkungan materiilnya selalu melalui hubungan-hubungan sedemikian meresapnya sehingga semua hubungan sosial lainnya dan bentuk-bentuk dasar kesadaran, dibentuk oleh hubungan ekonomi. (Doyle P. Johnson, 1986:120).

Industri yang membawa simbol-simbol material lebih banyak mengkaitkan dengan transaksi komersial, sehingga masyarakat desapun dengan mudah mengadopsi unsur materialisme tersebut. Pada konteks yang lebih luas, setiap tindakan selalu bermakna ekonomis, termasuk urusan mendukung atau mengkritik kegiatan berbagai kelompok kepentingan yang ada di desa bermuatan materi.

Dukungan pemuka pendapat terhadap kepentingan rakyat sering berakhir pada kalkulasi ekonomi. Misalnya: protes kepada pabrik karena pencemaran lingkungan akan berakhir dengan negosiasi antara pabrik dengan pemuka pendapat yang berujung pada pemberian fasilitas kepada pemuka pendapat yang mengaku bisa menyelesaikan persoalan dengan warga desa. Ini terjadi di Desa Anggadita, ketika warga desa protes terhadap pabrik yang membuat jalan desa menjadi hancur. Gambaran ini membuat situasi krisis multi dimensi yang penuh jargon untuk membela rakyat dan demokratisasi, terbatas pada retorika saja.

Sebagai ilustrasi lain tentang kecenderungan berkolaborasi dengan kelompok kepentingan adalah dalam pemilihan kepala desa yang dilakukan di suatu desa, persaingan antara kandidat melibatkan dukungan partai politik. Selain itu, setiap calon kepala desa juga didukung oleh kelompok yang memiliki jaringan politik sampai tingkat Kabupaten. Sedangkan bupati terlebih lagi Camat, bukan lagi dalam posisi sebagai orang yang paling dominan untuk menjadikan kandidat terpilih dalam kompetisi menjadi kepala desa.

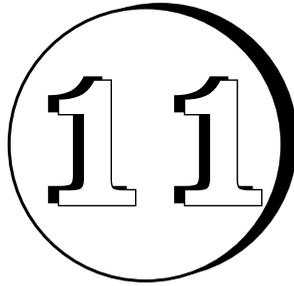
Persaingan semakin kompleks, dan tidak berlaku lagi patron politik dan kekuasaan tunggal, sebagaimana pada masa kejayaan industri. Persaingan sesengit apapun untuk menduduki posisi kepala desa, yang sudah tentu didukung oleh aparat pemerintah di tingkat kecamatan maupun kabupaten, semuanya akan berakhir jika orang paling kuat di tingkat kabupaten merestui siapa yang paling layak menjadi kepala desa. Keterkaitan dengan kelompok kepentingan menjadi perilaku yang menghambat bagi kredibilitas pemuka pendapat.

Di pihak lain munculnya sifat agresif dan radikalisme ketika menyelesaikan persoalan juga menjadi faktor negatif. Pemuka pendapat yang cenderung memiliki karakteristik ini selalu beralasan tidak percaya lagi terhadap penyelesaian yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Padahal demokratisasi semestinya didorong oleh pemerintah seperti pendapat Durkheim (dalam Giddens, 1986:127), yang menyatakan, “bahwa suatu masyarakat sedikit banyak demokratis, sepanjang ada proses komunikasi dua arah antara negara dan tingkatan lain dalam masyarakat”.

Dalam suatu kasus pada salah satu desa, kepala desa yang dianggap menyimpang dalam penyelenggaraan pemerintahan, misalnya dituduh memakai uang rakyat, mengurangi uang pembebasan tanah yang dibeli pabrik dan sejumlah masalah lainnya. Masyarakat berulang kali melaporkan kejadian ini di tingkat desa kepada Dewan Musyawarah Desa, dan sampai ke kabupaten, tetapi karena tidak memperoleh perhatian yang berarti, warga bersama pemuka pendapat, melakukan tindakan sendiri dengan mengerahkan massa dan memaksa dewan desa untuk memberhentikan kepala desa. Tindakannya berhasil tetapi pada satu sisi menyisakan ketidakpuasan bagi sementara pihak yang biasa hidup dalam retorika stabilitas keamanan.

Penilaian lain yang negatif terhadap pemuka pendapat adalah, sifat yang mekanistik, tergantung dari orang lain dan tidak memiliki kepercayaan terhadap kekuatan sendiri. Masyarakat dimana didalamnya ikatan utama untuk menjadi kesatuan didasarkan atas solidaritas mekanik, yang mempunyai struktur terkumpul atau berpangsa-pangsa, terdiri atas kelompok sanak-keluarga-politik yang dijajarkan (*clan*), yang sangat mirip satu sama lain dalam hal organisasi intern. (Emile Durkheim dalam Giddens, 1986:94).

Pola mekanistik dalam masyarakat, cenderung menjadikan pemuka pendapat bertindak klise, dengan meniru pemuka pendapat lain, sehinggaantisipasi untuk menangani masalah pedesaan yang berkembang menjadi lambat. Semua saling menunggu untuk bertindak antara masyarakat dengan pemuka pendapat di pedesaan. Keadaan yang dibenarkan oleh Rogers dan Shoemaker (1971: 131), “dalam sistem sosial yang tradisional, anggota sistem sulit untuk melakukan tindakan yang sebelumnya tidak pernah terjadi”.



SUMBER INFORMASI DAN POLA KOMUNIKASI

1. Kecenderungan Mencari Sumber Informasi yang Dipercaya

Masyarakat desa untuk mencari informasi dalam berbagai situasi yang berubah, tidak mempersoalkan apakah pemuka pendapat tersebut mendukung industrialisasi atau menolak industrialisasi yang ada di desanya. Pembahasan difokuskan pada kredibilitas peran pemuka pendapat sebagai sumber informasi yang tidak selalu menjadi rujukan masyarakat desa. Sebab sejalan dengan situasi yang berubah, masyarakat memiliki sumber informasi lain seperti media massa dan sumber lain yang lebih dipercaya.

Sebagaimana dalam temuan penelitian bahwa masyarakat desa mencari informasi dari sumber yang dipercaya. Kepercayaan terhadap sumber informasi tidak bersifat tetap namun berubah sesuai dengan jenis informasi dan situasi desa yang berkembang. Jenis informasi yang dicari oleh masyarakat desa meliputi informasi sosial budaya, perekonomian desa dan politik pedesaan. Sedangkan terminologi perubahan desa mencakup situasi desa pertanian, berkembangnya industri dan situasi surutnya industri.

Dari segi jenis informasi yang dicari masyarakat dan perkembangan desa, masyarakat memiliki pilihan sumber informasi yang berlainan dalam kurun waktu tahun 1989 ketika mulai muncul pabrik di desa sampai berakhirnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1997. Kecenderungan masyarakat desa mencari sumber informasi masalah sosial budaya, perekonomian desa dan politik pedesaan dalam situasi yang berbeda dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 11. 1: Kecenderungan Mencari Sumber Informasi Dalam Berbagai Situasi Desa

Jenis Informasi yang dicari		Situasi Desa		
		Pertanian	Berkembang Industri	Surutnya Industri
Sosial dan Budaya	Sosial	PP	PP	PP, MM, SL
	Budaya	PP	PP, MM	PP, MM
Perekonomian Desa	Pertanian	PP	PP, SL	PP, MM, SL
	Industri	PP, SL	PP, MM, SL	PP, MM, SL
	Perdagangan	PP, SL	PP, MM, SL	PP, MM, SL
Politik Pedesaan	Kekuasaan Lkl	PP	PP	PP, MM, SL
	Pemilu	PP	PP	PP, MM, SL

Keterangan: PP = Pemuka Pendapat MM = Media Massa SL = Sumber Lain

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Pilihan masyarakat untuk mencari sumber informasi yang dipercaya dapat saja karena kompetensinya *atau competence credibility* yaitu kredibilitas yang diperoleh karena dinilai ahli dalam bidangnya atau *safety credibility* yang dimiliki pemuka pendapat karena ia tidak memiliki maksud untuk memanipulasi orang lain atau menarik keuntungan pribadi dari apa yang dikatakannya atau apa yang dianjurkannya. Pola komunikasi yang dianggap ideal bagi khalayaknya. Menurut Cragan dan Wright (1980:73), “komunikasi yang secara positif dapat mempengaruhi kelompok untuk bergerak ke arah tujuan kelompok yang akan dicapai bersama adalah suatu bentuk kepemimpinan yang ideal”.

Dalam konteks inilah yang menjadikan pemuka pendapat sebagai sumber informasi adalah kejujurannya (*trustworthines*) maupun nilai ideal yang melekat pada karakteristik individual. Ikatan kosmis antara pemuka pendapat, masyarakat dengan tanahnya harus dipertahankan dan tetap dijadikan sebagai faktor produksi yang sangat berarti bagi warga desa.

Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat memposisikan media massa sebagai sumber informasi yang tidak menyiarkan hiburan saja tetapi juga berita sosial ekonomi dan politik yang diminati masyarakat, media massa berperan untuk memberitahu masyarakat tentang fakta kehidupan sosial, ekonomi dan politik yang terjadi di sekeliling atau di luar komunitas mereka. Media massa setelah pemerintahan Orde Baru menginterpretasikan berbagai fakta dalam penulisan atau penyiaran yang transparan sehingga masyarakat Klari menempatkannya sebagai salah satu sumber berita yang dipercaya.

Menghubungkan peran surat kabar dalam perubahan kekuasaan, McQuail (1987: 11), mengemukakan bahwa,

Keterlibatan surat kabar dalam gerakan politik pada masa terjadinya krisis nasional merefleksikan aspek peran dan fungsi yang berbeda yaitu satu sisi sebagai alat advertensi dan hiburan, pada sisi menyiarkan gerakan politik yang terjadi. Surat kabar merupakan rangsangan yang menunjang dinamika perkembangan dalam kurun sejarah yang berbeda.

Media massa memiliki peran dalam perubahan politik yang terjadi di Indonesia, walaupun unsur hiburan dan bisnis tetap dilakukan. Dengan intensitasnya dalam politik dan keterbukaan dalam pemberitaan, media massa menjadi salah satu sumber yang layak dijadikan referensi ketika terjadi perubahan politik dan pergantian kekuasaan di tingkat nasional.

Disamping itu sumber informasi lain yang dapat dipercaya, bisa tokoh temporer dalam masyarakat, orang yang kosmopolitan (*cosmopolitaness*) biasa berhubungan dengan orang dari luar kelompoknya, anak muda yang terpelajar, anggota berbagai lembaga non pemerintah ataupun media alternatif internet, yang diterima oleh warga desa melalui komunikasi dua tahap. Menurut Bovee dan Thill (1997: 69), internet adalah jaringan satu kelompok komputer yang saling dihubungkan sehingga semuanya dapat berbagi informasi, jaringan dapat terletak dalam satu tempat tertentu, atau jaringan terbesar di dunia dari banyak komputer yang saling berhubungan secara elektronik.

Internet pada masa pemerintahan Orde Baru merupakan salah satu sumber informasi alternatif yang disukai komunitas intelektual dengan jumlah terbatas, tetapi mereka selanjutnya akan menyebarkan berbagai informasi dari internet melalui banyak tahap hingga sampai ke masyarakat desa.

Dari berbagai pilihan sumber tersebut, masyarakat dalam situasi desa pertanian memposisikan pemuka pendapat sebagai rujukan yang dominan, kecuali ketika warga desa mencari informasi tentang industri dan perdagangan. Masyarakat mempunyai sumber informasi lain yaitu orang yang menguasai masalah industri dari aspek negatif maupun positifnya. Industrialisasi tidak selalu menampilkan aspek negatif, tetapi sekecil apapun, dapat menimbulkan hal positif bagi warga desa.

Untuk informasi perdagangan masyarakat mengandalkan dari sumber lain seperti orang yang sering melakukan migrasi ulang-alik dan orang yang dekat dengan pedagang grosir, pengepul gabah bahkan rentenir. Masyarakat menyadari bahwa pemuka pendapat tidak memiliki basis perdagangan yang murni diluar sektor pertanian, sehingga mereka akan

membandingkannya informasi yang diterima dari pemuka pendapat dengan informasi yang diperoleh dari orang yang kompeten di bidang perdagangan.

Pada situasi berkembangnya industri, pemuka pendapat dominan menjadi rujukan masyarakat dalam masalah sosial karena pemuka pendapat dianggap memiliki kekuasaan tradisional dan kharismatik dan sejenisnya. Sedangkan dalam urusan politik, dominasi pemuka pendapat sebagai sumber pesan karena sensitifnya persoalan politik di desa sehingga masyarakat lebih banyak mencari tahu tentang politik dari pemuka pendapat atau mereka tidak berani untuk menolak kemauan pemuka pendapat sebagai kepanjangan tangan pemerintah dan politik yang berkuasa.

Situasi berkembangnya industri yang membawa nilai rasional dan materialistis menjadikan masyarakat desa mencari informasi tentang industrialisasi di desa bukan hanya dari pemuka pendapat saja, tetapi dari media massa maupun sumber informasi lainnya. Media massa memberikan pemahaman terhadap berbagai masalah yang dihadapi masyarakat desa. Sedangkan informasi dari sumber lain sangat diminati oleh mereka yang bergerak di sektor perdagangan desa. Informasi yang diperoleh tersebut dapat dipakai untuk perbaikan mutu barang yang diproduksi, menyeragamkan harga barang maupun jasa yang ada di desa.

Pada informasi pertanian, masyarakat tidak menghiraukan berita media massa, mengingat pertanian tradisional masih menjadi kekuasaan keahlian dari pemuka pendapat di desa. Media massa tidak ada yang secara khusus memberikan ruang untuk mengatasi problem masyarakat desa dan pertanian.

Kalaupun ada ruang (*space*) dalam media massa untuk masyarakat desa, biasanya jumlahnya sangat terbatas dan tidak menyangkut langsung masalah yang dihadapi masyarakat. Jika ada penransferan pesan dari media massa, biasanya sangat tergantung kepada penjelasan pemuka pendapat maupun sumber lain yang dapat menerangkan secara baik sesuai dengan keadaan masyarakat dan lingkungannya.

Dalam hubungannya dengan pengaruh media massa, James P. Winter (1984:564) menyatakan,

Pengaruh media massa terhadap masyarakat, meski diakui sangat kuat, tidaklah menimbulkan efek yang sama bagi setiap individu atau kelompok dalam masyarakat karena adanya perbedaan kognisi maupun lingkungan realitas sosial.

Dalam arti bahwa, setiap masyarakat memiliki perbedaan dalam tingkat pengetahuan, pengalaman dan lingkungan, sehingga berita yang disebar oleh media massa mempunyai dampak yang tidak seragam, terlebih lagi masyarakat desa dengan segala keterbatasannya, tidak mudah untuk menangkap pesan dari media massa.

Berbeda dengan urusan perdagangan dan industri yang tingkat pengadopsiannya dari media massa tinggi, untuk masalah pertanian, di lingkungan petani kurang memiliki naluri pengalihan pengetahuan secara langsung dari sumber yang belum dikenal. Dengan demikian walaupun terpaan media (*media exposure*) sangat gencar, lepas dari kebenaran berita yang disampaikan, ternyata masyarakat kurang memberikan tempat kepada media massa sebagai sumber pesan yang dicari.

Situasi krisis multi dimensi yang disusul dengan surutnya kegiatan pabrik di Klari, menyebabkan berbagai sendi kehidupan yang semula dikendalikan oleh pemerintah melalui belantara peraturan menjadi pudar dan bergerak bebas. Hanya masalah sosial saja yang masih sangat bergantung pada informasi, saran dan nasehat dari pemuka pendapat. Itupun dalam pembicaraan dengan topik tertentu seperti hubungan sosial keagamaan dan ritual dalam pengelolaan tanah pertanian yang masih diyakini bahwa pemegang informasi tersebut adalah pemuka pendapat yang dipercaya sehingga sumber lainnya tidak diperhatikan.

Faktor yang masih mengikat antara pemuka pendapat dengan masyarakatnya karena ikatan tertentu yang masih diandalkan dalam hubungan kekerabatan di desa, dalam pandangan Mac. Iver, RM and Charles H. Page (1967:9) sebagai

Community sentiment yaitu perasaan saling memerlukan diantara anggota komunitas, dan diantara mereka percaya bahwa tanah yang mereka tinggali memberikan kehidupan kepada semua anggota-anggotanya. Unsur *community sentiment* adalah: seperasaan, sepenanggungan dan saling memerlukan.

Di luar masalah sosial, informasi budaya, perekonomian dan politik pedesaan cenderung memanfaatkan berbagai sumber yang mudah ditemukan serta diakses oleh masyarakat desa. Pada intinya masyarakat desa akan mencari sumber informasi secara konvensional dari pemuka pendapat yang dipercaya, media massa sebagai pembanding, dan dari sumber lain yaitu individu maupun kelompok lain yang mempunyai pengaruh besar di lingkungan masyarakat. Upaya ini sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap sistem yang melembaga dalam kontrol kekuasaan negara.

2. Pola Komunikasi antara Pemuka Pendapat dengan Masyarakat.

Penelaahan terhadap pola komunikasi antara masyarakat desa dengan pemuka pendapat dalam situasi perubahan desa, menggambarkan berbagai akibat yang kompleks. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa pemuka pendapat tidak memiliki kesamaan sikap terhadap munculnya industri di desa, mereka terpecah dalam kelompok yang memiliki kecenderungan menolak masuknya industrialisasi dan kelompok yang mendukung industrialisasi di desa.

Pemuka pendapat yang menolak industri di desa mempunyai alasan yang sifatnya mempertahankan nilai sosial ekonomi pertanian di desa. Ikatan kosmis antara masyarakat dengan tanahnya harus dipertahankan dan tetap dijadikan sebagai faktor produksi yang sangat berarti bagi warga desa. Disisi lain kelompok masyarakat yang mendukung industri berorientasi pada program pembangunan yang dilakukan pemerintah. Industri dianalogikan sebagai simbol yang membawa kesejahteraan. Kedua kelompok tersebut memiliki pola komunikasi yang berbeda dalam situasi desa pertanian, pada waktu industri berkembang di pedesaan dan ketika industrialisasi di desa-desa lokasi industri mulai surut.

Tiap situasi menghasilkan pola komunikasi yang berbeda, walaupun sama dalam bentuk yang linier atau interaktif, tetapi setiap pola komunikasi yang dilakukan oleh pemuka pendapat dengan masyarakat sebagai khalayaknya (*audience*), sebenarnya dilengkapi pula dengan karakteristik tertentu yang menunjukkan posisinya dalam kelompok dan gaya komunikasi yang dilakukan.

Untuk melihat lebih jelas tentang berbagai pola komunikasi dalam pembicaraan sosial budaya, perekonomian dan politik pedesaan serta faktor lainnya yang mempengaruhi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.11.2: Pola Komunikasi Pemuka Pendapat dengan Masyarakat Desa,
Dikaitkan dengan Sikap Terhadap Industri dan Perubahan Situasi Desa

Jenis Informasi yang Dibicarakan		Menolak Industrialisasi			Mendukung Industrialisasi		
		Situasi			Situasi		
		Pertanian	Berkem Indust.	Surut. Indus.	Pertanian	Berkem Indust	Surut. Indst
Sosial & Budaya	Sosial	L	I	L	L	L	I
	Budaya	L	I	I	L	L	I
Perekonomian	Pertanian	L	I	I	L	L	I
Pedesaan	Industrialisasi	I	I	I	L	L	I
	Perdagangan	I	I	I	L	L	I
Politik Pedesaan	Kekuasaan Lkl	L	L	I	L	L	I
	Pemilu	L	L	I	L	L	I

Keterangan: I = Interaktif L = Linier

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Secara umum berdasarkan tabel tersebut, maka pola komunikasi pemuka pendapat yang menolak industrialisasi dengan masyarakat desa, pada situasi desa pertanian lebih banyak diwarnai dengan pola komunikasi yang linier dengan mengandalkan otoritas tradisional yang diakui dalam komunitas terbatas yaitu di lingkungan masyarakat setempat. Masyarakat desa cenderung berperilaku mengikuti kebiasaan yang sudah dilakukan turun temurun sebagai pedoman dalam kelompoknya. Menurut pendapat Mills (1968: 44), *Small Group* mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat dan juga terhadap perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok kecil merupakan bentuk khusus dalam kerangka sistem sosial secara keseluruhan dan merupakan miniatur masyarakat yang mempunyai pembagian kerja, kode etik pemerintahan, *prestige*, ideologi dan sebagainya.

Di lingkungan pedesaan yang mengajarkan untuk tunduk terhadap otoritas tradisional, maka anggota masyarakat juga akan mengikuti norma tersebut sepanjang lingkungan sekitarnya memungkinkan untuk tunduk terhadap aturan tradisional. Dalam situasi berkembangnya industri, ketika muncul rasionalisme dan materialisme dalam simbol-simbol modernisasi, maka pola komunikasi antara pemuka pendapat dengan khalayaknya cenderung interaktif berdasarkan kesederajatan dan transaksional untuk berbagi informasi. Sedangkan dalam situasi surutnya industri, pola komunikasi antara pemuka pendapat dengan khalayaknya di dominasi oleh model interaktif dengan berbagai karakteristik tertentu yang dimiliki oleh pemuka pendapat maupun khalayaknya.

Hanya otoritas di bidang sosial yang merujuk pada aspek sosial religius pemuka pendapat dapat menjalankan komunikasi satu arah. Hal ini

dimaklumi mengingat faktor sosial religius merupakan salah satu kekuatan pemuka pendapat yang tetap bertahan dan memperoleh kepercayaan masyarakat. Dalam konteks peran pemuka pendapat dengan basis religius di daerah industri, hasil penelitian Rosi dan Rosi (1961) di daerah industri Massachusetts menunjukkan:

Penonjolan *reference group* dalam masyarakat industri tampak ketika mereka lebih banyak memilih pemimpin keagamaan sebagai acuan yang potensial dan aktual bagi individu yang memerlukan saran dalam pengambilan keputusan pribadi. (Rosi dan Rosi dalam Krech, Crutchfield dan Ballachey, 1962:200).

Otoritas religius tidak mudah pudar dalam situasi industrialisasi, walaupun mungkin saja kualitas peribadatnya yang tampak secara fisik berkurang. Pemuka pendapat dengan otoritas keagamaan masih dijadikan referensi untuk mencari informasi yang berkaitan dengan norma keagamaan. Agama di satu pihak dan hukum ekonomi dalam industrialisasi berjalan dengan baik di desa. Dalam konteks ini Weber memadukan antara faktor religius dengan tindakan ekonomi yang rasional. Pengaruh etika keagamaan atas organisasi ekonomi hendaknya dianggap berada diatas segala-galanya. Selanjutnya dikemukakan, kepercayaan keagamaan merupakan salah satu rangkaian dari aneka ragam pengaruh-pengaruh yang mungkin bisa mempersiapkan pembentukan suatu etika ekonomi, dan agama itu sendiri sangat terpengaruh oleh fenomena sosial, politik dan ekonomi. (Max Weber dalam Anthony Giddens, 1986:208).

Dalam situasi desa pertanian maupun berkembangnya industri, pola komunikasi antara pemuka pendapat yang mendukung industrialisasi desa dengan masyarakat desa berlangsung satu arah. Ini dapat dimaklumi mengingat pemuka pendapat dalam kelompok ini umumnya didukung oleh kekuasaan negara yang menggunakan model komunikasi yang sama.

Komunikasi satu arah yang berlangsung sepanjang pemerintahan Orde Baru, berubah menjadi interaktif dengan berbagai karakteristik yang terkait di dalamnya, setelah munculnya reformasi politik. Dalam situasi itu, komunikasi dengan kesederajatan muncul dengan prinsip kebebasan memperoleh informasi. Sejalan dengan kondisi tersebut, menurut Lerner (1983), bahwa "pendapat umum yang berbeda-beda terhadap suatu opini adalah pertanda adanya modernisasi" Setidaknya modernisasi dalam perbaikan pola komunikasi yang telah berlangsung dengan pola otokratis menjadi demokratis.



KOMUNIKASI POLITIK PEMUKA PENDAPAT

1. Karakteristik Utama Pemuka Pendapat yang Menolak Industrialisasi

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat sejumlah karakter spesifik yang mendukung ataupun mengurangi kredibilitas peran pemuka pendapat di lingkungan khalayaknya. Diantara sejumlah karakter tersebut, masyarakat memiliki kecenderungan menetapkan salah satu karakter pemuka pendapat yang menonjol sebagai faktor yang mendukung dan menghambat kredibilitas perannya.

Karakteristik utama sebagai faktor yang mendukung dan menghambat kredibilitas peran pemuka pendapat di lingkungan khalayaknya, secara lengkap dapat dilihat seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 12.1: Karakteristik Utama Kredibilitas Pemuka Pendapat yang Menolak Industrialisasi dalam Berbagai Situasi Desa

Jenis Informasi		Mendukung Kredibilitas			Menghambat Kredibilitas		
		Situasi Desa			Situasi Desa		
		Pertanian	Berkem Industri	Surut Industri.	Pertanian	Berkem Industri	Surut. Industri
Sosial & Budaya	Sosial	Sama Nilai Budaya	Sama Nilai Sosbud	Sama Nilai Sosbud	Otokratis	Prejudice	Tidak Adaptif
	Budaya	Toleransi	Inklusif	Inklusif	Etnosentrisme	Tidak Adaptif	Tidak Adaptif

Perekonomian Desa	Pertanian	Kompetensi	Kompetensi	Kompetensi	Indolent	Tidak Inovatif	Tidak adaptif
	Industrialisasi	Bela Warga Desa	Kesederajatan	Berbagi Informasi	Indolent	Tidak Adaptif	Kompromis
	Perdagangan	Hub.Luas	Pengalaman	Berbagi Informasi	Indolent	Tidak Inovatif	Mekanistis
Politik Pedesaan	Kekuasaan Lokal	Elite Desa	Pengalaman	Demokratis	Otokratis	Birokratis	Orientasi Politik
	Pemilihan Umum	Pengalaman	Pengalaman	Demokratis	Otokratis	Birokratis	Orientasi Politik

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Secara umum karakteristik pemuka pendapat yang menolak industrialisasi di Klari memiliki sejumlah atribut fisik seperti status sosial ekonomi yang memadai dan memiliki tanah pertanian. Sedangkan karakteristik individual biasanya berkisar pada hubungan yang luas, memiliki kewibawaan yang mampu memberi dorongan serta sejumlah sifat positif lain.

Sejalan dengan kondisi itu, Van Den Ban (1981:293), juga mengungkapkan gejala yang sama dengan menyebutkan bahwa “pemuka pendapat memiliki sejumlah atribut yang membedakan dengan orang lain dari komunitasnya yaitu status sosial ekonomi yang lebih tinggi dan memiliki hubungan dengan orang di luar komunitasnya (*cosmpoliteness*)”.

Sejumlah karakteristik sebagaimana yang tampak dalam tabel diatas sebenarnya tidak terpisah antara satu dengan yang lainnya, sebab karakteristik yang mendukung sudah barang tentu di dalamnya, terdapat berbagai karakter yang berinteraksi. Demikian juga sifat negatif yang mengurangi kredibilitas, didalamnya terakumulasi berbagai sifat, perilaku maupun kepentingan lainnya.

1.1. Masalah Sosial dan Budaya

Pemuka pendapat yang menolak industrialisasi di desa, dalam menghadapi masalah sosial umumnya mengandalkan kesamaan nilai dengan masyarakat sebagai khalayaknya dalam berbagai situasi desa. Tetapi faktor yang menghambat adalah sifat otoriter pada masa pertanian.

Komunikasi satu arah sebenarnya lazim terjadi dalam masyarakat tradisional, tetapi ketika jaman berubah pola komunikasi yang penuh dengan pengarah dan petunjuk dianggap sebagai otoriter, maka pemuka

pendapat tidak merasa bahwa tindakannya memiliki dampak buruk bagi masyarakat, sebab dia menjalankan rutinitas yang terdapat dalam kekuasaan tradisional, bahkan dia merasa sebagai bentuk mempertahankan adat istiadat, aturan serta prosedur tradisional.

Persamaan nilai sosial budaya membentuk persamaan persepsi yang dapat merekatkan hubungan, dikemukakan oleh Samovar dan Porter (1988: 37), “unsur sosial budaya yang berpengaruh terhadap persepsi seseorang adalah sistem kepercayaan (*belief*), nilai (*value*) dan sikap (*attitude*), selain itu terdapat cara pandang dunia (*worldview*) dan organisasi sosial”. Jika unsur tersebut terpenuhi dalam interaksi maka komunikasi akan berjalan dengan baik diantara masyarakat desa dan pemuka pendapat.

Sementara itu Krech, Crutchfield dan Ballachey (1977:180), menyatakan sebagai berikut:

Keseragaman sikap individu dalam kelompok primer dapat dilakukan dengan memaksakan penyesuaian sehingga dapat menyebabkan keseragaman diantara anggota kelompok, kecenderungan individu memilih sikap yang sama, mencari informasi dari sub kultur yang sama dan membentuk sikap kolektif dalam kesatuan sistem sosialnya.

Dengan demikian, bahwa kesamaan nilai sosial budaya memiliki potensi yang besar bagi pemuka pendapat di desa, untuk mempengaruhi masyarakat pedesaan secara kolektif.

Dalam situasi berkembangnya industri, pemuka pendapat memiliki karakteristik berprasangka terhadap kelompok di luar komunitasnya. Dikemukakan oleh Samovar, Porter dan Jain (1981:123), “*prejudice* adalah sebagai sikap kaku yang didasarkan pada sistem kepercayaan dan prakonsepsi yang keliru”. Sifat yang banyak melekat pada komunitas tradisional ini mengurangi dukungan masyarakat terhadap kredibilitas pemuka pendapat dan menjadi faktor utama yang tidak disukai masyarakat.

Sifat *prejudice* akan mengakibatkan perilaku lain yang tidak menguntungkan, terlebih lagi jika ditularkan kepada khalayaknya. Menurut pendapat Samovar, Porter dan Jain (1981:124),

Perwujudan sikap prasangka adalah: (1) *Antilocution* yaitu mendiskusikan kelompok lain dari segi negatifnya, (2) *Avoidance* sebagai upaya menghindari dari kelompok lain yang tidak disukainya, (3) *Discrimination* yaitu mengucilkan kelompok tertentu yang dianggap tidak layak untuk diajak berkomunikasi, (4) *Violence* atau serangan fisik setelah emosi meningkat, (5) *Extermination* sebagai upaya pemusnahan satu persatu atau dilakukan secara massal.

Prasangka dipelajari dari pengalaman pribadi dengan satu orang maupun kelompok dan media massa. Atau prasangka dibentuk oleh berbagai sumber dominan dalam kehidupan bermasyarakat.

Semestinya ketika industrialisasi surut di desa, dan terjadi perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan, pemuka pendapat dapat menyesuaikan dengan tuntutan kebebasan di desa, tetapi ternyata mereka tidak mampu menyesuaikan dengan cepat, padahal di satu pihak masyarakat menghendaki untuk bersama-sama melakukan perubahan.

Dalam menghadapi masalah budaya di desa, kekuatan utama pemuka pendapat adalah toleransi terhadap para pendatang dan kelompok lain yang memiliki perbedaan kultural. Faktor positif ini berubah ketika muncul pluralisme di desa, pemuka pendapat terbuka terhadap penyederhanaan kegiatan ritual yang membutuhkan banyak biaya dan dapat menerima informasi tentang kebudayaan dari luar komunitasnya. Sifat keterbukaan terus dipertahankan sampai terjadinya krisis ekonomi melanda pabrik.

Karakteristik utama yang menghambat pada masa agraris adalah etnosentrisme yang menganggap tradisi desa yang terbaik. Pada perkembangan situasi berikutnya pemuka pendapat tidak dapat menyesuaikan keadaan yang cepat berubah dan menggeser nilai kultural pemuka pendapat. Kelambanan mengikuti perubahan karena pemuka pendapat merasa bahwa otoritas tradisionalnya akan segera berakhir, sehingga ragu-ragu untuk berubah secara radikal. Faktor inilah yang mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pemuka pendapat di desa.

1.2. Masalah Perekonomian Desa

Sifat yang mendukung kepemimpinan pemuka pendapat dalam masalah pertanian pada berbagai situasi adalah kompetensinya. Keahlian di bidang pertanian tidak luntur oleh perkembangan desa. Di sisi lain sifat yang menunjukkan kelambanan, tidak inovatif, dan tidak adaptif menunjukkan karakteristik asli dari masyarakat pertanian tradisional.

Dalam berbagai situasi, industri adalah sesuatu yang baru dan tidak disukai oleh pemuka pendapat. Gambaran yang sama dikemukakan oleh Rogers dan Shoemaker (1971:54), norma sosial yang sudah berlangsung dalam masyarakat secara turun temurun mempunyai pengaruh sangat kuat terhadap individual maupun kelompok yang masih tradisional, sehingga hampir tidak ada keputusan yang dihasilkan secara individual, semua keputusan bersifat kolektif.

Pemuka pendapat dalam kelompok ini, sulit untuk beradaptasi atau menerima ide baru dalam perubahan sistem sosial ekonomi di desa, sampai saat berkurangnya kegiatan industrialisasi, sebagian dari mereka bukan termasuk mayoritas akhir (*late majority*) dalam menerima inovasi maupun sebagai orang yang menerima inovasi paling lambat (*laggard*) dalam konteks industrialisasi di pedesaan.

Dalam posisinya yang mempertahankan desa pertanian, pemuka pendapat berupaya membela kepentingan warga desa ketika berhadapan dengan agen-agen pabrik yang menanamkan pengaruhnya di desa-desa. Karena hanya mengandalkan solidaritas terhadap kepentingan pertanian, pemuka pendapat tidak begitu paham dengan seluk beluk industrialisasi, sehingga pada saat kegiatan pabrik berkembang pesat, sifat kesederajatan komunikasi lebih ditekankan untuk menjaga ikatan dengan khalayaknya dan sifat egaliter ini tetap dipertahankan dengan kesediaan berbagi informasi dalam komunikasi yang interaktif dan transaksional. Dengan demikian otoritas tradisional yang memberikan kewenangan juga memudar.

Sederetan sifat yang menunjang dalam mengkomunikasikan masalah industrialisasi, ternyata tidak seimbang dengan faktor yang mengurangi kredibilitasnya, seperti kemalasan dan tidak dapat beradaptasi dengan perubahan. Sifat ini cenderung merugikan pemuka pendapat, karena berkonotasi lamban, malas, tidak merasa dikejar waktu.

Sedangkan sifat kompromis dianggap merugikan peran pemuka pendapat, karena dianggap tidak dapat mempertahankan argumentasi untuk memberikan sanksi terhadap mereka yang menyimpang pada waktu kejayaan industri. Kompromi dalam konteks ini memiliki substansi yang buruk, karena tidak mampu bertindak tegas terhadap penyimpangan yang pernah terjadi maupun yang sedang berlangsung di desa. Faktor ini menghambat kredibilitas pemuka pendapat di lingkungan khalayaknya.

Sebagai ilustrasi tentang kompromi yang dilakukan pemuka pendapat, antara lain: pada tahun 2001, salah satu pabrik di Gintung Kerta membuat sumur artesis pada beberapa titik yang tidak dilaporkan kepada pemerintahan setempat. Akibatnya tanah sekitarnya menjadi kering dan kesuburan tanah juga berkurang. Warga meminta pertanggungjawaban pihak pabrik dengan melakukan unjuk rasa yang menjurus anarkis. Pemuka pendapat sebagai orang yang diandalkan untuk memberikan sanksi dengan keras, justru terjebak dalam kompromi yang tidak tegas.

Dalam urusan perdagangan, pemuka pendapat ketika berinteraksi dan berkomunikasi dengan khalayaknya menunjukkan sifat keluasan

hubungan, pengalaman dan berbagi informasi dalam status egaliter, tetapi faktor karakteristik masyarakat tradisional menjadi penghambat kredibilitas, misalnya kelambanan dan kemalasan, tidak inovatif dan naluri untuk bertindak sama dengan yang lain tanpa ada upaya untuk mengadopsi hal-hal baru.

Inovasi dalam konteks aplikasinya di pedesaan bukan berarti baru sama sekali, seperti pendapat Rogers dan Shoemaker (1971: 247),

Ide inovatif bukan berarti baru sama sekali, tetapi sebelumnya pernah dikenal tetapi seseorang belum mau mengadopsinya atau mengembangkan sikap suka atau tidak suka terhadap gagasan, tindakan atau barang yang dianggap baru tersebut.

Sedemikian banyak gagasan, tindakan dan sesuatu yang dianggap baru melanda pedesaan sejak masih sebagai penghasil padi yang baik di wilayahnya. Dalam era pertanian, para penyuluh pertanian banyak menyebarkan inovasi di bidang pengelolaan padi sawah, terlebih lagi setelah munculnya pabrik, inovasi dalam berbagai bentuknya, sering diparktekkan di desa oleh agen pembangunan. Desa-desanya lokasi industri, sebagai wilayah strategis dan surplus di bidang pertanian sering digunakan sebagai obyek berbagai eksperimen pertanian dan perekayasa sosial, politik dan ekonomi tingkat desa.

1.3. Masalah Politik Pedesaan.

Pemuka pendapat dalam konteks kekuasaan lokal umumnya mengandalkan posisinya sebagai elite desa yang memiliki otoritas tradisional kuat dan pengalaman yang memadai. Tetapi faktor penghambat juga menjadi penilaian yang lebih dominan seperti sifat otokratis dan birokratis yang lebih mengunggulkan sistem dan struktur dalam pemerintahan. Padahal masyarakat cenderung tidak menyukai sesuatu yang formal dalam kehidupan sehari-hari.

Ketika masyarakat menuntut keterbukaan dan kebebasan berbicara, pemuka pendapat juga menonjolkan sifat demokratis yang ikut membebaskan warga desa berpendapat sesuai aspirasinya. Di pihak lain pemuka pendapat juga menggunakan kebebasannya dengan masuk dalam partai politik.

Keterlibatan masyarakat dalam politik adalah salah satu karakteristik masyarakat modern, dinyatakan oleh Smelser (1964:268):

Masyarakat modern adalah mereka yang memiliki partisipasi dalam politik, setidak-tidaknya dalam bentuk perwakilan, ikut merumuskan

dan memiliki alternatif kebijaksanaan nasional. Partisipasi politik akan memposisikan bahwa masyarakat memiliki kekuatan untuk ikut dalam pengambilan keputusan.

Masyarakat selayaknya ikut dalam kegiatan pembuatan kebijaksanaan, sehingga aspirasinya tertampung oleh pemerintah. Tetapi partisipasi politik di desa sulit dilakukan, mengingat konsep *floating mass* diberlakukan oleh pemerintah semasa Presiden Soeharto berkuasa.

Dalam urusan politik, pengalaman adalah faktor positif bagi pemuka pendapat ketika membicarakan pemilihan umum, tetapi faktor penghambat yang berorientasi pada kekuasaan tradisional dan aspek formal dalam kehidupan politik menjadi faktor negatif sebagai penghambat kredibilitas.

Sedangkan dalam era kebebasan berpolitik, walaupun pemuka pendapat bersifat demokratis tetapi hubungan yang kuat dengan partai politik sering mengakibatkan komunikasi dengan khalayaknya tidak bebas lagi. Kekecewaan sering muncul ketika pemuka pendapat lebih sibuk dengan urusan propaganda dan kampanye partai politik yang cenderung melupakan khalayaknya.

2. Karakteristik Utama Pemuka Pendapat yang Mendukung Industrialisasi

Pemuka pendapat yang mendukung industrialisasi di desa umumnya menjalin hubungan dengan pemerintah dan pemilik modal dengan baik. Mengingat posisi tersebut, pemuka pendapat berperan pula menjadi agen pembaharuan. Dalam posisinya sebagai tokoh masyarakat, dia juga harus berhadapan dengan sistem sosial yang juga menjadi komunitasnya. Namun tidak mudah untuk melakukan pembaharuan di lingkungan desa pertanian tradisional, sebagaimana diingatkan oleh Rogers dan Shoemaker (1971:131), yaitu:

Sistem sosial tradisional memiliki ciri: kurang berorientasi pada perubahan, teknologi yang digunakan sederhana, hubungan interpersonal masih sangat efektif, sehingga mempermudah kekangan masyarakat untuk mempertahankan *status quo* dalam sistem sosialnya, sedikit sekali komunikasi dengan orang dari luar kelompoknya dan sulit untuk menempatkan diri dalam sistem lainnya di luar sistemnya sendiri.

Karakteristik tersebut menyulitkan agen pembaharuan untuk melakukan perubahan, terlebih lagi jika perubahan dikaitkan dengan pembangunan yang tidak pernah bebas nilai. Seperti dikemukakan oleh Berger (1982: 31):

Pembangunan adalah perbaikan menyeluruh dalam kesejahteraan penduduk yang dicapai dengan modernisasi. Modernisasi adalah perubahan kelembagaan dan kebudayaan yang menyertai pertumbuhan sebagai sesuatu yang bebas nilai, sedangkan pembangunan akan dikategorikan sangat politis dan tidak bebas nilai.

Masyarakat Klari melihat pembangunan sebagai sesuatu yang tidak dapat dilawan, didalamnya mengandung arti penekanan untuk menjual tanah pertanian bagi kepentingan orang luar desa dan industri, seperti jalan tol Jakarta-Cikampek, sambungan telepon otomatis dan berbagai fasilitas lainnya.

Menghadapi kompleksitas pembangunan di pedesaan, pemuka pendapat memiliki sejumlah karakteristik yang mendukung dan menghambat kredibilitasnya. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 12.2: Karakteristik Utama Kredibilitas Pemuka Pendapat yang mendukung Industrialisasi dalam Berbagai Situasi Desa

Jenis Informasi		Mendukung Kredibilitas			Menghambat Kredibilitas		
		Situasi Desa			Situasi Desa		
		Pertanian	Berkem Industri	Surut. Industri	Pertanian	Berkem Industri	Surut Industri
Sosial & Budaya	Sosial	Sama Nilai Sosbud	Hub. Kekuasaan	Sama Nilai Sosbud	Otokratis	Tinggal Nilai Sosbud	Tinggal Nilai Sosbud
	Budaya	Sama Nilai Budaya	adaptif	Introspektif	Materialis	Pengontrol	Penghambat
Perekonomian Pedesaan	Pertanian	Kompenensi	Inovatif	Introspektif	Otokratis	Pengontrol	Tdk tanggu. jawab
	Industrialisasi	Memberikan insentif	Inovatif	Introspektif	Inf.tidak transparan	Orientasi Pabrik	Tdk tangg. jawab
	Perdagangan	Hub.Luas	Inovatif	Introspektif	Materialis	Tidak transparan	Tdk tangg. jawab
Politik Pedesaan	Kekuasaan Lokal	Partisipatif	Konseptor Pro	Responsif	Inf.tidak transparan	Represif	Destruktif
	Pemilihan Umum	Pengalaman	Hub. Kekuasaan	Korektif	Otokratis	Anti Kritik	With drawl

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Karakteristik utama pemuka pendapat yang ditemukan dalam berbagai situasi desa bukan bersifat mutlak. Karakter lain yang menguntungkan maupun merugikan dalam interaksi dan komunikasinya, tetap memiliki kontribusi dalam menempatkan pemuka pendapat sebagai tokoh yang dipercaya atau kurang dipercaya. Pada intinya karakteristik utama pemuka pendapat merupakan kecenderungan yang dapat dilihat oleh masyarakat Klari sebagai khalayaknya.

2.1. Masalah Sosial dan Budaya

Karakteristik utama yang mendukung kredibilitas peran pemuka pendapat dalam situasi desa pertanian adalah kesamaan nilai budaya, tetapi dalam waktu yang bersamaan ketika pabrik baru dibangun, pemuka pendapat bersikap otoriter dengan pola komunikasi yang tidak dapat dibantah dan menekan kepada khalayaknya. Berkaitan dengan tindakan otoriter, Krech et. al, (1962: 198), menyebutkan:

Pengaruh tekanan dan paksaan kultural dapat menimbulkan perlawanan terhadap kelompok primernya, sikap otoriter yang ditonjolkan dalam berbagai tindakan di lingkungan keluarga, masyarakat maupun organisasi berpotensi menimbulkan perlawanan.

Dalam perkembangannya, pemuka pendapat memperoleh dukungan kekuasaan, faktor ini dianggap positif oleh khalayaknya. Namun nilai positif itu tidak cukup untuk menutupi sifat yang tidak menghiraukan nilai sosial budaya di pedesaan. Dengan demikian karakter ini dinilai sangat menghambat kredibilitas pemuka pendapat. Pada situasi krisis ekonomi, pemuka pendapat berupaya untuk menonjolkan kesamaan nilai tetapi pengingkaran terhadap nilai setempat juga menimbulkan permasalahan tersendiri dihadapan khalayaknya.

Sebagaimana masalah sosial, pembicaraan tentang tentang budaya, pemuka pendapat berpijak pada kesamaan nilai budaya dalam situasi desa pertanian sebagai faktor positif, dan perilaku yang membawa budaya materialistis dinilai oleh masyarakat sebagai faktor negatif. Sementara itu dalam situasi berkembangnya industri, meskipun pemuka pendapat mudah beradaptasi dengan simbol-simbol modernisasi, tetapi muncul faktor yang mengurangi kredibilitas yaitu perilaku mengontrol dan mengendalikan dalam komunikasi adalah tindakan yang tidak disukai oleh masyarakat.

Perilaku mengontrol khalayaknya, karena pemuka pendapat merasa di dukung oleh penguasa setempat beserta institusi desa maupun kekuatan lain yang dominan. Sifat mengontrol adalah meniru perilaku pemerintah yang

merasa berhak untuk mengendalikan semua segi kehidupan masyarakat desa. Padahal gejala ini dikhawatirkan oleh Durkheim yang menyatakan:

Di dalam masyarakat modern, dimana pengaruh tradisi yang menghambat untuk sebagian besar telah dilenyapkan, maka terbuka banyak jalan untuk memperlihatkan jiwa kritis dan perubahan pendapat di dalam masyarakat. Jika pemerintah selanjutnya mengatur kecenderungan tersebut sedemikian rupa, hasilnya adalah ketidakpastian yang konstan dalam lingkungan politik dan kebimbangan yang mengarah pada perubahan yang tidak konkrit. (Emile Durkheim dalam Anthony Giddens, 1986:127).

Upaya menuju modernisasi dengan industrialisasinya meminggirkan tradisi setempat, tetapi dengan pengaturan yang berlebihan dan tidak terfokus pada problem yang dihadapi masyarakat desa, tetapi lebih dititikberatkan pada perlindungan industri, maka berakibat munculnya suasana ketidakpastian di desa yang terbukti menimbulkan berbagai konflik internal.

Di dalam situasi kebebasan untuk menentukan orientasi budaya, pemuka pendapat cenderung untuk memaklumi dan introspektif terhadap peran yang dilakukan, tetapi disisi lain muncul pula karakteristik negatif yaitu menghambat berlangsungnya perubahan. Sebab perubahan yang tidak direncanakan, bagi pemuka pendapat maupun kelompok pendukungnya dianggap tidak menguntungkan. Padahal dalam tradisi kekuasaan pemerintahan Orde Baru mereka sangat menikmati.

2.2. Masalah Perekonomian Desa.

Kompetensi di bidang pertanian dan inovasi adalah karakteristik yang positif dari pemuka pendapat. Tetapi ketika kompetensi dihadapkan pada perilaku yang otoriter dalam pertanian, ternyata masyarakat masih dapat menerimanya. Namun dalam *setting* industrialisasi yang berkembang di desa, sifat positif sebagai orang yang inovatif, harus dibandingkan dengan karakteristik yang selalu mengatur dan mengontrol yang tidak disukai masyarakat.

Dalam situasi berkurangnya kegiatan pabrik, pemuka pendapat yang membanggakan diri karena didukung pemerintah ini juga sadar kalau kebijakan desa pada masa sebelumnya tidak selalu berpihak pada rakyat, tetapi ketika diminta untuk bertanggung jawab, para pemuka pendapat cenderung menghindar dari tanggung jawab masa lalu, dengan alasan bahwa tindakan tersebut sebelumnya sudah disetujui dalam musyawarah.

Di pihak lain, masyarakat juga mengetahui bahwa musyawarah di desa

lebih banyak dilakukan sekadar melegalkan kebijakan pemerintahan desa yang sudah diprogramkan dan diatur melalui jalur birokrasi.

Untuk urusan industrialisasi desa, pemuka pendapat memberikan imbalan-imbalan tertentu kepada masyarakat desa dengan tujuan supaya masyarakat mau menerima kehadiran pabrik. Memberikan imbalan merupakan salah satu aspek sebagai sumber kewibawaan dan kekuasaan seorang pemimpin. Menurut French dan Raven (1968), bahwa:

Sumber kewibawaan dan kekuasaan pemimpin adalah (1) Kekuasaan Paksa (*coercive power*), kekuasaan yang didasarkan pada pemaksaan yang menakutkan, (2). Kekuasaan Imbalan (*reward power*) yaitu kekuasaan untuk memperoleh kepatuhan dengan memberikan imbalan kepada orang lain, (3) Kekuasaan Legal (*legitimate Power*) sebagai kekuasaan formal yang diberikan oleh organisasi (4) Kekuasaan Keahlian (*expert power*), pengaruh yang didasarkan pada keterampilan, keahlian atau pengetahuan, (5). Kekuasaan Rujukan (*referent power*), kekuasaan yang didasarkan karena keteladannya. (French dan Raven, dalam Myers dan Myers, 1988:198).

Tindakan pemuka pendapat yang berorientasi pada *reward power* bersifat sementara untuk memperoleh simpati masyarakat, sebab pada sisi lain, perilaku itu disertai dengan memanipulasi pesan atau secara sengaja justru menyampaikan pesan yang kebenaran isinya diragukan. Padahal seperti ditegaskan oleh Kincaid dan Schramm (1990:24), "komunikasi manusia dimaksudkan untuk mengurangi ketidakpastian dan mengurangi keragu-raguan". Ketika pemuka pendapat menyampaikan informasi tidak transparan biasanya berdalih, bahwa tidak objektifnya penyampaian informasi karena menjaga agar tidak terjadi gejolak di masyarakat dan pesan tersebut adalah titipan pemerintah.

Sebagai pendukung industri tentunya pemuka pendapat lebih inovatif dibandingkan dengan orang lainnya, sehingga karakter yang merugikan seperti pesan yang disampaikan tidak transparan menjadi tidak dihiraukan oleh masyarakat. Dalam konteks ini pemuka pendapat bertindak sebagai agen perubahan yang membantu program pemerintah dalam pembangunan di desa. Karakteristik yang ideal bagi seorang agen perubahan adalah sebagai berikut:

Membangkitkan kebutuhan untuk berubah, mengadakan hubungan dalam rangka perubahan, mendiagnosa kebutuhan yang dihadapi masyarakat, menciptakan keinginan berubah di kalangan kliennya, merencanakan tindakan perubahan, memelihara program pembangunan supaya tidak

terjadi kemacetan dan menjaga hubungan baik dengan klien yang sudah berubah. (Rogers dan Shoemaker, 1971: 315-316).

Jika pemuka pendapat di desa memiliki kapasitas sempurna seperti itu, tetapi belum tentu mampu melakukan perubahan yang berjalan dengan lancar dan diterima oleh masyarakat, yang mengalami pasang surut dalam perjalanannya.

Perubahan ke arah modernisasi dengan industrialisasinya di negara berkembang, tidak secara langsung menciptakan kemakmuran dan menuju keadaan yang lebih baik bagi masyarakat setempat. Perubahan dapat pula menimbulkan masalah baru yang rumit.

Walaupun di lakukan di Timur Tengah, hasil penelitian Daniel Lerner memiliki substansi yang sama untuk menelaah perubahan di negara sedang berkembang. Dinyatakan sebagai berikut:

Masyarakat tergesa-gesa dengan laju sejarah perkembangan Barat yang rumit, apa yang terwujud di Barat selama berabad-abad, oleh beberapa tokoh Timur Tengah hendak diperolehnya dalam beberapa tahun saja. Lagi pula mereka hendak melakukan dengan cara mereka sendiri,yang dibutuhkan mereka adalah institusi modern tetapi bukan ideologi modern, kekuasaan modern tetapi bukan tujuan modern, kekayaan modern tetapi bukan kebijaksanaan modern, barang-barang modern tetapi bukan lagak-gaya modern. (Daniel Lerner, 1983:31)

Industrialisasi di pedesaan sebagai bentuk untuk mencapai kesejahteraan dan modernisasi, dalam kalkulasi ekonomi nasional mungkin saja memberikan kontribusi devisa, tetapi pada tingkat masyarakat menimbulkan masalah baru yang rawan dengan konflik horisontal maupun vertikal.

Dalam konteks perdagangan desa, hubungan yang luas pada masa desa pertanian diakui sebagai sifat yang baik dari pemuka pendapat, dan inovatif pada hal-hal baru seperti antisipasi menghadapi perubahan konsumen di desa adalah karakteristik yang menunjukkan peran ketokohnya.

Munculnya usaha-usaha baru di desa dengan dukungan pemuka pendapat, yang mengarah pada spesialisasi tugas yang jelas, misalnya dalam pekerjaan di Koperasi Unit Desa, industri kecil, koperasi dan lembaga perkreditan desa menunjukkan pergeseran dari masyarakat pertanian yang mekanistik menuju masyarakat pra industri yang organik. Tentang masyarakat mekanistik, Durkheim menyatakan sebagai berikut:

Di dalam masyarakat kontemporer, bentuk solidaritas mekanis makin lama diganti oleh suatu jenis baru dari kohesi sosial yaitu masyarakat organis

yang mengarah pada utilitarianisme, berorientasi pada kontrak-kontrak individual yang sangat heterogin dan cenderung mengurangi kesadaran kolektif (*conscience collective*) masyarakat tradisional. (Emile Durkheim dalam Anthony Giddens, 1986:99).

Kesadaran kolektif dalam model pertanian tradisional tidak nampak dalam pola perdagangan yang sangat komersial di pedesaan, bahkan Koperasi Unit Desa yang terdapat di desa juga tidak mencerminkan integrasi dan komunikasi dalam kesadaran kolektif. Semuanya sangat kalkulatif dan cenderung menguntungkan elite desa secara ekonomis.

Pada segi lainnya faktor yang menghambat adalah terlalu materialistis dan tidak transparan dalam menyebarkan informasi perdagangan di desa. Tetapi karena situasi pada waktu itu menempatkan pemuka pendapat sebagai kepanjangan tangan pemerintah, maka sifat materialistis dan tidak transparan tersebut tidak memiliki dampak yang luas terhadap kredibilitas pemuka pendapat. Menurut Rogers dan Svenning (1969:217), "pemuka pendapat atau tokoh masyarakat tradisional biasanya merangkap pula sebagai agen pemerintah yang membantu program pembangunan di desa". Dengan demikian karakter yang dianggap negatif oleh masyarakat, tetapi bukan merupakan hambatan terhadap kredibilitasnya.

Sedemikian banyak persoalan yang ditimbulkan oleh industrialisasi di desa seperti, terjadinya kebocoran pipa penampungan bahan kimia pada salah satu pabrik, kebisingan suara pabrik yang menimbulkan protes warga desa, dan lain-lain kejadian yang menimbulkan konflik diantara masyarakat desa, pemerintah, pabrik dan pemuka pendapat. Belum lagi kericuhan internal pabrik yang mengganggu keselarasan hidup di desa. Berbagai kasus cenderung menempatkan pemuka pendukung industrialisasi berpihak pada pabrik, walaupun berupaya untuk menyelesaikan, biasanya berakhir dengan perjanjian tertentu yang lebih tidak terkait dengan masalah sosial pedesaan.

Pemuka pendapat seolah bekerja dalam sistem organisasi dengan koordinasi pemerintah yang berpijak pada kekakuan struktur birokrasi. Padahal disatu sisi masyarakat mengharapkan berpijak pada kolektivitas untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sejalan dengan gambaran tersebut Likert (1961), menyebutkan, dalam organisasi yang otoritatif, pesan-pesan ke bawah diterima dengan penuh kecurigaan, menimbulkan kesalahpahaman dan penolakan. Sedangkan dalam organisasi dan kelompok yang partisipatif, komunikasi kebawah atau kesemua arah lebih dapat diterima oleh anggotanya. (Likert dalam Rogers dan Shoemaker, 1971:127).

Penyelesaian masalah yang selalu merujuk pada aspek formalisme dalam struktur organisasi sulit untuk dapat memuaskan warga desa. Lebih mengecewakan lagi, jika sedari awal persoalan ditangani oleh masyarakat sendiri, tetapi setelah menjelang selesai, pemuka pendapat dan pemerintah dengan kekuasaannya berusaha menyelesaikan.

Dalam dinamika desa yang bergejolak, eksistensi pemuka pendapat menjadi pudar ketika terjadi krisis multi dimensi. Berbagai masalah yang semula tidak dipermasalahkan oleh masyarakat desa, kembali diungkit, antara lain kebijakan mendukung masuknya pengecer dalam jaringan konglomerasi bisnis eceran di desa, setidak-tidaknya pemuka pendapat ikut berperan di dalamnya. Walaupun kadang-kadang pemuka pendapat menyadari ketidaksejalannya dengan harmomnisasi perekonomian desa, tetapi cenderung tidak bertanggung jawab dan berlindung dibalik aturan formal terhadap kesulitan yang dirasakan oleh pemilik toko kecil di seputar desa lokasi industri.

2.3. Masalah Politik Pedesaan

Sebagai pendukung program pemerintah, pemuka pendapat selalu berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan di desa, partisipasinya yang konstan menempatkan pemuka pendapat sebagai orang yang memiliki kredibilitas tinggi, padahal dalam penyebaran informasi sering tidak melaksanakan dengan objektif karena tergantung pada pesan titipan pemerintah yang dikemas dalam bingkai menjaga harmonisasi desa.

Keaktifannya membuat program pemerintahan desa lebih diunggulkan dibandingkan dengan tindakan memaksa warga desa yang mengatasnamakan pembangunan. Sebagai orang yang dapat berinteraksi dalam pemerintahan, maka ketika terjadi perubahan dan tuntutan kebebasan, pemuka pendapat berupaya untuk beradaptasi dengan situasi yang berkembang, dia merespon semua tuntutan warga desa, tetapi dalam prakteknya pemuka pendapat seringkali melakukan tindakan yang destruktif, atau "tindakan aktif maupun pasif yang merusak dasar organisasi dan kelompok" (Robbins,1986:85). Perilaku ini tidak membangun kebersamaan di lingkungan masyarakat desa, dan lebih banyak melakukan pengabaian terhadap kewajiban yang semestinya lebih layak dijalankan. Posisi yang semakin terpinggirkan, menjadikan aktivitas pemuka pendapat sangat berkurang dan cenderung menjauh dalam kegiatan pemerintahan desa.

Pengalaman dalam menghadapi pemilihan umum, berdasarkan pendapat masyarakat adalah faktor yang mendukung peran pemuka

pendapat, sekalipun dia bertindak otokratis dalam penyampaian pesan yang isinya serba wajib, tetapi sebagaimana diketahui bahwa politik adalah dominasi pemerintah dan organ kekuasaan lain yang mendukung. Oleh sebab itu pemuka pendapat sebagai salah satu organ kekuasaan, walaupun bertindak otokratis tetapi masyarakat desa tidak berani untuk menolak pesan-pesan yang disampaikan. Masyarakat sebenarnya menyadari bahwa dalam kewajiban melekat hak tetapi politik hegemonik kekuasaan negara tidak dapat dilawan.

Pemilihan umum dan peran partai politik di desa tidak kentara sejak pemilihan umum tahun 1971 di Indonesia, sebab politik sebagai suatu masalah sensitif, dimana masyarakat desa dianggap tidak layak ikut aktif didalamnya. Dengan demikian, partisipasi politik yang paling rendah seperti mengikuti pemilihan umum, semata-mata hanya untuk memenuhi kewajiban yang diberlakukan pemerintahan di desa.

Dapat dikaitkan dengan situasi tersebut, Liddle menyatakan,:

bahwa pemilihan umum tahun 1971 di Indonesia adalah motivasi anti partai, partai-partai dan pemimpinnya merupakan duri dalam daging, yaitu saingan dalam kekuasaan, sumber dari pandangan-pandangan dunia yang lain dan pembangkit keresahan rakyat. (William Liddle dalam Kartodirdjo, 1990:129).

Sejak tahun 1971 pada pemilihan umum pertama kekuasaan Soeharto, politik dikonotasikan berbahaya bagi kehidupan masyarakat. Ini berimplikasi pada peran birokrat yang lebih dominan sebagai pengendali politik di desa. Padahal jika mengacu pada konteks moralitas, seperti dikemukakan oleh Durkheim (dalam Abdullah dan Leeden, 1986:98), kekuasaan selalu menganggap bahwa suatu tindakan yang melawannya adalah suatu kejahatan, meskipun tindakan melawan itu sebenarnya bukan merupakan pelanggaran hati nurani umum atau bukan pelanggaran terhadap nilai moral manusia". (Emile Durkheim dalam Abdullah dan Leeden, 1986:98)

Tindakan melawan adalah perilaku antagonis yang tidak disukai oleh pemerintah, dan dominasi kekuasaan negara yang kuat dalam mengatur dan mengendalikan masyarakatnya, menjadikan semua lembaga, kelompok dan individu yang berafiliasi di dalamnya, semakin kuat. Oleh sebab itu meskipun pemuka pendapat tidak suka dikritik tetapi sepanjang masih sebagai kepanjangan tangan birokrasi kekuasaan negara, mereka tetap memiliki kedudukan yang kuat di lingkungan masyarakatnya.

Seperti halnya dalam menghadapi masalah politik dari pemerintahan desa, pemuka pendapat yang mengikuti arus perubahan, berupaya

bertindak korektif terhadap penyimpangan yang terjadi, tetapi ini tidak menghilangkan posisinya sebagai orang yang lebih banyak mendukung kekuasaan hegemonik Golongan Karya, sehingga masyarakat memandang kredibilitas peran yang dimiliki pemuka pendapat kurang memadai untuk dipakai sebagai rujukan. Sikap masyarakat yang menolak terhadap eksistensi kekuasaan masa lalu, mengakibatkan pemuka pendapat lebih banyak menarik diri (*withdrawal*) dalam berbagai kesempatan komunikasi publik di desa.

Dalam konteks komunikasi dengan kelompok yang berbeda secara sosial maupun kultural, tindakan yang menghindar untuk berkomunikasi masuk dalam satu kriteria penghambat komunikasi yang efektif. Dikemukakan oleh Samovar, Porter dan Jain (1981:192-200), pada intinya menyatakan sebagai berikut:

Masalah yang menghambat dalam komunikasi adalah (1). perbedaan tujuan berkomunikasi, (2). etnosentrisme, (3), ketidakpercayaan (*lack of trust*) terhadap orang atau kelompok lain, (4) penarikan diri (*withdrawal*) untuk berkomunikasi dengan pihak lain, (5) ketiadaan empati, (6) stereotip (*stereotype*), (7) kekuasaan yang menyebabkan komunikasi berjalan tidak seimbang.

Keputusan menarik diri untuk tidak berkomunikasi dengan khalayaknya, karena masyarakat mengalami krisis kepercayaan terhadap pemuka pemerintah dengan lembaga-lembaganya dan pemuka pendapat pendukung program pemerintah, sehingga apa yang disampaikan selalu dikritik oleh masyarakat.

Komunikasi pedesaan dalam kehidupan politik tidak menampilkan lagi unsur represif dengan pola *top-down*, masyarakat berbicara apa adanya, terbuka dan semakin jarang komunikasi yang dipengaruhi oleh jarak kekuasaan, bahkan sering pula, komunikasi antara masyarakat dengan dengan penguasa maupun orang-orang pabrik diselingi dengan ancaman destruktif untuk menggunakan massa dalam mengatasi persoalan. Tindakan ini cenderung dilakukan karena ketidakpercayaan (*lack of trust*) kepada pemuka pendapat dan pemerintah.

3. Perubahan Kredibilitas Peran Pemuka Pendapat

Kredibilitas pemuka pendapat sangat tergantung dari karakteristik individual, kapasitas penguasaan masalah, isi pesan yang disampaikan, hubungan dengan kelompok kepentingan yang dominan, peran sumber informasi alternatif yang muncul dalam era kebebasan memperoleh

informasi. Faktor tersebut selalu bergeser untuk dapat mendekati kredibilitas atau dalam situasi yang berlainan justru akan menjauh dari ukuran kredibilitas.

Kredibilitas dalam berbagai situasi yang melekat pada kelompok pemuka pendapat yang menolak maupun yang mendukung industrialisasi, selengkapnyanya dapat dilihat seperti dalam tabel dibawah ini:

Tabel 12.3: Kredibilitas Pemuka Pendapat

Dikaitkan dengan Sikap Terhadap Industri dan Perubahan Situasi Desa

Jenis Informasi		Menolak Industrialisasi			Mendukung Industrialisasi		
		Situasi Desa			Situasi Desa		
		Pertanian	Berkembang Industri.	Surutnya. Industri	Pertanian	Berkembang Industri	Surut. Industri
Sosial & Budaya	Sosial	K	TK	K	TK	K	TK
	Budaya	K	TK	K	TK	K	TK
Perekonomian Pedesaan	Pertanian	K	TK	K	TK	K	TK
	Industrialisasi	TK	TK	TK	TK	K	TK
	Perdagangan	TK	TK	TK	K	K	TK
Politik Pedesaan	Kekuasaan Lkl	TK	TK	K	K	K	TK
	Pemilu	TK	TK	K	K	K	TK

Keterangan: K = Memiliki Kredibilitas TK = Tidak Memiliki Kredibilitas

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Pemuka pendapat yang dipandang sebagai sumber informasi atau saluran komunikasi yang dapat dipercaya dan kompeten oleh masyarakat desa tidak berlangsung secara konstan dalam berbagai situasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Timasheff (1967:117), yang menyebutkan, “dorongan untuk berkuasa dan kepatuhan pengikut dalam berbagai situasi menentukan posisi pemimpin dalam suatu kelompok”. Perubahan persepsi masyarakat karena pengaruh dinamika desa menyebabkan pemuka pendapat juga dituntut untuk melakukan penyesuaian peran dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai setempat.

Tuntutan yang ideal ini tidak mudah dilakukan oleh pemuka pendapat, yang terjadi justru sikap dan perilaku pemuka pendapat yang satu kelompok menolak untuk menerima perubahan dengan tetap berlandaskan pada nilai setempat, sedangkan kelompok pemuka pendapat lain cenderung untuk mendukung perubahan tetapi melakukan pengabaian terhadap nilai setempat.

Pemuka pendapat yang berpijak pada tradisi desa dan tidak mau beradaptasi dengan perubahan yang dibawa oleh industrialisasi, tidak selalu

sejalan dengan masyarakat desa, sebab realitas sosial ekonomi di sekitarnya menuntut penyesuaian terhadap simbol modernisasi. Tetapi di pihak lain, yang melakukan adaptasi dengan perubahan cenderung mengabaikan nilai masyarakat setempat.

Mengingat sedemikian sulitnya menemukan pemuka pendapat yang ideal dalam berbagai situasi, maka masyarakat desa menetapkan pilihan tentang pemuka pendapat yang ideal berdasarkan jenis informasi atau masalah yang dikomunikasikan dan sejauh mana informasi tersebut menguntungkan.

Di lingkungan pemuka pendapat yang menolak industrialisasi desa, kredibilitas peran dalam situasi desa pertanian terbatas pada masalah sosial, budaya dan pertanian, sedangkan masalah lainnya, pemuka pendapat dianggap tidak memiliki kredibilitas, karena masalah tersebut umumnya dalam pengendalian intensif pemerintah seperti masalah politik, atau masalah yang tidak banyak bersentuhan dengan tradisi di pedesaan yaitu industri dan perdagangan.

Berkembangnya industri, mempunyai dampak yang negatif terhadap peran pemuka pendapat tradisional, mereka dinilai tidak memiliki kredibilitas peran dalam berbagai masalah yang ada di desa. Semangat perubahan di desa memarginalkan posisi mereka di dalam komunitasnya. Masalah yang biasa muncul dalam industrialisasi menurut Tjokrowinoto adalah: " (1) Konsentrasi dan marginalisasi, (2) ambivalensi orientasi nilai, (3) berimpitnya struktur politik dan struktur ekonomi (4) urbanisasi dan marginalisasi". (Moeljarto Tjokrowinoto, dalam Haneman, 1990:58). Sebuah kondisi penuh dengan ambivalensi perilaku individual, kelompok dan institusi yang berkembang didalamnya.

Tetapi ketika situasi berubah, pemuka pendapat mampu mengembalikan kekuasaan tradisional, sehingga kredibilitas di lingkungan masyarakat juga diakui. Menghubungkan dengan kekuasaan sosial, Mc.Iver dan Page (1967:37) menyatakan:

Kekuasaan sosial senantiasa terdapat dalam individu yang satu dengan yang lainnya, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok dalam masyarakat, di dalamnya terdapat kapasitas untuk mengendalikan hubungan, memerintahkan dan memberikan pelayanan.

Kekuasaan dalam masyarakat pedesaan merupakan kekuatan relasional yang disepakati bersama dalam suatu sistem sosial. Ketika modernisasi dengan industrialisasinya dianggap gagal memberikan kesejahteraan, maka

kekuasaan tradisional dalam bidang sosial, budaya dan pertanian, bahkan masalah yang semula didominasi oleh pemerintah beserta agen-agennya seperti masalah politik, juga dapat dikuasai oleh pemuka pendapat.

Di lingkungan pemuka pendapat yang mendukung industrialisasi, pada situasi awal berdirinya pabrik, mereka dinilai tidak memiliki kredibilitas, kecuali dalam informasi politik, pemuka pendapat dianggap memiliki kredibilitas. Masa kejayaan mereka adalah ketika industrialisasi berkembang dengan pesat, hampir semua masalah pedesaan dikuasai sehingga masyarakat menganggap pemuka pendapat memiliki kredibilitas karena dukungan pemerintah dan pemilik modal.

Menyangkut kredibilitas yang bersumber pada hubungan dengan kekuasaan negara dan kekuasaan ekonomi, dikemukakan oleh Gerth dan Mills (1967:180), "kekuasaan mungkin bukan satu-satunya kehormatan sosial, tetapi dapat pula didasari oleh kekuasaan politik dan ekonomi yang dijamin oleh aturan hukum (*legal order*)". Dengan prinsip tersebut pemuka pendapat semakin kuat ketika industrialisasi berkembang dengan pesat.

Keadaan berubah, perkembangan selanjutnya, ketika krisis multi dimensi terjadi, pemuka pendapat ini tersingkir dari khalayaknya. Mereka dianggap tidak memiliki kredibilitas lagi, bahkan dipojokkan karena kedudukannya sebagai sumber masalah pada waktu hegemoni kekuasaan pemerintah sangat besar.

4. Ikatan Pola Komunikasi dengan Kelayakan Kredibilitas .

Pola komunikasi yang dilakukan antara pemuka pendapat dengan masyarakat desa menghasilkan penilaian terhadap kelayakan kredibilitas yang dimiliki oleh pemuka pendapat. Tidak tampak bahwa setiap bentuk komunikasi akan selalu berdampak sama terhadap penilaian masyarakat desa. Sebab pola komunikasi yang dinilai layak, terkait pula dengan tuntutan masyarakat, peran dan dukungan pemerintah, serta eksistensi dari sumber pesan lain yang semakin mudah ditemukan ataupun diakses dari wilayah desa, seperti media massa dan tokoh kontemporer.

Penetapan kredibilitas yang dipengaruhi oleh banyak faktor tersebut, dalam konteks pendapat masyarakat tetapi memiliki substansi yang sama dikemukakan oleh Rush dan Althoff (1997:282), yaitu:

Pendapat umum masyarakat bergantung pada konteks kemasyarakatan, pengetahuan, nilai-nilai dan sikap yang ditentukan oleh interaksi antara lingkungan sosial dengan individu dan hasil pengaruh kontak tatap muka dengan media massa maupun pemuka pendapat.

Masyarakat desa akan mengungkapkan bahwa pemuka pendapat memiliki kredibilitas yang layak tergantung berbagai aspek, sehingga pola komunikasi tidak akan menghasilkan model baku terhadap kelayakan suatu kredibilitas.

Sosok ideal pemuka pendapat dari waktu ke waktu mengalami perubahan sejalan dengan lingkungan internal desa maupun eksternal desa. Karakteristik yang dikehendaki masyarakat dalam pola hidup agraris adalah pemeliharaan nilai-nilai pedesaan, pada situasi industrialisasi menuntut adaptasi dari pemuka pendapat, dan dalam situasi krisis ekonomi masyarakat menuntut kebebasan.

Beranekaragamnya tuntutan, berimplikasi terhadap penilaian terhadap kelayakan kredibilitas peran yang dimiliki pemuka pendapat pedesaan. Gambaran selengkapnya terhadap keanekaragaman pendapat masyarakat terhadap pemuka pendapatnya dapat dilihat seperti dalam tabel tersebut dibawah ini:

Tabel 12.4: Pola Komunikasi Pemuka Pendapat dan Kelayakan Kredibilitas

Jenis Informasi		Menolak Industrialisasi			Mendukung Industrialisasi		
		Situasi Desa			Situasi Desa		
		Pertanian	Berkem Indust.	Surut. Indus.	Pertanian	Berkem Indust	Surut. Indust
Sosial & Budaya	Sosial	L Ly	I T.Ly	L Ly	L T.Ly	L Ly	I T.Ly
	Budaya	L Ly	I T.Ly	I Ly	L T.Ly	L Ly	I T.Ly
Perekonomian Pedesaan	Pertanian	L Ly	I T.Ly	I Ly	L T.Ly	L T.Ly	I T.Ly
	Industrialisasi	I T.Ly	I T.Ly	I T.Ly	L T.Ly	L Ly	I T.Ly
	Perdagangan	I T.Ly	I T.Ly	I T.Ly	L Ly	L Ly	I T.Ly
Politik Pedesaan	Kekuasaan Lokal	L T.Ly	L T.Ly	I Ly	L Ly	L Ly	I T.Ly
	Pemilihan Umum	L T.Ly	L T.Ly	I Ly	L Ly	L Ly	I T.Ly

Keterangan: I = Interaktif L = Linier Ly = Layak T.Ly = Tidak Layak

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel tersebut diatas, kelayakan kredibilitas pemuka pendapat tidak tergantung pada pola komunikasi. Komunikasi linier tidak dapat diidentikkan dengan pola komunikasi yang tidak disukai. Sebab dalam beberapa situasi maupun jenis informasi yang dibutuhkan

masyarakat desa, ternyata pola komunikasi linier dari pemuka pendapat bisa dikategorikan pula sebagai sesuatu yang layak mendukung kredibilitas perannya.

Demikian pula tidak setiap pola komunikasi yang interaktif antara pemuka pendapat dan khalayaknya selalu mencerminkan kebebasan berbicara atau berpendapat yang disukai warga desa. Kenyataannya pola komunikasi interaktif yang dilakukan pemuka pendapat, dapat pula dinilai tidak layak oleh masyarakat desa ketika dikaitkan dengan situasi desa dan jenis informasi yang dibutuhkan..

Dengan demikian pola komunikasi tidak dapat dipakai sebagai ukuran untuk menetapkan kelayakan ataupun ketidaklayakan suatu kredibilitas peran yang dimiliki pemuka pendapat pedesaan. Untuk mengetahui lebih jelas tentang hubungan pola komunikasi dengan kelayakan kredibilitas peran, maka pemuka pendapat dikelompokkan dalam mereka yang menolak industrialisasi dan mereka yang mendukung industrialisasi di desa.

4.1. Kerenggangan Hubungan Pemuka Pendapat dengan Industri di Pedesaan.

Dalam situasi desa pertanian, pola komunikasi linier dalam masalah sosial dan budaya pada masa pertanian dikategorikan layak oleh masyarakat desa, karena lebih terfokus pada kesamaan nilai. Demikian pula yang terjadi dengan masalah pertanian, pemuka pendapat tetap dinilai layak karena keahliannya yang diakui di lingkungan desa.

Tetapi di luar ke tiga persoalan tersebut, pemuka pendapat yang berkomunikasi dengan pola apapun juga dinilai tidak layak kredibilitasnya karena tidak menguasai masalah yang berhubungan dengan pertanian dan perdagangan di desa yang bergerak dinamis. Karakteristik yang sejalan dengan pendapat Uphoff (1974:4), "masyarakat desa yang paternalistik bersikap pasif dan fatalistik yang tidak tertarik untuk melakukan usaha yang mengembangkan kesejahteraan mereka melalui organisasi desa yang mengantisipasi perubahan". Pemuka pendapat memiliki nilai, kepercayaan dan hubungan kosmis yang tetap dipertahankan dalam situasi yang berubah, dipihak lain sebagian masyarakat menuntut untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan.

Sedangkan dalam masalah politik, ketidak-layakan pemuka pendapat dikerenakan ketidakmampuannya untuk mengimbangi, mengkritik atau bahkan melawan berbagai macam kemauan politik dari pemerintah dan

Golongan Karya. Walaupun masyarakat tetap menyadari bahwa tidak mungkin untuk bersaing dengan gabungan kekuatan kekuasaan dengan kelompok politik dan pemilik modal yang mau menanamkan investasinya di desa.

Sejalan dengan pengaruh tiga kelompok yang kuat, Todaro (1983:152), menyatakan: "perubahan struktur ekonomi dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan dari transformasi dalam sikap, lembaga-lembaga dan ideologi-ideologi yang mendukungnya". Wilayah desa pada awal pembangunan pabrik mulai terjadi perubahan sosial ekonomi yang di dikendalikan oleh pemerintah dan pemilik modal.

Berkembangnya industri di pedesaan memiliki pengaruh besar terhadap sikap masyarakat kepada pemuka pendapat yang menolak industrialisasi. Masyarakat cenderung menilai kredibilitas peran pemuka pendapat tidak layak sebagai acuan untuk membicarakan semua jenis informasi. Kesiediaan untuk berkomunikasi dengan interaktif maupun transaksional ditafsirkan sebagai suatu kewajiban dan suatu ketidakmampuan menghadapi perubahan.

Menghubungkan dengan bentuk komunikasi yang interaktif dalam kelompok masyarakat, Sean MacBride dkk (1980:39) menyatakan sebagai berikut:

Komunikasi dalam setiap sistem sosial mengandung perdebatan dan diskusi dengan saling menukar fakta yang diperlukan untuk memungkinkan persetujuan atau menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai masalah publik, menyediakan bukti relevan untuk kepentingan umum dan agar masyarakat melibatkan diri dalam komunikasi yang menyangkut kepentingan bersama di tingkat internasional, nasional dan lokal.

Komunikasi yang berlangsung dua arah yang dilakukan pemuka pendapat adalah sesuatu yang dianggap wajar dalam sistem sosial, sehingga tidak dapat dipakai sebagai faktor yang menunjang kelayakan perannya sebagai pemberi informasi di lingkungan warga desa. Di sisi lain, gencarnya retorika keberhasilan pemerintah dengan pembangunan ekonominya, meminggirkan pemuka pendapat ini dari peran- perannya yang diharapkan masyarakat.

Sedangkan dalam situasi surutnya industri, semua masalah yang menjadi pembicaraan publik dapat dikuasai dengan baik oleh pemuka pendapat sehingga dapat dikategorikan memiliki kredibilitas yang layak di lingkungan masyarakat desa. Konsistensi pemuka pendapat untuk

tetap berpedoman pada karakteristik tradisional tidak sia-sia, karena ketidakpercayaan masyarakat desa terhadap industrialisasi menimbulkan mereka kembali mengakui eksistensi nilai yang terkandung dalam masyarakat pertanian. Pada konteks ini Le Vine (1987) menyatakan:

adalah menyesatkan jika menganggap bahwa nilai-nilai tradisional sebagai sesuatu yang harus dimusnahkan dan harus diganti, seharusnya bisa dikombinasikan dengan institusi baru atau pola-pola tingkah laku baru, sehingga tidak ada pemutusan hubungan dengan masa lalu karena kesinambungan tetap ada walaupun ada perubahan yang fundamental. (Le Vine dalam Rush dan Althoff, 1997: 110-111).

Perubahan ideal yang mestinya terjadi di desa adalah perpaduan antara penghargaan terhadap nilai tradisional yang positif dengan nilai baru yang demokratis, rasional dan produktif, dengan demikian tidak terbatas pada semangat menyalahkan era hegemoni politik birokrasi dan kembali ke nilai moral tradisi pertanian.

Namun pada saat ini yang terlihat masih terbatas pada semangat untuk kembali ke nilai moral pedesaan saja tanpa disertai perilaku yang demokratis dan rasional. Padahal setiap saat masyarakat selalu menghendaki tokoh-tokohnya demokratis. Tetapi memang tidak mudah untuk berperilaku demokratis, sebab seperti digambarkan Alex Inkeles, yaitu: "perilaku demokratis adalah kesediaan menerima orang lain, terbuka terhadap pengalaman dan ide baru, bertanggung jawab tetapi waspada terhadap kekuasaan dan toleransi terhadap perbedaan-perbedaan". (Alex Inkeles dalam Rush dan Althoff, 1997:46). Suatu syarat yang tidak mudah dilakukan oleh pemuka pendapat maupun masyarakat pedesaan dalam waktu sekejap.

4.2. Merapat Kepada Kekuatan Pabrik

Kecenderungan penggunaan komunikasi satu arah dalam situasi desa pertanian pada awal industrialisasi yang dilakukan oleh pemuka pendapat dengan masyarakat desa, menghasilkan penilaian yang beragam. Dalam pembicaraan mengenai masalah sosial, budaya dan pertanian, pemuka pendapat dianggap kredibilitasnya tidak layak. Padahal kelompok pemuka pendapat ini sudah berusaha untuk menyesuaikan dengan keadaan masyarakat dengan mengeksplorasi kesamaan nilai dalam setiap penyampaian pesan.

Beroprasinya pabrik di desa, yang sangat di dukung oleh pemuka pendapat ini, tetapi ternyata tidak mampu meyakinkan masyarakat

untuk memberikan kepercayaan, sebab pemuka pendapat banyak memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan dan lebih banyak menguntungkan kegiatan pabrik. Sementara dalam masalah politik pedesaan walaupun pemuka pendapat berkomunikasi dengan pola linier satu arah tetapi dikategorikan memiliki kredibilitas peran yang layak, sebab situasi desa dengan kekuatan pemerintah yang dominan menghendaki agar masyarakat desa tidak ikut berpolitik sebagaimana dalam kebijakan *floating mass* dan tidak perlu aktif dalam menilai kebijakan pembangunan pemerintahan desa.

Penilaian yang diberikan masyarakat desa terhadap tingkat kelayakan peran yang dimiliki oleh pemuka pendapat, semata-mata karena ketidak-tahuan masyarakat terhadap hak politik dan demokratisasi, sebagai, "suatu sistem politik dimana pemberian suara mayoritas dalam pemilihan reguler dan bersifat tidak memaksa, dan melembagakan pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah". (Berger1990:108-109).

Pada masa berkembangnya industri, pemuka pendapat memiliki kredibilitas yang layak dalam berbagai masalah pedesaan, kecuali masalah pertanian sebagai *core* matapencaharian asli masyarakat setempat. Masalah pertanian tetap tidak memberikan kesempatan kepada pemuka pendapat yang dianggap bertanggung jawab terhadap pudarnya pamor Klari sebagai penghasil padi di Karawang.

Tingkat kelayakan sebenarnya secara substantif merujuk pada referensi politik yang kuat dari pemerintah dan partai penguasa. Pidato-pidato di desa, seringkali mengandung unsur propaganda, yang mengarahkan individu untuk mendukung program penguasa. Dalam pandangan Rosengreen dan Windahl (1962),:

Propaganda lebih merupakan suatu teknik pengendalian sosial yang diarahkan kepada individu sebagai anggota suatu kelompok, sedangkan retorika lebih merupakan suatu pendekatan hubungan para-sosial antara komunikator dengan khalayaknya. (Rosengreen dan Windahl, dalam Suwardi, 1994:25).

Interaksi antara pemuka pendapat dengan masyarakat desa lebih banyak diwarnai dengan komunikasi politik, atau dalam pandangan Rush dan Althoff (1997:256), yaitu:

Komunikasi politik tidak perlu merupakan bagian struktural pada sistem politik, sebab dalam berbagai kesempatan komunikasi, bisa saja muncul pesan yang berisi rangkaian usulan dan kebijakan politik yang disampaikan kepada khalayaknya.

Sebenarnya dalam situasi pedesaan yang tradisional, dimana masyarakatnya apolitis atau mengalami depolitisasi, tindakan politik pemerintah yang dikaitkan dengan kekuasaan adalah bagian dari upaya mempertahankan dominasi politik dalam birokrasi. Penelitian Lerner di negara Dunia mengindikasikan bahwa:

Dalam kehidupan politik di Turki tahun 1970, pemaksaan dilakukan sebagai pengganti bujukan dalam banyak peristiwa, bukan karena pihak lawan berada diatas angin, tetapi semata-mata karena kegelisahan penguasa terhadap eksistensi berlangsungnya pemerintahan. (Daniel Lerner, 1983:106).

Di desa-desa lokasi industri dan wilayah lain di Indonesia, tidak ada yang dapat mengimbangi kekuasaan partai pemerintah dan birokrasi pemerintahan dalam politik, tetapi upaya untuk mempengaruhi dan memaksa masyarakat supaya patuh sebagai konstituennya tetap berlangsung sepanjang waktu dan mencapai puncaknya pada waktu kampanye pemilihan umum tahun 1997 dan pemilu-pemilu sebelumnya.

Setelah mengalami masa yang selalu mengunggulkan peran semua entitas dalam kekuasaan negara, pemuka pendapat mulai tergeser dari komunikasi publik ketika terjadi krisis ekonomi, sehingga penguasaan dan perannya terhadap semua masalah yang ada di pedesaan dinilai oleh masyarakat tidak layak lagi.



HARAPAN TERHADAP DEMOKRATISASI KOMUNIKASI

1. Eksistensi Pemuka Pendapat sebagai Elite Dalam masyarakat.

Sumber informasi sebagai rujukan masyarakat dalam membicarakan masalah yang dihadapi dan keadaan di sekitarnya pada berbagai situasi desa, dalam bingkai demokratisasi komunikasi, adalah pemuka pendapat sebagai elite pedesaan ataupun entitas penyebar pesan lain, yang memiliki kejelasan dan kebenaran pesan, kesesuaian dengan kepentingan masyarakat desa, serta kriteria positif lain yang dimiliki oleh suatu sumber informasi dalam penyampaian pesan sosial, ekonomi dan politik kepada khalayaknya.

Representasi dari kriteria tersebut, masyarakat desa memilih sumber informasi dalam berbagai situasi desa adalah pemuka pendapat pedesaan, media massa dan sumber informasi lain yang dipercaya. Dengan demikian, dalam bingkai kebebasan berkomunikasi, pemuka pendapat bukan merupakan satu-satunya sumber informasi utama bagi masyarakat desa yang mengalami perubahan sebagaimana yang dikenal dalam model komunikasi *two step flow*.

Dalam konteks permasalahan tersebut, pemuka pendapat sebagai elite dalam masyarakat, media massa dan sumber informasi lain, sudah selayaknya jika berupaya menjaga lingkungan sosial pedesaan, memosisikan sebagai sumber informasi dengan menyampaikan kebenaran pesan, menghargai hak masyarakat desa untuk mencari ataupun menyampaikan pendapat secara bebas dalam mengatasi berbagai masalah sosial budaya, ekonomi dan masalah politik di lingkungan pedesaan

Pola komunikasi antara pemuka pendapat dengan masyarakat desa yang berlangsung linier dan interaktif pada berbagai situasi desa, dari tahap kejayaan dan harmonisasi desa sebagai habitat ideal bagi pertanian, tergusur oleh kekuatan industri, sampai dengan eredupnya operasi pabrik di pedesaan, menjadi lebih beragam manifestasinya interaksi dan komunikasi masyarakat.

Pola komunikasi linier tidak selalu identik dengan keunggulan penguasaan informasi dari sumber pesan kepada khalayaknya, kekuasaan yang dimiliki sumber pesan yang kursif dalam penyampaian pesan, dan kekuatan teknologi penyebaran pesan, tetapi hakikatnya komunikasi linier, dapat berlangsung karena ketidakperdulian, keterpaksaan, ketidakberanian, pengaruh komunikasi tradisional serta kelemahan lain dari masyarakat desa, dalam hubungan dengan sejumlah elite dalam perspektif stratifikasi masyarakat Max Weber, yang mencakup struktur sosial, material dan kekuasaan.

Sedangkan komunikasi interaktif tidak sepenuhnya menunjukkan bahwa pemuka pendapat dan masyarakat desa pada situasi yang demokratis ataupun kedudukan sederajat dalam penguasaan informasi, tetapi disebabkan pula oleh munculnya kebebasan berpendapat dalam koridor reformasi politik, tersedianya informasi dari berbagai sumber pesan yang mudah diperoleh, dan faktor lain yang merujuk pada bentuk perlawanan masyarakat desa terhadap simbol kekuasaan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Terjadinya keanekaragaman pola komunikasi antara pemuka pendapat dengan masyarakat dalam berbagai situasi desa, hendaknya dijadikan sebagai titik tolak pemuka pendapat dan pihak-pihak yang berkepentingan di desa, untuk menyesuaikan pola komunikasi dengan tuntutan masyarakat desa, memperbaiki cara penyampaian pesan yang tidak merugikan kehidupan sosial budaya, ekonomi dan politik masyarakat desa, sejalan dengan tuntutan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pola komunikasi linier dan interaktif, sejatinya diikuti dengan memposisikan masyarakat desa, sebagai khalayak yang menguasai informasi dan memiliki kemampuan berkomunikasi. Dengan demikian pemuka pendapat dan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap potensi desa, harus meningkatkan penguasaan informasi sosial budaya, ekonomi dan politik dari sumber yang kompeten untuk menunjang terbentuknya pola komunikasi yang integratif dan tidak mengandung nilai deferensiasi dalam kehidupan masyarakat desa yang beradab.

Faktor yang mendukung atau mengurangi kredibilitas peran pemuka pendapat, didasarkan pada penguasaan informasi yang konsisten terhadap nilai sosial budaya masyarakat desa, perilaku ekonomi dan politik, hubungan dengan kekuasaan formal dan pemilik modal, serta tuntutan kebebasan mencari informasi dalam situasi pedesaan yang berubah, sejalan dengan dinamika pedesaan yang seringkali dipakai sebagai basis kekuatan ekonomi dan politik, tetapi mengabaikan eksistensi sosial pedesaan yang sesungguhnya harus dilembagakan.

Karena itu, sudah sepantasnya jika pemuka pendapat sebagai elite masyarakat, dalam berbagai situasi desa, berupaya terus menerus meningkatkan faktor yang mendukung kredibilitas perannya, dengan menghargai nilai sosial budaya, ekonomi dan politik masyarakat desa, serta menjaga ketidakberpihakan dengan kekuasaan formal, pemilik modal maupun entitas lain pendukungnya, yang cenderung tidak berpihak kepada rakyat.

Disamping itu pemuka pendapat harus menghilangkan faktor yang mengurangi kredibilitas peran, melalui tindakan yang dikehendaki masyarakat desa dengan menyesuaikan pada tuntutan perubahan yang sejalan dengan dinamika reformasi kenegaraan. Bukan sebaliknya justru menutup diri untuk berunding dengan beradaptasi semu, bahkan konfrontatif terhadap perubahan yang dianggap tidak menguntungkan secara individual maupun kelompok.

2. Harapan Munculnya Penelitian ataupun Kajian Lain

Mengingat bahwa tulisan ini mencakup berbagai macam teori, metode dan konsep dalam ilmu komunikasi yang beragam, maka secara akademis, penelitian ini perlu dikembangkan lebih terspesialisasi dalam kajian komunikasi politik dan komunikasi massa. Topik yang menarik untuk diteliti lebih lanjut adalah, apakah pesan pembangunan yang disampaikan pemerintah dalam situasi kebebasan mengemukakan pendapat mempengaruhi orientasi politik masyarakat desa; disamping itu sejauh mana peran pemuka pendapat, media massa dan sumber informasi lain dalam mengarahkan pilihan politik masyarakat desa

Masih perlu untuk dikembangkan lebih lanjut adalah, penelitian dalam topik komunikasi antarbudaya pada situasi perubahan di pedesaan. Mencermati munculnya industrialisasi yang membawa dampak keanekaragaman etnik, maka cukup menarik jika dilakukan kajian lebih mendalam tentang pola interaksi dan komunikasi diantara masyarakat

desa yang berlainan etnik dalam situasi perbedaan nilai sosial budaya di satu pihak, dan kepentingan material untuk hidup layak dalam konteks industrialisasi di pedesaan di pihak lainnya

Tulisan ini bersumber pada hasil penelitian yang menggunakan metode kualitatif, sehingga masih memungkinkan dilakukan penelitian sejenis dengan metode kuantitatif, yang sesuai dengan aspek teoritis maupun metodologis terhadap kredibilitas peran pemuka pendapat dalam situasi pedesaan yang berubah akibat berkembangnya industrialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik dan A.C.Van Der Leeden.1986.*Durkheim dan Pengantar Sosiologi Moralitas*, Jakarta: Penerbit Yayasan Obor.
- Adoni, Hanna, Akiba A. Cohen and Sheril Mane.1981.*Social Reality And Television News: Perceptual Dimension Conflict in Selected Life Area*, dalam Wilhoit dan Harold de Bock (ed), *Mass Communication Review Yearbook*, Volume II, Beverly Hill Sage Publication.
- Agusta, Ivanovich.2001. "*Pemberdayaan Masyarakat Dalam Otonomi Desa*", *Jurnal Sosiologi Indonesia* Volume 05/2001, Jakarta: Ikatan Sosiologi Indonesia.
- Alexander, Cynthia J and Leslie A. Pal.2000. *Digital Democracy: Policy and Politic in the Wired World*, *United Nation Online Review* Volume 24 No.3.
- Allen, Bryce L.1996. *Information Task; Toward a User-Centered approach to Information Systems*, San Diego: Academic Press.
- Altman, Irwin and Dalmas Taylor.1973. *Social Penetration: The Development of Interpersonal Relationship*, New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Barndlund, Dean C.1968. *Interpersonal Communication: Survey and Studies*, New York: Houghton Mifflin.
- Batten,TR.1969. *Pembangunan Masyarakat Desa*, disadur A. Suryadi,Bandung: Penerbit Alumni.
- Berger, Charles R .1986. *Uncertainty Values in Predicted Relationship, Human Communication Research*, Beverly Hill: Sage Publication.
- Berger, Charles R and Steven H. Chafee.1987. "*The Study of Communicaton Science*", *Handbook of Communication Science*, ed. Charles R. Berger, California, Newburry: Sage Publication.
- Berger, Peter L .1982. *Pyramids of Sacrifice: Political Ethics and Social Change, atau Piramida Kurban Manusia: Etika Politik dan Perubahan Sosial*, terjemahan A. Rahman Tolleng, Jakarta: Penerbit LP3ES.

- 1990. *The Capitalist Revolution: Fifty Propositions about Prosperity, Equality and Liberty, atau Revolusi Kapitalis*, terjemahan Mohamad Oemar, Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Berger, Peter L and T. Luckmann.1979. *The Social Construction of Reality, a Traetise in the Sociology of Knowledge*, Middlesex: Penguin Books
- Berlo, David K.1960. *The Process of Communication*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Bintarto.1990. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Black, James A. and Dean Champion.1992. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, terjemahan, Bandung: PT. Eresco
- Blake, Reed H and Edwin O. Haroldsen. 1975. *A Taxonomy of Concept in Communication*, New York: hasting House Publisher.
- Blanchard, R.O .1974. *Congress and the News Media*, NewYork: Hasting House.
- Blumler, Jay G. 1982. " *Political Communication: Democratic Theory and Broadcast Practise*", dalam Whitney, Wartela and Windahl, eds. Mass Communication Review Yearbook Volume 3, New York: Sage Publication.
- Bogdan, Robert C dan Sari Knopp Biklen .1990. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods, atau Riset Kualitatif untuk Pendidikan: Pengantar ke Teori dan Metode*, Jakarta: PAU UT dan Ditjen Dikti Depdikbud.
- Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor .1997. *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to The Social Sciences*, NewYork: John Wiley and Sons..
- Bohannan, Paul and Mark Glazer.1973. *High Points in Antropology*, New York: Alfred A. Knopf.
- Bovee, Courtland L and John V.Thill.1997. *Bussiness Communication atau Komunikasi Bisnis*, terjemahan Alexander Sindoro, edisi ke enam, Jakarta: Prenhalindo.
- Bordeneva, Juan Diaz.1985." *Komunikasi Inovasi Pertanian di Amerika Latin: Perlunya Model-Model Baru*", *Communication and Development: Critical Perspectives*, terjemahan Dasmur Nurdin, Everett M. Rogers, Ed., Jakarta:LP3ES.
- Bottomore, Tom.1983. *Sosiologi Politik*, terjemahan Sahat Simamora, Jakarta: Bina Aksara.
- Bower, John W and James J. Bradac.1982., *Issues in Communication Theory: A Metatheoretical Analysis*, Communication Yearbook 5, Sage Publication.
- Brannen, Julia.1997. *Mixing Method: Kualitatif and Quantitative Research*, atau Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, terj. Imam

- Syafei dan A.H. Noorhadi, Yogyakarta,:Penerbit Pustaka Pelajar.
- Brown, JAC.1972. *Technical of Persuation: From Propaganda to Brainwashing*, Ringwood Victoria-Australia Sosiologi: Penguin Book Ltd.
- Brown, John Scely and Paul Duguid. 2000. *The Social Life of Information*, American Communication Journal Volume 25 No. 4
- Budiardjo, Miriam. 1994. *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlemerter dan Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Penerbit PT.Gramedia.
- Burn, Joseph E. 1999. *The Worl Wide Web: Triability Difficulty in the Diffusion of An Innovation*, Canadian Journal of Communication: Volume 24.
- Canter, Larry W.1996. *Environmental Impact Assessment*, New York: Mc.Graw Hill International Edition.
- Chaffee, Steven H.1988.“*Asking New Question about Communication and Politic*”, *Political Communication: Issues and Strategies for Research*, Beverly Hill, ed. Steven H. Chaffee, Sage Annual Review of Communication Rersearch Volume IV.
- Chang Won Ho, Jae-Jin Park and Sun Wok Shim. 1990. *Effectiveness of Negative Political Advoertising*. Journal of Broadcasting and Electronic Media.
- Chesney, Robert W.2000. *Rich Media, Poor Democracy: Communication Politics in Dubius Times*”. UNO Online: Volume 25 No. 4.
- Chinoy, Ely.1961. *Society: An introduction to Sociology*, First Printing, New York: Random House.
- Chirot, Daniel.1976. *Social Change in Peripheral Society: The Creation of Balkan Colony*, New York: Academy Press.
- (1981), *Social Change in Twentieth Century*, New York: Academy Press.
- Collier, William, Kabul S, Soentoro dan Rudi Wibowo.1995. *Pendekatan Baru dalam Pembangunan Pedesaan di Jawa: Kajian Pedesaan Selama Duapuluh Lima Tahun*, Jakarta: Yayasan Obor.
- Corner, John .1984. *Mass in Communications Research*, Mass Communication ReviewYearbook, Beverly Hill: Sage Publication.
- Cragan,J.F and D.W. Wright.1980. *Communication in Small Group Discussion*, New York: West Publishing Company.
- Davis, Fred.1972. *Illness, Interaction and the Self*, Belmont, California: Wadsworth Publishing Company Inc.
- Davis, Keith .1977.*Human Behavior*, fifth edition, New Delhi: Tata Mc.Graw Hill.
- Decaro, Peter A. 2000. *Ho Chi Minh’s Rethoric Revolution*, American Communication Journal, Volume 5
- DeFleur, Melvin L .1970.*Theories of Mass Communication*, Second Edition, New York: David McKay Inc.

- DeFleur, Melvin and Sandra J. Ball-Rokeach. 1989. *Theories of Mass Communication*, fifth edition, New York: Longman Inc.
- Delia, Jesse G. 1987. "Communication Research: A History", dalam Charles R. Berger (ed), *Handbook of Communication*, California Newbury: Sage Publication.
- Denzin, Norman K and Yvona S. Lincoln. eds. 1994. *Handbook of Qualitative Research*. California: Sage Publication, Inc.
- Depari, Edward dan Collin MacAndrew. 1988. *Peranan Komunikasi Massa dalam Pembangunan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers.
- Desiderato, D.B. Howieson and D.H. Jackson. 1976. *Investigating Behavior: Principles of Psychology*, New York: Harper and Row Pub.
- Deutch, Karl W. 1963. *The Nerves of Government: Models of Political Communication and Control*, New York: World Publishing.
- Devito, Joseph. 1978. *Communicology: An Introduction to the Study of Communication*, New York: Harper and Row Publisher
- Dick, H. 1982. *Survey of Recent Developments*, Bulletin of Indonesia Economic Studies Vol. 18.
- Djarot, Eros. 2000. *Politik Jalan Buntu*, Jakarta: Penerbit Pustaka Massa
- Doi, Takeo. 1992. *The Anatomy of Dependence*, atau *Anatomi Dependensi: Telaah Psikologi Jepang*, terjemahan Arifin Bey, Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Duverger, Maurice. 1998. *The Study of Politics*, atau *Sosiologi Politik*, terjemahan Daniel Dhakidae, Jakarta: Rajawali Pers.
- Effendi, Sofian. 1990. "Debirokratisasi dan Deregulasi: Meningkatkan Kemampuan Administrasi untuk Melaksanakan Pembangunan", *Percikan Pemikiran Fisipol UGM tentang Pembangunan*. Yogyakarta: Penerbit Adytia Media.
- Effendi, Sofian, T K. Yeremias et. al. 1989. *Alternatif Kebijakan Perencanaan administrasi: Suatu Analisis Retrospektif dan Prospektif*, Yogyakarta: Penerbit Fisipol Univ. Gadjah Mada.
- Etzioni, Amitai. 1985. *Modern Organization*, atau *Organisasi Modern*, terj. Suryatim, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang, YA3.
- Fardiaz, Deddy. 1988. "Media Komunikasi Baru", *Komunikasi Massa dan Pembangunan Pedesaan di Negara-Negara Dunia Ketiga*, ed., Amri Jahi, Jakarta: PT. Gramedia.
- Finch, C. Vernor. 1957. *Element of Geography*, New York: Mc.Graw Hill Book Company Inc.

- Fisher, Aubrey B. 1978. *Interpersonal Communication: A Pragmatics of Human Relationships*, New York: Random House.
- Friedman, John and Robert Wulff. 1979. *The Urban Transition Comparative Studies of Newly Industrializing Societies*, London: Edward Arnold.
- Frobish, Todd S. 2000. *Altar Rhetoric and Online Performance: Scientology, Ethos and World Wide Web*, American Communication Journal, Volume 4, Issue 1, Fall 2000.
- Gaffar, Afan. 1988. *Negara dan Birokrasi*, Yogyakarta: PAU Studi Sosial Universitas Gadjah Mada.
- Garramone, Gina M, C.A. Atkin, B E. Pinkleton and R.T. Cole. 1990. *Effect of Negative Political Advertising on the Political Process*, www.script.ohio.edu: Journal of Broadcasting Electronic Media.
- Garna, Judistira K. 1992. *Teori-Teori Perubahan Sosial*, Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- 1999. *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif*, Bandung: C.V. Primaco Akademika.
- Geertz, Clifford. 1981. *The Religion of Java*, atau Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa, terjemahan Bur Rasuanto, Jakarta: Pustaka Jaya.
- 2000. *Indonesia: Starting Over*, The New York Review of Book.
- Gerth and Mills. 1981. *From Max Weber: Essay in Sociology*, Oxford University Press.
- Gibb, Jack R. 1961. *Defensive Communication*, Journal of Communication 11
- Giddens, Anthony. 1986. *Capitalism and Social Modern Theory: An Analysis of Writing of Mark, Durkheim and Max Weber*, atau Kapitalisme dan Teori Sosial Klasik dan Modern: Suatu Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber, terjemahan Soeheba Kramadibrata, Jakarta: Universitas Press.
- Goonasekerta, Anura. 1987. "Third World Culture and New Information Order", *Rethinking Development Communication*, eds. Neville Jayawera and Sarath Amunugama, The Asia Mass Communication, Singapore: Kefford Press Pte Limited Co.
- Gonzales, Hernando. 1988. "Beberapa Mitos Komunikasi dan Pembangunan", *Komunikasi Massa dan Pembangunan Pedesaan Di Negara-Negara Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*, editor. Amri Jahi, Jakarta: Gramedia.
- Goulet, Dennis. 1983. *Mexico: Development Strategy for the Future*, Notre Dame: University of Indiana.
- Gurevitch, Michael and Mark R. Levy. Eds. 1985. *Mass Communication Review Yearbook 5*, London: Sage Publication.

- Hall, Edward T. 1977. *Beyond Culture*, New York: Anchor Book.
- Hamijoyo, Santoso S. 1969. "Aplikasi Model Komunikasi Dari Perubahan Sikap Dalam Riset Pembangunan Masyarakat Pedesaan "Reinterpretasi Beberapa Data, Bandung: IKIP.
- 1978. *Institutional Credibility and Emotionality of Appeals as Determinants of Attitude Change*, Surabaya: Airlangga University Press.
- 1993. *Karakteristik Kemiskinan di Indonesia dan Kendala-Kendala Pengentasannya*, Malang: IKIP
- Haneman, Samuel. 1990. *Emilie Durkheim: Raksasa Sosiologi*, Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Harrison, David. 1988. *The Sociology of Modernization and Development*, London and New York: University of Sussex.
- Haris, Syamsudin. 1999. "Kekuasaan Transisional: Problem Penyelenggaraan Pemilu 1999", dalam Juri Ardiantoro (ed), *Transisi Demokrasi*, Jakarta: Komite Independen Pemantau Pemilu.
- Hart, Joy L, Stuart L. Esrok, Margaret U D'Silva. 2001. *David and Goliath Revisted: Grassroads Consumer Campaign Battles Cooperate Giant*, *American Communication Journal*, Volume 4, Issue 3, Spring 2001.
- Hayami, Yujiro and Masao Kikuchi. 1977. *Asian Village Economy at Crossroad: An Economic Approach to Institutional Change*, Japan: University of Tokyo.
- Heilbroner, Robert L. 1994. *The Making Economic Society*, atau *Terbentuknya Masyarakat Ekonomi*, terjemahan Anassidik, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Hennessy, Bernard. 1990. *Public Opinion* atau *Pendapat Umum*, terjemahan Amiruddin Nasution, Cetakan Kedua, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hocker, Joyce L and William W. Wilmot. 1978. *Interpersonal Conflict*, Dubuque-Iowa: Wim C. Brown Publishers.
- Hofstede, W. 1991. *Pembangunan Masyarakat: Kumpulan Karangan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Holiday, Duncan A. 1983. *Making Media Fit: Short Term Ajustment to A New Communications Technology in A West Javanese Village*, An Arbor, Michigan, USA: University Microfilms International.
- Hoogvelt, Ankie M. 1976. *The Sociology of Developing Societes*, The Mac Millan Press Ltd.
- Irawan dan M. Suparmoko. 1995. *Ekonomika Pembangunan*, edisi 5, Yogyakarta: BPFE Universitas Gadjah Mada.

- Irwanto. 1998. *Focus Discussion Group (FGD): Sebuah Pengantar Praktis*, Jakarta: Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat Unika Atmajaya.
- Jackson, Jay M. 1959. *The Organization and Its Communication Problems*, Journal of Communication IX.
- Jahi, Amri, ed..1988. *Komunikasi Massa dan Pembangunan Pedesaan di Negara-Negara Dunia Ketiga*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Jayaweera, Neville and Sarath Amunugama. ed.. 1987. *Rethinking Development Communication: The Asia Mass Communication*. Singapore: Keford Press Pte Ltd.
- Johnson, Doyle P. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, terjemahan Robert M.Z. Lawang, Jakarta: Penerbit PT. Gramedia
- Jowett,G and J.M.Linton. 1980. *Movies as Mass Communication*, Beverly Hills and London: Sage Publications.
- Kana, Nico L. 1993. *Dunia Orang Sawu*, Cetakan Pertama, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan
- Kadi, Saurip. 2000. *TNI-AD: Dahulu, Sekarang dan Masa Depan*, Jakarta: Grafiti Pers.
- Kartodirdjo, Sartono. 1990. *Kepemimpinan Dalam Dimensi Sosial*, Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Kartono, Kartini .1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Katz, Elihu and George Wendel.1978. *Broadcasting in theThird World*, London: Macmillan.
- Katz, Elihu, JG.Blumler and M.Gurevitch. 1974. *Utilization of Mass Communication by the Individual*, dalam Jay G. Blumler dan Elihu katz (eds), *The Uses of Mass Communication: Current Perspective on Gratification Research*, Beverly Hills: Sage Publication..
- Kellermann. 1986. " *Anticipation of Future Interaction Exchange in Initial Interaction* ", Human Communication Research, Vol 13 No1, Sage Publication.
- Kincaid, Lawrence and Wilbur Schramm.1990. *Asas-Asas Komunikasi Antar Manusia* terjemahan. Agus Setiadi: Jakarta, LP3ES dan East West Communication Institute Hawaii.
- Kluver, Randy. 1998. *Globalization and Intercultural Communication*, United Nation Online.
- Koehler, Jerry W, Karl WE.Anatol, Ronald L. Applbaum. 1985. *Organizational Communication*, Second Edition, New York: Holt, Rinehart and Winston Inc.

- Koentjaraningrat.1984. Masalah-Masalah Pembangunan, Jakarta: Penerbit LP3ES
- 1988. Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, Jakarta: Penerbit Gramedia.
- 1990. Sejarah Teori Antropologi I dan II Jakarta: Universitas Indonesia Press. .
- 1993. Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Kunio, Yoshihara. 1990. Kapitalisme Semu di Asia Tenggara, Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Kusumah, Mulyana W. 1999. "Pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 1999, Transisi Demokrasi: Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pemilu 1999, Editor: Juri Ardiantoro F, Jakarta: Komite Independen Pemantau Pemilu Jakarta.
- Kotler, Philip and Eduardo L. Roberto.1989. *Social Marketing*, New York: The Free Press.
- Kotter, John P and James L. Heskett. 1992. *Coorporate Culture and Performance*, Toronto-Canada: The Free Press.
- Krech, D and Richard S. Crutchfield. 1977. *Perceiving The World and Effect of Mass Communication*, W.Schramm dan D.F.Robert, editors, Urbana: University of Illinois.
- Krech, David, Richard S. Crutchfield and Egerton L. Ballachey. 1962. *Individual in Society*, International Student Edition, Mc. Graw-Hill Kogakusha, Ltd.
- Krueger, Richard A. 1988. *Focus Group: A Practical Guide for Applied Research*, Newsbury California.
- Langsdorf, Lenore and Andrew R. Smith.eds. 1995. *Recovering Pragmatism's Voice: The Classical Tradition, Rorty, and the Philosophy of Communication*, New York: State University of New York Press.
- Lee, Everett S.1987. *A Theory of Migration*, Yogyakarta: PPK Universitas Gadjah Mada.
- Lehman, Carol M, William C. Himstreet and Wayne M.Baty. 1996 *Bussiness Communications*, Cincinnati Ohio: South-Western College Publishing
- Lerner, Danie.1983. *The Passing of Traditional Society: Modernization in Middle East*, atau Memudarnya Masyarakat Tradisional, terjemahan Muljarto T, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Levinson. 1964. "Role, Personality and Social Structure " dalam *Sociological Theory, A Book of Readings* , by Lewis A. Coser and Bernard Rosenberg, second edition, New York: The Mac Millan Company.

- Lewis, Bernard.1994.*The Political Language of Islam atau Bahasa Politik Islam*, alih bahasa Ihsan Ali-Fauzi, Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Linton, Ralph.1952. *The Study Of Man: An Introduction*, Student Edition, New York: Appleton-Century-Crofts Inc..
- Lippman, Walter.1960. "*The World Outside and The Pictures*", *Mass Communication*, ed. Wilbur Schramm, Urbana: University of Illinois Press.
- Littlejohn, Stephen W. 1992.*Theories of Human Communication*, Fourth Edition, Belmont California, Wadsworth Publishing Company.
- Lofland, J. 1974. *Styles of Reporting Qualitative Field Research*, Chicago: University of Chicago.
- Lowery, Shearon and Melvin L. DeFleur. 1983. *Milestones in Communications Research: Media Effects*, New York: Longman Inc.
- Maarif, A. Syafii.1988 *Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press.
- MacBride, Sean .1980. *Communication and Society; Today and Tomorrow: Many Voices One World*, London, Kogan Page.
- Mac Iver, Robert M and Charles H. Page.1967. *Society: An Introductory Analysis*, New York: Rinehart and Company.
- Malaranggeng, Andi Alfian. 1999. "*Peraturan Perundang-undangan Pemilu 1999 dan Agenda Perubahannya*" dalam Juri Ardiantoro (ed), *Transisi Demokrasi*, Jakarta: Komite Independen Pemantau Pemilu.
- Mc. Combs, Maxwell E. and Donald L. Shaw. 1977. *The Emergence of American Political Issues*, St. Paul: West.
- Mac. Iver,RM and Charles H. Page .1967. *Society: An introductory Analysis*, New York: Rinehart and Company Inc.
- Mc.Leod, Jr. Raymond. 1995. *Management Information System: A Study Computer-Based Information System, atau Sistem Informasi Manajemen*, terjemahan Hendra Teguh, Jakarta: PT. Prenhallindo.
- McQuail, Denis.1984. *With the Benefit of Hindsight: Reflection on Uses and Gratification Research: Critical Studies in Mass Communication* 1.
----- .1987. *Mass Communication Theory: An Introduction*, second edition, London: Sage Publication.
- Meyer, Robert R and Ernest Greenwood. 1989. *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Miles, Matthew B and A. Michael Huberman .1993., *Qualitative Data Analysis, atau Analisis Data Kualitatif*, terjemahan.Tjetjep Rohendi, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

- Milikan, Max F and Donald L.M.Blakmer. 1961. *The Emerging Nations. Their Growth and United States Policy*, Boston, Toronto: Little Publisher
- Mills, Charles Wright. 1968. "Some Effects of Mass Media", *Mass Media and Mass Man*, ed. Alan Costy, New York: Rinehart and Winston.
- Mills, Theodore M.1968. "On the Sociology of Small Group" dalam *Knowledge and Society*, edited Talcott Parsons; Cambridge Massachusetts: VOA.
- Mohamad, Gunawan dan Wartawan Alumni Majalah Tempo. 1994. *Buku Putih Tempo: Pembredelan Itu*, Jakarta: Penerbit alumni majalah Tempo.
- Moleong, Lexi J. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Penerbit Remaja Rosda Karya.
- Mountjoy, Alan B. 1982. *Industrialization and Developing Countries*, London: Hutchinson.
- Mubyarto. 1988. *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Muhadjir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi ke IV. Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin.
- Mulyana, Deddy. 1999. "Kendala-Kendala Penelitian Komunikasi di Indonesia", *Menuju Paradigma Baru Penelitian Komunikasi*, Jurnal ISKI Vol. 3, Bandung: ISKI dan Penerbit Remaja Rosda Karya.
- 2000. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Bandung: Penerbit Remaja Rosda Karya.
- 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Penerbit Rosda Karya.
- Muthahari, Murtadha. 1992. *Kritik Islam Terhadap Faham Materialisme, atau Addawaffi Nahul Maddiyah*, terjemahan Achsin Muhammad Muzakir, Jakarta: Penerbit Risalah Masa.
- Myers, Michele Tolela and Gail E. Myers. 1988. *Managing By Communication*, New York, New Newsey, London, Mc.Graw Hill International Book Co.
- Naya, Seiji, Miguel Urruytia, Shelly Mark and Alfredo Fuentes .1988. *Lesson in Development: A Comparative Study of Asia and: Latin America*, Maryland USA: International Center of Economics Growth.
- Nazir, Mochammad. 1993. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu.1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Newcomb, Horace and Paul M. Hirsch. 1985. *Television as a Cultural Forum: Implications for Research*, dalam Michael Gurevitch and Mark R. Levy. Eds. *Communication Yearbook Volume 5*, Beverly Hills London New Delhi: Sage Publication.

- Nimmo, Dan .1993.*Political Communication and Public Opinion in America, atau Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*, Cetakan kedua, terjemahan Tjun Surjaman, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Noel-Neumann , Elizabeth .1973. *Return to the Concept of Powerfull Mass Media*, Studies of Broadcasting 9.
- Ogburn, William F and Nimkoff Mayer F. 1953.*A Handbook of Sociology*, London, Routledge and Kegan Paul Ltd.
- Ollien, Clarice N, George A. Donohue and Phillip J. Tichenor. 1983.“*Structure, Communication and Social Power: Evolution of the Knowledge Gap Hypothesis*”, Mass Communication Review Yearbook, eds. Ellen Wartella and D. Charles Whitney (ed), Volume 4, Beverly Hill, London: Sage Publications.
- Ornstein, Allan C, and Daniel U. Levine. 1985.*An Introduction to the Foundation of Education*, Third Edition, Boston: Houghton Mifflin Company.
- Pace, R.Wayne dan Don F. Faules. 1998. *Komunikasi Organisasi: Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan*, terjemahan Deddy Mulyana dkk, Editor Deddy Mulyana, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Pelzer, Karl J. 1985. *Planter and Peasant, Colonial Policy and the agrarian Struggle in East Sumatra 1863-1947 atau Toeang Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria*, terjemahan J. Rumbo, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Phillips, Bonnie D. 1983. *Bussiness Communication*, United State: Delmar Publishers Inc.
- Polak, JBAF .1971. *Sosiologi: Suatu Pengantar Ringkas*, cetakan ke 6, Jakarta: Balai Buku Ichtar.
- Ponsioen, J.A. 1969. *The Analysis of Social Change Reconsidered*, Mouton: The Hague.
- Prasadja, Buddy. 1980. *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*, Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial dan Rajawali Pers.
- Putra, Heddy Shri Ahimsa.2001. *Strukturalisme Levi-Strauss: Mitos dan Karya Sastra*, Yayasan Adi Karya IKAPI-The Ford Foundation, Jakarta: Galang Press.
- Rahardjo.1999. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press.
- Rahim, Syed A .1976.“ *Communication Approach in Rural Development*”, *Communication and Change in the last ten years and the Next*, ed. Daniel Lerner, Honolulu: The University Press of Hawaii.
- Rakhmat, Jalaluddin. 1998. *Psikologi Komunikasi*, Edisi Revisi Cetakan ke 12, Bandung: Remaja Rosda Karya.

- Rao, YV. Lachsmama .1976. "One Self, Many Cultures", *Communicating Across Culture for What ?*, eds. John C. Condon and Mitsuko Saito, Tokyo: The Simul Pers.
- Rauf, Maswadi. 1999. "Evaluasi Pemilihan Umum tahun 1999, Transisi Demokrasi: Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pemilu 1999, Editor: Juri Ardiantoro F, Jakarta Komite Independen Pemantau.
- Ray, Michael L. 1973. "Marketing Communication and Hierarchy of Effects", *Model Communication Research*, ed. Peter Clarke, Beverly Hill: Sage Publications.
- Reardon, Kathleen.1987. *Interpersonal Communication: Where Minds Meet*, Belmont-California: Wadsworth Publishing Co
- Redfield, Robert. 1956. *Peasant and Culture*, Chicago: University of Chicago Press.
- Rigg, Fred W. 1964. *Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic Society*, Indiana University: Houghton Mifflin Company.
- Robbins, Stephen P.1990. *The Administrative Process*, New Delhi: The Prentice Hall.
- Rogers, Everett M.1973." *Mass Media and Interpersonal Communication*", *Handbook of Communication*, eds. Ithiel de Sola Pool and Wilbur Schramm, Chicago: Rand Mc Nally.
- .1983., *Diffusion of Innovations*, Third Edition, London: The Free Press.
- .1985. *Komunikasi dan Pembangunan: Perspektif Kritis*, Jakarta: Penerbit LP3ES.
- .1986. *Communication Technology: The New Media in Society*, New York: The Free Press.
- Rogers, Everett M and Floyd F. Shoemaker. 1971.*Communication of Innovations: A Cross Culture Approach*, New York, The Free Press.
- Rogers, Everett M and Lawrence Kincaid. 1981. *Communication Networks*, NewYork: The Free Press.
- Rogers, Everett M and Lynne Svenning. 1969. *Modernization Among Peasant*, New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Rogers, Everett M. and Ronny Adhikarya. 1978.*Communication and Inequitable Development: Narrowing The Socio-Economic Benefits*, Media Asia 5.
- Rogers, Everett M. and Thomas M. Steinfatt.1999. *The Edge*, The E.Journal of Intercultural Relations, University of New Mexico: Dept. of Communication and Journalism.
- Rogers, Everett M, Zao Xiaoyan and Pan Zhangdong, Chen and Milton.1985. *The Beijing Audiense Study*, Communication Research 12.

- Roling, Niels G, J. Ascoft dan F.E. Chege. 1985. Difusi Inovasi dan Masalah Kemerataan dalam Pembangunan di Pedesaan dalam E. M. Rogers.ed. Komunikasi dan Pembangunan: Perspektif Kritis, Jakarta: LP3ES.
- Ruben, Brent D. 1992. *Communication and Human Behaviour*, Third Edition, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
- Ruopp, Philipp. 1953. *Approach to Community Development: A Symposium Introductory to problem and Methods of Village Welfare Under Developed Areas*, Bandung W Van Hoeve Ltd, The Hague.
- Rush, Michael dan Phillip Althoff. 1997. *An Introduction to Political Sociology*, atau Pengantar Sosiologi Politik, terjemahan Kartini Kartono, Jakarta: Rajawali Pers.
- Saefullah, A. Djadja. 1994. Mobilitas Penduduk dan PSDM di Dati II (Makalah). Bandung: Kerjasama Badan Perencana Pembangunan Nasional dan Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Penelitian Unpad.
- Samovar, Larry A and Richard E. Porter.1988. "*Approaching Intercultural Communication*",eds. Samovar and Porter, *Intercultural Communication: A Reader*, Belmont-California: Wadsworth Publishing Company.
- Samovar, Larry A and Richard E. Porter. 1991. *Communication Between Culture*, Belmont-California: Wadsworth Publishing Company.
- Samovar, Larry A, Richard E. Porter and Nemi C. Jain. 1981. *Understanding Intercultural Communication*, Belmont-California: A Division of Wadsworth Inc.
- Scot, James C. 1993. *Perlawanan Kaum Tani*, Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia.
- Sajogya dan Pudjiwati Sajogya. 1983. *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Saung, Aye.1991. *Burman in the Backrow: Autobiography of a Burmese rebel*, atau Catatan-Catatan dari Bawah Tanah: Otobiografi pemberontak Burma, terjemahan Nurul Agustina, Jakarta: LP3ES.
- Schramm, Wilbur.1977. *Big Media Little Media*, Beverly Hill: Sage Publication.
- Scott, James C. 1993. "*Perlawanan Kaum Petani*", Jakarta: Yayasan Obor.
- Seiji Naya, Miguel Urrutia, Shelley Mark dan Alfredo Fuentes. 1988. *Lesson in Development: A Comparative Study of Asia and Latin America*, Maryland USA: International Center of Economic Growth.
- Silverman, David. 1993. *Intepreting Qualitative Data: Methods for Analysing Talk, Text and Interaction*, New York: Sage Publishing.
- Simbolon, Parakriti Tahi. 1995. *Menjadi Indonesia*, Jakarta: Kompas Gramedia.

- Siregar, Ashadi.1990."Kebebasan dan Posisi Pers sebagai Kontrol Sosial dari Masa Ke masa", dalam Percikan Pemikiran Fisipol UGM tentang Pembangunan, Yogyakarta: FISIP Universitas. Gadjah Mada.
- Smith, Lynn T and Paul E. Zopf Jr. 1970. *Principles of Inductive Rural Sociology*, Philadelphia: PA, FA Davis Company.
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Sosiologi: Suatu Pengantar*, cetakkan ke tujuh, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- ,1985. Bunga Rampai Sosiologi Indonesia, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Soemardjan, Selo. 2000. "Pengawasan Sosial Orde Baru dan Reformasi", Jurnal Sosiologi Indonesia No. 04/2000, Jakarta Ikatan Sosiologi Indonesia.
- Soetomo.1990."Strategi Pembangunan Pedesaan menuju Pemerataan hasil Pembangunan Pedesaan", dalam Percikan Pemikiran Fisipol UGM tentang Pembangunan, Yogyakarta: FISIP Universitas Gadjah Mada.
- Soewardi, Herman.1976. Respons Masyarakat Desa Terhadap Modernisasi Produksi Pertanian Terutama Padi: Suatu Kasus yang terjadi di Jawa Barat, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sola Pool, Ithiel de and Wilbur Schramm.eds. 1973. *Handbook of Communication*, Chicago: Rand Mc.Nally.
- Sopory, Pradeep and James Dillard. 2002. *"The Persuasive Effects of Metaphore; A Meta Analysis"*, Human Communication Research, International Communication Association.
- Stark, Oded. 1991. *The Migration of Labor*, Cambridge: Basil Blackwell.
- Stogdill, Ralph M .1974. *Handbook of Leadership*, NewYork: The Free Press A Division of Mac Millan Publishing Co.
- Stryker, Sheldon and Anne Statham Macke. 1978. *"Status Inconcistency And Role Conflict"*, *Annual Review of Sociology Volume IV*, eds. Ralph H. Turner, et.al, Palo Alto California.
- Sukirno, Sadono. 1976. *Beberapa aspek Dalam Pembangunan Daerah.*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE Universitas Indonesia.
- ,1985. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Suwardi, Harsono. 1993. *Peranan Pers Dalam Politik di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- , 1995. *Komunikasi Politik*, Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

- Suwarsono dan Alvin Y. So. 1991. *Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Tehrastian, M. 1979. " *Development Theory and Communication Policy: The Changing Paradigm* ", eds., Voight and Hanneman, *Progress in Communication Sciences Vol.1*, Noorwood, NJ: Ablex Publishing Cooperation.
- Thompson, Warren's. 1953. *Population Problems*, New York: Mc.Graw Hill Company Inc.
- Timasheff, Nicolas. 1967. *Social Change in The Twentieth Century*, New York: Random House Pub.
- Tim LSAF. 1999. " *Organisasi Keagamaan Nahdlatul Ulama (NU)* ", dalam *Gerakan Keagamaan Dalam Penguatan Civil Society: Analisis Perbandingan Visi dan Misi LSM dan Ormas Berbasis Keagamaan*, Asep Gunawan dan Dewi Nurjulianti (eds), Jakarta: Penerbit Lembaga Studi Agama dan Filsafat dan The Asia Foundation.
- Tjokrowinoto, Moeljarto.1985. " *Adaptasi Teknologi di Kabupaten Klaten dengan Acuan Khusus pada Industri Logam dan Tenun* ", dalam *Kebudayaan dan Pembangunan: Sebuah Pendekatan Terhadap Antropologi Terapan di Indonesia*, Nat J. Colleta dan Umar Kayam (ed), terjemahan Sonny Keraf dan Mien Joebhaar, Jakarta: Yayasan Obor.
- Tubbs, Stewart L dan Sylvia Moss. 1996. *Human Communication; Konteks - Konteks Komunikasi*, Buku I dan Buku II, terjemahan Deddy Mulyana dan Gembirasari, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Todaro, Michael P .1983. *Economic Development in the Third World, atau Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jilid 1 dan 2, terjemahan Aminudin dan Mursid, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia
- Triyono, Lambang. 1994. *Negara dan Petani di Masa Orde Baru*, dalam *Prisma* Jakarta: LP3ES.
- Uphoff, Norman T and Milton J. Esman. 1974. *Local Organization for Rural Development: Analysis for Asian Experience*, Ithaca New York: Rural Development Committee Center for International Studies Cornell University
- Usman, Sunyoto.1991." *Struktur Interaksi Kelompok Elit Dalam Pembangunan: Penelitian di Tiga Desa Santri* ", *Prisma* No. 6 Juni 1991, Jakarta: LP3ES.
- Van Den Ban, A.W. 1981. " *Interpersonal Communication and The Diffusion of Innovation* ", *Extension Education an Rural Development*, eds. Bruce R. Crouch and Shankariah Chamala, New Yor: John Willey and Sons.
- Vredembregt, J. 1980. *Metode Penelitian dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia.

- Wahyuni, Ekawati S.2000. "Migran Wanita dan Persoalan Perawatan Anak: Sebuah Analisa Migrasi Internal di Jawa", Jurnal Sosiologi Indonesia No.04/2000, Jakarta: Ikatan Sosiologi Indonesia.
- Wanasinghe. 1979. "Role of Peasant Organization in Rural Development" dalam Approach to Rural development: Some Asian Experiences, Inayatullah,ed, Kuala Lumpur: Asian and Pacific Development Administration Centre.
- Warren's Thompson. 1953. *Population Problems*; New York: Mc.Graw Hill Company Inc. page
- Weber, Max. 2003. *The Fundamental Concepts of Sociology*, [http://www. src.uchicago. edu/ssr1/Prelims/ Theory Weber. Html](http://www.src.uchicago.edu/ssr1/Prelims/TheoryWeber.html).
- Weber, Max. 2003. Basic Term: The Fundamental Concepts of Sociology, [http:// www.faculty. rsu. edu/~felwell/ Theorists/ Weber/ Whome. Htm](http://www.faculty.rsu.edu/~felwell/Theorists/Weber/Whome.Htm).
- Weaver, Warren . 1972. "Recent Contribution to the Mathematical Theory of Communication", *The Mathematical Theory of Communication*, eds. Claude E. Shannon and Warren Weaver (1972) , Urbana: University of Illinois Press.
- Winter, James P.1984. "The Contingent in the Agenda Setting Process", *Communication Research* Vol. 11 No.4, New York: Sage Publication.
- .Worchell, Stephen, JF.Morales, D Paez and Deschamps.1999. *Social Identity: Intercultural Perspective*, *Canadian Journal of Communication*, Volume 3. No. 3.
- Wright, Charles R.1975. *Mass Communication: A Sociological Perspective*, New York: Random House.
- Wright, Peter L. 1973. The Cognitive Process Mediating Acceptance of Advertising, [www.scripps ohio.edu](http://www.scripps.ohio.edu): *Journal of Marketing Research*.
- Xin-An Lu. 2001. *Dazhai: Imagistic Rhetoric as a Culture Instrument*, *American Communication Journal*, Volume 4, Issue 1, Spring 2001.
- Zaehner, Robert C.1993. *Hinduism, atau Kebijakan Dari Timur: Beberapa Aspek Pemikiran Hinduisme*, *Seri Filsafat Driyarkara* 3, terjemahan Dr.A. Sudiarja, Jakarta: PT Gramedia.
- Zelinsky, Wilbur . 1971. *The Hypothesis of the Mobility Transition*, *Geographical Review* 61.

Dokumen

- Asasi.1999. *Analisa Dokumentasi Hak Asasi Manusia*. Juni, Jakarta: ELSAM
- Kompas, 10 Juli 2002, 27 September 2002, 31 Desember 2002.
- Kompas, Jumat, 24 Januari 2003, Kompas, Rabu, 29 Januari 2003.

Laporan Pemantauan Pemilihan Umum 1999: Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi, Jakarta: KIPP Jakarta

Media Indonesia, 2 Oktober 2002.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*, Jakarta: Kantor Menko Ekuin dan Wasbang, 1984.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang *Pemerintahan Desa*, Jakarta: Kantor Menko Ekuin dan Wasbang, 1984.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Otonomi Daerah*

